



# PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2021

BAPPEDA  
Kota Tegal



Jalan Ki Gede Sebayu No.3 Tegal,  
Kode Pos. 52123



(0283) 351452  
Fax. (0283) 353673



BUKU 1



WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3321); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 46);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tegal.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tegal untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana . . .

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahun kedua dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024.
- (3) RKPD Tahun Anggaran 2021 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal . . .

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 15 Juli 2020

WALI KOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO



Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL



JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 25

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kota Tegal Tahun 2021 disusun melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik serta berorientasi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS). Pendekatan (1) *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi; (3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; (4) politik, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan. Pendekatan yang berorientasi pada HTIS yaitu melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan.

Selain itu, implementasi *money follow priority programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/ kegiatan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa penyusunan dokumen RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan;
- 2) Penyusunan rancangan awal;
- 3) Penyusunan rancangan;
- 4) Pelaksanaan musrenbang;
- 5) Perumusan rancangan akhir; dan
- 6) penetapan.

RKPD Kota Tegal Tahun 2021 merupakan penjabaran **tahun kedua** dari RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 yang dalam proses penyusunannya penuh dengan **tantangan dan dinamika** perencanaan pembangunan daerah. Disamping dokumen ini disusun **pada masa transisi** implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan pengganti PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat penyusunan dokumen RKPD Kota Tegal Tahun 2021, berbagai peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 12 Tahun 2019 **belum diterbitkan** seluruhnya. Disamping itu, proses penyusunan dokumen RKPD Kota Tegal Tahun 2021 dilaksanakan pada masa terjadinya **pandemik global COVID-19** yang memberi dampak dan tekanan pada aspek ekonomi, sosial dan budaya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Adapun dampak/ tekanan yang dialami oleh Kota Tegal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlambatan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Terjadinya peningkatan pengangguran;
- 3) Adanya peningkatan kerawanan sosial/ kriminalitas;
- 4) Angka Kemiskinan yang semakin meningkat;
- 5) Adanya rawan pangan (terkait daya beli dan ketersediaan pangan);
- 6) Kesenjangan sosial ekonomi meningkat;
- 7) Penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, perdagangan dan jasa pada pertumbuhan ekonomi (yang merupakan sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal);
- 8) Inflasi meningkat; serta
- 9) Terhambatnya pembangunan infrastruktur;

Oleh sebab itu, dokumen RKPD Kota Tegal Tahun 2021 ini disusun dengan melakukan penyesuaian atas berbagai dinamika perencanaan pembangunan daerah yang terjadi.

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 12) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
- 13) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal tahun 2013 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
- 14) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);

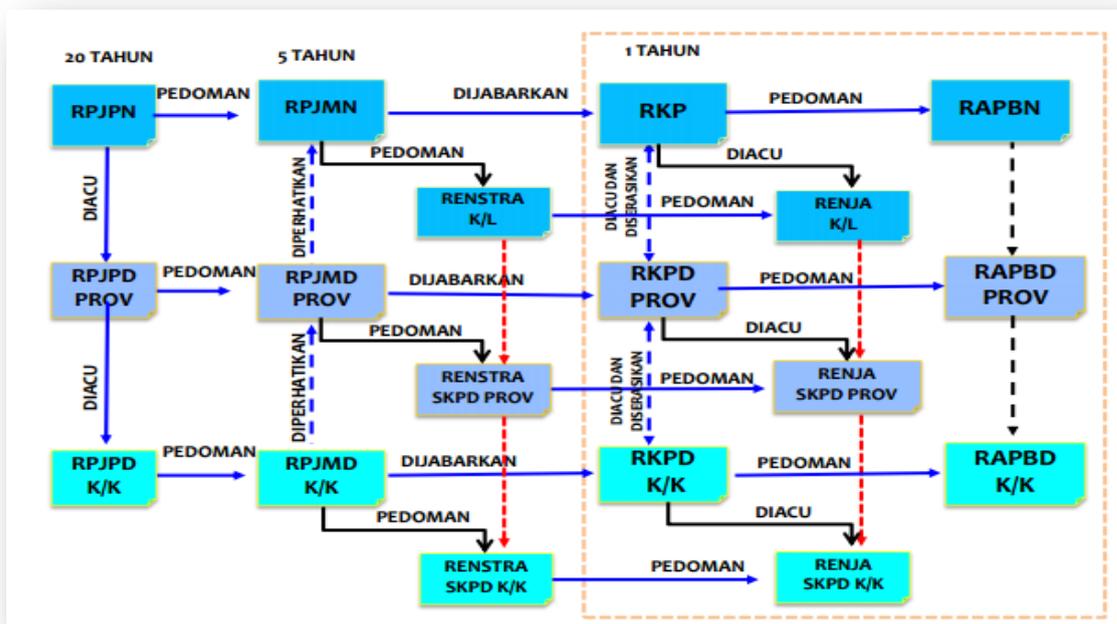
- 15) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor );
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Layanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
- 20) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 21) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
- 22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- 28) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKP Kota Tegal Tahun 2021 memiliki keterkaitan erat dan semaksimal mungkin selaras dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen RKP Kota Tegal Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025 serta mengacu kepada kebijakan RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Keterkaitan RKP tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Dokumen RKP Kota Tegal Tahun 2021 adalah sebagai upaya untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Tegal di tahun 2021, dan untuk mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan tujuan dari penyusunan Dokumen RKP ini adalah untuk memenuhi kebutuhan terhadap rencana pembangunan daerah, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Tegal Tahun 2021.

Penyusunan Dokumen RKP Kota Tegal Tahun 2021 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2021 serta juga untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan

di Kota Tegal. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Dokumen RKPD Kota Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan program-program prioritas yang menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tegal Tahun 2021.
- b. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021.
- c. Tersedianya acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Tegal Tahun 2021;
- d. Tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021; dan
- e. Menjadi sarana untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

## **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kota Tegal Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Dasar Hukum**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

#### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP/program strategis nasional.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

#### **1.5. Sistematika Dokumen**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. Kondisi Umum Daerah**

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD  
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah  
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  
Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD Provinsi, juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kota.  
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah  
Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021  
Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

## **BAB VII PENUTUP**

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Kota.

# BAB II

## GAMBARAN UMUM

### KONDISI DAERAH

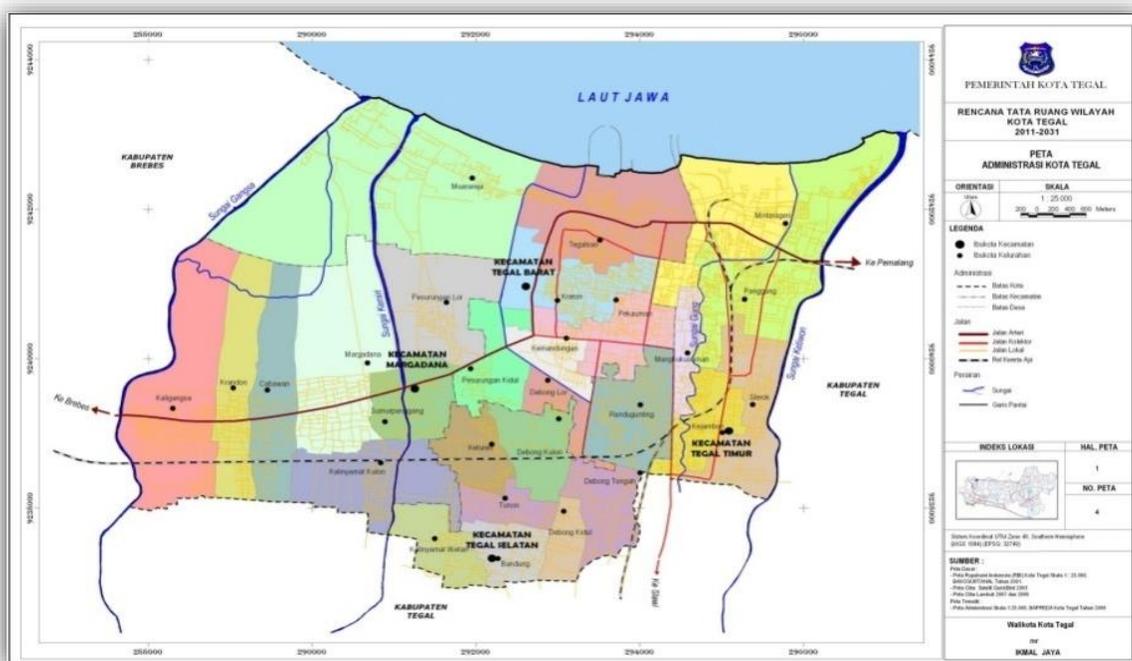
#### 2.1. Kondisi Umum Daerah

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

###### A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Tegal memiliki luas wilayah sebesar 39,68 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara; Kabupaten Tegal di sebelah timur; Kabupaten Tegal di sebelah selatan; dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat. Batas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Tegal



Sumber: RTRW Kota Tegal 2011-2031

Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan; Kecamatan Tegal Barat; Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Tegal Barat (15,13 km<sup>2</sup>), sedangkan

kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tegal Timur (6,36 km<sup>2</sup>). Perincian nama kecamatan, kelurahan dan luas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Tegal berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan (km<sup>2</sup>)**

<b>Kecamatan Tegal Selatan</b>		<b>:</b>	<b>6,43</b>	<b>Kecamatan Tegal Timur</b>		<b>:</b>	<b>6,36</b>
1.	Kel. Kalinyamat Wetan	:	0,89	1.	Kel. Kejambon	:	0,86
2.	Kel. Bandung	:	0,59	2.	Kel. Slerok	:	1,39
3.	Kel. Debong Kidul	:	0,35	3.	Kel. Panggung	:	2,23
4.	Kel. Tunon	:	0,75	4.	Kel. Mangkukusuman	:	0,47
5.	Kel. Keturan	:	0,62	5.	Kel. Mintaragen	:	1,41
6.	Kel. Debong Kulon	:	0,74				
7.	Kel. Debong Tengah	:	1,11				
8.	Kel. Randugunting	:	1,38				
<b>Kecamatan Tegal Barat</b>		<b>:</b>	<b>15,13</b>	<b>Kecamatan Margadana</b>		<b>:</b>	<b>11,76</b>
1.	Kel. Pesurungan Kidul	:	0,72	1.	Kel. Kaligangsa	:	2,53
2.	Kel. Debong Lor	:	0,56	2.	Kel. Krandon	:	1,20
3.	Kel. Kemandungan	:	0,56	3.	Kel. Cabawan	:	1,28
4.	Kel. Pekauman	:	0,96	4.	Kel. Margadana	:	2,41
5.	Kel. Kraton	:	1,23	5.	Kel. Kalinyamat Kulon	:	1,52
6.	Kel. Tegalsari	:	2,19	6.	Kel. Sumurpanggung	:	1,00
7.	Kel. Muarareja	:	8,91	7.	Kel. Pesurungan Lor	:	1,82

**Sumber:** Kota Tegal Dalam Angka, 2019

#### B. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Tegal secara astronomis terletak pada 109° 08' – 109° 10' BT dan 6° 50' – 6° 53' LS. Posisi astronomis tersebut menunjukkan bahwa daerah Kota Tegal berada dalam posisi daerah dengan iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kota Tegal dilihat dari posisi geostrategik memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, mengingat Kota Tegal berada pada posisi simpang jalur kota besar yang mendukung terhadap jalur distribusi perekonomian nasional yaitu jalur Semarang-Tegal-Jakarta maupun jalur Jakarta-Tegal-Yogyakarta.

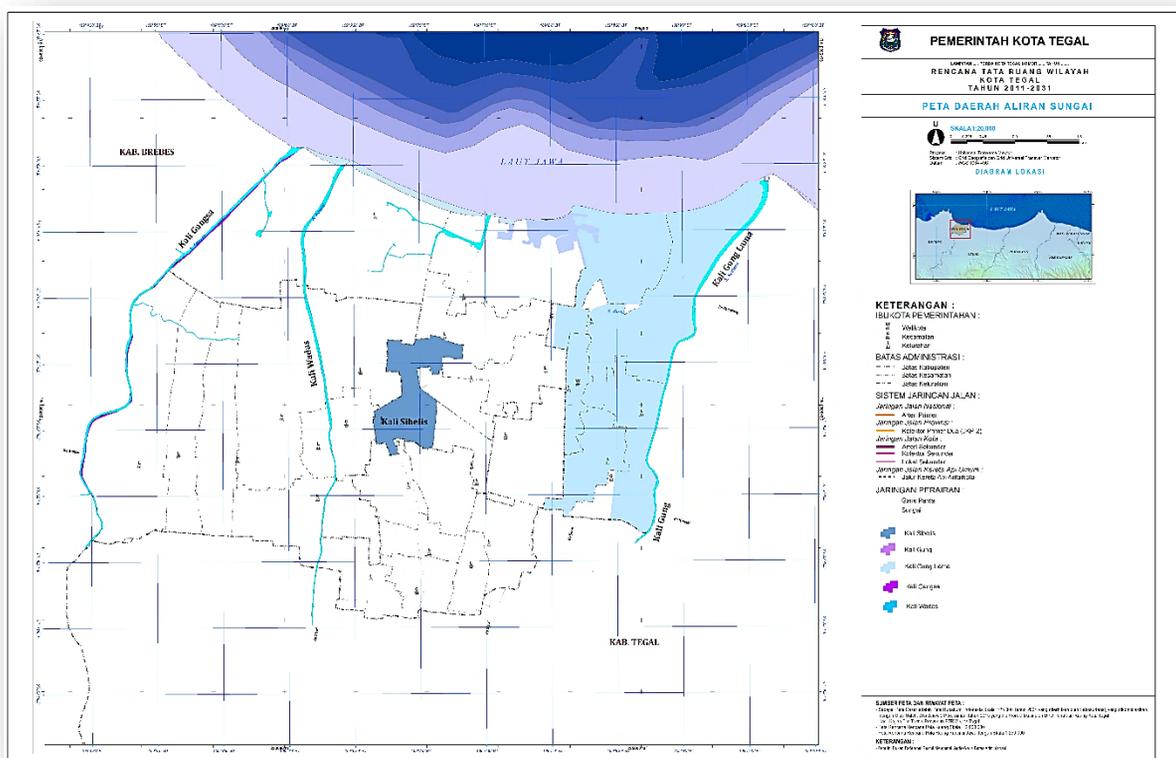
Topografi Kota Tegal termasuk dalam kategori dataran rendah, yaitu memiliki ketinggian antara 0-3 meter diatas permukaan air laut (dpal), membentang dari wilayah Timur hingga ke Barat dan Wilayah Selatan hingga ke Utara. Batuan pembentuk lahan di Kota Tegal terbagi dalam dua jenis batuan pembentuk, yaitu tanah liat dan pasir. Batuan pasir banyak tersebar di sepanjang daerah pesisir mulai dari Kecamatan Tegal Barat dan Tegal Timur yaitu Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Mintaragen, dan Kelurahan Panggung. Adapun persebaran tanah liat berada di hampir keseluruhan Kecamatan di Kota Tegal.

#### C. Hidrologi

Terdapat 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah administratif Kota Tegal. Kelima sungai tersebut yaitu Sungai Ketiwon, Sungai Gung, Sungai Gangsa, Sungai Kemiri, dan Sungai Sibelis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS), terdapat 5 (lima) DAS yang melewati Kota Tegal yakni DAS Gung, DAS Gung Lama, DAS Sibelis, Das Gangsa, dan DAS Wadas. Dari kelima DAS tersebut, DAS Gung merupakan DAS terluas dengan total panjang sungai 55,58 km, total luas DAS 155,52 km<sup>2</sup> dan debit air 514 m<sup>3</sup>/detik dengan kemiringan 0,0065. Daerah Aliran Sungai (DAS) Gung mempunyai karakteristik fisik yang rentan terhadap banjir. Di bagian hulu (Kabupaten Tegal) DAS Gung mempunyai kelerengan yang curam. Di bagian hilir DAS (Kota Tegal), dengan kelerengan yang landai hampir tidak ada kantong resapan air dan vegetasi yang rendah. Selain itu, curah hujan yang tinggi dan berlangsung cukup lama mengakibatkan penambahan debit sungai menjadi besar. Jika daya tampung sungai tidak bisa menampung curah hujan maka akan terjadi limpasan air permukaan. Banjir limpasan mampu membanjiri wilayah yang luas terutama di dataran rendah. Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tegal disajikan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tegal**



**Sumber:** Dokumen RPJMD Kota Tegal 2019-2024

Berdasarkan gambar Peta DAS di atas, terlihat bahwa wilayah Kecamatan Tegal Timur merupakan wilayah paling luas terdampak DAS. Berikut Rincian DAS di Kota Tegal yang mengalir beberapa kelurahan, antara lain:

**Tabel 2.2 Rincian DAS per Kelurahan dan Kecamatan Kota Tegal**

No.	Nama DAS	Kecamatan	Kelurahan
1	Gung Lama & Gung	Tegal Timur	Kelurahan Mintaragen
			Kelurahan Slerok
			Kelurahan Panggung
			Kelurahan Mangkukusuman
			Kelurahan Kejambon
2	Sibelis	Tegal Barat	Kelurahan Tegalsari
			Kelurahan Pesurungan Kidul
			Kelurahan Kemandungan

No.	Nama DAS	Kecamatan	Kelurahan
			Kelurahan Randugunting
			Kelurahan Pekauman
			Kelurahan Kraton
		Tegal Selatan	Kelurahan Debong Kulon
			Kelurahan Keturen
			Kelurahan Tunon
			Kelurahan Bandung
3	Wadas	Tegal Selatan	Kelurahan Debong Kidul
			Kelurahan Kalinyamat Wetan
		Margadana	Kelurahan Kalinyamat Kulon
			Kelurahan Sumurpanggang
			Kelurahan Cabawan
			Kelurahan Pesurungan Lor
			Kelurahan Margadana
4	Gangsa	Tegal Barat	Kelurahan Muarareja
		Margadana	Kelurahan Cabawan
			Kelurahan Krandon
			Kelurahan Kaligangsa

**Sumber:** Dokumen RPJMD Kota Tegal 2019-2024

#### D. Klimatologi

Iklim di Kota Tegal termasuk kedalam kondisi iklim tropis kering. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi geografis Kota Tegal yang berada di daerah pesisir dengan suhu antara 27,0° Celcius hingga 29,0° Celcius dan tingkat kelembaban antara 69% – 82%. Musim hujan di Kota Tegal terjadi antara bulan Januari hingga bulan Mei dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 492,5 mm dan paling rendah pada bulan Juli sebesar 82 mm. Perkembangan klimatologi Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Curah Hujan, Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kota Tegal Tahun 2019**

No	Bulan	Curah Hujan (mm/ tahun)	Rata-rata Suhu Udara (° Celcius)	Rata-rata Tingkat Kelembaban (RH %)
1.	Januari	492.5	27.7	82
2.	Februari	365.2	27.8	81
3.	Maret	372.3	27.7	81
4.	April	257.1	28.6	79
5.	Mei	8.1	28.7	75
6.	Juni	-	27.5	73
7.	Juli	7	27.0	72
8.	Agustus	-	26.9	70
9.	September	-	27.4	70
10.	Oktober	89.1	28.7	69
11.	November	30.3	29.0	71
12.	Desember	385	28.6	78
<b>Kota Tegal</b>			<b>28,0</b>	<b>75,10</b>

**Sumber:** BPS Kota Tegal, 2019

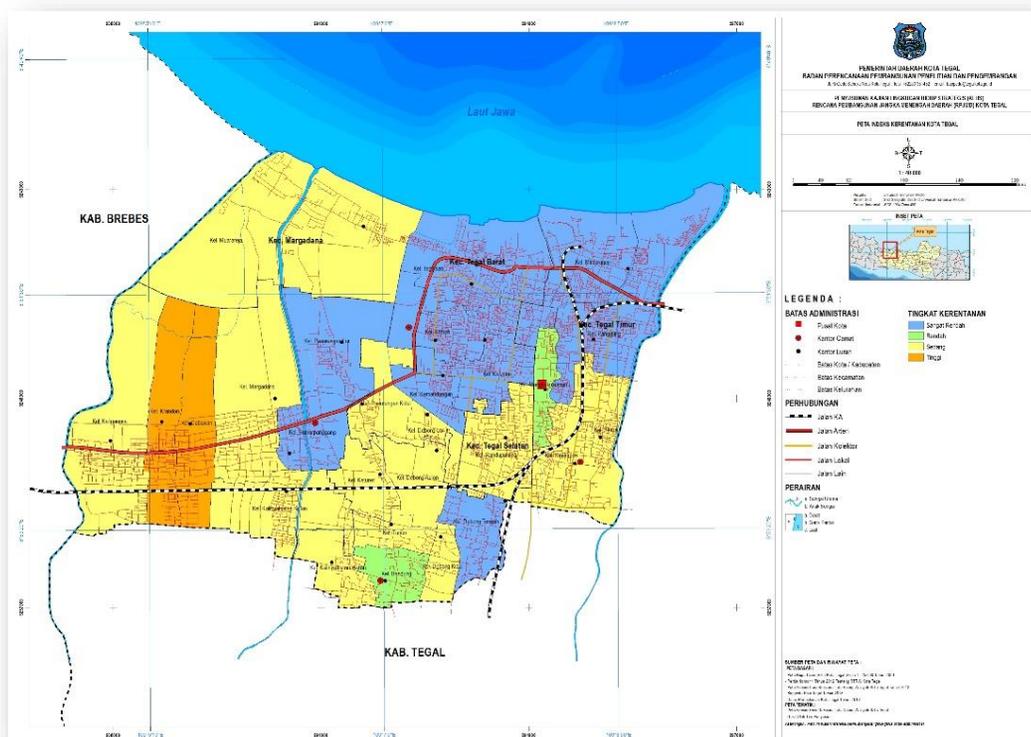
Indeks Kerentanan dan adaptasi perubahan iklim di Kota Tegal berdasarkan dokumen Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015) berada pada indeks kelas kerentanan sangat rendah sampai dengan tinggi.

- Indeks kerentanan sangat rendah sebanyak 7 kelurahan
- Indeks kerentanan rendah sebanyak 2 kelurahan
- Indeks kerentanan sedang sebanyak 13 kelurahan
- Indeks kerentanan tinggi sebanyak 2 kelurahan

Dengan adanya wilayah yang mempunyai indeks kerentanan tinggi maka mempunyai resiko terhadap bencana tinggi dan adaptasi terhadap perubahan iklimnya rendah, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan adaptasi perubahan iklim di wilayah tersebut.

**Gambar 2.3 Peta Indeks Kerentanan Kota Tegal**



**Sumber:** Dokumen RPJMD Kota Tegal 2019-2024

#### E. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Tegal terdiri dari penggunaan lahan sawah (14,41%) dan lahan non sawah (85,59%). Lahan sawah yang ada di Kota Tegal merupakan sawah irigasi dengan luas 565.37 Ha. Penggunaan lahan bukan sawah terdiri dari beberapa tutupan lahan, dengan penggunaan terluas yaitu permukiman seluas 1.614,83 Ha (41,15%), tambak seluas 800.22 Ha (20,39%), dan rawa seluas 170,28 Ha (4,34%), serta penggunaan lainnya seluas 773,42 Ha (19,71%).

**Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Kota Tegal**

No	Nama Kawasan	Luas	No	Nama Kawasan	Luas (Ha)
1	Badan Jalan	33,73	17	Permukiman	1614,83
2	Badan Sungai	45,07	18	Pertokoan	112,03
3	Dermaga	18,29	19	Peternakan	8,19
4	Hutan Bakau	4,49	20	Rawa	170,28
5	Industri	59,30	21	Rel Kereta Api	14,90
6	Kebun Campuran	16,69	22	Rumah Sakit	6,07
7	Kolam	12,81	23	Sawah Irigasi	565,37

No	Nama Kawasan	Luas	No	Nama Kawasan	Luas (Ha)
8	Lapangan	16,30	24	Semak Belukar	70,95
9	Makam	10,76	25	Stasiun	3,03
10	Masjid	0,82	26	Taman	7,60
11	Olahraga	0,36	27	Tambak	800,22
12	Pasar	3,85	28	Tanah Kosong	69,32
13	Pelabuhan	49,39	29	Terminal	6,33
14	Pendidikan	86,65	30	TPA	12,31
15	Perdagangan/Jasa	38,97	31	Waduk Pengendali	3,38
16	Perkantoran	47,95	32	Wisata Pantai	13,88
				<b>JUMLAH</b>	<b>3.924,12</b>

#### F. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Tegal yang tergabung dalam sistem perwilayahan secara nasional masuk dalam dalam wilayah yang disebut Bregasmalang yang terdiri dari Brebes, Kota Tegal, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kabupaten Pemalang. Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota lain.

Pengembangan wilayah di Kota Tegal telah mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, Kota Tegal termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Bregasmalang. Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional maka mendasari Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Bregasmalang, Kota Tegal masuk dalam Kawasan Bregasmalang. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan yang dilakukan guna meningkatkan daya saing daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian nasional. Percepatan pembangunan ekonomi dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Adapun amanat program/proyek strategis di Kota Tegal sesuai Perpres Nomor 79 tahun 2019, antara lain:

1. Pengendalian banjir dan normalisasi Muara Sungai Sibelis
2. Pengendalian banjir dan normalisasi Muara Sungai Kemiri
3. Pembangunan Fly Over Tirus
4. Pembangunan TPA Bokongsemar
5. Peningkatan Terminal Tipe A
6. Pengembangan Pelabuhan Tegal, koneksi dengan Kereta Api dan Jalan Akses masuk ke Kawasan Industri
7. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari

Proyek strategis tersebut telah diakomodir dalam rencana Revisi RTRW Kota Tegal tahun 2011-2031 yang sampai dengan sekarang masih dalam tahap pembahasan persetujuan substansi di Kementerian ATR/ BPN. Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari Rencana Tata dan Ruang Wilayah Kota Tegal, sebagai yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-

2031, mengklasifikasikan rencana pola ruang di Kota Tegal kedalam dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat; Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK); kawasan cagar budaya; dan kawasan rawan bencana alam. Kawasan budidaya terdiri atas kawasan perumahan; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan perkantoran; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan ruang terbuka non hijau; kawasan ruang evakuasi bencana; kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan kawasan peruntukan lainnya.

**Gambar 2.4 Rencana Pola Ruang dan Wilayah Kota Tegal**



**Sumber:** RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031

Daerah yang masuk dalam kawasan perlindungan setempat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sempadan sungai dan sempadan pantai. Daerah sempadan sungai tersebut meliputi Sungai Ketiwon, Sungai Kali Gung, Sungai Kali Gangsa, Sungai Kemiri, dan Sungai Sibelis. Wilayah yang termasuk dalam sempadan pantai terdapat pada Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Tegal Barat. Mekanisme pengelolaan sempadan sungai adalah melalui identifikasi dan penataan bangunan di sempadan sungai; penghijauan sempadan sungai; pengaturan pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik, pondasi jembatan; dan pembangunan jalan inspeksi. Adapun pengelolaan sempadan pantai melalui penghijauan, pembangunan groin dan breakwater untuk melindungi pantai dari abrasi; dan penetapan kawasan sempadan pantai yang dapat dimanfaatkan dermaga, pelabuhan, kegiatan perikanan lain, dan kegiatan lain yang diijinkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Lingkup perkotaan yang menjadi ruang terbuka hijau direncanakan berupa taman-taman kota, lapangan olahraga, tempat-tempat bermain anak, dan bufer zone untuk kawasan industri. RTH Kota Tegal antara lain taman kota, taman kecamatan yang tersebar pada semua daerah kecamatan; RTH sempadan berada di sepanjang sempadan sungai meliputi Sungai Ketiwon, Sungai Gung, Sungai Kemiri, Sungai Gangsa dan daerah pesisir sepanjang pantai di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur dengan luasan yang bervariasi; dan hutan kota berada di setiap Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK). Rencana pengembangan fasilitas open space dan olahraga Kota Tegal ini meliputi taman main besar, taman main kecil, lapangan olahraga, dan makam.

Kebijakan pengelolaan kawasan cagar budaya bertujuan untuk menjaga kelestarian peninggalan sejarah secara benar dan konsisten sebagaimana alur perjalanan budaya yang terjadi di lokasi peninggalan. Proses pengelolaan dapat ditempuh melalui penelitian dan inventarisasi nilai-nilai yang terkandung, serta mengembangkan berbagai bentuk atraksi pelestarian sejarah. Untuk itu segala aktivitas yang tidak selaras dengan kelestarian budaya perlu dihindari. Bangunan bersejarah yang ada di Kota Tegal kebanyakan berarsitektur Kolonial Belanda terletak di kawasan Alun-alun kota di Kelurahan Mangkukusuman, kawasan Kota Lama yang terletak di lingkungan Balai kota lama di Kelurahan Tegalsari; dan kawasan Stasiun Besar Kereta Api di Kelurahan Panggung.

**Gambar 2.5 Bangunan Bersejarah Kawasan Kota Lama dan Kawasan Stasiun Besar Kereta Api**



#### G. Wilayah Rawan Bencana

Topografi Kota Tegal termasuk dalam kategori dataran rendah, yaitu memiliki ketinggian antara 0-3 meter di atas permukaan air laut (dpl) menyebabkan Kota Tegal sangat rawan terjadinya bencana seperti genangan, abrasi dan rob. Wilayah rawan bencana di Kota Tegal dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### a. Genangan

Air permukaan yang merupakan salah satu sumber air juga dapat mengakibatkan bencana banjir jika volume ketersediaan berlimpah dan tidak adanya drainase yang baik akan menyebabkan genangan. Kota Tegal sangat rentan terhadap genangan setiap tahunnya yang disebabkan oleh curah hujan tinggi, drainase yang kurang memadai, dan penurunan muka tanah. Daerah yang rawan terkena genangan ialah Kelurahan Debong Kidul, Kelurahan Tunon, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kelurahan Sumurpanggang, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kelurahan Pesurungan Lor, dan Kelurahan Tegalsari.

##### b. Abrasi

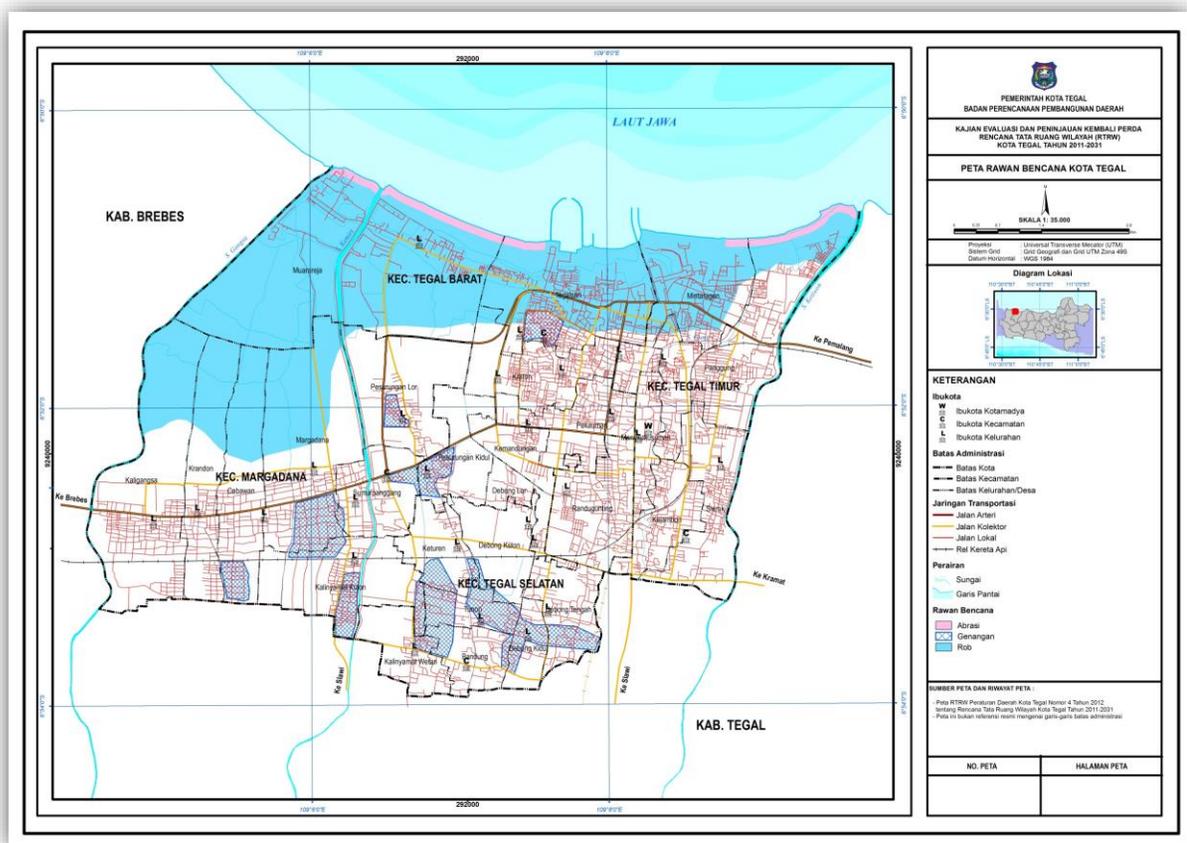
Abrasi merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Potensi rawan abrasi di Kota Tegal tergolong rendah dan tidak semua wilayah di Kota Tegal berpotensi abrasi. Daerah yang terkena rawan abrasi ialah sepanjang garis pantai utara di Kota Tegal. Lokasi yang sangat rawan terhadap abrasi ialah Kelurahan Muarareja di Kecamatan Tegal Barat dan Kelurahan Panggung di Kecamatan Tegal Timur. Hal ini selain disebabkan oleh ombak besar dan air laut pasang juga disebabkan karena sebagian ekosistem yang berfungsi sebagai penghalang ombak seperti tanaman

mangrove ketika pasang tidak berfungsi atau fungsinya terganggu akibat pengurangan tanaman mangrove yang digunakan untuk aktivitas pembangunan.

c. Rob

Rob merupakan banjir air laut atau naiknya permukaan air laut. Rob terjadi karena air laut yang pasang yang mengenai daratan, merupakan permasalahan yang terjadi di daerah yang lebih rendah dari muka air laut. Lokasi yang sangat rawan terhadap rob tentunya adalah daerah-daerah di sepanjang pantai, yaitu di Kelurahan Muarareja dan Kelurahan Tegalsari di Kecamatan Tegal Barat serta Kelurahan Mintaragen dan Kelurahan Panggung di Kecamatan Tegal Timur. Secara spasial, wilayah Kota Tegal dengan kondisi rawan bencana berupa genangan adalah seluas 234 Ha, wilayah rawan abrasi seluas 47 Ha, dan wilayah rawan rob seluas 1.261 Ha yang dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.6 Wilayah Rawan Bencana Kota Tegal**



**Sumber:** Dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

H. Demografi

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penduduk Kota Tegal berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) tercatat sebanyak 286.376 jiwa, terdiri dari 144.141 jiwa penduduk laki-laki dan 142.235 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (proporsi penduduk laki-laki dan perempuan) adalah 101,34% dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,32% per tahun. Ini mengindikasikan pertumbuhan penduduk laki-laki lebih cepat dibanding penduduk perempuan. Angka pertumbuhan penduduk Kota Tegal tahun 2019 ini tercatat 0,51 persen. Angka tersebut relatif lebih besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan kenaikan jumlah penduduk Kota Tegal adalah 1.457 jiwa.

Namun demikian Perkembangan jumlah penduduk Kota Tegal relatif terkendali, hal ini terlihat dari kondisi tingkat kelahiran. Gambaran tingkat kelahiran di Kota Tegal dapat dilihat dari Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/ TFR) yang didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Tahun 2019 angka TFR Kota Tegal sebesar 2,14, menurun dibandingkan angka tahun 2018 yang tercatat sebesar 2,18. Angka TFR Kota Tegal juga lebih rendah jika dibanding dengan nasional yang sebesar 2,32. Adapun Jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5 Jumlah, Rasio dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Tegal Tahun 2015-2019**

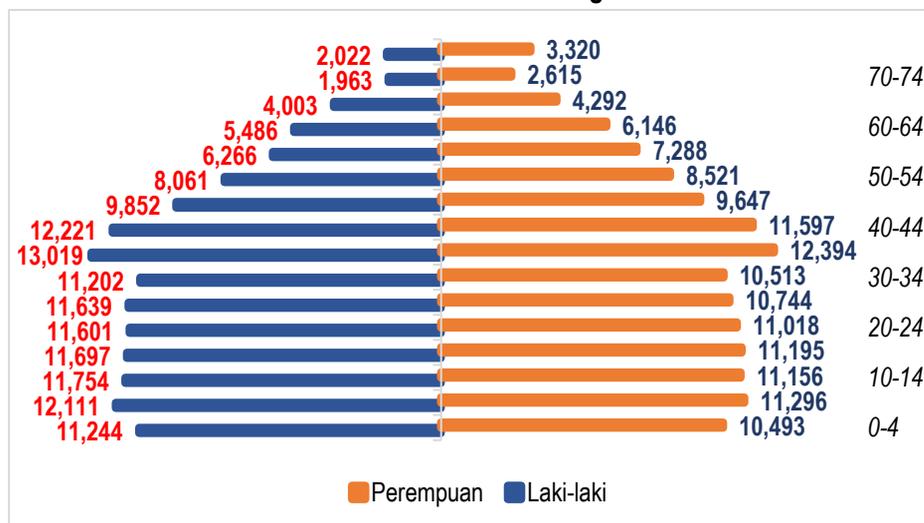
No	Kecamatan	Luas Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin (%)	Kepadatan Penduduk
1	Tegal Barat	15,13	35.027	34.821	69.848	100,59	4.616
2	Tegal Timur	6,36	42.260	42.501	84.761	99,43	13.327
3	Tegal Selatan	6,43	35.308	34.282	69.590	102,99	10.822
4	Margadana	11,76	31.546	30.631	62.177	102,99	5.287
<b>Tahun 2019</b>		<b>39,68</b>	<b>144.141</b>	<b>142.235</b>	<b>286.376</b>	<b>101,34</b>	<b>7.217</b>
Tahun 2018			143.455	141.464	284.919	101,40	7.180
Tahun 2017			141.625	140.184	281.809	101,02	7.102
Tahun 2016			141.263	138.854	280.117	101,73	7.059
Tahun 2015			139.629	137.105	276.734	101.84	6.974

*Sumber: Disdukcapil Kota Tegal, 2019*

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar berada di Kecamatan Tegal Timur, yaitu sebanyak 84.761 jiwa, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Margadana sebanyak 62.177 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Tegal sebesar 7.180 jiwa/km<sup>2</sup>, tertinggi di Kecamatan Tegal Timur yaitu 13.327 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan terendah berada di Kecamatan Tegal Barat yaitu 4.616 jiwa/km<sup>2</sup>. Rasio jenis kelamin di Kota Tegal adalah 101,34%, namun masing-masing kecamatan memiliki rasio yang berbeda terutama di Kecamatan Tegal Timur jumlah penduduk Perempuan lebih banyak dibanding Laki-laki dengan rasio 99,43 persen.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur secara rinci dapat dilihat pada gambar Piramida Penduduk sebagai berikut:

**Gambar 2.7 Piramida Penduduk Kota Tegal Tahun 2019**



*Sumber: Disdukcapil Kota Tegal, 2019*

Penduduk Kota Tegal pada tahun 2019 lebih banyak didominasi oleh penduduk produktif, terlihat dari jumlah penduduk usia 15-64 tahun lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif (0-14 dan 65 tahun keatas). Perbandingan jumlah penduduk non produktif terhadap jumlah penduduk produktif menunjukkan bahwa angka ketergantungan Kota Tegal pada tahun 2019 sebesar **43,11**, yang berarti sebanyak 100 orang produktif menanggung sebanyak **43 orang** non produktif. Kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan angka ketergantungan pada tahun 2015 sebesar **72,24**. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Tegal telah mengalami **bonus demografi**, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Hal ini memerlukan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang tepat, antara lain menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke Angkatan kerja, menjaga penurunan fertilitas, menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta strategi *link and match* antara kebutuhan pasar tenaga kerja.

Sebagai langkah antisipasi menghadapi bonus demografi, Kota Tegal telah menyusun Kajian Bonus Demografi Kota Tegal 2019-2030, dimana di dalamnya berisi serangkaian arah kebijakan antara lain menyangkut pengendalian kuantitas penduduk yang diarahkan untuk mengelola dan mempertahankan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran dengan cara mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB). Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas penduduk yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan secara umum dan pendidikan serta kesempatan kerja/ berusaha. Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, dari sisi pelayanan kesehatan perlu diupayakan peningkatan derajat kesehatan untuk menurunkan angka kematian terutama ibu dan anak serta meningkatkan usia harapan.

Sementara dari sisi pendidikan, perlu diupayakan peningkatan kompetensi dan daya saing penduduk melalui pendidikan formal, non formal dan informal tanpa mengesampingkan masalah kesetaraan gender. Sedangkan dari sisi kesempatan kerja/ berusaha perlu diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak atau kemudahan berwirausaha. Melalui pekerjaan yang layak memberi peluang keluarga untuk meningkatkan penghasilannya sehingga terbebas dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Tingkat Pendidikan tertentu penduduk laki-laki di Kota Tegal mendominasi tingkat Pendidikan penduduk perempuan, demikian juga sebaliknya. Pada tingkat Pendidikan SD/ sederajat didominasi oleh perempuan, SLTA/ sederajat didominasi oleh laki-laki, Diploma IV/ Strata I didominasi oleh laki-laki, Strata II dan Strata II didominasi oleh penduduk laki-laki. Sedangkan Diploma I/ II, juga Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda didominasi oleh penduduk Perempuan. perkembangan proporsi penduduk Kota Tegal menurut tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Proporsi Penduduk Kota Tegal Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
Tidak/ Belum Sekolah	34,622	34,011	68,633
Belum Tamat SD/ Sederajat	11,016	10,356	21,372
Tamat SD/ Sederajat	36,075	39,692	75,767
SLTP/ Sederajat	22,009	20,296	42,305
SLTA/ Sederajat	31,195	28,289	59,484
Diploma I/ II	289	487	776
Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	2,093	2,775	4,868
Diploma IV/ Strata I	6,364	6,063	12,427

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
Strata II	468	261	729
Strata III	10	5	15
<b>TOTAL</b>	<b>144,141</b>	<b>142,235</b>	<b>286,376</b>

Sumber: Disdukcapil Kota Tegal, Tahun 2019

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kota Tegal yang bekerja sebagian besar adalah karyawan swasta sebanyak 13,56 persen dan wiraswasta sebanyak 9,54 persen.

Tabel 2.7 Mata Pencaharian Penduduk Kota Tegal Tahun 2017-2019

No	Jenis Kegiatan Utama	2019		2018		2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Belum / tidak bekerja	69.063	24,12	67.374	23,65	65.340	23,19
2	Mengurus rumah tangga	45.738	15,97	45.351	15,92	44.942	15,95
3	Pelajar / mahasiswa	43.480	15,18	44.254	15,53	44.512	15,80
4	Pensiunan	2.101	0,73	2.130	0,75	2.179	0,77
5	Pegawai Negeri Sipil	4.196	1,47	4.408	1,55	4.764	1,69
6	Tentara Nasional Indonesia	192	0,07	202	0,07	205	0,07
7	Kepolisian RI	374	0,13	377	0,13	391	0,14
8	Perdagangan	65	0,02	61	0,02	54	0,02
9	Petani / pekebun	1.553	0,54	1.584	0,56	1.709	0,61
10	Peternak	53	0,02	54	0,02	57	0,02
11	Nelayan / perikanan	7.501	2,62	7.401	2,60	6.764	2,40
12	Industri	14	0,00	12	0,00	15	0,01
13	Konstruksi	7	0,00	7	0,00	8	0,00
14	Transportasi	23	0,01	23	0,01	26	0,01
15	Karyawan swasta	38.844	13,56	38.187	13,39	36.240	12,86
16	Karyawan BUMN	622	0,22	603	0,21	553	0,20
17	Karyawan BUMD	129	0,05	124	0,04	112	0,04
18	Karyawan honorer	401	0,41	388	0,14	355	0,13
19	Buruh harian lepas	20.416	7,13	20.486	7,19	20.525	7,28
20	Buruh tani / perkebunan	346	0,12	332	0,12	360	0,13
21	Buruh nelayan / perikanan	176	0,06	179	0,06	174	0,06
22	Buruh peternakan	6	0,00	6	0,00	6	0,00
23	Pembantu rumah tangga	91	0,03	90	0,03	103	0,04
24	Tukang cukur	12	0,00	11	0,00	12	0,00
25	Tukang listrik	10	0,00	9	0,00	9	0,00
26	Tukang batu	173	0,06	176	0,06	177	0,06
27	Tukang kayu	293	0,1	274	0,10	274	0,10
28	Tukang sol sepatu	6	0,00	4	0,00	5	0,00
29	Tukang las/ pandai besi	47	0,02	51	0,02	51	0,02
30	Tukang jahit	130	0,05	132	0,05	127	0,05
32	Penata rias	8	0,00	9	0,00	9	0,00
33	Penata busana	1	0,00	1	0,00	1	0,00
34	Penata rambut	6	0,00	7	0,00	8	0,00
35	Mekanik	103	0,04	101	0,04	91	0,03
36	Seniman	12	0,00	12	0,00	11	0,00
37	Tabib	1	0,00				

No	Jenis Kegiatan Utama	2019		2018		2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
38	Imam mesjid	1	0,00	1	0,00	1	0,00
39	Pendeta	23	0,01	23	0,01	27	0,01
40	Wartawan	26	0,01	27	0,01	16	0,01
41	Ustadz / mubaligh	14	0,00	15	0,01	1	0,00
42	Juru masak	1	0,00	1	0,00	1	0,00
43	Walikota	1	0,00	1	0,00	1	0,00
44	Wakil Walikota	1	0,00	1	0,00	1	0,00
45	Anggota DPR Provinsi	1	0,00	1	0,00	1	0,00
46	Anggota DPRD kabupaten/ kota	10	0,00	12	0,00	14	0,00
47	Dosen	138	0,05	121	0,04	105	0,04
48	Guru	2.374	0,83	2.336	0,82	2.252	0,80
49	Pengacara	7	0,00	5	0,00	6	0,00
50	Notaris	24	0,01	23	0,01	21	0,01
51	Arsitek	6	0,00	5	0,00	5	0,00
52	Akuntan	1	0,00	1	0,00	1	0,00
53	Konsultan	10	0,00	7	0,00	8	0,00
54	Dokter	205	0,07	199	0,07	187	0,07
55	Bidan	159	0,06	150	0,07	136	0,05
56	Perawat	314	0,11	299	0,10	274	0,10
57	Apoteker	40	0,01	35	0,01	30	0,01
58	Psikiater/ psikolog	1	0,00	1	0,00	1	0,00
59	Penyiar Radio	1	0,00				
60	Pelaut	193	0,07	186	0,07	129	0,05
61	Peneliti	1	0,00	2	0,00	1	0,00
62	Sopir	518	0,18	495	0,17	477	0,17
63	Pedagang	18.557	6,48	18.730	6,57	19.284	6,84
64	Perangkat desa	4	0,00	4	0,00	4	0,00
65	Kepala desa	1	0,00	1	0,00	1	0,00
66	Biarawati	4	0,00	3	0,00	2	0,00
67	Wiraswasta	27.308	9,54	27.591	9,68	28.314	10,05
68	Lainnya	239	0,08	264	0,09	318	0,11

Sumber: Disdukcapil Kota Tegal, Tahun 2019

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, seni budaya dan olahraga.

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### A. Pertumbuhan Ekonomi/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan PDRB Kota Tegal tahun 2019 mencapai 5,77 persen, **lebih lambat** bila dibandingkan tahun 2018 dengan pertumbuhan 5,87 persen. Laju Pertumbuhan di Kabupaten/ Kota eks Karesidenan Pekalongan memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dengan capaian 5,77%

menduduki posisi ketiga, sebelumnya Kabupaten Brebes pada posisi pertama dengan capaian 5,86%, disusul Kabupaten Pemalang 5,8%, sedangkan posisi keempat sampai ketujuh adalah Kabupaten Tegal 5,58%, Kota Pekalongan 5,5%, Kabupaten Batang 5,39 dan posisi terakhir Kabupaten Pekalongan 5,35%.

**Tabel 2.8 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB se-Eks Karisidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**

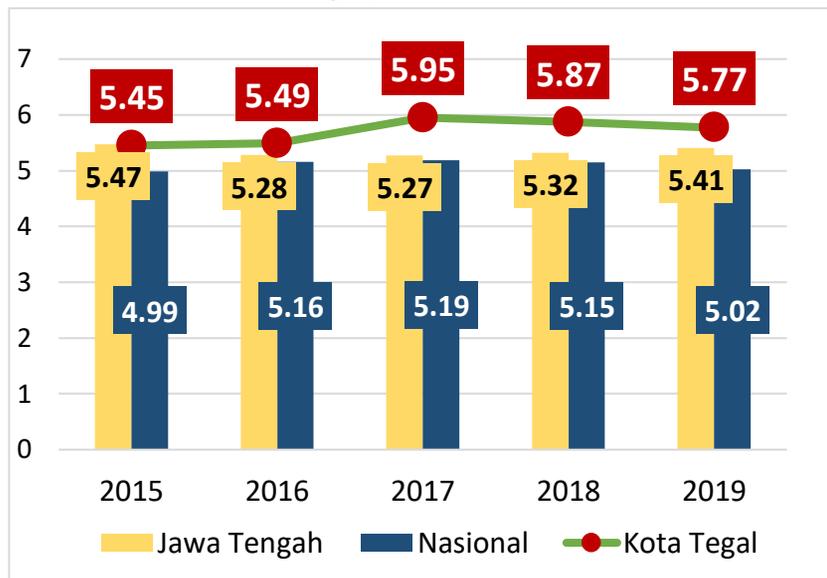
No.	Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018*	2019**
	Nasional	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02
	Provinsi Jawa Tengah	5,47	5,25	5,26	5,31	5,41
1.	Kabupaten Brebes	5,98	5,11	5,65	5,22	5,86
2.	Kabupaten Tegal	5,49	5,92	5,38	5,51	5,58
3.	Kabupaten Pemalang	5,58	5,43	5,61	5,7	5,8
4.	Kabupaten Pekalongan	4,78	5,19	5,44	5,76	5,35
5.	Kabupaten Batang	5,42	5,03	5,55	5,72	5,39
6.	Kota Pekalongan	5,00	5,36	5,32	5,69	5,5
7.	<b>Kota Tegal</b>	<b>5,45</b>	<b>5,49</b>	<b>5,95</b>	<b>5,87</b>	<b>5,77</b>

Sumber: BPS, Tahun 2019

\*) Angka Sementara \*\*) Angka Sangat Sementara

Sedangkan perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi antara Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

**Gambar 2.8 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan grafik di atas, Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal mampu tumbuh stabil dikisaran 5% – 5,77% dengan tren meningkat sepanjang tahun 2015-2019, dimana pada Tahun 2019 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal mampu tumbuh sebesar 5,77%, bila dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,41% dan Nasional 5,02%.

Adanya **pandemik global COVID-19** ini tentunya memberikan dampak yang sangat berat bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal diproyeksikan akan cukup melambat pada Tahun 2020-2021. Karena, pandemik global COVID-19 justru memberikan tekanan yang berat pada sektor-sektor unggulan yang menjadi penopang PDRB Kota Tegal.

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Nilai PDRB Kota Tegal atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai **15,29 triliun rupiah**. Secara nominal, nilai PDRB ini **mengalami kenaikan** sebesar 1,18 triliun rupiah dibandingkan dengan PDRB tahun 2018 yang mencapai 14,11 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, terutama sektor informasi dan komunikasi, serta adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga **mengalami kenaikan**, dari 10,59 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi **11,20 triliun rupiah** pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kota Tegal murni mengalami peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha tanpa dipengaruhi inflasi.

**Tabel 2.9**  
**Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Berlaku & Konstan (Jutaan Rupiah)**  
**Di Kota Tegal Tahun 2015 – 2019\*\*)**

<i>Tahun</i>	<i>PDRB ADHB</i>	<i>PDRB ADHK</i>
2015	10.979.950,43	8.953.879,56
2016	11.963.075,45	9.445.030,96
2017	12.996.752,28	10.006.943,00
2018*	14.105.843,66	10.594.340,17
2019**	15.287.590,42	11.205.322,88

**Sumber:** BPS Kota Tegal. data diolah;

\*) Angka Sementara    \*\*) Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa Nilai PDRB Kota Tegal atas dasar harga berlaku dari tahun 2015-2019 selalu **mengalami kecenderungan peningkatan**. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan biasanya dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Secara rinci perkembangan PDRB Kota Tegal ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.10 dan Tabel 2.11 sebagai berikut:

**Tabel 2.10 PDRB Kota Tegal ADHB**  
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2015–2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	577 465.06	624 065.29	660 642.21	715 784.51	769 608.42
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	1 653 523.22	1 819 851.07	1 979 877.12	2 142 007.88	2 281 740.97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15 159.56	17 177.89	19 506.64	20 925.13	22 072.76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 567.61	6 875.31	7 125.71	7 453.63	7 838.84
F	Konstruksi	1 849 408.02	1 992 375.93	2 192 454.24	2 413 837.00	2 633 862.95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 113 267.63	3 360 837.56	3 615 787.76	3 911 635.00	4 251 514.28
H	Transportasi dan Pergudangan	461 522.91	505 932.01	547 610.97	590 676.27	650 773.64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	613 993.96	701 454.38	758 574.15	820 586.51	893 934.48
J	Informasi dan Komunikasi	538 667.50	579 316.84	676 527.59	759 571.43	845 327.48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	514 488.02	565 440.29	609 347.53	654 531.69	703 073.47
L	Real Estate	226 802.17	243 894.79	264 205.53	284 282.10	306 082.66
M, N	Jasa Perusahaan	41 486.29	47 340.79	53 426.18	59 632.40	67 162.62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	649 195.44	703 973.91	744 773.49	776 397.47	819 298.24
P	Jasa Pendidikan	417 044.08	464 399.64	508 951.57	559 093.65	612 431.10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161 740.36	174 355.38	190 051.39	209 782.20	227 400.11
R,S,T,U	Jasa lainnya	139 618.60	155 784.37	167 890.20	179 646.79	195 468.40
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>8 953 879.56</b>	<b>10 979 950.43</b>	<b>11 963 075.45</b>	<b>12 996 752.28</b>	<b>14 105 843.66</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>8 953 879.56</b>	<b>10 979 950.43</b>	<b>11 963 075.45</b>	<b>12 996 752.28</b>	<b>14 105 843.66</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Tahun 2019

**Tabel 2.11 PDRB Kota Tegal ADHK**  
**Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2015—2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	435 553.90	451 172.05	467 154.97	486 522.53	506 387.27
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	1 279 112.51	1 343 346.03	1 424 085.58	1 490 728.75	1 562 746.85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15 342.48	16 859.24	17 894.68	18 779.84	19 741.02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 011.56	6 119.42	6 253.68	6 457.42	6 707.97
F	Konstruksi	1 495 209.93	1 585 670.78	1 684 504.55	1 785 856.00	1 876 398.90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 614 519.39	2 735 043.52	2 876 886.92	3 028 256.30	3 191 473.49
H	Transportasi dan Pergudangan	400 468.85	425 352.69	451 264.02	481 290.61	516 928.08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	497 763.35	542 436.94	580 816.48	623 022.00	671 509.57
J	Informasi dan Komunikasi	533 644.01	567 511.39	633 790.24	711 774.30	784 446.46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	385 875.99	411 127.37	429 919.77	448 085.44	466 887.32
L	Real Estate	206 798.43	219 334.86	232 045.35	244 233.00	257 226.20
M, N	Jasa Perusahaan	33 519.03	35 779.33	38 996.70	42 488.06	46 681.63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	496 529.12	516 566.90	532 247.65	548 268.31	570 856.96
P	Jasa Pendidikan	313 462.06	334 157.04	359 165.74	386 057.60	412 734.18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124 060.18	131 716.34	141 360.77	154 286.20	165 456.52
R,S,T,U	Jasa lainnya	116 008.78	122 837.06	130 555.90	138 233.81	149 140.46
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>8 953 879.56</b>	<b>9 445 030.96</b>	<b>10 006 943.00</b>	<b>10 594 340.17</b>	<b>11 205 322.88</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>8 953 879.56</b>	<b>9 445 030.96</b>	<b>10 006 943.00</b>	<b>10 594 340.17</b>	<b>11 205 322.88</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Tahun 2019

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Tegal didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tegal.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tegal pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 27,81 persen (angka ini meningkat dari 27,73 persen pada tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 17,23 persen (naik dari 17,11 persen pada tahun 2018). Disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan 14,93 persen (turun dari 15,19 persen pada tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,85 persen (naik dari 5,82 persen pada tahun 2018), serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,53 persen (naik dari 5,38 persen pada tahun 2018).

**Tabel 2.12 Peranan Produk Domestik Regional Bruto Kota Tegal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015 - 2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.26	5.212	5.08	5.07	5.03
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	15.06	15.21	15.23	15.19	14.93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
F	Konstruksi	16.84	16.65	16.87	17.11	17.23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28.35	28.09	27.82	27.73	27.81
H	Transportasi dan Pergudangan	4.2	4.23	4.21	4.19	4.26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.59	5.86	5.84	5.82	5.85
J	Informasi dan Komunikasi	4.91	4.84	5.21	5.38	5.53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.69	4.73	4.69	4.64	4.6
L	Real Estate	2.07	2.04	2.03	2.02	2
M, N	Jasa Perusahaan	0.38	0.4	0.41	0.42	0.44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.91	5.88	5.73	5.5	5.36
P	Jasa Pendidikan	3.8	3.88	3.92	3.96	4.01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.47	1.46	1.46	1.49	1.49
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.27	1.3	1.29	1.27	1.28
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2019

Dari kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi serta informasi dan komunikasi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, peranan industri pengolahan semakin menurun. Peranan dua lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Penyedia Akomodasi dan Makan Minum selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab peningkatan peran lapangan usaha konstruksi adalah banyaknya proyek pembangunan infrastruktur di Kota Tegal sehingga geliat perekonomian semakin terasa.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. **Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.** Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Tegal Tahun 2019 **mengalami penurunan sebesar 0,1 persen** dari Tahun 2018. Pada Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87 persen sedangkan pada Tahun 2019 menurun menjadi **5,77 persen**. Secara rinci, Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tegal atas dasar harga konstan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tegal Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015–2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.68	3.59	3.54	4.15	4.08
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	6.15	5.02	6.01	4.68	4.83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.76	9.89	6.14	4.95	5.12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.63	1.79	2.19	3.26	3.88
F	Konstruksi	6.00	6.05	6.23	6.02	5.07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.14	4.61	5.19	5.26	5.39
H	Transportasi dan Pergudangan	9.20	6.21	6.09	6.65	7.40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.08	8.97	7.08	7.27	7.78
J	Informasi dan Komunikasi	6.53	6.35	11.68	12.30	10.21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.59	6.54	4.57	4.23	4.20
L	Real Estate	6.10	6.06	5.80	5.25	5.32
M, N	Jasa Perusahaan	8.01	6.74	8.99	8.95	9.87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.56	4.04	3.04	3.01	4.12
P	Jasa Pendidikan	7.08	6.60	7.48	7.49	6.91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.05	6.17	7.32	9.14	7.24
R, S, T, U	Jasa lainnya	3.21	5.89	6.28	5.88	7.89
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5.45</b>	<b>5.49</b>	<b>5.95</b>	<b>5.87</b>	<b>5.77</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi selama 2019 secara umum terjadi karena semakin meningkatnya kegiatan pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, seperti menjamurnya usaha penjualan dalam bidang komunikasi dan informasi. Hal ini tidak lepas dari semakin bergantungnya masyarakat terhadap penggunaan telepon seluler terutama *smart phone*. Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 10,21 persen. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan telepon seluler, baik untuk keperluan komunikasi (seperti menelepon, mengirim SMS (*short message service*), mengirim WA (*whatsapp*), membentuk grup WA, dan lain-lain), maupun untuk keperluan informasi (seperti membaca berita, melihat film melalui *youtube*, dan lain-lain). Seluruh lapangan usaha ekonomi yang ada mengalami pertumbuhan yang positif. Sebanyak 12 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas lima persen, sedangkan lima lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif dibawah lima persen.

Bila ditinjau dari data PDRB ADHK Kota Tegal Tahun 2019 (Tabel 2.11) terlihat bahwa nilai output lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki nilai paling tinggi yaitu **3,19 Trilyun** rupiah. Lapangan usaha lain yang juga cukup tinggi yaitu Konstruksi dan Industri Pengolahan dengan nilai masing-masing 1,8 trilyun rupiah dan 1,5 trilyun rupiah. Dengan demikian, ketiga lapangan usaha tersebut menjadi sandaran utama PDRB Kota Tegal. Sedangkan distribusi masing-masing kategori dalam pembentukan PDRB ADHK Kota Tegal tahun 2015- 2019 dapat digambarkan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.14 Distribusi PDRB ADHK Kota Tegal Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015–2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,68	3,59	3,54	4,15	4,08
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	6,15	5,02	6,01	4,68	4,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,76	9,89	6,14	4,95	5,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,63	1,79	2,19	3,26	3,88
F	Konstruksi	6,00	6,05	6,23	6,02	5,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,14	4,61	5,19	5,26	5,39
H	Transportasi dan Pergudangan	9,20	6,21	6,09	6,65	7,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,08	8,97	7,08	7,27	7,78
J	Informasi dan Komunikasi	6,53	6,35	11,68	12,30	10,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,59	6,54	4,57	4,23	4,20
L	Real Estate	6,10	6,06	5,80	5,25	5,32
M, N	Jasa Perusahaan	8,01	6,74	8,99	8,95	9,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,56	4,04	3,04	3,01	4,12
P	Jasa Pendidikan	7,08	6,60	7,48	7,49	6,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,05	6,17	7,32	9,14	7,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,21	5,89	6,28	5,88	7,89
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2019

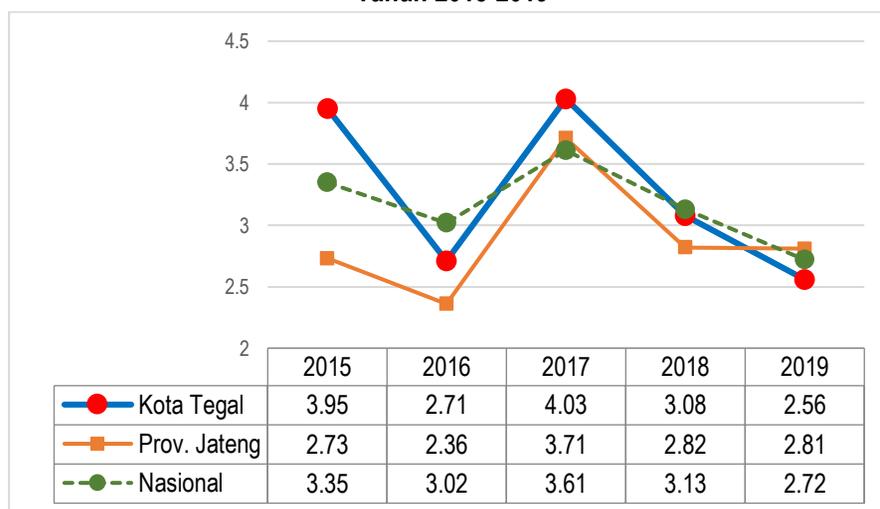
Dari 17 kategori penyumbang distribusi pembentuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2019 hanya 9 lapangan usaha yang mengalami peningkatan antara lain Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; dan Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Terkait pandemik global COVID-19, sektor-sektor ekonomi yang diperkirakan akan terdampak negatif adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan, Real Estate dan Industri Pengolahan. Hal ini tentunya akan memberikan tekanan bagi pertumbuhan ekonomi Kota Tegal hingga Tahun 2021 mendatang. Namun demikian, sektor informasi dan komunikasi diperkirakan justru terdampak positif mengingat terjadinya transformasi digital sebagai salah satu kebutuhan dan penyesuaian di masa pandemik global COVID-19.

## B. Laju Inflasi

Pencapaian inflasi Kota Tegal tahun 2019 sebesar 2,56 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yaitu inflasi sebesar 2,81 % dan 2,72 %. Dari tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2019 secara *year on year* (yoy) Inflasi Kota Tegal cenderung stabil. Pada tahun 2015 inflasi Kota Tegal sebesar 3,95% kemudian mengalami penurunan menjadi 2,71% (2016) dan kembali sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 4,03% yoy dan tahun 2018 inflasi Kota tegal mengalami penurunan menjadi 3,08%. Pada tahun 2019 inflasi Kota Tegal mengalami penurunan kembali menjadi 2,56 %, inflasi ini lebih rendah dari data historis 5 (lima) tahun terakhir yang tercatat sebesar 4,24%. Perbandingan Laju Inflasi Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada gambar sebagai berikut:

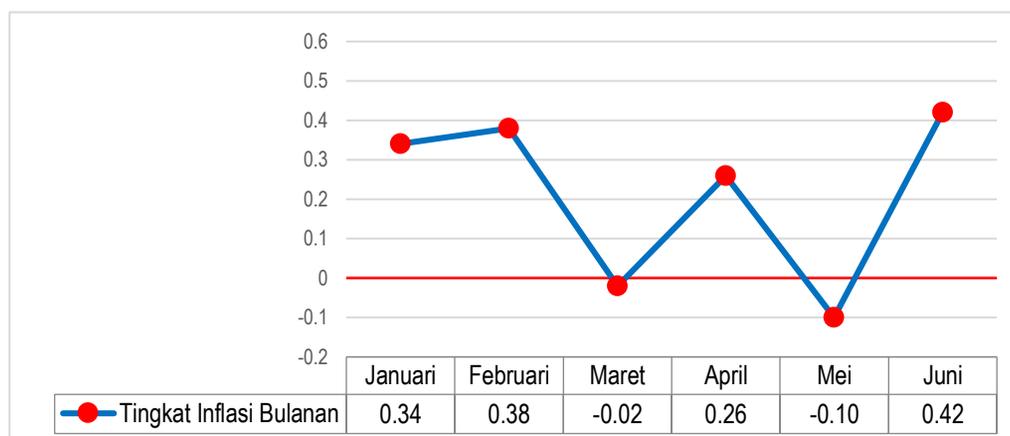
**Gambar 2.9 Laju Inflasi Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Terjadinya pandemik global COVID-19 ternyata tidak berdampak besar bagi perkembangan stabilitas harga. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan tingkat inflasi bulanan/ *month to month* (mtm) Kota Tegal sepanjang Januari hingga Juni Tahun 2020, sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 2.10 Inflasi Bulanan Kota Tegal  
Januari – Juni, 2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tingkat Inflasi Bulanan (mtm) dihitung berdasarkan persentase perubahan IHK bulan  $n$  tahun  $n$  terhadap IHK bulan  $n-1$  tahun  $n$ . Pada kurun waktu Januari – Juni 2020, di perkembangan Indeks Harga Konsumen terjadi fluktuasi, dimana pada bulan Maret dan Mei terjadi deflasi, tapi pada Januari, Februari, April dan Juni terjadi inflasi. Pada Mei 2020 terjadi inflasi sebesar 0,42 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,16. Penyebab utama inflasi di Kota Tegal adalah kenaikan harga daging ayam ras, telur ayam ras, angkutan antar kota, jasa pembuangan sampah, tarif kendaraan travel dan tarip dokter umum.

Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2020 sebesar 1,30 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar 2,43 persen. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 1,66 persen dan 2,15 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Juni 2019 terhadap Juni 2018 dan Juni 2018 terhadap Juni 2017 masing-masing sebesar 2,74 persen dan 3,05 persen., sebagaimana data tabel berikut:

**Tabel 2.15 Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun  
2018 – 2020 (Persen)**

Tingkat Inflasi	2018	2019	2020
Juni	0,97	0,82	0,42
Tahun Kalender	2,15	1,66	1,30
Tahun ke Tahun (Juni tahun $n$ terhadap Juni tahun $n-1$ )	3,12	2,58	2,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

### C. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Tegal atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 44,61 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 61,17 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel 2.16 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Tegal, 2015—2019**

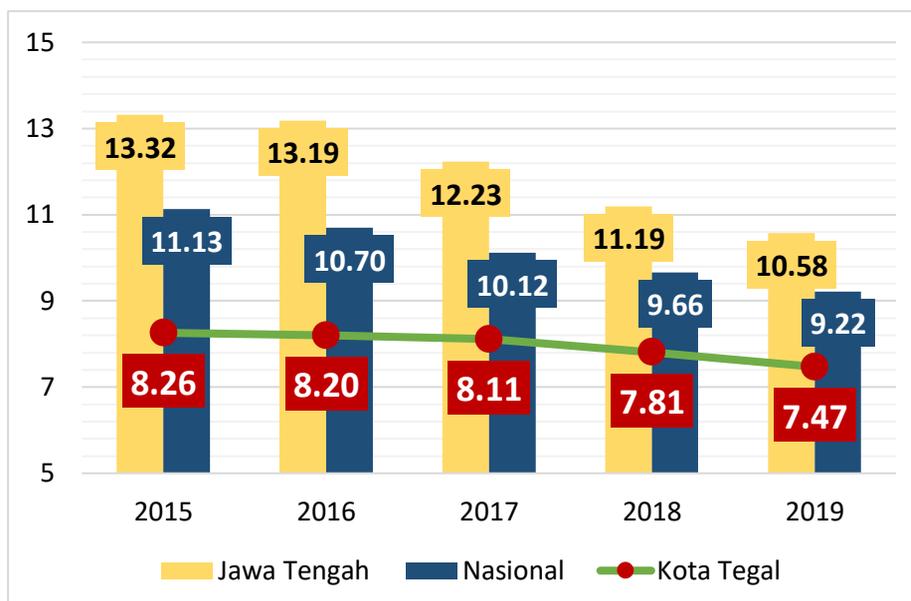
TAHUN	2015	2016	2017	2018*	2019**
<b>Nilai PDRB (Milyar Rupiah)</b>					
ADHB	10.980	11.963	12.997	14.106	15.288
ADHK	8.954	9.445	10.007	10.594	11.205
<b>PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)</b>					
ADHB	44.612,36	48.391,97	52.386,40	56.649,29	61.173,61
ADHK	36.380,29	38.206,20	40.335,29	42.547,04	44.838,33
<b>Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010</b>	<b>5,45</b>	<b>5,49</b>	<b>5,95</b>	<b>5,87</b>	<b>5,77</b>
<b>Jumlah Penduduk (orang)</b>	<b>246.119</b>	<b>247.212</b>	<b>248.094</b>	<b>249.003</b>	<b>249.905</b>
<b>Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)</b>	<b>0,47</b>	<b>0,44</b>	<b>0,36</b>	<b>0,37</b>	<b>0,36</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

#### D. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kota Tegal pada tahun 2019 sebesar 7,47%. Tingkat kemiskinan di Kota Tegal pada kurun tahun tersebut lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 10,58%, serta lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,822%. Namun demikian, tren penurunan tingkat kemiskinan tersebut masih belum signifikan, sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

**Gambar 2.11 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2019

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan (GK) sangat menentukan besar kecil penduduk miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Kota Tegal dalam kurun tahun 2015-2019 mengalami tren meningkat, dimana pada Tahun 2015 sebesar Rp.371.528,00; sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi **Rp.465.047,00**. Garis Kemiskinan Kota Tegal relatif lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

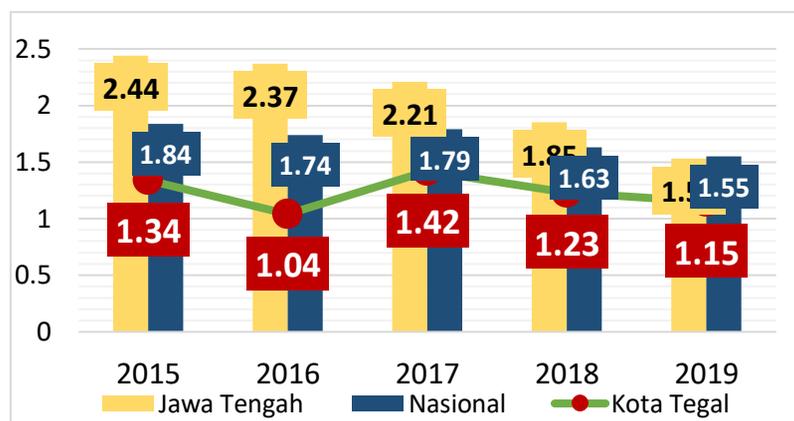
**Tabel 2.17 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**

Tahun	Garis Kemiskinan Kota Tegal (Rp)	Garis Kemiskinan Prov. Jawa Tengah (Rp)	Garis Kemiskinan Nasional (Rp)
2015	371.528	309.314	356.378
2016	395.631	317.348	372.114
2017	418.845	333.224	400.995
2018	455.488	350.875	425.770
2019	465.047	369.385	425.250

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2019

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat kedalam kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

**Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**

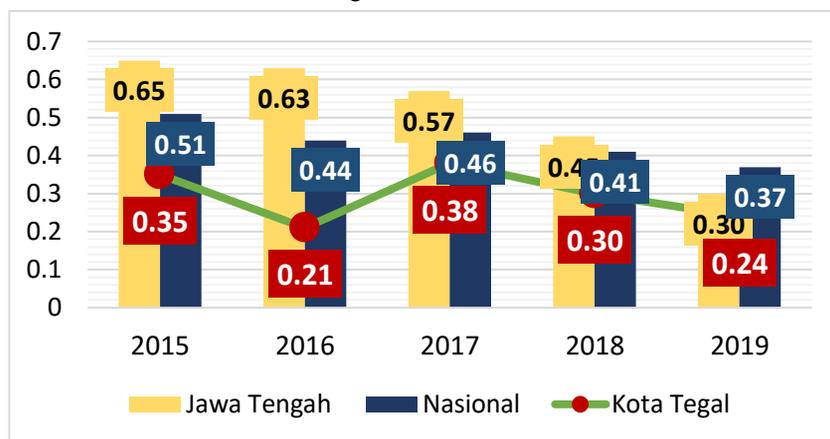


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2019

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tegal dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan tren positif. Indeks P1 mengalami penurunan sebesar 0,08 point dari 1,23 pada tahun 2018 menjadi 1,15 point pada tahun 2019. Kondisi Tingkat Kedalaman Kemiskinan (Indeks P1) Kota Tegal tersebut lebih baik bila dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Namun, ketimpangan dan keparahan kemiskinannya masih tergolong tinggi.

Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin digunakan Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2). Angka Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan demikian sebaliknya. Perbandingan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kota Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

**Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2019

Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kota Tegal kurun waktu 2015-2019 menunjukkan tren positif, dimana Indeks P2 Kota Tegal Tahun 2018 sebesar 0,03 berhasil diturunkan menjadi 0,24 pada Tahun 2019. Kendati indeks P2 Kota Tegal berhasil diturunkan, angka tersebut masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar.

### E. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kota Tegal pada tahun 2019 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2019, IPM mencapai 74,93, angka ini meningkat 0,49 poin dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 74,44. Sejak tahun 2011, status pembangunan manusia di Kota Tegal sudah mulai masuk kategori “tinggi” (IPM di atas 70). Tabel berikut menunjukkan perbandingan angka IPM beserta komponennya Se-Eks Kersidenan Pekalongan Tahun 2018-2019.

**Tabel 2.18 Perbandingan IPM Se-Eks Karisidenan Pekalongan dan Kota lainnya di Jawa Tengah Tahun 2018-2019**

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup		Angka Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu rupiah PPP)			
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Kabupaten Batang	74.56	74.59	11.88	12,00	6.62	6.63	9,203	9,573	67.86	68.42
Kabupaten Pekalongan	73.53	73.57	12.17	12.4	6.74	6.88	10,221	10,508	68.97	69.71
Kabupaten Pemalang	73.11	73.22	11.91	11.94	6.32	6.41	8,186	8,546	65.67	66.32
Kabupaten Tegal	71.28	71.40	12.34	12.58	6.70	6.86	9,433	9,798	67.33	68.24
Kabupaten Brebes	68.84	69.04	12.02	12.03	6.19	6.20	9,890	10,238	65.68	66.12
Kota Magelang	76.72	76.75	13.8	13.81	10.31	10.33	11,994	12,514	78.31	78.8
Kota Surakarta	77.11	77.12	14.52	14.55	10.53	10.54	14,528	15,049	81.46	81.86
Kota Salatiga	77.11	77.22	15,00	15.34	10.40	10.41	15,464	15,944	82.41	83.12
Kota Semarang	77.23	77.25	15.50	15.51	10.51	10.52	14,895	15,550	82.72	83.19
Kota Pekalongan	74.25	74.28	12.79	12.83	8.57	8.71	12,312	12,680	74.24	74.77
<b>Kota Tegal</b>	<b>74.30</b>	<b>74.34</b>	<b>12.9</b>	<b>13.04</b>	<b>8.30</b>	<b>8.31</b>	<b>12,830</b>	<b>13,250</b>	<b>74.44</b>	<b>74.93</b>
<b>Jateng</b>	<b>74.18</b>	<b>74.23</b>	<b>12.63</b>	<b>12.68</b>	<b>7.35</b>	<b>7.53</b>	<b>10,777</b>	<b>11,102</b>	<b>71.12</b>	<b>71.73</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Selama periode 2018 – 2019, komponen pembentuk IPM Kota Tegal juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang hidup hingga 74,34 tahun, meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun 2018. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,04 tahun, meningkat 0,14 tahun dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,31 tahun (SMP Kelas 2), meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai 13,25 juta rupiah pada tahun 2019, meningkat Rp 420 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, diantaranya meliputi angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah.

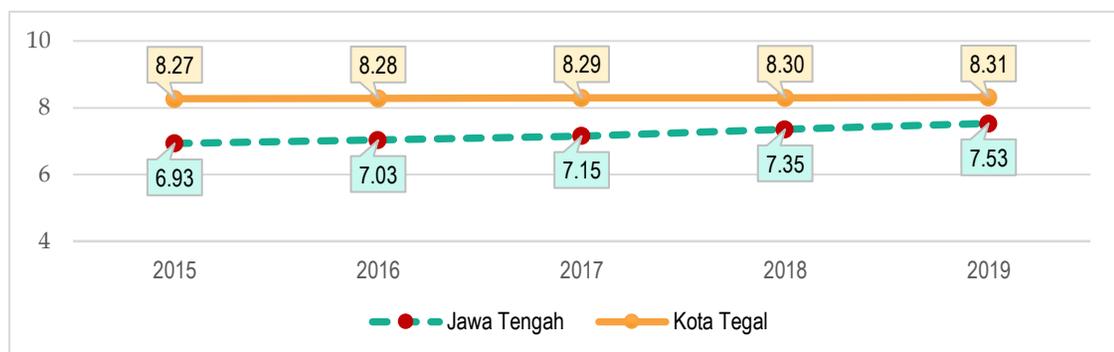
### 1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf berdasarkan BPS yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Angka Melek Huruf di Kota Tegal meningkat dari 99,96% di tahun 2018 menjadi 99,88% di tahun 2019.

### 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan dibangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan semakin baik.

**Gambar 2.14 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tegal**  
Tahun 2015 – 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tegal Tahun 2019 mencapai 8,31 meningkat 0,01 poin dari Tahun 2018 yang mencapai 8,30. Hal ini berarti tingkat Pendidikan penduduk Kota Tegal setara dengan kelas tiga SMP (belum tamat). Meskipun relatif lambat, tetapi dari tahun ke tahun rata-rata lama sekolah di Kota Tegal menunjukkan peningkatan.

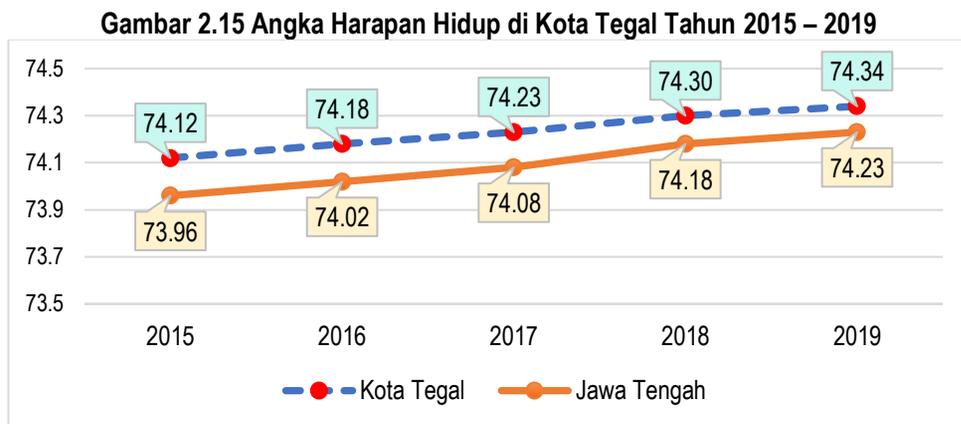
## B. Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

### 1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup yaitu rata-rata lama hidup (dalam tahun) penduduk, yang menurut BPS dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Asumsinya, semakin panjang angka harapan hidup maka kesejahteraan penduduk semakin tinggi, khususnya berdasarkan aspek kesehatan. Data angka usia harapan hidup di Kota Tegal, ditunjukkan pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

## 2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. AKB dapat menjadi salah satu indikator penting dalam merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat, baik berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, sarana dan prasarana kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data AKB ini dapat digunakan sebagai dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Tabel berikut menunjukkan AKB di Kota Tegal Tahun 2015 – 2019.

**Tabel 2.19 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Tegal Tahun 2015-2019**

No.	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kematian bayi (jiwa)	39	53	50	32	28
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	4.374	4.297	4.352	4.197	4.214
3.	<b>Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)</b>	8,9	12,33	11,00	7,62	6,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2019

Angka kematian bayi (AKB) di Kota Tegal menunjukkan tren menurun. AKB yang dicapai di Tahun 2019 sebanyak 6,60 per-1000 kelahiran hidup, menunjukkan kinerja pembangunan kesehatan yang baik. Pencapaian kinerja AKB jauh melampaui target kesepakatan global yang disyaratkan yaitu 23 per-1000 kelahiran hidup di Tahun 2015. Meskipun angka kematian bayi sudah berhasil diturunkan, namun perlu upaya-upaya untuk tetap mempertahankan dan menurunkan mengingat AKB adalah indikator pembangunan kesehatan yang paling sensitif selain angka kematian ibu.

## 3. Angka Kematian Balita (AKABa)

Angka Kematian Balita (AKABa) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. AKABa di Kota Tegal lebih rendah dibandingkan dengan AKB. Tabel berikut ini menunjukkan data angka kematian balita di Kota Tegal tahun 2015-2019:

**Tabel 2.20 Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABa) Kota Tegal Tahun 2015-2019**

No.	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kematian balita (jiwa)	53	67	59	37	22
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	4.374	4.297	4.352	4.197	4.214
3.	<b>Angka Kematian Balita (per 1.000 KH)</b>	<b>12,12</b>	<b>15,59</b>	<b>14,00</b>	<b>8,82</b>	<b>5,20</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2019

Upaya untuk menurunkan kematian Balita berupa pemantauan tumbuh kembang Balita dan kunjungan Balita terstandar membawa hasil yang sesuai harapan. Angka kematian Balita dari tahun ke tahun berhasil diturunkan dengan cukup signifikan.

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Angka Kematian Ibu di Kota Tegal tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.21 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Tegal Tahun 2015 – 2019**

No.	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kematian ibu melahirkan (jiwa)	6	3	2	1	3
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	4.374	4.297	4.352	4.197	4.214
3.	<b>Angka Kematian Ibu (per 1.000 KH)</b>	<b>137,17</b>	<b>69,82</b>	<b>47,39</b>	<b>23,82</b>	<b>71,20</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2019

Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Tahun 2019 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018. Terdapat 3 kasus kematian ibu sepanjang tahun 2019 sehingga Angka kematian Ibu menjadi 71,20 per 1.000 KH.

5. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting

Prevalensi balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di Kota Tegal, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan pengadaan program penanganan masalah gizi buruk di Kota Tegal. Berikut ini data prevalensi balita gizi buruk di Kota Tegal kurun tahun 2015-2019:

**Tabel 2.22 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Tegal Tahun 2015-2019**

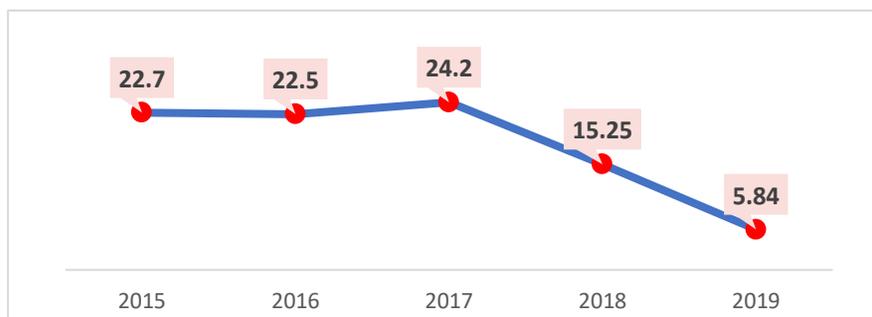
No.	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur (anak)	312	204	229	81	57
2.	Jumlah Balita yang Ditimbang (anak)	12.378	13.014	14.115	11.827	11.800
3.	<b>Prevalensi balita gizi buruk (BB/ umur) (%)</b>	<b>1,38</b>	<b>1,45</b>	<b>1,62</b>	<b>0,68</b>	<b>0,49</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2019

Prevalensi gizi buruk berdasarkan berat badan per umur, di Kota Tegal terus mengalami penurunan. Berdasarkan data surveillans/ data rutin pembangunan. Jumlah penderita gizi buruk di Tahun 2015 sebanyak 312 turun menjadi 57 atau 0,49 % di Tahun 2019. Peningkatan kinerja untuk menurunkan prevalensi gizi buruk berhasil mencapai harapan karena berjalannya program perbaikan gizi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat khususnya di posyandu, meningkatnya kunjungan balita terstandar dan layanan intervensi untuk gizi masyarakat kurang maupun gizi buruk di unit layanan kesehatan maupun masyarakat.

Sedangkan Angka Balita Stunting di Kota Tegal mengalami penurunan, ditunjukkan oleh grafik berikut:

**Gambar 2.16 Angka Balita Stunting di Kota Tegal Tahun 2015-2019**



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2019

Berdasarkan data timbang ukur yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal, selama kurun tahun 2015-2019, angka balita stunting Kota Tegal berhasil diturunkan dari 22,7% pada tahun 2015 menjadi 5,84% di tahun 2019.

### C. Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

**Tabel 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tegal Tahun 2015-2019**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	9.726	N/A	10.215	9.806	10.682
2.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	120.665*	122.042	197.884	123.568	132.318
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,06 % *	N/A	8,19	7,94	8,07
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	65,17%*	58,12	66,33	65,24	69,28

**Sumber:** Badan Pusat Statistik, 2019

Jumlah penduduk angkatan kerja sejak 2015 hingga 2019 bertambah 11.653 orang. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kota Tegal pada Tahun 2019 justru mengalami peningkatan menjadi 8,07% dari Tahun 2018 sebesar 7,94%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja, dan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Selama 2015 hingga 2019, TPAK Kota Tegal tidak banyak berubah, bahkan cenderung meningkat. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

#### D. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenang serta sejahtera semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

**Tabel 2.24 Skor Pola Pangan Harapan dan Penguatan Cadangan Pangan Kota Tegal Tahun 2015 – 2019**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	87,00	90,00	85,00	86,15	89,30
2.	Penguatan Cadangan Pangan (%)	83,00	85,00	83,00	84,00	84,00

*Sumber : DKPPP, Tahun 2019*

Pada tabel di atas, terlihat skor pola pangan harapan pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2018. Keragaman konsumsi pangan masyarakat dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH), antara tahun 2015 dan tahun 2019 tidak banyak berbeda. Namun pada tahun 2016 sempat mencapai skor 90,00% karena Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Tegal sebagian mulai

memahami akan pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pada tahun 2017 mengalami penurunan skor hingga 85%. Hal ini karena terjadi perubahan standarisasi WHO. Perubahan standar tersebut antara lain mencakup standar Angka Kecukupan Energi (AKE) berubah dari 2000 kkal/kapita/hari menjadi 2150 kkal/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein (AKP) berubah dari 52 gr/kapita/hari menjadi 57 gr/kapita/hari.

Penguatan cadangan pangan juga menunjukkan trend meningkat, kecuali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan standarisasi AKE dan AKP di tingkat *ketersediaan* mengalami peningkatan. AKE meningkat dari 2200 kkal/kapita/hari menjadi 2400 kkal/kapita/hari, sedang AKP meningkat dari 60 gr/kapita/hari menjadi 65 gr/kapita/hari.

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya.

#### A. Budaya

Pembangunan kebudayaan di Kota Tegal ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Kota Tegal seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebudayaan juga akan menjadi potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Kebudayaan juga menjadi media diplomasi yang akan mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa dalam pergaulan internasional, karena memiliki kekuatan citra positif bangsa yang berperadaban. Bukti dari kekayaan budaya tersebut adalah Kota Tegal memiliki keragaman budaya yang berciri khas budaya pesisir, baik budaya *tangible* (kasat mata) maupun *intangible* (tidak kasat mata).

#### B. Olahraga

Pembinaan dibidang olahraga dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat kota yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pembangunan di bidang keolahragaan selama tahun 2013-2017 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tegal yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Urusan pendidikan sendiri sangat erat kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan ke-1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, Tujuan ke-4 Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, dan Tujuan ke-8 Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Untuk mewujudkan peningkatan SDM yang berkualitas di Kota Tegal, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS). Capaian Indikator di bidang Pendidikan secara umum mengalami kenaikan dari target RPJMD yang telah ditetapkan khususnya dengan menurunnya angka putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga semakin meningkat. Gambaran capaian pembangunan di Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

##### 1. Pemerataan Akses Layanan Pendidikan

###### a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan PAUD, SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.25 Capaian APK dan APM Kota Tegal Tahun 2015 – 2019**

INDIKATOR		2015	2016	2017	2018	2019
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	69,78	57,88	58,76	67,72	88,42
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	100,89	102,56	103,37	103,54	103,14
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	99,75	112,94	107,10	110,74	107,81
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,95	93,20	93,83	94,34	93,81
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	83,59	93,58	88,54	93,80	81,05

**Sumber :** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Capaian APK jenjang PAUD secara agregat dari tahun 2015-2019 terjadi kenaikan sebesar 5,26. Pada tahun 2019 APK PAUD meningkat cukup signifikan dengan capaian 88,42 atau naik 15,75 dari capaian tahun 2015 pada angka 69,78. Realisasi capaian tahun 2019 untuk APK dan APM jenjang SD maupun jenjang SMP mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2018. Capaian dari tahun 2015-2019 berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami kenaikan rata-rata 0,96 untuk APK SD Sederajat. APM

SMP/MTs, sedangkan APK SMP/MTs cenderung turun rata-rata 0,065%. Hal tersebut disebabkan (1) dengan adanya sistem zonasi berpengaruh pada penurunan jumlah calon peserta didik baru; (2) persebaran satuan pendidikan yang belum merata, banyaknya mutasi siswa keluar Kota Tegal; (3) masih adanya siswa putus sekolah, (4) adanya Anak usia sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) karena berkebutuhan khusus atau alasan membantu orang tua bekerja; (5) masih adanya siswa dengan rentang usia diluar rentang usia sesuai PMDikbud tentang PPDB sehingga mempengaruhi capaian APM SMP/ MTs.

b. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka putus sekolah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan. Secara agregat dari tahun 2015-2019 terjadi penurunan APtS SD/MI hingga 17,92% dan APtS SMP/MTs turun 10,20%, hal ini di karenakan adanya komitmen dalam pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah dengan program pemberian beasiswa untuk siswa miskin/tidak mampu dari APBD Kota dan APBN melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta program pemberian BOS dari Pemerintah Pusat, pendampingan dana BOS dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.26 Angka Putus Sekolah (APS) Kota Tegal Tahun 2015-2019**

INDIKATOR		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,24	0,16	0,16	0,07	0,08
2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,33	0,29	0,27	0,11	0,14

**Sumber :** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Selain itu terdapat pula program pendampingan anak rentan putus sekolah “ASELA” Ayo Sekolah Lagi melalui Kegiatan Fasilitasi Advokasi Pendidikan Dasar. Para siswa di *assessment* dan dianalisa alasan mendasar yang menyebabkan rentan putus sekolah (selama lebih 1 bulan tidak masuk sekolah). Hasil *assessment* tersebut dengan pendekatan kepada orang tua dan sekolah dilakukan tindak lanjut pengentasan anak rentan putus sekolah. Tahun 2019 telah berhasil melakukan pendampingan atau *assessment* bagi 140 siswa rentan putus sekolah bekerjasama dengan psikolog.

c. Angka Melek Huruf (AMH)

Tingkat pendidikan masyarakat Kota Tegal yang semakin meningkat menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-harinya atau disebut angka melek huruf di Kota Tegal dari tahun ke tahun semakin meningkat. Capaian Angka Melek Huruf di tahun 2018 sebesar 99,96% meningkat menjadi sebesar 99,98% pada tahun 2019.

2. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 100%, namun nilai ujian sekolah 2019 terjadi penurunan nilai sebesar 0,07. Kebijakan peningkatan bobot soal ujian yang diterapkan di tahun 2019 menyebabkan nilai nilai ujian sekolah siswa SD/MI dan Ujian Nasional siswa SMP/MTs pun turun.

Di tahun 2019 untuk jenjang SMP/MTs mampu mempertahankan capaian tahun 2018 lulus 100%. Kecenderungan penurunan nilai ujian juga terjadi di jenjang ini, secara agregat selama 5 (lima) tahun turun 0,21. Adapun perkembangan dari tahun 2014-2019 untuk jenjang SD naik dari 99,44% di tahun 2014 menjadi

100% di tahun 2015,2016,2017 dan 2019 sedangkan di tahun 2018 menjadi 99,98%. Pada jenjang SMP/MTs, sama capaiannya dengan jenjang SD/MI pada tahun 2015-2016 dan 2018-2019 mencapai 100%, dan 2017 sebesar 99,88%.

**Tabel 2.27**  
**Perbandingan Angka Kelulusan dan Nilai Ujian Tahun 2015-2019**

Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>SD/ MI</b>					
a	Tingkat Kelulusan	100	100	100	99,98	100
b	Nilai Ujian Sekolah	7,012	7,071	7,091	6,23	6,16
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
a	Tingkat Kelulusan	100	100	99,88	100	100
b	Nilai Ujian Sekolah	7,08	7,25	8,26	5,69	5,84

Kelayakan program dan satuan pendidikan ditentukan dengan akreditasi dalam upaya penjaminan mutu layanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk jenjang SD satuan pendidikan yang berakreditasi A ada 37 SD negeri dan swasta, sedangkan pada jenjang SMP/MTs yang telah berakreditasi 35 satuan pendidikan dengan akreditasi A sebanyak 18 atau 51%.

**Tabel 2.28**  
**Daftar SD dan SMP/MTS Berakreditasi**

No.	Nama Satuan Pendidikan	Masa Akreditasi	Keterangan
	<b>Sekolah Dasar</b>		
1.	SD Kejambon 1	12 Desember 2008-19 Agustus 2014	A
2.	SD Pekauman 7	11 oktober 2012-30 Juni 2017	A
3.	SD Kejambon 2	22 November 2012-31 Desember 2015	A
4.	SD Kejambon 3	12 Januari 2009 - 12 Januari 2015	A
5.	SD Tegalsari 3	12 Desember 2008 - 12 Desember 2013	A
6.	SD Tegalsari 1	11 November 2009 - 30 Juni 2015	A
7.	SD Kejambon 6	09 November 2010 - 09 November 2015	A
8.	SD Kejambon 7	24 Oktober 2012 - 24 Oktober 2017	A
9.	SD Kejambon 8	09 November 2010 - 09 November 2015	A
10.	SD Mangkukusuman 1	24 Oktober 2012 - 24 Oktober 2017	A
11.	SD Mangkukusuman 2	27 Oktober 2011 - 27 Oktober 2016	A
12.	SD Al Irsyad	09 November 2010 - 09 November 2015	A
13.	SD Ihsaniyah Gajahmada	09 November 2010 - 09 November 2015	A
14.	SD Mangkukusuman 5	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2017	A
15.	SD Mangkukusuman 7	12 Desember 2008 - 12 Desember 2013	A
16.	SD Mangkukusuman 8	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2017	A
17.	SD Mangkukusuman 9	27 Oktober 2011 - 27 Oktober 2016	A
18.	SD Ma'mur Ni'mah	27 November 2011 - 27 November 2016	A
19.	SD Mintaragen 2	02 Juni 2014 - 02 Juni 2019	A
20.	SD THHK	05 Maret 2015 - 05 Maret 2020	A
21.	SD Putra Wacana	14 Februari 2010 - 14 Februari 2015	A
22.	SD Pius	21 November 2012 - 21 November 2017	A
23.	SD Krandon 1	21 November 2012 - 21 November 2017	A
24.	SD Krandon 3	21 November 2007 - 21 November 2012	A
25.	SD Krandon 4	27 Oktober 2011 - 26 Oktober 2016	A
26.	SD Mintaragen 9	09 November 2010 - 09 November 2015	A
27.	SD Margadana 3	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019	A
28.	SD Bandung 1	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2017	A
29.	SD Bandung 3	11 Desember 2009 - 11 November 2009	A
30.	SD Panggung 13	11 Oktober 2012 - 01 Juli 2017	A
31.	SD Debong Tengah 2	21 November 2012 - 21 November 2017	A
32.	SD Randugunting 1	21 November 2012 - 21 November 2017	A

No.	Nama Satuan Pendidikan	Masa Akreditasi	Keterangan
33.	SD Randugunting 3	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2018	A
34.	SD Randugunting 6	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019	A
35.	SD Tunon 2	30 Agustus 2011 - 30 Agustus 2011	A
36.	SD Panggung 7	12 Desember 2008 - 20 Maret 2015	A
37.	SDIT BIAS Assalam	01 Agustus 2012 - 02 Agustus 2017	A
<b>SMP/ MTs</b>			
1.	SMP Negeri 1	11 November 2009 - 19 September 2014	A
2.	SMP Negeri 10	17 Desember 2005 - 17 Desember 2009	A
3.	SMP Negeri 11	18 Februari 2014 - 18 Februari 2018	
4.	SMP Negeri 12		
5.	SMP Negeri 13	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2017	B
6.	SMP Negeri 14	11 Januari 2009 - 11 Juni 2015	A
7.	SMP Negeri 15	18 Februari 2014 - 18 Februari 2018	A
8.	SMP Negeri 17		
9.	SMP Negeri 18	11 November 2009 - 11 November 2014	A
10.	SMP Negeri 19		
11.	SMP Negeri 2	17 Desember 2005 - 17 Desember 2009	A
12.	SMP Negeri 3	11 November 2009 - 11 November 2014	A
13.	SMP Negeri 4	12 Desember 2008 - 12 Desember 2012	A
14.	SMP Negeri 5	11 November 2009 - 11 November 2015	B
15.	SMP Negeri 6	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019	A
16.	SMP Negeri 7	11 November 2009 - 11 November 2015	A
17.	SMP Negeri 8	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2017	B
18.	SMP Negeri 9	11 November 2009 - 30 Juni 2015	A
19.	SMP Al Khairiyah	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019	B
20.	SMP Al Irsyad	11 November 2009 - 11 November 2014	A
21.	SMP Atmaja Wacana	11 November 2009 - 11 November 2014	A
22.	SMP Bhakti Praja	09 November 2010 - 09 November 2015	B
23.	SMP IC Bias Assalam		
24.	SMP Ihsaniyah	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019	A
25.	SMP Maarif NU	28 Desember 2006 - 09 November 2010	B
26.	SMP Muhammadiyah 1	14 Agustus 2009 - 14 September 2014	A
27.	SMP Muhammadiyah 2	09 November 2010 - 09 November 2015	A
28.	SMP Muhammadiyah 3	12 Desember 2008 - 02 Februari 2014	B
29.	SMP Pius	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019	A
30.	SMP Purnama	09 November 2010 - 22 Januari 2015	B
31.	MTs Negeri Margadana		
32.	MTs Assalafiyah		
33.	MTs Mambaul Ulum		
34.	MTs Model Ihsaniyah		
35.	MTs Raudhatul Ulum		

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Tegal belum dilaksanakan dengan maksimal karena kendala sarana prasarana inklusi yang belum memadai, belum ada tenaga pendidik profesional inklusi dan metode pembelajaran inklusi yang intensif.

**Tabel 2.29**

**Daftar Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Penyelenggara Inklusi**

No.	Nama Sekolah	Alamat
1.	SD Negeri Bandung 3	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 87
2.	SD Negeri Slerok 2	Jl. Wekudoro No. 124
3.	SD Negeri Kalinyamat Kulon 3	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 121
4.	SMP Negeri 9	Jl. Martoloyo No. 62

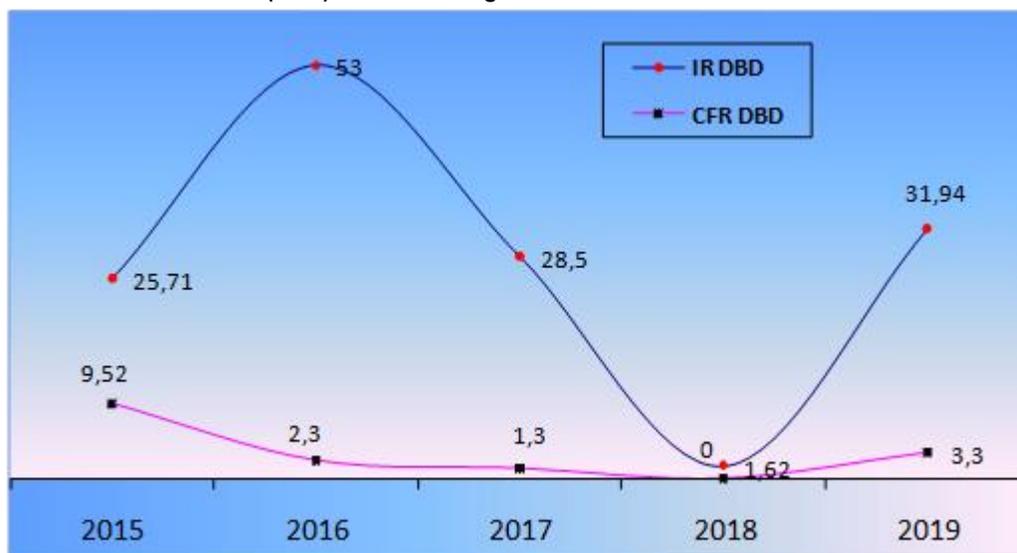
## B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat agar sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional maka Pemerintah Kota Tegal berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau dari penyediaan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan, khususnya perhatian terhadap masyarakat miskin.

Pemberdayaan masyarakat dalam berkontribusi langsung pada urusan kesehatan sangat berperan penting. Peran masyarakat tersebut dapat dilihat dari peningkatan prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tahun 2019 mencapai 91,35 persen lebih meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 89,23 persen, menurunnya prevalensi balita gizi buruk turun dari 0,51 persen di tahun 2018 menjadi 0,49 persen. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi asupan yang bergizi meningkat dari 59,01 persen menjadi 67,28 persen, serta kondisi rumah sehat mencapai 85,8 persen.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD telah dilaksanakan 100 persen namun Angka kesakitan dan Angka Kematian DBD masih meningkat dari tahun sebelumnya. Angka kesakitan DBD di tahun 2019 meningkat tajam menjadi 31,94 per 100.000 penduduk dari capaian tahun 2018 sebesar 2,1 per 100.000 penduduk. Demikian pula dengan Angka Kematian DBD dari 0 di tahun 2018 menjadi 3,3 di tahun 2019 sehingga perlu perhatian untuk pengendalian secara komprehensif.

**Gambar 2.17 Grafik Tren Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD Kota Tegal Tahun 2015-2019**



Peningkatan penemuan baru TB Paru Positif (CDR) juga masih cukup signifikan walaupun menurun 4,42 persen menjadi 81,01 di tahun 2019, dengan prevalensi 97 per 10.000 penduduk. Penderita Kusta yang ditemukan dengan prevalensi 0,84 per 10.000 penduduk. Angka ini turun hampir 73 persen dari capaian tahun sebelumnya 1,16 per 10.000 penduduk, dengan angka kesembuhan (RTF) 88,35.

Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tahun 2019 untuk kunjungan ibu hamil K4 sebesar 96,2, ibu nifas masih sama pada capaian 99,98 persen seperti tahun 2018, kunjungan balita 97,82 persen. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup meningkat menjadi 8,13 dibanding tahun 2018 sebesar 7,62. Angka kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup menurun signifikan menjadi sebesar 3,08 dibanding tahun 2018 yang mencapai 8,82.

Pelayanan Rumah Sakit pada BLUD RSUD Kardinah sudah sangat baik dengan skor indeks kepuasan masyarakat mencapai 82,67 dan Zero Complain hanya 0,019. Tingkat hunian rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) cenderung menurun sampai 59 persen di tahun 2019 dengan rata-rata lama pasien dirawat (Average Length of Stay) 3,94 hari dan angka perputaran tempat tidur 47,40 dan *Net Death Rate* atau angka kematian dibawah 48 setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita yang keluar baik hidup ataupun meninggal mencapai 28,01.

Selama pandemi COVID-19, hingga 11 Juni 2020 terjadi 4 kasus positif dari warga Kota Tegal, yaitu yang masih dirawat 1 orang, 2 sembuh, dan 1 meninggal. Sedangkan yang bukan warga Kota Tegal yang dirawat pada rumah sakit rujukan di Kota Tegal sebanyak 7 kasus positif, yaitu 2 dirawat, 2 sembuh dan 3 meninggal. Adapun pasien PDP di Kota Tegal sebanyak 47 PDP dengan rincian 2 orang dirawat, 33 orang pulang, dan 11 orang meninggal. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tegal sehingga saat ini menjadi daerah zona hijau antara lain pembatasan akses masuk ke Kota Tegal (*local lockdown*), pemeriksaan suhu badan dengan *thermogun* digital, dan penggunaan masker/ *faceshield*, penyemprotan disinfektan di ruas-ruas jalan, tempat ibadah, pasar, pertokoan, mal, alun-alun, instansi pemerintah, dan penyediaan tempat cuci tangan serta sosialisasi secara intensif kepada masyarakat.

**Gambar 2.18 Update Informasi data kasus COVID-19 di Kota Tegal**



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2020

### C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur perkotaan yang baik akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih meningkat. Mobilisasi masyarakat dalam kegiatan perekonomian akan terhambat apabila infrastruktur jalan, jembatan dan drainase mengalami penurunan kualitas maupun ketersediaannya.

Panjang jalan di Kota Tegal adalah 231,435 km, terdiri dari 533 ruas jalan yang terbagi menjadi 2 (dua) kelas jalan, yaitu jalan nasional dan jalan kota. Panjang jalan nasional selama kurun tahun 2015-2019 relatif tetap yaitu 12.905 meter. Sedangkan panjang jalan Kota Tegal mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 1.585 meter dari 229.850 meter tahun 2015 meter menjadi 231.435 meter pada tahun 2016 . Perkembangan panjang jalan berdasarkan status jalan di Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.30 Panjang Jalan Berdasarkan Status Jalan di Kota Tegal Tahun 2015- 2019**

No	TAHUN	STATUS JALAN (m)	
		Nasional	Kota
1	2015	12.905	229.850
2	2016	12.905	231.435
3	2017	12.905	231.435
4	2018	12.905	231.435
5	2019	12.905	231.435

Sumber: DPUPR, tahun 2019

Ruas jalan yang merupakan jalan nasional di Kota Tegal adalah sepanjang jalan pantura yaitu Jalan Martoloyo, Jalan Yos Sudarso, Jalan MT. Haryono, Jalan Gajah Mada, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Kol Sugiono, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo. Selain itu juga ada jalan yang berada di tengah kota yaitu Jalan Sudirman, Jalan AR. Hakim, dan Jalan Sultan Agung.

Kondisi jalan kota di Kota Tegal lebih didominasi oleh jalan kota dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang), namun demikian terjadi perubahan yang fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2015 dari panjang jalan 229.850 m, 94,81% merupakan jalan kota dalam kondisi mantap dan 11.940 m atau 5,19% kondisi jalan dalam kondisi tidak mantap. Begitu juga pada tahun 2019, kondisi jalan mantap adalah sebesar 88,45% menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar 94,73%. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan lalu lintas yang sangat pesat menyebabkan penurunan tingkat pelayanan terhadap pengguna jalan. Peningkatan Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) menyebabkan jalan melampaui kapasitasnya sehingga menimbulkan lebih cepat habisnya masa layanan jalan akibat jumlah lintasan rencana telah terlampaui. Kondisi ini secara otomatis akan memperpendek umur layanan jalan. Begitu pula dengan masih banyaknya genangan di jalan akibat kurang optimalnya fungsi drainase dan sering terjadinya genangan dan banjir menyebabkan kemantapan jalan menjadi prioritas dalam tingkat layanan jalan.

**Tabel 2.31 Kondisi Jalan Kota Tahun 2015 – 2019**

Tahun	Panjang Jalan (m)	Kondisi Jalan (m)			
		Mantap	%	Tidak Mantap	%
2015	229.850	217.910	94.81	11.940	5.19
2016	231.435	220.150	95.12	11.285	4.88
2017	231.435	221.460	95.69	9.975	4.31
2018	231.435	219.238	94.73	12.197	5.27
2019	231.435	204.704	88,45	26.731	11,55

Sumber: DPUPR, tahun 2019

Konstruksi jalan yang ada di Kota Tegal dari ruas jalan kota yang telah tersedia pada tahun 2019 konstruksi permukaan jalan aspal sebesar 99,49%, sementara 0,51% sisanya masih berupa permukaan tanah. Ruas jalan yang masih berupa permukaan tanah tersebut termasuk dalam Status Jalan Kota yang menghubungkan kawasan permukiman yang baru tumbuh dan masih berkembang.

**Tabel 2.32**  
**Kondisi Konstruksi Permukaan Jalan Kota Tegal Tahun 2015- 2019**

Tahun	Panjang Jalan (m)	Konstruksi Permukaan (m)							
		Aspal		Kerikil		Tanah		Lain-lain	
		Panjang	%	Panjang	%	Panjang	%	Panjang	%
2015	229.850	224.456	97,65	0	0	4.117	1,79	1.277	0,56
2016	231.435	229.119	98,99	0	0	2.316	1,01	0	0
2017	231.435	229.119	98,99	0	0	2.316	1,01	0	0
2018	231.435	230.045	99,39	0	0	1.390	0,61	0	0
2019	231.435	230.270	99,49	0	0	1.165	0,51	0	0

Sumber: DPUPR, tahun 2019

Jembatan merupakan bagian penting dari suatu sistem jaringan jalan karena jika tidak berfungsi baik akan mengurangi atau menahan lalu lintas yang mengganggu kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas dan mengganggu perekonomian. Kondisi jembatan hingga saat ini di Kota Tegal dalam kondisi baik. Jumlah jembatan di Kota Tegal terdiri dari 11 unit merupakan jembatan nasional dan 62 unit merupakan jembatan kota dengan kondisi baik. Pada tahun 2016 kondisi jembatan menurun dari kondisi 100% baik menjadi 96,77% dikarenakan adanya kerusakan pada jembatan Blanak namun jembatan tersebut sudah diperbaiki di pertengahan tahun 2016.

**Tabel 2.33 Kondisi Jembatan di Kota Kota Tahun 2014 - 2019**

Tahun	JUMLAH JEMBATAN		Kondisi Jembatan (%)
	Nasional	Kota	
2015	11	62	100
2016	11	62	96,77
2017	11	62	100
2018	11	62	100
2019	11	62	100

Sumber: DPUPR, tahun 2019

**Gambar 2.19 Peta Jaringan Jalan Kota Tegal**



Untuk mencukupi kebutuhan air minum, dilakukan upaya pemenuhan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Penyediaan melalui sistem perpipaan dilakukan oleh PDAM sedangkan non perpipaan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Ketersediaan air baku/sumber air baku yang digunakan PDAM Kota Tegal berasal dari mata air Bumijawa yang dikelola sendiri dan mata air Kaligiri yang dikelola oleh PDAB Provinsi Jawa Tengah, serta SPAM Bregas dengan debit air baku yang tersedia sebesar 386 lt/detik dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal.

Hingga tahun 2019 PDAM telah melayani kebutuhan air minum kepada sekitar 188.456 jiwa penduduk Kota Tegal. Layanan ini diberikan melalui 27.611 SR (sambungan rumah) dan 74 unit kran umum. Selain PDAM, Dinas PUPR juga memberikan layanan akses langsung air minum non-perpipaan kepada sekitar 13.620 jiwa penduduk melalui 20 unit sumur dalam yang dibangun mulai tahun 2010 hingga 2014. Setelah tahun 2014, upaya pemenuhan kebutuhan air minum perpipaan yang dilakukan Dinas PUPR berupa pembangunan jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi bagi (JDB) yang dimanfaatkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan air minum dari PDAM. Berikut data capaian cakupan pelayanan air minum baik perpipaan maupun non perpipaan dari tahun 2014–2019.

**Tabel 2.34**  
**Cakupan Layanan Air Minum Tahun 2015 – 2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk terlayani air minum non perpipaan / Sumur Dalam DPUPR (jiwa)	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
Penduduk terlayani air minum perpipaan dari PDAM (jiwa)	109.388	142.952	161.908	173.066	188.456
<b>Cakupan Layanan (%)</b>	<b>44,45</b>	<b>55,90</b>	<b>62,29</b>	<b>66,25</b>	<b>70,56</b>

Sumber: DPUPR, tahun 2019

Cakupan pelayanan Air Minum Kota Tegal pada tahun 2019 mencapai 70,56% terdiri dari sumur bor jaringan non perpipaan dan melalui SPAM BREGAS yaitu untuk jaringan perpipaan. Kota Tegal pada tahun 2019 telah membangun Jaringan Distribusi Utama (JDU) sepanjang 2.490 m. Jumlah penduduk yang mendapatkan akses layanan air minum melalui Sumur Bor dan PDAM sekitar sebesar 188.456 jiwa atau 70,56% dari seluruh penduduk Kota Tegal. Layanan akses air minum tersebut disediakan melalui 30.176 sambungan rumah (SR) dan 74 kran umum yang tersebar di wilayah Kota Tegal.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan layak untuk hidup dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan bahwa kondisi daya dukung air defisit, dimana pada tahun 2017 (DA) kebutuhan total air Kota Tegal untuk keperluan penduduk dan sawah sebesar 31.720.939 m<sup>3</sup>/th. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa (DA) kebutuhan air tahun 2017 (31.720.939 m<sup>3</sup>/th) lebih besar dari (SA) ketersediaan air (25.915.264,6 m<sup>3</sup>/tahun) yang ada di Kota Tegal sehingga kebutuhan air di Kota Tegal defisit. Untuk mempertahankan kontinuitas ketersediaan air maka pemerintah Kota Tegal perlu membuat program dan kegiatan yang mendukung kontinuitas ketersediaan air seperti membangun RTH, perlindungan daerah sempadan mata air, pemanenan air hujan, pembuatan sumur resapan dan biopori.

Upaya peningkatan sanitasi lingkungan yang sehat dilaksanakan melalui upaya pembangunan sanitasi lingkungan yang berbasis masyarakat berupa pembangunan MCK Plus serta pembangunan septik komunal. Capaian layanan sanitasi (air limbah) pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebesar 276.734 jiwa, penduduk yang terlayani sebesar 215.742 jiwa atau sebesar 77,96% meningkat menjadi 84,94% pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk yang terlayani sebesar 243.236 jiwa dari jumlah total penduduk keseluruhan sebesar 286.376 jiwa. Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Tegal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.35**  
**Cakupan Pelayanan Sanitasi di Kota Tegal Tahun 2015 -2019**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk	276.734	280.117	281.809	284.919	286.376
2.	Jumlah Penduduk Terlayani	215.742	220.620	223.334	239.560	243.236
	<b>Cakupan Layanan Sanitasi (%)</b>	<b>77,96</b>	<b>78,76</b>	<b>79,25</b>	<b>84,08</b>	<b>84,94</b>

Sumber : Dokumen LKPJ – AMJ Walikota Tegal Tahun 2014-2019

Pembangunan di sektor drainase ditujukan untuk meningkatkan kualitas prasarana dan sarana drainase, pengendali rob, dan pengurangan genangan. Agar penanganan genangan dan rob berhasil, diperlukan sistem jaringan drainase yang terintegrasi, baik skala kawasan maupun skala kota. Selain itu juga perlu dilakukan normalisasi dan pemeliharaan saluran secara berkala. Dari sisi capaian persentase, diketahui 2018 sebesar 86,20%. Namun hal ini bukanlah kondisi yang menunjukkan buruknya sistem drainase kota yang penyediaannya sudah meningkat menjadi 71,55% pada 2019. Berkurangnya persentase luasan kawasan bebas banjir lebih disebabkan adanya luapan sungai dari Kabupaten Tegal dan Brebes yang mengakibatkan jebolnya tanggul sungai sehingga Kota Tegal mendapatkan dampak terjadinya banjir yang cukup tinggi. Sementara pembangunan kolam retensi yang lokasinya cukup jauh dari tempat terjadinya banjir pada 2018 tidak dapat secara langsung mengatasi banjir. Adapun realisasi capaian sektor drainase adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.36**  
**Realisasi Capaian Sektor Drainase Tahun 2014 – 2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	62,50	63,10	63,15	68,89	71,85
2.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	68,80	69,75	69,80	70,21	71,55
3.	Prosentase wilayah bebas genangan banjir	97,38	97,40	97,47	86,20	87,17

Sumber : DPUPR, tahun 2019

Drainase dalam keadaan baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat meningkat dari 68,89 persen di tahun 2018 menjadi 71,55 persen. Ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali dalam setahun meningkat 1,34 persen dari capaian tahun 2018 menjadi 71,55 persen. Terselainya pembangunan kolam

retensi Tegalsari pada tahun 2019 yang pembiayaannya didukung Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diharapkan kedepan dapat mengurangi genangan di wilayah Kelurahan Tegalsari, Kraton dan sekitarnya. Sistem jaringan drainase tersebut mampu meningkatkan persentase wilayah bebas banjir menjadi 98,17 persen.

Sampai dengan tahun 2019 drainase utama kondisi baik sebanyak 8.665 m atau 26,3%, kurang baik 5.504 m atau 16,7%, dan rusak 18.710 m atau 56,9%. Sementara untuk kondisi saluran sekunder baik sepanjang 34.195 m atau 32,95 %, kurang baik 26.440,4 m atau 25,48%, dan rusak 43.131 m atau 41,56%. Kondisi saluran drainase tersier baik 40.444,56 m atau 58,4%, kurang baik 920 m atau 1,32%, rusak 27.873,0 m (40,26%). Untuk drainase lingkungan sepanjang 27.728,30 m (96,19%) kondisi baik dan 1.097,00 m (3,8%) kondisi kurang baik. Perkembangan kondisi saluran drainase selengkapnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.37**  
**Kondisi Saluran di Kota Tegal Tahun 2015 – 2019**

Nama Saluran	Kondisi (meter)														
	2015			2016			2017			2018			2019		
	Baik	Kurang Baik	Rusak	Baik	Kurang Baik	Rusak	Baik	Kurang Baik	Rusak	Baik	Kurang Baik	Rusak	Baik	Kurang Baik	Rusak
Saluran Utama	7.865,00	7.113,00	18.710,00	8.665,00	5.504,00	18.710,00	8.665,00	5.504,00	18.710,00	8.665,00	5.504,00	18.710,00	8.665,00	5.504,00	18.710,00
Saluran Sekunder	39.629,45	33.072,40	54.407,00	31.370,00	25.456,00	45.641,00	32.235,60	26.440,40	45.091,00	34.195,00	26.440,40	43.131,00	43.690,31	26.440,40	33.635,69
Saluran Tersier	22.876,60	920,00	24.755,60	28.143,00	1.575,00	33.238,00	28.916,25	920,00	39.401,30	30.949,25	920,00	37.368,30	30.949,25	920	37.368,30
Drainase Lingkungan	26.944,30	1.097,00	0,00	26.944,00	1.097,00	0,00	26.944,30	1.097,00	0,00	27.728,30	1.097,00	0,00	27.728,30	1.097,00	0

Sumber : DPUPR, tahun 2019

Kondisi Kota Tegal terletak di daerah pesisir laut Jawa dengan Topografi Kota Tegal yang relatif datar sekitar  $\pm 3$  m dpa maka sangat rawan terhadap ancaman genangan/banjir dan rob. Selain itu Kota Tegal juga menjadi daerah tangkapan air dari wilayah Kabupaten Tegal. Kota Tegal sangat rawan terjadinya genangan/banjir yang disebabkan oleh air kiriman. Pada akhir tahun 2019 luas wilayah genangan/banjir dan Rob di Kota Tegal mencapai 519,58 Ha (13,09%). Sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Kota Tegal telah melakukan berbagai upaya untuk terus mengatasi banjir dengan telah membangun kolam retensi di 2 lokasi yaitu kolam retensi Tegalsari dan Kolam Retensi Mintaragen, serta Polder Bayeman di Kelurahan Kaligangsa disamping juga melakukan normalisasi saluran, perbaikan saluran dan pembangunan saluran.

Tahun 2019 genangan banjir seluas 519,58 Ha, kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun 2015 dimana luas genangan banjir 551,16 Ha. Sampai dengan akhir tahun 2019 Kota Tegal berhasil mengurangi luas genangan banjir seluas 28 Ha. Berikut perkembangan luas genangan banjir di Kota Tegal dari tahun 2015 – 2019.

**Tabel 2.38 Luas Wilayah Tergenang Kota Tegal Tahun 2015 – 2019**

Tahun	Luas Genangan banjir	
	Ha	%
2015	551,16	13,89
2016	550,36	13,87
2017	547,58	13,80
2018	547,58	13,80
2019	519,58	13,09

Sumber: DPUPR, tahun 2019

Rasio ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik belum sesuai harapan. Berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi dan Potensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tegal Tahun 2019, diketahui bahwa terdapat RTH publik seluas 2.618.902,82 meter persegi atau 261,89 hektar. Di samping itu, juga tercatat adanya potensi RTH publik seluas 180,43 hektar. Dengan demikian, dari 3.968 hektar luas wilayah Kota Tegal, baru tersedia 442,32 hektar atau 11,15% lahan ruang terbuka hijau.

#### **D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani tahun 2019 sebanyak 780 unit melalui APBD Kota Tegal sebanyak 308 unit, DAK sebanyak 174 unit dan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 298 unit, sehingga pada akhir tahun masih tersisa sejumlah 3.752 unit yang terdiri dari 1.709 unit data PBDT, 1.680 unit data SK Wali Kota dan 363 unit rumah data usulan RTLH baru.

Capaian ketersediaan rumah layak huni mencapai 93,98% karena masih banyak RTLH yang belum mendapatkan program bantuan RTLH yang disebabkan status tanahnya. Rumah-rumah tersebut berlokasi di tempat ilegal seperti bantaran sungai, tanah PT. KAI maupun tanah pelabuhan.

Dalam mendukung program pengembangan perumahan, Pemerintah Kota Tegal mendapat bantuan dari Kementerian PUPR melakukan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang berlokasi di Kelurahan Tegalsari, program BSPS PB (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya – Pembangunan Baru) dengan melakukan Pembangunan Rumah Baru sejumlah 63 unit yang tersebar di beberapa kelurahan serta

Pembangunan Rumah Susun eksperimen Hemat energi yang merupakan bantuan/hibah dari Hiroshima University Japan dengan Puslitbang Teknik Kementrian PUPR dan ITB Bandung.

Tahun 2019 dilaksanakan kegiatan Penyerahan PSU sebanyak 5 lokasi yaitu Perumahan Tegal Residen Kelurahan Debong Kulon, Hunian Dozen Kelurahan Mintaragen, Graha Bahari Kelurahan Pesurungan Kidul, Vero Permai Kelurahan Margadana, Dalem Kinasih 1 Kelurahan SumurPanggung.

Upaya meningkatkan kualitas permukiman kumuh, Pemerintah Kota Tegal melakukan program penanganan kawasan kumuh secara kolaborasi dengan melaksanakan perbaikan infrastruktur permukiman dan pelaksanaan rehab Rumah Tidak Layak Huni. Penanganan kawasan kumuh di tahun 2019 adalah seluas 83,68 hektar, salah satunya untuk Kelurahan Debong Lor untuk luasan kumuh sudah mencapai 0 ha sehingga untuk luasan kumuh di Kota Tegal menjadi 39,53 hektar.

**Tabel 2.39**  
**Perkembangan Luas Lokasi Kumuh di Kelurahan se-Kota Tegal**  
**Tahun 2015-2019**

No.	Kelurahan	Luasan Kumuh (Ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Muarareja	15.01	15.01	15.01	9,14	9,14
2.	Kraton	14	14	14	12,50	0,41
3.	Kemandungan	7	7	7	0,82	0,82
4.	Tegalsari	31.43	31.43	31.43	15,40	4,91
5.	Pesurungan Lor	15	15	15	8,21	5,23
6.	Debong Lor	5	5	5	5	0,00
7.	Pesurungan Kidul	12	12	12	12	2,48
8.	Kejambon	23	23	23	12,06	1,17
9.	Mangkukusuman	11	11	11	4,19	0,54
10.	Mintaragen	21.28	21.28	21.28	12,05	9,66
11.	Panggung	36.41	36.41	36.41	31,85	5,18
	<b>TOTAL</b>	<b>191,13</b>	<b>191,13</b>	<b>191,13</b>	<b>123,21</b>	<b>39,53</b>

Sumber : Disperkim Kota Tegal dan KOTAKU, tahun 2019

Penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan kolaborasi dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahun 2019 mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat melalui kegiatan BPM (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat) sebesar Rp 10.500.000.000,- yang dialokasikan untuk 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Mintaragen, Kelurahan Panggung, Kelurahan Pesurungan Lor dan Kelurahan Pesurungan Kidul.

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang terdiri dari pembangunan pagar makam, pengurugan makam, dan pemasangan lampu makam, Pembangunan Pagar Makam Kosambi Kel. Krandon, Pembangunan Makam Cleret Kel. Randugunting, Pembangunan Makam Kerkhof Kel. Tegalsari, Pembangunan Makam Sipacar Kel.Kejambon, Pembangunan Makam Pasir Luhur Kel. Slerok, Pengurugan makam baru Kaligangsa, dan Pemasangan lampu Penerangan Makam Panggung Kel. Panggung.

#### **E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dengan tenteram, tertib, dan teratur apabila ditunjang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjaga.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik.

Perkembangan angka kriminalitas cenderung fluktuatif pada tahun 2019 turun cukup signifikan sebanyak 56 kasus menjadi 134 kasus atau 29,47 persen dari tahun 2018 dengan jumlah kasus 190 dan pada tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 118. Angka tersebut dihitung berdasarkan kasus tindak kriminal yang terjadi dan dilaporkan dalam satu tahun.

Penegakkan Perda dan Perwal dilaksanakan pada kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat dalam bentuk operasi perizinan, penertiban reklame yang melanggar, dan berbagai kegiatan lain yang diperlukan. Banyaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota menyebabkan penegakan terhadap seluruh peraturan tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Pelaksanaan hasil kegiatan dalam bentuk memberi surat teguran, peringatan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang menempatkan dan meninggalkan sarana usaha serta melakukan aktifitasnya pada tempat yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Penyelesaian Pelanggaran K3 di tahun 2019 menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pelayanan terhadap bencana kebakaran di Kota Tegal dari tahun 2017 – 2019 tercapai 100%. Kesiapsiagaan tenaga pemadam kebakaran Kota Tegal dan kerjasama dengan tenaga pemadam kebakaran daerah sekitar untuk saling membantu mengatasi kejadian kebakaran menjadi faktor pendukung tercapainya target tersebut. Kejadian kebakaran dalam daerah Kota Tegal dapat direspon dalam 15 menit atau 75% dari seluruh bencana kebakaran yang ditangani.

#### F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi sasaran penanganan bidang Sosial, sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Tegal meliputi : keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial penyimpangan perilaku, korban bencana dan tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi, dan kemiskinan. Cakupan penanganan PMKS mencapai 94,21 persen meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 90,09 persen. Adapun PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 telah mencapai 92,14 persen, meningkat 2,87 persen dari prosentase capaian tahun 2018 sebesar 89,27 persen. Penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial diberikan jaminan sosial dengan capaian 128,30 persen. Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 terdiri dari penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat (KIS) APBN sebanyak 76.411 jiwa, penerima bantuan pangan lansia terlantar dan penyandang disabilitas berat sebanyak 340 jiwa dan penerima Kartu Jateng Sejahtera bagi penyandang penyakit kronis sebanyak 97 jiwa.

**Tabel 2.40**  
**Penanganan PMKS Tahun 2019**

No	Jenis Penanganan PMKS	Jumlah	Satuan
1	Penanganan PMKS melalui penjangkauan <i>outreach</i>	30	Jiwa
2	Rujukan PMKS ke rumah sakit dan balai rehabsos	29	Jiwa
3	Rujukan Lansia Terlantar ke rumah perlindungan sosial	25	Jiwa
4	Bantuan kepada Lansia dan Penyandang Disabilitas	1.511	Jiwa
5	Rujukan penjangkauan PGOT	4	Jiwa
6	Penerima Alat Bantu Penyandang Disabilitas	12	Jiwa

No	Jenis Penanganan PMKS	Jumlah	Satuan
7	Penanganan Anak Terlantar dalam dan luar Panti	456	Jiwa
8	Penerima Kartu Jateng Sejahtera bagi penyandang penyakit kronis	97	Jiwa
9	Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)	-	Jiwa
10	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) APBN	76.411	Jiwa
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>79.404</b>	<b>Jiwa</b>

Sumber: Dinas Sosial, tahun 2019

Disamping itu diberikan pula program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain dengan cakupan 24,54 persen sebanyak 88.589 jiwa atau 24.318 rumah tangga yang berdasarkan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2018.

Dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat pada keluarga miskin maupun yang terkena PHK dan Dirumahkan. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Tegal memberikan Jaring Pengaman Sosial kepada keluarga dan kelompok masyarakat terdampak secara tepat sasaran.

### 2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait dengan ketenagakerjaan antara lain pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Tegal berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan softskill, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Pelatihan yang diselenggarakan hanya Pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis kewirausahaan. Pelatihan kerja yang dilaksanakan pelatihan Tata Boga dengan peserta 18 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Peningkatan kesempatan kerja dilaksanakan melalui kegiatan Job Fair, pemagangan, dan Bursa Kerja Khusus (BKK). Pada tahun 2019 telah ditempatkan 18 pencari kerja untuk magang di beberapa perusahaan di Kota Tegal, dengan hasil 100 persen peserta magang mendapatkan pekerjaan. Adapun melalui Job Fair, telah terserap 132 orang pencari kerja. Capaian tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 42,62 persen, dan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 39,80 persen, sedangkan pencari kerja yang ditempatkan hanya 25,02 persen.

Hubungan industrial yang kondusif perlu diwujudkan agar kesejahteraan pekerja semakin meningkat melalui beberapa upaya, diantaranya dengan membuka Posko pengaduan perselisihan hubungan industrial yang disampaikan melalui e-mail dan website maupun datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, pencegahan terjadinya mogok kerja di perusahaan dengan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pembinaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tegal, pembinaan kepada pengusaha dan pekerja/buruh agar membentuk dan

memfungsikan sarana hubungan industrial sebagai media dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan. Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 9 kasus. Sedangkan pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 21.274 orang atau 107,9 persen

Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, sehingga diharapkan upah yang diterima pekerja memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan untuk pekerja yang memiliki kerja lebih dari satu tahun diterapkan struktur upah dan skala upah. UMK tahun 2019 sebesar Rp 1.762.000,- meningkat 8 persen dari UMK tahun 2018.

**Tabel 2.41**  
**Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Tegal Tahun 2015-2019**

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angkatan kerja (orang)	119.475	122.042	197.884	123.568	175.318
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,02%	58,12	66,33	65,24	69,38
3	Jumlah orang yang bekerja	108.480	115.157	120.072	113.762	121.636
4	Jumlah Pengangguran	10.995	6.885	10.215	9.806	10.682
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,21%	5,64	8,19	7,94	8,07
6	Pencari Kerja (AK-1 atau Kartu Kuning)					
	- SD	17	15	10	15	15
	- SMP	99	122	60	68	28
	- SMA/SMK	1.514	1.822	1680	1.259	1.482
	- Diploma 1/2/3	220	262	200	190	152
	- Diploma 4/Sarjana/Pascasarjana	166	212	205	249	265
	Jumlah (orang)	2.016	2.567	2.155	1.781	1.982
7	Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	67	54	46	168	129
8	Penempatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	161	13	178	56	75
9	Penempatan Antar Kerja Antar lokal (AKAL)	62	68	17	283	292
10	Upah Minimum Kota (UMK) (Rp)	1.206.000	1.385.000	1.499.500	1.630.500	1.762.000
11	Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (Rp)	1.202.158	1.376.831,27	-	-	-
12	Capaian UMK terhadap KHL	100,32 %	100,59%	-	-	-
13	Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	19	7	18	11	22
14	Jumlah Pekerja yang PHK (orang)	21	27	20	41	87

Dampak pandemi COVID-19 berpengaruh pada perusahaan yang ada di Kota Tegal. Dari 503 Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), 7 perusahaan tutup, melakukan PHK/ Merumahkan Pekerja sebanyak 144 perusahaan, dan 70 perusahaan mengatur hari kerja/shift. Hal tersebut mengakibatkan PHK pada 83 pekerja berKTP Kota Tegal dan 133 pekerja bukan berKTP Kota Tegal, Pekerja yang dirumahkan sebanyak 245 pekerja berKTP Kota Tegal dan 483 pekerja bukan berKTP Kota Tegal, sedangkan pekerja yang berKTP Kota Tegal akan tetapi bekerja di luar kota yang di PHK sebanyak 82 pekerja dan yang dirumahkan sebanyak 133 pekerja.

## **B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Upaya mencapai kesetaraan gender dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi di lingkungan pendidikan pada 2 sekolah dan tingkat kota dengan peserta 100 orang, pelayanan pengaduan, dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 38 kasus dengan rincian 23 kasus kekerasan terhadap anak dan 15 kasus kekerasan terhadap dewasa pada tahun 2019. Pelayanan yang dilaksanakan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Puspa Kota Tegal dalam tahun 2019 meliputi pelayanan pengaduan konseling terhadap korban 15 perempuan dewasa dan 25 anak; pelayanan kesehatan 3 perempuan dewasa dan 17 anak; pelayanan bantuan hukum 15 perempuan dewasa dan 25 anak; pelayanan reintegrasi sosial 15 perempuan dewasa dan 25 anak; serta pelayanan pendampingan 15 perempuan dewasa, dan 25 anak.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tahun 2019 sebanyak 57 kasus, dengan rincian kekerasan fisik 13 perempuan dewasa dan 15 anak; fisik 13 perempuan dewasa dan 5 anak; seksual 7 anak; eksploitasi 1 anak; trafficking 1 perempuan dewasa; lainnya 1 perempuan dewasa. Perkembangan kelembagaan PUG saat ini sudah ada kemajuan kearah kesetaraan dan keadilan gender meskipun tetap harus ditingkatkan. Adapun upaya yang sudah dilaksanakan dengan dibentuknya Tim Pokja PUG Tingkat Kota dan Focal Point di tiap OPD Kota Tegal. Sedangkan Focal Point dibentuk oleh masing-masing OPD guna menunjang kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Sejak tahun 2015 sudah terbentuk Forum Anak aktif dengan rincian tingkat kota 1 Forum Anak, tingkat kecamatan 4 dan tingkat kelurahan 27. Bahkan pada tahun 2016 telah dilaksanakan Pilot Project Kelurahan Layak Anak (KLA) di Kelurahan Panggung dan tahun 2017 di Kelurahan Tegalsari sedangkan tahun 2019 sudah terbentuk 2 Kelurahan Layak Anak, yaitu Kelurahan Panggung dan Tegalsari serta dibentuknya Tim Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak di KelurahanPanggung dan Tegalsari. Adapun upaya lain yang dilaksanakan adalah sosialisasi sekolah ramah anak ke SD dan SMP Negeri maupun swasta dan Kota Layak Anak agar bisa meningkat capaian strata KLA Kota Tegal serta masih perlu ditingkatkan dari kategori strata Madya ke kategori lebih tinggi serta agar tim Focal point seluruh OPD dapat membuat PPRG dan Kepala OPD selaku Tim PUG dapat lebih aktif.

Upaya pemberdayaan perempuan juga digiatkan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) bagi kelompok masyarakat melalui pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan keluarga, yaitu pelatihan jumptan dan glas painting di Kelurahan Randugunting.

## **C. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sumber-sumber pangan pangan yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang maka dilakukan melalui : (1) monitoring dan evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Tegal sehingga petani dapat meningkatkan hasil pertaniannya; (2) Survey Pola PanganHarapan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun untuk mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat dan juga ketersediaan pangan wilayah serta proyeksi konsumsi dan ketersediaanpangan pada tahun yang akan datang; (3) Penyusunan Peta Rawan Pangan untuk mendapatkan informasi dan data situasi pangan dan gizi masyarakat. Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ini dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan,

penentuan intervensi atau tindakan dalam penanganan kerawanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Tegal.

Selain itu dilaksanakan pendataan harga kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menjaga stabilisasi harga komoditi pangan strategis masyarakat antara lain beras, jagung, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, cabe, bawang merah, daging sapi, daging ayam dan telur. Penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan dalam rangka meningkatkan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Kelurahan Slerok, Kelurahan Tunon, Kelurahan Kuturen, Kelurahan Pesurungan Kidul dan Kelurahan Margadana dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan juga dilakukan dalam rangka peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan serta mutu pangan yang beredar di masyarakat. DKP3 Kota Tegal bersama Tim SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) mengadakan sidak keamanan pangan menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Pasar Pagi maupun di pasar-pasar kecamatan, serta melakukan uji petik terhadap sampel makanan yang disinyalir mengandung zat berbahaya. Dalam rangka meningkatkan kualitas produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dengan memberikan fasilitasi Sertifikat Prima 3 sehingga memiliki nilai jual dan daya saing di pasaran, serta memberikan jaminan mutu pangan pada konsumen melalui Tim OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

#### D. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Kewenangan pada urusan ini meliputi (1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dalam Daerah kabupaten/kota, Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota, Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, Penerbitan izin membuka tanah, Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan lainnya adalah melakukan pensertifikatan tanah pemerintah daerah. Dari pengajuan pensertifikatan tanah sebanyak 181 bidang di tahun 2019 telah terbit sebanyak 161 sertifikat. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan dilakukan pemetaan partisipatif masyarakat berupa pendataan bidang tanah baik tanah penguasaan pemerintah maupun tanah hak milik yang telah maupun belum bersertifikat di dua kelurahan sebagai Pilot Project yaitu Kelurahan Bandung dan Kalinyamat Wetan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tegal difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kota Tegal dengan melibatkan langsung elemen masyarakat dari mulai karang taruna, tokoh masyarakat, LPMK, Babinkamtibmas, dan Babinsa.

**Tabel 2.42**  
**Data Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Tegal Tahun 2019**

No	Jenis	Sudah Sertifikat		Proses Sertifikat		Belum Sertifikat		Luas (M <sup>2</sup> )	Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Bidang/ Pertanian	645	42,97	-	-	98	6,53	3.244.874,38	743
2	Tanah Jalan	150	9,99	368	24,52	-	-	1.468.996,64	518
3	Tanah Pengairan	-	-	-	-	220	14,66	133.901,10	220

No	Jenis	Sudah Sertifikat		Proses Sertifikat		Belum Sertifikat		Luas (M <sup>2</sup> )	Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
4	Tanah Urugan / Kapitalisasi	20	1,33	-	-	-	-	-	20
	Jumlah	815	54,30	368	24,52	318	21,19	4.847.772	1.501

Sumber: Bakeuda, tahun 2019

#### E. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Pembangunan daerah khususnya wilayah perkotaan dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh terbatasnya sumber daya alam dan menurunnya kualitas daya dukung lingkungan serta jumlah penduduk yang meningkat diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.

Permasalahan sampah perkotaan di Kota Tegal dapat ditangani dengan baik dengan adanya penambahan armada angkutan persampahan seperti dump truck dan tossa pengangkut sampah yang berpengaruh pada penambahan volume sampah yang dapat dikelola dengan capaian sebesar 91,2 persen di tahun 2019. Ditunjang upaya meningkatkan rasio tempat pembuangan sampah (TPS) yang semakin meningkat mencapai 2,64 persen dengan perbaikan TPS/TPST dan penambahan gedung TPST, namun pengelolannya belum maksimal dengan pengurangan volume pengolahan yang masuk ke TPA baru sekitar 10 persen.

Upaya peningkatan kepatuhan usaha atau kegiatan untuk mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara dilakukan : (a) penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air dan udara; (b) monitoring dan evaluasi; (c) bimbingan teknis pengolahan air limbah dan bimbingan teknis produksi bersih dan pengendalian pencemaran udara bagi pelaku usaha; (d) sosialisasi pengelolaan air limbah dengan media papan informasi pada lokasi tertentu; (e) meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah dengan mewajibkan setiap kegiatan dan atau usaha harus memperoleh izin pembuangan air limbah sebelum membuang limbah ke badan air penerima; (f) pemantauan kualitas air sungai sebagai dasar menentukan kebijakan pengelolaan kualitas air, dan pemantauan kualitas udara pada setiap kegiatan atau usaha yang menghasilkan emisi dari sumber tidak bergerak; dan (g) Car Free Day, serta (h) menambah luas hutan kota dengan tanaman penyerap zat polutan. Di tahun 2019 terdapat 4 kasus pengaduan dan dapat ditangani keseluruhannya.

#### F. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio penduduk Ber-KTP per-satuan penduduk pada tahun 2019 mencapai 99,90 persen dari jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik maupun surat keterangan pengganti KTP elektronik sebanyak 207.844, hal ini karena perkembangan penduduk khususnya bagi usia 17 tahun yang setiap hari muncul dan dinamis serta keterbatasan blanko KTP elektronik dari pemerintah pusat.

Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga sebanyak 92.797, KTP yang sudah diterbitkan/rekam sejumlah 214.410 dari jumlah wajib KTP sebanyak 207.844, Penerbitan akta kelahiran (0-18) realisasi 94,01 % pada semester 2 tahun 2019. Untuk pelayanan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang didukung dengan database kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah dilaksanakan pelayanan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran berbasis Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan menggunakan layanan aplikasi online (Jakwir Cetem Apps) berbasis mobile android dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) serta pengiriman dokumen menggunakan layanan ojek online.

## **G. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kota Tegal perkembangannya cukup baik. Data peserta KB aktif di Kota Tegal pada tahun 2019 sebanyak 33.952 orang dengan rincian : peserta metode kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD 3.389 orang, Metode Operasi Pria (MOP) 88 orang, Metode Operasi Wanita (MOW) 2.288 orang, Implant 4.105 orang, sedangkan metode kontrasepsi jangka pendek yaitu suntik 19.941 orang, pil 3.153 orang, dan kondom 988 orang.

Peserta KB baru di tahun 2019 sebanyak 9.509 orang, dengan rincian : metode kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD 871 orang, Metode Operasi Pria (MOP) 19 orang, Metode Operasi Wanita (MOW) 87 orang, Implant 587 orang, sedangkan metode kontrasepsi jangka pendek yaitu suntik 3.547 orang, pil 3.774 orang, dan kondom 624 orang. Penunjang peningkatan pelayanan dan angka capaian peserta KB Kota Tegal telah didukung dengan 1 unit mobil penerangan KB, 1 unit mobil pelayanan KB, 1 unit mobil untuk transportasi calon peserta/akseptor KB baru, 1 unit mobil pengangkut alat kontrasepsi, 31 unit Klinik milik pemerintah dan 4 rumah sakit.

Peran serta masyarakat untuk ber KB mandiri masih belum optimal dikarenakan perilaku masyarakat lebih mengandalkan pelayanan KB yang disubsidi pemerintah sehingga tingkat putus KB cukup tinggi yang disebabkan mendapatkan pelayanan pada saat dilaksanakan layanan KB Gratis. Upaya yang sudah dilakukan dengan mendorong perubahan perilaku yang mampu tidak menggunakan alat kontrasepsi KB gratis dan mengubah sikap menjadi bangga mengakses layanan swasta serta melakukan penyuluhan terhadap masyarakat.

Peningkatan kualitas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan PKK KB-Kesehatan terintegrasi dengan Kelurahan mengambil peran aktif. Wilayah Kelurahan Slerok tahun 2019 mewakili Kota Tegal kegiatan PKK KB-Kesehatan meraih Juara 3 Tingkat Propinsi Jawa Tengah. Peningkatan peranserta masyarakat ditunjukkan dengan pembentukan dan pembinaan Tri Bina yang meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta pembentukan Kelompok UPPKS.

Masih tingginya Unmeetneed tahun 2019 sebesar 13,60% dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang KB, serta dukungan suami pada daerah pesisir yang mata pencahariannya sebagian besar Nelayan tidak mengizinkan istrinya ikut KB dan budaya/keyakinan dari sisi agama tidak memperbolehkan istrinya ber KB atau kurangnya akses untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi maka upaya yang dilaksanakan melalui kegiatan KIE penyuluhan kepada masyarakat, pembentukan kampung KB di Kelurahan Panggung dan pengembangan kampung KB di Kelurahan Slerok, Muarareja, Kalinyamat Wetan dan Margadana, Pembinaan terhadap Kader KB dan Akseptor, melaksanakan gerakan terpadu (Gerdu) pada daerah-daerah (legok) atau daerah-daerah yang cakupan peserta KB-nya rendah, melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja dengan Klinik IBI melaksanakan pelayanan KB gratis serta promosi program KB melalui leaflet, banner, dan baliho.

## **H. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Kota Tegal merupakan pusat bagi daerah hinterland sekitarnya dengan posisi yang strategis sebagai titik simpul perpisahan antara jalur Utara Jawa dengan Selatan Jawa yang melalui daerah Purwokerto. Simpul transportasi yang meliputi 1 (satu) Terminal tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang sampai dengan saat ini statusnya yang masih dalam tahapan pelimpahan

walaupun secara operasional pengelolaannya sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Ditjen Darat Wilayah X Jateng-DIY. Terminal dengan luasan total ± 5 Ha rencananya akan diserahkan sebagian dan sisanya akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tegal untuk pembangunan kantor Dinas Perhubungan yang selama ini menempati tanah asset PT. Pelindo, yang beroperasi untuk melayani angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Untuk memenuhi pelayanan jaringan angkutan di Kota Tegal Pemerintah Kota Tegal merencanakan pembangunan Terminal Tipe C dengan melihat potensi simpul-simpul transportasi.

**Gambar 2.20 Terminal Tipe A Kota Tegal**



Layanan transportasi lainnya adalah stasiun kereta api yang melayani pengangkutan penumpang dan barang lintas utara (Jakarta–Cirebon–Tegal–Pekalongan–Semarang–Surabaya) dan lintas selatan untuk penumpang (Semarang–Tegal–Purwokerto), pengangkutan barang (Tegal–Cilacap), dan satu pelabuhan niaga serta tiga pelabuhan perikanan.

**Gambar 2.21 Stasiun Besar Tegal dan Pelabuhan Niaga Tegal**



Jumlah ijin trayek angkutan perkotaan register Kota Tegal adalah sebanyak 194 ijin trayek. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak terdapat penambahan ijin trayek, karena belum ditetapkannya Surat Keputusan Walikota tentang penambahan ijin trayek, Namun setiap tahunnya melayani perpanjangan ijin dari trayek yang sudah terdaftar. Masa berlaku ijin trayek adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan Perda Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012. Jumlah trayek yang memperpanjang ijinnya 182 trayek, sisanya 12 trayek tidak lagi aktif beroperasi.

**Tabel 2.43**  
**Trayek Angkutan Perkotaan Register Kota Tegal**

No.	Kode trayek/ warna	Trayek	Jenis Kendaraan (kap/ seat)	Jumlah Kendaraan	Keterangan
1.	A1	Angkutan dalam kota	12	22	Dalam kota
2.	A2	Angkutan dalam kota	12	25	Dalam kota
3.	Kuning	Term Tegal-Slawi	12	26	Perbatasan
4.	Biru telur	Terminal-banjaran	12	77	Perbatasan
5.	Biru/atap kuning	Term tegal - Kemantran	12	15	Perbatasan
6.	Hijau strip putih	Term Tegal- Pasar Bawang	12	9	Perbatasan
7.	Kuning/Atap Biru	Term Tegal - Dukuhturi	12	13	Perbatasan
8.	Hijau Strip Putih	Term Tegal- Jatibarang	12	7	Perbatasan
JUMLAH				194	

Sumber : Dinas Perhubungan, tahun 2018

Dari data load factor, maka dapat diketahui bahwa angkutan umum di Kota Tegal kurang diminati. Terbukti dengan rendahnya penggunaan angkutan umum oleh masyarakat. Kondisi “kelesuan” penggunaan angkutan umum bukan hanya menjadi masalah Kota Tegal tetapi juga Pemerintah Pusat dan hampir seluruh daerah mengalaminya. Kondisi tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya karena kemudahan yang diperoleh dalam kepemilikan kendaraan pribadi, pelayanan yang diberikan oleh perusahaan angkutan umum perkotaan termasuk juga kepatuhan operator angkutan umum terhadap peraturan yang ada, dan transportasi berbasis daring yang mudah, murah dan terjangkau saat ini lebih menurunkan penggunaan angkutan perkotaan bertrayek.

**Tabel 2.44**  
**Load Factor Angkutan Umum Kota Tegal**

No	Rute	2015	2016	2017	2018	2019
1	A I	32	22	-	-	-
2	All	30	37	29	19	17
3	Tegal – Slawi	30	43	39	37	36
4	Tegal – Banjaran	35	36	22	43	42
5	Tegal – Kemantran	30	40	32	39	37
6	Tegal – Dukuhturi	35	31	29	33	30
7	Tegal - Pasar Bawang	26	14	-	-	-
8	Tegal – Jatibarang	22	11	-	-	-
	Rata rata	30	29,25	18,88	21,38	20,25

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2019

Dari data kinerja angkutan umum, rata-rata kendaraan yang digunakan oleh angkutan umum di Kota Tegal diatas 10 tahun atau tidak memenuhi standar yang ditentukan. Sedang load factor atau faktor muat angkutan umum perkotaan berkisar antara 9% -16%.

Penggunaan angkutan umum di Kota Tegal masih sangat rendah dengan besaran berkisar 2% apabila diperbandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Tegal. Prosentase terbesar penduduk Kota Tegal dalam memilih moda transportasi adalah menggunakan kendaraan. Akibatnya emisi gas buang yang ada menjadi permasalahan tersendiri yang harus diselesaikan.

**Tabel 2.45**  
**Kinerja Angkutan Umum**

No	Rute	Headway (menit)	Frekuensi Peak (Kend/Jam)	Faktor Muat	Waktu Perjalanan (Jam)	Kecepatan (Km/Jam)	Umur kendaraan rata-rata (Tahun)	Standar Bank Dunia (Tahun)	Ket
1	A II	0,07	0	15%	1.54	15	20	5	Tidak memenuhi
2	Tegal - Slawi	0,16	0	16%	1.47	20	14	5	Tidak memenuhi
3	Tegal - Banjaran	0,08	8	9%	1.05	21	11	5	Tidak memenuhi
4	Tegal - Kemantran	0,14	4	9%	1.07	8	17	5	Tidak memenuhi
5	Tegal - Dukuhturi	0,29	0	9%	1.50	10	17	5	Tidak memenuhi

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2019

Selain mewujudkan pelayanan angkutan publik yang baik, upaya lain dengan mewajibkan seluruh kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum melakukan uji kir untuk mengetahui apakah kendaraan telah memenuhi persyaratan kelaikan jalan. Selain angkutan umum, beberapa jenis kendaraan juga wajib melakukan uji laik jalan, seperti kendaraan angkutan barang dan kendaraan besar. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala satu kali dalam 6 (enam) bulan.

Seluruh kendaraan yang diuji kir telah memenuhi persyaratan. Hasil akhir semua kendaraan yang melakukan uji kir dinyatakan lulus meski ada beberapa yang sebelumnya diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan yang menjadi syarat kelulusan. Setelah semua dilengkapi, maka kendaraan dinyatakan lulus. namun belum semua kendaraan wajib uji yang terdaftar di Kota Tegal melakukan uji laik jalan di Kota Tegal,

Sistem pengujian kendaraan bermotor yang ada di Dinas Perhubungan saat ini telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Perhubungan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pengujian kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan baik. Adapun mengenai prosentase Kendaraan Berotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam melaksanakan uji kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan yang melakukan numpang uji dari kabupaten/kota lain. Dalam hal pelayanan angkutan umum di Kota Tegal telah dilakukan kajian jaringan trayek, kajian potensi simpul transportasi dan telah dibuat database angkutan, meskipun demikian, capaian dalam pemenuhan standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota masih rendah. Bahkan menurun pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan kondisi pelayanan yang masih kurang baik.

**Tabel 2.46**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Tegal Tahun 2015 – 2019**

URAIAN		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	2.584	2.488	2.408	2.578	2.255
2.	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	4.499	4.520	4.542	4.424	4.329
3.	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	7.944	8.089	8.059	8.859	8.473
4.	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	7.810	8.008	7.963	8.719	8.320

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tegal, tahun 2019

Keselamatan jalan ditentukan oleh kondisi jalan dan fasilitas perlengkapan jalan yang ada. Salah satu indikator kinerja Dinas Perhubungan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (APILL, rambu marka dll). Penurunan angka capaian pada indikator ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan disebabkan karena tidak terpenuhinya target pengadaan sesuai dengan rencana. Perhitungan capaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh jumlah rambu dan APILL, namun juga pada ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan lainnya, seperti marka. Dalam upaya untuk meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dilakukan diantaranya dengan pemasangan rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah maupun rambu petunjuk.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll), pada tahun 2019 capaiannya meningkat menjadi 62,2 persen dari capaian tahun 2018 sebesar 43,5 persen. Persentase terpenuhinya standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota 51 persen.

#### I. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Nilai indeks keterbukaan informasi publik Kota Tegal dari Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Tengah hanya memperoleh nilai sebesar 41,2 dengan predikat kurang informatif, menempati urutan ke-30, tertinggal oleh daerah-daerah sekitar, seperti Kab. Pemalang yang menempati urutan ke-8, Kabupaten Brebes urutan ke-16 dan Kabupaten Tegal urutan ke-29.

**Tabel 2.47 Hasil Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Se-Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Urutan	Nilai	Kategori
1	Kabupaten Pekalongan	5	94	Informatif
2	Kabupaten Batang	7	92.95	Informatif
3	Kabupaten Pemalang	8	92.7	Informatif
4	Kota Pekalongan	11	91	Informatif
5	Kabupaten Brebes	16	85.3	Menuju Informatif
6	Kabupaten Tegal	29	41.6	Kurang Informatif
<b>7</b>	<b>Kota Tegal</b>	<b>30</b>	<b>41.2</b>	<b>Kurang Informatif</b>

Hasil penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019, Kota Tegal memperoleh nilai sebesar 2,54 dengan kategori Cukup, masih menempati urutan ke-18 di wilayah Provinsi Jawa Tengah lebih meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan nilai sebesar 2,33. Adapun penilaian dari Domain Kebijakan SPBE sebesar 2,00, Domain Tata Kelola sebesar 1,86, dan Domain Layanan SPBE 3,06.

**Tabel 2.48 Nilai Indeks SPBE Kabupaten/Kota Se-Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2018 - 2019**

No	Kabupaten/ Kota	2018			2019		
		Urutan	Skor	Kategori	Urutan	Skor	Kategori
1	Kabupaten Batang	1	3.39	Baik	1	3.41	Baik
2	Kabupaten Pemalang	2	3.11	Baik	3	2.91	Baik
3	Kota Pekalongan	3	2.95	Baik	2	3.14	Baik
4	Kabupaten Tegal	4	2.58	Cukup	4	2.82	Baik

No	Kabupaten/ Kota	2018			2019		
		Urutan	Skor	Katagori	Urutan	Skor	Katagori
5	Kota Tegal	5	2.33	Cukup	6	2.54	Cukup
6	Kabupaten Pekalongan	6	1.48	Kurang	7	2.24	Cukup
7	Kabupaten Brebes	7	1.39	Kurang	5	2.81	Baik

Insiden keamanan informasi menjadi momok dalam pengembangan SPBE di Kota Tegal. Salah satunya adalah serangan hacker ke server-server aplikasi, apabila hal ini terjadi layanan aplikasi seketika terhenti. Selama periode tahun 2017 hingga 2018 tercatat ada 31 kejadian serangan hacker. Jaringan komunikasi yang ada sebanyak 60 unit, website milik pemerintah daerah sebanyak 30 domain.

**Tabel 2.49**  
**Jumlah Website Perangkat Daerah dari Tahun 2015 - 2019**

Indikator Sasaran	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Website milik pemerintah daerah	SKPD	4	23	45	30	30

Sumber : Diskominfo Kota Tegal, tahun 2019

Dalam rangka menunjang reformasi birokrasi menuju tata kelola sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi, telah dibangun jaringan intranet dan internet Pemerintah Kota Tegal yang menghubungkan kantor-kantor satuan perangkat daerah Kota Tegal menggunakan teknologi kabel UTP (Unshielded Twisted-Pair), Radio Wireless dan kabel Fiber Optic (FO). Jaringan dengan teknologi kabel UTP mulai dibangun pada tahun 2002 untuk menghubungkan satuan perangkat daerah dilingkungan kompleks Balaikota Tegal. Kemudian jaringan dengan teknologi radio wireless mulai dibangun sejak tahun 2004 untuk menghubungkan satuan perangkat daerah diluar kompleks Balaikota Tegal namun masih terbatas hanya 6 (enam) satuan perangkat daerah yaitu 4 (empat) kantor Kecamatan, Dinas Pertanian dan Kelautan, dan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja. Pada tahun 2009 dilanjutkan pembangunan radio wireless yang menjangkau ke seluruh satuan perangkat daerah diluar kompleks Balaikota Tegal, sampai dengan seluruh kantor Kelurahan.

Jaringan dengan teknologi kabel Fiber Optic (FO) mulai dibangun sejak tahun 2011 sebagai backbone jaringan di kompleks balaikota Tegal yang sebelumnya menggunakan teknologi kabel LAN UTP. Selanjutnya pada tahun 2016, dilanjutkan pembangunan kabel FO yang menghubungkan kantor-kantor satuan perangkat daerah (Dinas, Kantor dan Kecamatan) diluar kompleks balaikota Tegal. Pada tahun 2017, pembangunan jaringan kabel FO dilanjutkan hingga ke 27 kantor Kelurahan se-Kota Tegal untuk menggantikan teknologi radio wireless yang ada. Semenjak jaringan kabel FO telah menjangkau ke seluruh satuan perangkat daerah, jaringan radio wireless difungsikan sebagai backup apabila jaringan kabel FO mengalami kendala.

#### **J. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Langkah strategis perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, peningkatan pembinaan dan pemberdayaan UMKM agar tumbuh dan berkembang. Sampai dengan Desember 2019 jumlah koperasi di Kota Tegal sebanyak 179 unit, terdiri dari 149 koperasi aktif dan 30 unit koperasi tidak aktif. Jumlah koperasi ini meningkat bila dibandingkan tahun 2018. Dalam rangka validasi data koperasi, telah diajukan pembubaran 18 (delapan belas) koperasi tidak aktif kepada Pemerintah Pusat cq. Kementerian

Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang sampai saat ini masih menunggu proses penetapannya untuk dimuat dalam Lembaran Negara (LN). Sehingga secara pendataan jumlah koperasi tidak aktif masih tetap berjumlah 30 (tiga puluh) unit.

Sesuai peraturan, penilaian kesehatan koperasi dilakukan oleh pihak yang berwenang, dan hanya dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau koperasi yang mempunyai usaha Unit Simpan Pinjam (USP) yang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). KSP/USP merupakan lembaga keuangan non Bank yang kegiatan usahanya menerima/menghimpun dana dan menyalurkan pinjaman kepada para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Pada tahun 2019 terdapat 78 unit koperasi yang melaksanakan RAT, 70 unit diantaranya merupakan KSP/USP dan telah dinilai kesehatannya, dengan hasil 65 unit koperasi berpredikat sehat.

**Tabel 2.50 Perkembangan Koperasi Tahun 2017 – 2019**

No	Uraian	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Koperasi	Unit	175	177	179
2	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	35.687	35.709	35.357
3	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	145	147	149
4	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	Unit	81	73	78
5	Jumlah KSP/USP RAT	Unit	80	71	70
6	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	73	55	65

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, 2019

Dalam rangka memberikan legalitas kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat Kota Tegal khususnya yang berskala mikro dilaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pembuatan sertifikasi izin usaha gratis IUMK kepada 500 pelaku usaha mikro di 4 kecamatan.

**Tabel 2.51 Perkembangan UMKM di Kota Tegal Tahun 2018-2019**

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019*)
1.	Jumlah Usaha Mikro	Unit	1.774	1.790
2.	Jumlah Usaha Kecil	Unit	115	114
3.	Jumlah Usaha Menengah	Unit	35	36
	Jumlah	Unit	1.924	1.940

\*) Update Data diperoleh dari hasil pendataan bertahap pada tahun 2019

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, tahun 2019

**Tabel 2.52  
UMKM Binaan di Kota Tegal Tahun 2018-2019**

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil	Unit	155	930

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, tahun 2019

Keberadaan Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) menjadi akses permodalan menjadi alternatif bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal apabila mengalami kesulitan menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan konvensional. Peran BPR/LKM diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan mikro melalui kegiatan simpan pinjamnya. Jumlah BPR/LKM di Kota Tegal sampai dengan Tahun 2019 jumlahnya tetap seperti tahun 2018 yaitu sebanyak 48 unit, menurun dibandingkan tahun 2017 sejumlah 62 unit.

**Tabel 2.53**  
**Perkembangan BPR/ LKM Di Kota Tegal Tahun 2017 – 2019**

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019
1.	BPR	Unit	3	3	3
2.	LKM Aktif	Unit	59	45	45

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, tahun 2019*

#### **K. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Pertumbuhan investasi Kota Tegal tahun 2019 tidak terlepas dari peran serta para pelaku usaha/investor yang mencapai 814 investor dengan jumlah tenaga kerja 8.614 orang terdiri dari 5.491 laki-laki dan 3.123 perempuan. Dari sisi pelayanan perizinan sampai dengan Desember 2019 tercatat total jumlah perizinan yang diterbitkan sebanyak 2.079 dokumen, dengan perincian 1.940 izin dan 139 non perizinan (terdiri dari laik sehat sebanyak 118, penggunaan alun-alun sebanyak 6 dan tontonan/keramaian sebanyak 15). Nilai investasi di Kota Tegal periode Januari sampai dengan Desember 2019 dari data Online Single Submission (OSS) mencapai angka sebesar Rp. 4.202.834.695.252,-.

#### **L. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Pembinaan dan Pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui program kegiatan yang terarah dan terencana diharapkan dapat meningkatkan disiplin, tanggung jawab dan sportifitas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.

Pembinaan kepemudaan melalui fasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan melalui anggaran Hibah sebanyak 22 OKP dibawah pembinaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Upaya peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan pelaksanaan upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat Propinsi Jawa Tengah, pengiriman peserta kemah bakti pemuda Tingkat propinsi, seminar kepemudaan dan pelaksanaan kemah bhakti tingkat kota, lomba tata upacara baris berbaris, pidato pemuda, dan lomba band, kegiatan pemuda pelopor dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota, pembentukan kader kewirausahaan yaitu pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

Pembinaan dibidang keolahragaan antara lain penyelenggaraan kompetisi olahraga : POPDA tingkat Kecamatan se-Kota Tegal, Karisedenan dan Propinsi Jawa Tengah, lomba gerak jalan beregu pelajar, lomba gerak jalan 28 km tingkat Provinsi Jawa Tengah serta fasilitasi pengiriman coaching clinic dan training camp pelatih, pembinaan atlet pelajar.

Sedangkan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat berupa penyelenggaraan Kejurnas tenis junior, lomba senam, lomba lari 10K, pengiriman kejuaraan tenis Gubernur Jawa Tengah, upacara HAORNAS. Untuk sarana prasarana olahraga melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga yang setiap tahun terus dilakukan. Pada tahun 2019 dilaksanakan pembangunan tembok keliling dan gerbang masuk GOR Tegal Selatan serta pengadaan alat- alat olahraga untuk beberapa cabang olahraga.

Jumlah organisasi cabang olahraga sebanyak 41 cabang olahraga di bawah naungan KONI. Dari cabang olahraga wushu pada tahun 2019 berhasil meraih prestasi pada event internasional yaitu event Bali

Internasional Kungfu Championship diraih oleh atlet Yesua Imanuel SS (Juara I) dan Dela Adhelia S (Juara 2). Juga dilaksanakan sosialisasi SKJ Indonesia Bersatu dan lomba SKJ Jadul tingkat pelajar.

Kota Tegal telah memiliki 2 gedung olahraga, yaitu GOR Wisanggeni dan GOR Tegal Selatan. GOR Tegal Selatan dibangun secara bertahap pada tahun 2016 dan 2017 kemudian pada tahun 2019 dilaksanakan pembanguan sarana dan prasana pendukungnya yaitu pembangunan gerbang masuk dan tembok keliling GOR Tegal Selatan, serta renovasi Gedung Wanita menjadi "Gedung Serbaguna Berdedikasi" yang pembangunannya dilaksanakan bertahap pada tahun 2017 dan 2018 kemudian pada tahun 2019 pengadaan sarana dan prasarana kelengkapan pendukungnya yaitu lift dan genset.

#### **M. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Penyediaan data statistik disesuaikan dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tegal hanya terbatas pada kegiatan penggandaan dan pencetakan Buku Tegal Dalam Angka (TDA) dan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai bentuk publikasi data statistik dasar. Pada tahun 2019, buku TDA dan PDRB yang dicetak 90 buku dan dibagikan kepada OPD/SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan instansi lainnya untuk dijadikan sebagai materi atau bahan pendukung lainnya penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

#### **N. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Persandian yang didukung teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas layanan pengamanan informasi, merupakan salah satu perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Layanan persandian dalam memberikan informasi yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh (kerahasiaan, keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan nir penyangkalan atas informasi). Dalam pengelolaan data berbasis teknologi informatika berupa informasi strategis sangat berpengaruh terhadap kinerja birokrasi dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pemerintah Kota Tegal dalam operasional persandian menggunakan aplikasi kriptosoft pro yang dapat mengamankan file berita yang dikirim melalui secure email (email.sanapati.net). Adapun berita yang diterima melalui email sanapati sebanyak 970 berita di tahun 2019.

Selain itu Pemerintah Kota Tegal juga memiliki perangkat Jammer atau pengacak sinyal yaitu alat yang memiliki fungsi untuk membuat sinyal HP, Wifi, Bluetooth, Radio menjadi kacau dan tidak dapat diterima oleh perangkat penerimanya. Jammer digunakan ditempat seperti di dalam kelas, tempat ibadah, perpustakaan, ruang rapat, rumah sakit, perkantoran dan lain sebagainya, sehingga kita tidak perlu mengingatkan orang untuk menonaktifkan perangkat selulernya. Peralatan tersebut dalam kondisi baik dan merupakan aset Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan sistem pinjam pakai yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali sesuai dengan kebijakan BSSN.

Manfaat alat jammer bagi Pemerintah Kota Tegal dapat dipergunakan pada agenda rapat-rapat penting Kepala Daerah agar agenda rapat dapat berjalan lancar tidak terganggu dengan sinyal HP dan sinyal lain yang dapat mengganggu berjalannya rapat, sehingga peserta rapat dapat dengan fokus mengikuti jalannya rapat.

## **O. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Pemerintah Kota Tegal selalu berupaya untuk menjaga nilai-nilai luhur dan kearifan yang dimiliki masyarakat Kota Tegal agar menjadi masyarakat yang semakin berbudaya. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal : Pentas Duta Kesenian di TMII, PentasWayangKulit, Pentas event bersama Sapta Mitra Pantura, Pentas Seni Masyarakat dengan Sekolah, Workshop/ Sarasehan Budaya, Workshop dan Pentas Seni Komite Seni Dewan Kesenian Kota Tegal, Workshop dan Pemutaran Film Komunitas, Parade Seni Budaya Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, Pentas dan Karnaval Budaya Apeksi, Pentas Promosi dan Seni Budaya (Parade Teater Daerah VIII TMII), Pentas Jateng Fair, Fasilitasi Paduan Suara Gita Bahari Sebayu, Festival Teh dan Kuliner Tempo Doeloe, Lomba Band SMP/SMA Tingkat Kota Tegal, Kemah Budaya Tingkat Kota Tegal, Lomba Seni Kemasyarakatan, Lomba Pidato Bahasa Tegal, Pekan Seni Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota, Pemeliharaan Makam Ki Gede Sebayu, Pentas Kesenian dalam rangka HUT KORPRI.

Bangunan/situs cagar budaya yang sampai saat ini masih ada sebanyak 36, dengan kondisi terawat sejumlah 33 bangunan (91,67 persen) sedangkan yang tidak terawat sejumlah 3 bangunan (8,33 persen), yaitu gedung Kong Kwan, gudang barang, dan gedung Rakyat.

Komitmen Pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan dengan penetapan 2 objek bangunan cagar budaya, yaitu Gedung DPRD Lama dan Menara PDAM, perencanaan DED Pemeliharaan Gedung DPRD Lama, penyusunan kajian pemeliharaan Cagar Budaya, yang bertujuan, melindungi dan memelihara bangunan cagar budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam, menjadikan bangunan bersejarah dan bangunan cagar budaya sebagai salah satu media dalam proses pembelajaran masyarakat tentang sejarah, sosial budaya dan arsitektur.

Selanjutnya disusun kajian Sejarah Makam se-Kota Tegal, dengan tujuan tersusunnya data dan informasi makam bersejarah dari aspek tradisi lisan dan/atau sejarah, nilai dan artefak sebagai dasar perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan, penyusunan Kajian Kardinah sebagai Pahlawan Nasional, yaitu dengan menulis jejak perjuangan Kardinah berdasarkan biografi, sudut pandang, pendapat tokoh masyarakat dan akademisi, penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Bahasa Tegal, yaitu merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (raperda).

## **P. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Pembinaan perpustakaan selama tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hanya 59 perpustakaan menjadi sebanyak 82 perpustakaan. Pembinaan reguler selalu dilaksanakan disamping memenuhi permintaan pembinaan di sekolah yang akan diakreditasi perpustakaan sekolahnya. Peningkatan kualitas perpustakaan dari pengelolanya (SDM) juga dilakukan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi perpustakaan di instansi dan sekolah.

Jumlah pengunjung perpustakaan dalam 1 tahun di Perpustakaan Daerah Mr. Besar Martokoesoemo Kota Tegal mengalami peningkatan yaitu sebanyak 40.497 pengunjung atau naik sebesar 132% dari capaian tahun 2018 sebanyak 26.205 pengunjung. Hal ini disebabkan kerjasama dengan sekolah untuk datang ke perpustakaan daerah. Tingkat koleksi buku di Perpustakaan Daerah, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang disebabkan kerusakan dan hilang atau tidak dikembalikan oleh pengunjung sehingga perlunya peningkatan pengamanan buku pinjaman.

## **Q. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan pengolahan dokumen/arsip secara baku atau sesuai ketentuan kearsipan.

Upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dalam tahun 2019 yaitu menduplikat buku-buku Pethok (Letter C) dari seluruh Kelurahan Kota Tegal dalam bentuk informatika sejumlah 2.000 dokumen/arsip.

### **2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Letak geografis Kota Tegal yang berada di kawasan pesisir memiliki potensi kelautan yang cukup besar, baik melalui perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari mempengaruhi meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap dengan terus bertambahnya jumlah kapal besar yang masuk ke pelabuhan perikanan. Tahun 2019 jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 25.399,356 ton, melebihi capaian tahun 2018 sebesar 22.225,25 ton atau meningkat 107,24 persen.

Bahan baku dari produksi perikanan yang cukup melimpah mempengaruhi produksi pengolahan hasil perikanan. Selama tahun 2019 jumlah produksi hasil olehan ikan mencapai 7.553,63 ton atau meningkat 146,81 persen dari tahun 2018 sebesar 6.609,76 ton. Perikanan budidaya jumlah produksinya cenderung stagnan dari tahun 2018, yang disebabkan luasan lahan tambak yang digunakan berbudidaya semakin menyusut. Produksi perikanan budidaya hanya mencapai 598,17 ton di tahun 2019, sedangkan pada tahun sebelumnya mencapai 597,34 ton.

#### **B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Pengembangan pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena mampu menggerakkan berbagai jenis bidang usaha disamping memperluas lapangan kerja dan memberi kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bidang usaha yang menunjang kepariwisataan antar lain travel agent, transportasi, kuliner, perhotelan, dan berbagai usaha lainnya, serta pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya.

Kota Tegal memiliki beberapa obyek dan sarana prasarana pendukung wisata yang menjadi daya tarik masyarakat Kota Tegal sendiri maupun dari daerah lain. Faktor letaknya yang strategis, fasilitas perkotaan seperti pusat perbelanjaan dan hiburan yang lengkap, memiliki sejarah dan budaya yang menarik, serta karakter masyarakatnya menjadikan Kota Tegal menarik dikunjungi. Obyek wisata alam maupun buatan yang ada yaitu : Pantai Alam Indah (PAI), Pantai Muarareja Indah, Bahari Waterpark dan Ritapark, serta potensi wisata lain seperti wisata sejarah, religi, budaya, kuliner dan belanja.

Dengan luas pantai 21 Ha dan panjang pantai 2 km, PAI sebagai salah satu obyek wisata unggulan yang cukup diminati, bukan hanya sebagai sarana rekreasi, tapi juga tempat berolah raga. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung adalah wisatawan domestik dengan jumlah kunjungan pada tahun 2019 sebanyak 502.096 orang. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah, PAI berkontribusi terhadap PAD sebesar Rp. 1.617.512.250,-. Untuk meningkatkan sarana pendukung wisata dibangun jalan dalam kawasan wisata PAI yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sarana rekreasi lainnya yang berlokasi di bagian Timur

PAI adalah Bumi Perkemahan Bahari yang terletak di tepi pantai, selain digunakan untuk kegiatan pembinaan kepemudaan/keparamukaan, dapat dijadikan sarana rekreasi *outbond*.

**Tabel 2.54 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata dan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2015-2019**

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kunjungan Wisata	523.827	506.480	538.229	498.884	502.096
2	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	1.015.423.000	1.058.231.900	1.642.130.000	1.616.111.175	1.617.512.250

Untuk memperkenalkan dan menarik minat kunjungan ke Kota Tegal dilakukan promosi melalui penyediaan leaflet dan booklet, penyelenggaraan event Tegal Pesisir Karnaval, juga mengikuti promosi pariwisata tingkat nasional dan regional melalui festival kuliner dan Pameran Pekan Produk Budaya Indonesia di TMII Jakarta, Pameran Jateng Fair di PRPP Semarang serta Festival Jamu di Kabupaten Cilacap.

### C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Keterbatasan lahan pertanian mempengaruhi jumlah produksi pertanian di Kota Tegal. Luas lahan sawah yang merupakan sawah irigasi seluas 565.37 Ha pada tahun 2019 hanya memproduksi padi sebanyak 2.490 ton atau capaian produktivitas per hektarnya 70 kwintal, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebanyak 3.402 ton.

Selain itu pada sektor peternakan juga mengalami kondisi yang sama. Sentra-sentra peternakan yang ada diantaranya itik di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana, peternakan unggas di Kelurahan Keturan Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, dan daerah lainnya dengan jumlah 882.897 ekor dan luas lahan hanya 8,19 ha, produksi hasil peternakan sebanyak 2.372.406 ekor dengan tingkat kenaikan produksi daging 0,91 persen, susu 0,22 persen, dan telur 0,17 persen. Kondisi ini diperparah dengan ditemukannya 469 kasus flu burung di sentra peternakan unggas.

### D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan berkontribusi paling besar dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dari kegiatan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu dengan persentase sebesar 27,81 persen di tahun 2019.

Keberadaan pasar rakyat menjadi salah satu skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan sektor perdagangan karena pasar rakyat mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Pasar rakyat yang tersebar di 4 wilayah kecamatan Kota Tegal sebanyak 14 pasar dengan kondisi belum sepenuhnya memenuhi standar minimal kelayakan. Kurangnya sarana prasarana dan fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna jasa pasar seperti toilet umum, tempat parkir, TPS, tempat ibadah, ruang laktasi, klinik pengobatan, pos ukur ulang dan bahkan gedung yang belum permanen. Ada 2 pasar rakyat yang perlu direvitalisasi agar menjadi pasar yang memenuhi persyaratan, yaitu Pasar Beras dan Pasar Muaraanyar. Kebutuhan anggaran untuk merevitalisasi maupun pemeliharaan pasar rakyat cukup tinggi sehingga perlu dukungan APBD, Bantuan Keuangan Provinsi maupun APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2019, telah dilaksanakan revitalisasi Pasar Kraton dengan biaya sekitar Rp. 5,1 Milyar berasal dari anggaran DAK Penugasan Tahun 2017.

Faktor pendukung lain pada sektor perdagangan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL yang menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota (3K) harus dilakukan pembinaan dan relokasi melalui penataan PKL. Tahun 2019 telah dilakukan upaya pembenahan dengan merencanakan tempat relokasi PKL yang lebih memadai, strategis dan mempercantik wajah kota dengan optimalisasi fungsi tata ruang yang ada sebagai usaha untuk menunjang perekonomian daerah.

Kegiatan ekspor dari Kota Tegal dari volume komoditi ekspor atau nilai ekspornya lebih besar daripada nilai komoditi impor, sehingga berdampak pada tingginya nilai ekspor bersih. Perkembangan nilai ekspor bersih tahun 2019 sebesar US\$ 14.965.480,06, lebih tinggi sebesar US\$ 5.334.476,74 bila dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar US\$ 9.631.003,32.

**Tabel 2.55**  
**Perkembangan Ekspor Bersih Kota Tegal Tahun 2015-2019**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ekspor	7.151.985,55	12.927.389,61	8.398.559,87	11.327.477,06	15.298.169,11
2	Impor	841.020,00	582.849,00	614.340,62	1.696.473,74	332.689,05
3	Ekspor Bersih	6.310.965,55	12.344.540,51	7.784.219,25	9.631.003,32	14.965.480,06

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan kemetrolgian bertujuan melindungi konsumen akibat dari ketidakakuratan takaran dan timbangan melalui Program Perlindungan Konsumen dengan kegiatannya antara lain Operasionalisasi Pelayanan Tera/ Tera Ulang. Dalam rangka perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran kritis akan hak-hak konsumen, dan kemampuan konsumen dalam pemilihan produk yang aman dan berkualitas melalui penyelenggaraan monitoring harga barang kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) dan barang penting lainnya (LPG dan pupuk bersubsidi) yang ada di wilayah Kota Tegal.

Sampai dengan tahun 2019 tercatat 8 pasar rakyat yaitu Pasar Martoloyo, Randugunting, Langon, Bandung, Krandon, Karangdawa, Sumurpanggung dan Kejambon telah mendapatkan predikat "Pasar Tertib Ukur" dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas upayanya melaksanakan perlindungan konsumen dengan menerapkan tertib ukur bagi UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) milik pedagang pasar rakyat.

#### **E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Upaya peningkatan produktifitas Industri Kecil dan Menengah terus diupayakan melalui pembinaan dan pelatihan IKM dalam memanfaatkan teknologi. Berbagai jenis pelatihan telah diberikan, diantaranya pertukangan kayu yang diikuti oleh 19 peserta laki-laki, membuat batik yang diikuti oleh 20 peserta perempuan, pembuatan shuttlecock yang diikuti 11 peserta perempuan dan 8 peserta laki-laki, pemasaran online yang diikuti 3 peserta laki-laki dan 17 peserta perempuan, pengemasan produk diikuti oleh 2 peserta laki-laki dan 18 peserta perempuan, dan pembuatan sangkar burung diikuti oleh 20 peserta laki-laki.

Melalui pelatihan tersebut peserta dapat memberi nilai tambah pada produk IKM, dan selanjutnya dapat meningkatkan kontribusi pada sektor industri . Pelatihan untuk membentuk wirausaha baru juga dilaksanakan, terutama generasi muda dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya, yaitu

pelatihan menjadi Juragan Kripik Pisang Standar Ekspor dengan peserta 40 orang, yang terdiri dari 12 peserta laki-laki dan 28 peserta perempuan sehingga dapat terbentuk IKM baru.

Pembinaan IKM dan promosi juga dilaksanakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tegal, antara lain dengan membina perajin batik Tegal dan mengikutkan perajin dalam pameran.

Fasilitasi juga diberikan kepada IKM untuk mengikuti berbagai pameran, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional, antara lain:

1. Hang Tuah Fair I pada bulan Mei 2019 : 42 IKM (IKM Pangan, IKM Sandang, dan IKM Aneka).
2. Hang Tuah Fair II : 42 IKM (IKM Pangan, IKM Sandang, dan IKM Aneka)
3. Pameran APEKSI di Kota Semarang tanggal 2-6 Juli 2019 diikuti oleh 1 IKM dari Aneka/Kerajinan dengan produk yang ditampilkan : Aneka kaos Galgil dan Batik, Sarung, aneka kerajinan dari pralon, dan Kerajinan Wayang Golek. serta dan 1 IKM Pangan.
4. Pameran HUT Prvovinsi Jateng di Kab.Wonogiri, tanggal 23-25 Agustus 2019 diikuti 1 orang dari IKM Sandang (Batik), menampilkan produk aneka batik, sarung, wayang golek, dan aneka kerajinan dari barang bekas.
5. Pameran INCRAFT di Jakarta Pusat, tanggal 23-28 April 2019, diikuti 4 orang dari IKM, dengan produk yang ditampilkan aneka aneka batik, sarung, wayang golek, dan aneka kerajinan dari barang bekas (dari IKM yang tergabung dalam RUTELA).
6. Gelar Budaya Kota Tegal di Anjungan Jawa Tengah TMII Jakarta, diikuti 2 orang dari IKM dengan produk yang ditampilkan aneka kaos Galgil dan batik, sarung, aneka produk makanan, kerajinan wayang golek, dan aneka produk dari RUTELA.
7. Jateng UKM Dekranasda Jateng EXPO di Palembang, tanggal 5-10 Nopember 2019, menampilkan aneka produk batik, sarung, aneka produk minuman tradisional.

Untuk memperluas jaringan pemasaran produk IKM dilaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah sejumlah 100 IKM dengan Swasta dalam acara Temu Usaha Industri yang menghadirkan 4 narasumber antara lain dari : Yayasan Dharma Bhakti Astra, PT. Nandya Karya Perkasa, PT. Barata Indonesia, dan PT. Tegal Shipyard Utama.

Pada sektor industri, pandemi Covid 19 mengakibatkan produktifitas menurun kecuali industri makanan dan minuman yang meningkat kurang lebih 35% IKM yang mengalami penurunan : Kerajinan 60%, Logam 50%, Kimia dan Aneka 30%, Pertukangan Kayu 40%, Industri Sandang 35% dengan sebagian IKM beralih membuat produk APD seperti masker dan hazmat.

#### **2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

##### **A. Sekretariat Daerah**

###### **1. Nilai SAKIP**

Setiap tahun anggaran Instansi Pemerintah selain menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dalam sebuah Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP).

Sejak tahun 2010 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Tegal secara rutin menyusun dan mengirim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden Republik Indonesia dan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tegal semakin meningkat dengan kategori B dari perkembangan nilai selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren meningkat hingga mencapai nilai evaluasi lebih dari 60 (baik). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan sehingga selaras dengan capaian kinerja yang dihasilkan, sementara itu pelaksanaan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut agar berjalan dengan baik.

## 2. Peringkat Hasil Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah.

## 3. Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan

Sebagai negara hukum membutuhkan produk-produk hukum yang baik, yaitu produk-produk hukum yang mampu diterapkan dan diterima di Negara Indonesia. Dalam hal pembuatan produk hukum yang dilakukan pemerintah, terdapat dua produk hukum yang lahir yaitu keputusan dan peraturan. Produk hukum daerah berupa keputusan oleh Kepala Daerah, mendasarkan pada Undang-Undang yang lebih tinggi, bersifat konkrit, individual dan final. Sedangkan peraturan adalah produk hukum tertulis yang substansinya atau isinya punya daya ikat terhadap seluruh atau sebagian penduduk wilayah negara, peraturan lebih ditekankan kepada isi.

## 4. Pelayanan Keprotokolan

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

## 5. Kerjasama Pemerintah Kota Tegal

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Tegal dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan karena banyaknya masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus di atasi dan dipenuhi dengan melewati batas batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, serta melihat prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut.

Mengingat peran strategis Pemerintah Kota dalam sistem negara kesatuan ini, maka peningkatan peran dan kemampuan pemerintah kota dalam mekanisme kerjasama ini, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya, harus menjadi agenda penting pemerintah di masa mendatang. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kerjasama sangatlah penting dilakukan karena keberhasilan sebuah kerjasama dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai sesuai dengan kesepakatan yang dibangun.

## **B. Sekretariat DPRD**

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Kota Tegal berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tersebut yang didukung kesekretariatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tegal diwujudkan berawal dari adanya Rencana Kerja Tahunan pada alat-alat Kelengkapan DPRD, terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD). Terintegrasinya Program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD. Indikator Kinerja Prosentase Prolegda yang terselesaikan pada tahun 2018 tercapai 100% berdasarkan data yang ada.

### **2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **A. Perencanaan**

##### **1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan**

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top-down dan Bottom-up.

Penyusunan dokumen perencanaan multi sektor juga menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Beberapa dokumen perencanaan multi sektor yang telah diamanatkan oleh pemerintah telah disusun, antara lain RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SDG's. Berbagai dokumen perencanaan multi sektor tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan terbaru sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RPJMN dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah juga dilakukan dalam rangka pemantauan dan supervisi dalam penyusunan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk tetap memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) tersebut dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu Dalev kebijakan perencanaan pembangunan daerah, Dalev terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

## 2. Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 180 dijelaskan bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan
- b. Hasil rencana pembangunan daerah;
- c. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- d. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- e. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- f. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## B. Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab dan kreatif mencari sumber-sumber pendanaan serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pendapatan daerah. Peraturan daerah dan kebijakan diformulasikan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas maka pendapatan daerah mengandalkan dua sumber utama yaitu Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi sumber utama pendanaan pembangunan dan belanja pegawai.

Mendasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan berpedoman Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah mendukung peningkatan PAD dan efisiensi pengelolaan. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, pemutakhiran data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

### **C. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Reformasi birokrasi yang meliputi delapan area perubahan reformasi birokrasi, yang salah satu adalah penataan manajemen SDM.

Aparatur Pemerintah Kota Tegal sampai dengan Desember 2019 sebanyak 3.596 orang sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik semakin ditingkatkan kualitasnya, baik peningkatan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung dan budaya organisasi. Peningkatan SDM Aparatur tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kedinasan baik diklat teknis, diklat fungsional maupun diklat kepemimpinan dengan jumlah peserta 327 orang di tahun 2019. Pelayanan aparatur pemerintah dari segi rasio jumlahnya dibandingkan jumlah penduduk masih kurang, yaitu baru mencapai 1,30 persen, sehingga perlu penambahan ASN melalui pengadaan PNS dan PPPK.

### **D. Penelitian dan Pengembangan**

Fungsi urusan kelitbangan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah dan mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik atau good government melalui penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penyusunan perencanaan program dan anggaran kelitbangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah, fasilitasi inovasi daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan litbang, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Litbang dan pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan.

Fasilitasi penelitian dan pengembangan inovasi daerah, penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi dan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah, dilaksanakan dengan kegiatan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, fasilitasi penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah, dan Fasilitasi Dewan Riset Daerah.

## **2.1.3.6. Unsur Pengawasan Pemerintahan**

### **A. Inspektorat Daerah**

Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal, khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan

tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu.

Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata kelola pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pencegahan korupsi memberikan garansi bagi penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, yang pada akhirnya dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan internal untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal diwujudkan dengan dilaksanakannya pengawasan internal secara berkala pada semua obyek pemeriksaan (obrik) sejumlah 96 obrik setiap tahunnya. Obyek pemeriksaan tersebut terdiri dari 17 Dinas, 1 Sekretariat DPRD, 4 Badan, 1 RSUD Kardinah, 1 Kantor Kesbangpol, 4 Kecamatan, 27 Kelurahan, 8 Bagian, 2 BUMD, 4 UPPD dan 24 UPTD.

Capaian kinerja pengawasan oleh APIP selama kurun waktu Tahun 2013-2017 dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler pada obyek pemeriksaan di Kota Tegal sejumlah 96 LHP, dengan persentase Tindak Lanjut Temuan mencapai 100 persen.

### **2.1.3.7. Unsur Kewilayahan**

#### **A. Kecamatan**

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan maka dibentuk Kecamatan. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan untuk mengkoordinasikan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota, serta penyelenggaraan

kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengkoordinasikan : (1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan; (2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; (3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan (4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota.

Pelayanan publik di Kecamatan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemertintah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Salah satu pelayanan publik yang dilimpahkan kewenangannya kepada kecamatan adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. proses sederhana;
- b. objek perizinan berskala kecil;
- c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- d. tidak memerlukan teknologi tinggi.

Sedangkan pelayanan nonperizinan dilakukan dengan kriteria:

- a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
- b. kegiatan berskala kecil; dan
- c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

Program yang terkait pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan adalah Posyandu Balita dan Lansia melalui PKK, serta melalui kelembangan masyarakat di Kelurahan seperti LPMK, RW, RT, Karang Taruna, PKK, Wartekel dan kelembangan yang tergabung dalam TMMD dan BBGRM.

### **2.1.3.8. Unsur Pemerintahan Umum**

#### **A. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Impementasi pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah, diarahkan untuk penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Dilihat dari capaian tingkat partisipasi masyarakat mengikuti proses Pemilihan Umum (Pemilu) cukup tinggi menggambarkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan berjalan dengan baik. Dalam Pemilu serentak Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019 meningkat menjadi 74,91 %. Tahun sebelumnya dalam Pemilukada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Wali Kota Tegal mencapai 70,98 %.

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

##### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi daerah Kota Tegal terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator PDRB menurut pengeluaran dan nilai tukar petani (NTP).

#### A. Tinjauan Agregat PDRB Komponen Pengeluaran Kota Tegal

Nilai PDRB Kota Tegal adh Berlaku selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Nilai ekonomi Kota Tegal berdasarkan nilai PDRB adh berlaku pada tahun 2019 mencapai Rp.15.287.590,42 juta.

**Tabel 2.56 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tegal Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2015-2019**

Kelompok Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,025,379.13	6,453,182.74	6,934,798.48	7,461,021.03	7,969,094.35
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)	92,040.07	97,310.13	103,670.10	115,393.69	129,724.86
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,200,051.61	1,246,047.84	1,286,381.16	1,333,917.51	1,388,090.57
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	5,329,753.53	5,701,113.42	6,091,193.93	6,703,250.68	7,235,359.58
Perubahan Inventori	115,191.85	43,786.14	55,092.48	87,092.02	60,860.72
Net Ekspor***	(1,782,465.75)	(1,578,364.82)	(1,474,383.87)	(1,594,831.27)	(1,495,539.66)
<b>PDRB Kota Tegal</b>	<b>10,979,950.43</b>	<b>11,963,075.45</b>	<b>12,996,752.28</b>	<b>14,105,843.66</b>	<b>15,287,590.42</b>

Sumber: BPS, 2019

Keterangan:

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

\*\*\* Ekspor dikurangi impor

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil,

utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Tahun 2019 nilai PDRB adh konstan Kota Tegal adalah sebesar Rp.11.205.322,88 juta. Selama kurun waktu 2015–2019, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Tegal berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2.57. Sama halnya dengan PDRB adh berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.57 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tegal Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah), 2015-2019**

Kelompok Pengeluaran	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,786,199.11	4,971,725.23	5,185,119.08	5,412,723.38	5,649,818.21
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	67,037.97	69,255.79	71,631.27	77,614.88	85,302.32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	821,761.45	824,244.95	826,140.71	840,473.64	868,619.95
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4,176,585.75	4,361,214.02	4,553,146.38	4,814,282.97	5,014,855.90
Perubahan Inventori	44,312.85	53,500.63	50,303.54	45,993.86	45,044.12
Net Ekspor***	(942,017.57)	(834,909.66)	(679,397.98)	(596,748.56)	(458,317.62)
<b>PDRB Kota Tegal</b>	<b>8,953,879.56</b>	<b>9,445,030.96</b>	<b>10,006,943.00</b>	<b>10,594,340.17</b>	<b>11,205,322.88</b>

Sumber: BPS, 2019

Keterangan:

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

\*\*\* Ekspor dikurangi impor

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 2.57 menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2015 – 2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2015 – 2019 cenderung semakin menurun. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 54,88 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 52,13 persen.

**Tabel 2.58 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
<b>Total Konsumsi Rumah Tangga (Juta Rp.)</b>					
ADHB	6.025.379,13	6.453.182,74	6.934.798,48	7.461.021,03	7.969.094,35
ADHK	4.786.199,11	4.971.725,23	5.185.119,08	5.412.723,38	5.649.818,21

URAIAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	54,88	53,94	53,36	52,89	52,13
<b>Rata-rata Konsumsi per Kapita/ tahun (Ribu Rp.)</b>					
ADHB	24.481,57	26.103,84	27.952,30	29.963,58	31.888,50
ADHK	19.446,69	20.111,18	20.899,82	21.737,58	22.607,85
<b>Pertumbuhan (% ADHK)</b>					
Total Konsumsi RT	3,83	3,88	4,29	4,39	4,38
Perkapita	3,35	3,42	3,92	4,01	4,00
<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>246.119</b>	<b>247.212</b>	<b>248.094</b>	<b>249.003</b>	<b>249.905</b>

Sumber: BPS, 2019

Keterangan:

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Secara umum, rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2015 konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 24,48 juta rupiah, yang artinya setiap penduduk Kota Tegal rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 24,48 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun hingga tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menjadi sebesar 31,89 juta rupiah.

Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan konsumsi per kapita berada pada kisaran 3-4 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,01 persen dan terendah sebesar 3,35 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan konsumsi per kapita setiap tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk Kota Tegal meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan sebesar 3,83 persen pada tahun 2015, terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yaitu berturut-turut sebesar 3,88 persen (2016); 4,29 persen (2017); 4,39 persen (2018); dan menurun sedikit pada tahun 2019 menjadi 4,38 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 1 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat.

## B. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sebagai salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, maka Nilai Tukar Petani (NTP) mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100, maka petani mengalami profit, dan memiliki daya beli untuk kebutuhan/ konsumsi selain biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka dapat dikatakan petani lebih sejahtera, dan semakin demikian pula sebaliknya.

**Tabel 2.59 Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Tegal Tahun 2015-2019**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	11.477.086	10.278.675	10.292.675	-	-
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	-
3.	<b>Rasio</b>	<b>127,52</b>	<b>114,21</b>	<b>114,36</b>	<b>107,00</b>	<b>102,48</b>

Sumber : DKPPP Kota Tegal, 2019

NTP Petani Kota Tegal dalam lima tahun selalu diatas 100, namun menunjukkan kecenderungan menurun. Ini dikarenakan indeks kenaikan produk pertanian lebih kecil daripada indeks kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani. Yang berarti daya beli petani menurun. Selain itu, ada hal-hal yang bersifat teknis yang turut menambah biaya produksi sektor pertanian. Sebagaimana diketahui, perubahan iklim sangat mempengaruhi proses tanam. Di Kota Tegal, bertambahnya lahan yang terkena intrusi turut berpengaruh. Selain itu penggunaan pupuk kimia dalam jangka waktu lama membuat tanah keras dan non produktif, sehingga diperlukan lebih banyak pupuk untuk mendapatkan hasil yang sama. Penggunaan teknologi hijau dan pupuk organik dapat menjadi pilihan, namun harus didukung oleh semua pihak terkait.

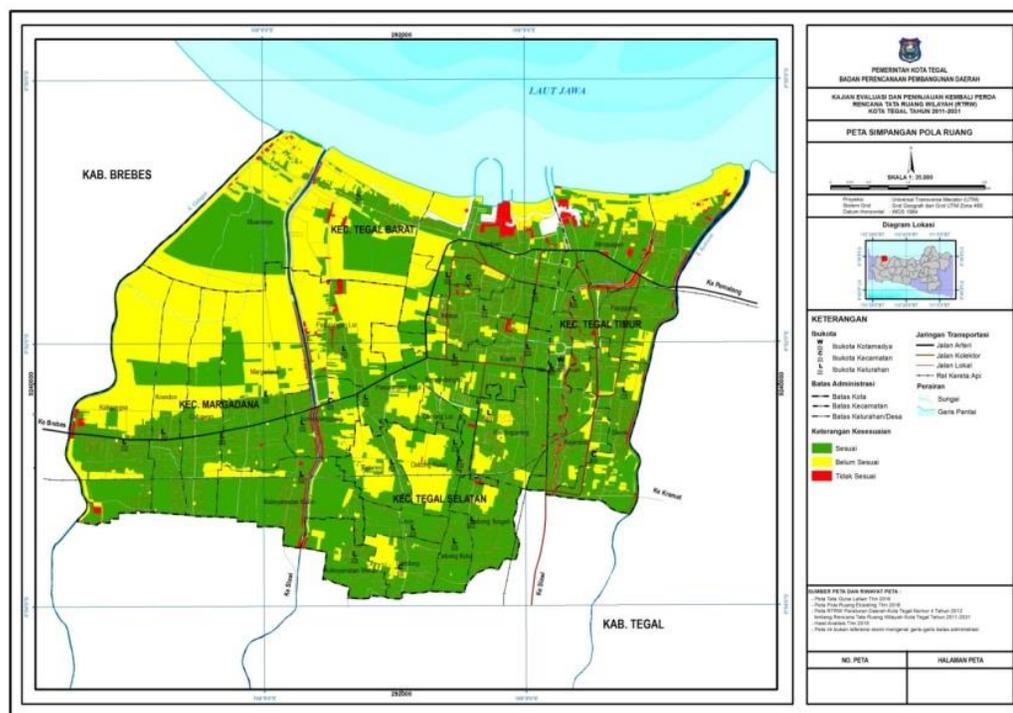
#### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

##### A. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah adalah untuk mengetahui kesesuaian penggunaan ruang dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah diketahui bahwa terdapat 35,69% total luas penggunaan lahan yang belum sesuai atau sekitar 1294,92 Ha. Ketidaksesuaian ini terdapat di Kecamatan Tegal Barat seluas 452,51 Ha yaitu di Kelurahan Debong Lor, Kemandungan, Kraton, Muarareja, Pekauman, Pesurungan Kidul dan Tegalsari. Di Kecamatan Tegal Selatan seluas 145,13 Ha antara lain Kelurahan Bandung, Debong Kidul, Debong Kulon, Debong Tengah, Kalinyamat Wetan, Keturen, Randugunting dan Tunon. Di Kecamatan Tegal Timur seluas 137,39 Ha antara lain di Kelurahan Kejambon, Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung dan Slerok. Di Kecamatan Margadana seluas 1240,73 Ha diantaranya di Kelurahan Cabawan, Kaligangsa, Kalinyamat Kulon, Krandon, Margadana, Pesurungan Lor dan Sumurpanggung.

Sedangkan total luas lahan yang telah sesuai adalah sebesar 2268,38 Ha atau 65,25% yang tersebar di Kecamatan Tegal Barat seluas 657,91 Ha, Kecamatan Tegal Selatan seluas 454,15 Ha, Kecamatan Tegal Timur seluas 491,61 Ha dan Kecamatan Margadana seluas 653,61 Ha. Untuk peruntukan penggunaan lahan yang tidak sesuai di Kota Tegal adalah sebesar 1,79% atau seluas 64,9 Ha. Ketidaksesuaian tersebut terdapat di Kecamatan Tegal Barat seluas 19,96 Ha yang tersebar di Kelurahan Debong Lor, Kraton, Muarareja, Pekauman dan Kelurahan Tegalsari. Di Kecamatan Tegal Selatan seluas 1,34 Ha yang tersebar di Kelurahan Debong Kulon, Debong Tengah, Kalinyamat Wetan dan Kelurahan Randugunting. Sementara di Kecamatan Tegal Timur terdapat ketidaksesuaian seluas 26,15 Ha yang tersebar di Kelurahan Kejambon, Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung dan Slerok. Lokasi simpangan dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 2.22 Simpangan Pola Ruang Kota Tegal



**2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam keputusan untuk berinvestasi. Selain faktor-faktor ekonomi, faktor non ekonomi seperti kondisi politik, stabilitas keamanan dan penegakan hukum menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menarik minat investasi. Dalam bagian ini akan dijelaskan perkembangan situasi kemandirian dan aspek lain yang berpengaruh terhadap iklim investasi di Kota Tegal

**A. Angka Kriminalitas**

Kriminalitas merupakan salah satu indikator yang menggambarkan rasa aman bagi masyarakat. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas usaha ekonomi produktif.

**Tabel 2.60 Angka Kriminalitas Kota Tegal Tahun 2015-2019**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kasus Narkoba	15	25	32	28	25
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	0	1	1	0	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	2	2	0	0	0
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	17	18	12	3	8
5.	Jumlah Kasus Pencurian	110	93	76	52	83
6.	Jumlah Kasus Penipuan	27	31	19	10	14

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	4	0	0	0	1
8.	Jumlah Kasus Lainnya	82	120	68	55	66
8.	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	257	290	208	148	190
9.	Jumlah Penduduk	275.982	276.734	280.117	281.809	284.919
10.	<b>Angka Kriminalitas (8)/ (9)</b>	<b>0,093</b>	<b>0,104</b>	<b>0,074</b>	<b>0,053</b>	<b>0,067</b>

Sumber : Polresta Tegal, 2019

Dari Tabel di atas dapat dilihat kasus kriminal yang menonjol terjadi adalah kasus pencurian, dari tahun 2014 – 2017 ada kecenderungan turun namun di Tahun 2018 ada kenaikan yaitu 31 kasus atau 59,61% dari kasus kejahatan tahun sebelumnya (Tahun 2017), sedangkan kasus kriminalitas yang paling sedikit adalah kasus pembunuhan yaitu 1 (satu) kasus yang terjadi pada Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2018. Sedangkan Kasus lainnya meliputi: Penggelapan, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga, perampasan, pengeroyokan dll.

## B. Jumlah Demonstrasi

Jumlah unjuk rasa atau demonstrasi yang berjalan dengan damai dapat menjadi indikator stabilitas keamanan wilayah. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kota Tegal relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar lain di Indonesia. Dari data yang ada unjuk rasa di Kota Tegal seluruhnya berlangsung damai.

**Tabel 2.61 Jumlah Demo di Kota Tegal Tahun 2015-2019**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bidang Politik	1	4	6	0	4
2.	Ekonomi	3	7	4	4	2
3.	Kasus Pemogokan Kerja	0	0	0	0	0
4.	<b>Jumlah Unjuk Rasa</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

Sumber : Polresta Tegal, 2019

### 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan demikian menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan baik nasional maupun daerah. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia juga dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan

investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka daya saing daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

#### A. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Kondisi angkatan kerja di Kota Tegal berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.62 Rasio Lulusan S1/ S2/ S3 di Kota Tegal Tahun 2015-2019**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Lulusan S1	11.675	11.780	11.880	12.259	12.427
2.	Jumlah Lulusan S2	652	651	671	705	729
3.	Jumlah Lulusan S3	11	10	14	13	15
4.	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	12.338	12.441	12.565	12.977	13.171
5.	Jumlah Penduduk	276.734	280.117	281.809	284.919	286.376
6.	<b>Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5)</b>	<b>0,0445</b>	<b>0,0444</b>	<b>0,0445</b>	<b>0,0455</b>	<b>0,0459</b>

Sumber: Data Disdukcapil diolah, 2019

Rasio lulusan sarjana baru mencapai sekitar 0,0445 di tahun 2017. Sehingga program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti pelatihan kerja dan kewirausahaan mutlak diperlukan agar angkatan kerja di Kota Tegal mampu bersaing di dunia kerja.

#### B. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Sedangkan penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap produktif. Atas dasar konsep ini maka dapat digambarkan berapa jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif/ usia kerja.

Konsep ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tinggi angka *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian sebaliknya. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka

ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

**Tabel 2.63 Rasio Ketergantungan di Kota Tegal Tahun 2015-2019**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	61.181	66.479	67.695	68.337	68.054
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	15.617	15.680	16.230	16.278	18.215
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	76.798	82.159	83.925	84.615	86.269
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	199.936	197.958	197.884	200.412	200.107
5.	<b>Rasio Ketergantungan (3)/ (4)</b>	<b>0,38</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,43</b>

Sumber: Data Disdukcapil diolah, 2019

Selama periode lima tahun terakhir, yaitu 2015 sampai dengan 2019, angka beban tanggungan penduduk Kota Tegal belum mengalami perubahan yang nyata dengan kisaran angka 0,43 dengan kecenderungan stagnan. Angka ketergantungan Kota Tegal ini masuk dalam kelompok tinggi, karena lebih dari 41. Rasio beban tanggungan penduduk Kota Tegal yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi daerah, karena sebagian pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif harus dibagikan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum/ tidak produktif.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPd sampai Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian di arahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPd). Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya

menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan tahun berikutnya. Mulai Tahun 2017, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia telah menerapkan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 2.64 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Tegal Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun								Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		% Capaian	Status Capaian
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>													
1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,93-5,43	5,13-5,63	5.44	5,23-5,73	5.46	5,33-5,93	5.46	5,43-5,93	5,77	100	Tercapai
2	Inflasi	%	4 ± 1	4 ± 1	2.71	4 ± 1	4.03	4 ± 1	3.08	4±1	2,56	100	Tercapai
3	Persentase penduduk miskin	%	9.76	9.2	8.2	8.92	8.11	8.64	7.81	8,36	7,47	111,91	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9	8.5	NA	8.25	8.19	8	7.94	7,75	8,07	96,03	Tidak Tercapai
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	74.84	75.26	73.55	75.47	73.95	75.68	73.95	75,89	74,93*	100	Tercapai
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	64.92	65.88	NA	66.36	92.92	66.84	92.92	67,32	79,57	135,91	Tercapai
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	67.65	68.07	NA	68.28	77.52	68.49	77.52	68,7	93,37	118,2	Tercapai
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>													
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>													
<b>A.</b>	<b>Pendidikan</b>												
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini 4-6 tahun (PAUD)	(%)	31.5	32.9	82.86	33.6	82.86	34.3	67.72	74,12	88,42	119,29	Tercapai
2	Angka Partisipasi Kasar SD sederajat	(%)	115	115	102,52	115	103.37	115	103.54	115	103,14	89,69	Tidak Tercapai
3	Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat	(%)	111	111	112,94	111	107.1	111	110.74	111	107,81	97,13	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(%)	98	98,8	93,2	98.2	93.83	99.6	94.34	100	93,81	100	Tercapai
5	Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	(%)	71	74,6	93,58	76.4	88.54	78.2	93.8	80	81,05	80	Tidak Tercapai
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(%)	0.38	0,32	0,16	0.29	0.16	0.26	0.07	0,23	0,08	0,23	Tidak Tercapai
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(%)	0.53	0,49	0,29	0.47	0.27	0.45	0.11	0,43	0,14	0,43	Tidak Tercapai
8	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	99.44	99,66	100	99.77	100	99.88	99.98	100	100	100	Tercapai
9	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	99.86	99,9	100	99.92	99.88	99.94	100	99,96	100	99,96	Tidak Tercapai
10	Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik	(%)	80.32	83,4	91,82	83.6	94.5	83.8	96.21	84	98,00	116,67	Tercapai
11	Ruang kelas SMP/ MTs dalam kondisi baik	(%)	80.97	81,5	86,09	82	91.74	92.5	92.83	83	92,83	111,84	Tercapai
12	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	(%)	97.73	98,23	99,83	98.48	99.88	98.73	99.96	99	99,98	100,99	Tercapai
13	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	63.24	66,9	77,18	69.1	92.28	70.9	94.74	72	86,12	119,61	Tercapai
14	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	83.08	86,7	95,96	88.1	94.34	89.5	97.5	90,70	96,25	106,12	Tercapai
15	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	90.5	92,5	97,34	94.1	99.33	95.9	98.2	96,70	90,71	93,81	Tidak Tercapai
<b>B.</b>	<b>Kesehatan</b>												

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	(%)	100	100	0	100	0	100	33.3	100	59,26	59,26	Tidak Tercapai
4	Cakupan Posyandu strata Mandiri	(%)	60	84,00	96,50	92	70.3	100	76.8	100	78,82	78,82	Tidak Tercapai
5	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	(%)	89,56	91,40	89,90	91.8	90	92.2	89.23	92,50	91,35	98,75	Tidak Tercapai
6	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/ umur)	(%)	1.7	1,50	1,45	1.4	1.62	1.3	0.51	1,20	0,49	158,58	Tercapai
8	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/tinggi badan)	(%)	0.27	0,20	0,17	0.17	0.16	0.14	0.12	0,15	0,189	74	Tidak Tercapai
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
10	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	(%)	50,00	54,00	52,67	56	54.18	61	60.53	65	57,3	88,15	Tidak Tercapai
11	Cakupan keluarga sadar gizi	(%)	59.01	69,00	75,81	73.5	66.39	77.5	59.01	80	67,28	84,1	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
12	Cakupan Rumah Sehat	(%)	89,17	92,00	72,00*	93	75,17*	94	75.28	95	85,8	90,31	Tidak Tercapai
13	Angka kesakitan DBD	Per 100.000 Penduduk	30.66	33,00	53,00	30	28.5	27	2.1	24	31,94	66,91	Tidak Tercapai
14	Angka kematian DBD	(%)	< 2	< 2,00	2,3	<2	1.18	< 2	0	<2.00	3,3	65	Tidak Tercapai
15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
16	Prosentase penderita HIV/IMS yang diobati	(%)	100	100	80,00	100	97	100	100	100	100	100	Tercapai
17	Penemuan baru TB Paru positif (CDR)		60	70,00	40,09	75	60.82	80	85.53	85	81,01	95,30	Tidak Tercapai
18	Prevalensi TB Paru	(per 10.000 penduduk)	64	75	95,12	42	63.7	86	88.4	91	97	93,40	Tidak Tercapai
19	Prevalensi penderita Kusta yang ditemukan	(per 10.000 penduduk)	1.25	1,35	1,51	1.4	1.45	1.45	1.16	1,50	0,84	156	Tercapai
20	Angka kesembuhan (RFT) Kusta	(%)	67.5	75,00	88,35	79	83.35	83	87.05	85	88,35	103,94	Tercapai
21	Prosentase penderita ISPA Pneumonia pada Balita yang ditemukan tertangani	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
22	Kelurahan dengan UCI	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
23	Tertanganinya KLB > 24 jam	(%)	100	100	100	100	100	100	Tidak ada KLB	100	100	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
24	AFP rate (penemuan penderita lumpuh layuh pd penduduk usia > 15 th)	(per 100.000 penduduk)	2	2,00	1	2	2	2	3.34	2	8,42	421	Tercapai
25	Cakupan puskesmas yang representatif	(%)	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	75	75	Tidak Tercapai
26	Angka kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	14	12,00	12,33	10	11	8	7.62	7,00	8,13	86,1	Tidak Tercapai
27	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1000 kelahiran Hidup	17	13,00	15,59	12	14	10	8.82	8	3,08	100	Tercapai
28	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	(%)	95	97,00	117,45	98	123.6	99	102	100	100	100	Tercapai
29	Cakupan kunjungan bayi	(%)	95	96,00	95,85	96	91.8	97	90.8	98	95,42	97,36	Tidak Tercapai
30	Cakupan kunjungan Balita	(%)	96	97,00	90,45	98	94.66	99	95.68	100	97,82	97,82	Tidak Tercapai
31	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	6	4,00	3,00	3	2	3	1	3	3	100	Tercapai
32	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	(%)	95,00	95,00	95,00	95	95	95	95	95	95,6	100,63	Tercapai
33	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	100,00	100,00	99,95	100	99.98	100	100	100	100	100	Tercapai
34	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	95	97,00	93,30	98	94	98	95	99	96,2	97,17	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
35	Cakupan pelayanan nifas	%	100,00	100,00	99,95	100	100	100	99,98	100	99,98	99,98	Tidak Tercapai
36	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100,00	100,00	123,39	100	115	100	100	100	100	100	Tercapai
37	BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	74	73,20	71,6	74,7	69,92	76,2	62	77,70	59	75,93	Tidak Tercapai
38	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	Hari	4,3	5,30	4,0	5,3	4,1	5,3	4,1	5,30	3,94	134,52	Tercapai
39	TOI (Turn Over Interval)	Hari	1,5	1,90	1,7	1,8	1,9	1,7	2,9	1,50	3,20	46,88	Tidak Tercapai
40	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	Kali	56,4	45,50	60,5	46,4	57,1	47,3	47,3	48,20	47,40	98,34	Tidak Tercapai
41	NDR (Net Death Rate)	Per 1000	32,3	31,70	27,5	31,4	30,8	31,1	31,5	30,80	28,01	109,96	Tercapai
42	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	%	78	78,70	77,68	79	77,38	79,5	80,75	80	82,67	103,34	Tercapai
43	Zero Komplain (Jumlah Komplain dibagi dengan Jumlah Kunjungan)	%	0,018	0,022	0,00048	0,022	0,00043	0,021	0,019	0,021	0,019	110,52	Tercapai
<b>C.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>												
1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	73,93	74,20	95,12	74,5	95,69	75,5	94,73	75,8	88,69	117	Tercapai
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100	100	96,77	100	100	100	100	100,00	100	100	Tercapai
3	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	60,55	61,20	63,10	61,27	63,15	61,33	68,89	61,44	71,85	116,94	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
4	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	68.56	69,67	69,75	70.22	69.8	70.78	70.21	71,35	71,55	100,28	Tercapai
5	Prosentase wilayah bebas genangan banjir	%	94.76	95,66	97,40	96.3	97.47	96.78	97.47	97,11	98,17	101,09	Tercapai
6	Persentase kawasan kumuh	%	3.96	3,86	4,76	3.81	3.1	3.76	0.99	3,71	0,07	5300	
7	Panjang trotoar yang direvitalisasi dan dibangun	meter	NA	16,000	11,225	24,000	14,454.60	32,000	14,456.60	40.000	14.456,6	36,14	Tidak Tercapai
8	Persentase LPJU yang terlayani meterisasi	%	86.11	90,89	92,44 (6428/ 6953 titik)	91.5	92,5 (6449/ 697 titik)	93.2	95,14 (7.245/ 7.615 titik)	94,10	99,36 (7.733/7.7 83) titik	105,59	Tercapai
9	Persentase LPJU yang menggunakan <i>Light Emitting Diode</i> (LED)	%	1.44	10.25	16,91 (1176/ 6953 titik)	12.07	49,94 (3481/ 6971 titik)	15.5	80 (6.092/ 7.615 titik)	17,2	98,21(7.6 44/7.783) titik	570,99	Tercapai
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital :												
10	Peta analog	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
11	Peta digital	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
12	Persentase kawasan yang memiliki RTBL	%	14.3	42.8	33	57.1	33**	57.1	8.33	71,40	8,33	11,67	Tercapai
13	Tersediannya Perda RDTRK pada 4 SSPK	%	0	100	0	100	33***	100	0	100	0	0	Tidak Tercapai
14	Rasio Ruang Terbuka Hijau	%	32.15	33.1	11.3	33.22	11.3	33.34	11.59	33,47	11,15	33,31	Tidak Tercapai
<b>D.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>												
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97.36	98,42	96,91	98.95	97.26	99.48	97.59	99,70	93,98	94%	Tidak Tercapai
2	Penyediaan Rumah Bagi MBR	Unit	196	294	294	294	294	294	294	294	336	114,29%	Tercapai
3	Luas tempat pemakaman umum	ha	23.54	27,54	24,29	29.54	26.09	31.54	29.45	33,54	27,2	86,24%	Tidak Tercapai
<b>E</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>												
1	Cakupan penegakan Perda dan Perwal Kota Tegal	%	100	100	100	100	92.3	100	100	100	100	100	Tercapai
2	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	%	100	100	100	100	94.03	100	93.6	100	100	100	Tercapai
3	Angka Kriminalitas	kasus	145	130	130	125	118	115	190	105	134	78,36	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
4	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kali/ hari	3	3	4	3	3	3	3	3	3	100	Tercapai
5	Cakupan rasio petugas linmas (1 orang tiap RT atau sebutan lainnya)/ per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	42.14	43	35	44	40.9	45	40.9	46	40,9	88,91	Tidak Tercapai
6	Tingkat partisipasi dalam pemilu	%	79	-	0	-	0	80	70.98	80	74,91	93,64	Tidak Tercapai
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	%	33.33	1	33,3	1	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	%	65	47.7	86,36	72.7	90.9	75	75	75	75	100	Tercapai
9	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	25	70	2	70	63.63	50	60	50	60	120	Tercapai
10	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	Unit	3	35	0	40	1	1	1	1	2	200	Tercapai
<b>F</b>	<b>Sosial</b>												
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	(%)	8.79	11,00	16,07	12	91.1	13	90.09	15	94,21	628,07	Tercapai
2	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	(%)	100	100	16,74	100	90	100	89.27	100	92,14	92,14	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
3	Persentase PMKS skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain.	(%)	80	82,00	80,00	83	91	84	22.59	85	24,54	28,27	Tidak Tercapai
4	Persentase korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	(%)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Tercapai
5	Persentase korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	(%)	0	80,00	-	82	-	80	-	80	-	100	Tercapai
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	(%)	62.12	64,00	10,26	65	68.01	66	69.95	68	128,30	188,68	Tercapai
7	Persentase Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
8	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	(%)	0	25,00	0	50	60	50	40	62,50	40	64	Tidak Tercapai
9.	Persentase (%) PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	%	42.4	47.5	40	50	58	52.5	100	55	53	96,36	Tidak Tercapai
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>													
<b>A</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>												
1	Pencari kerja yang ditempatkan	(%)	72.06	75,24	75,50	76.82	82.97	78.41	28.46	80	25,02	31,28	Tidak Tercapai
2	Proporsi UMK terhadap KHL	(%)	100	100	100	100	100	100	-	100	-*)	-*)	
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	(%)	57.1	75,00	57,00	75	51.28	75	39.21	75	47,62	63,49	Tidak Tercapai
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	(%)	33.3	60,00	60	65	41.32	70	22.12	75	39,80	53,07	Tidak Tercapai
5	Keselamatan dan Perlindungan (persentase perusahaan yang menerapkan KS)	(%)	35	42,00	43,19	36.3	Tidak Tercapai	47	-	50	-*)	-*)	

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
6	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	5	100	Tercapai	10	7	10	7	10	9	90	Tidak Tercapai
7	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Naker	(%)	57.79	52.28	Tidak Tercapai	59.45	71.86	57.79	93.86	60	107,9	179,83	Tercapai
8	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	(%)	85.02	31.6	Tidak Tercapai	88.75	-	85.02	-	90	-*)	-*)	
9	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	(%)	94.24	100	Tercapai	94.68	-	94.84	-	95	-*)	-*)	
<b>B</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>												
1	Persentase Focal point aktif	%	0	100	78,12	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	Persentase Forum Anak Aktif	%	31.25	56,25	56,25	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Persentase Sekolah Ramah Anak	%	0.003	25,00	25,00	25	25	25	25	100	100	100	Tercapai
4	Rasio KDRT	%	0.57	0,56	0,0002	0.56	0.007	0.55	0.009	0,55	0,02	2750	
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	0.57	0,56	94,74	0.56	100	0.55	100	0,55	100	100	Tercapai
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	%	0.57	0,56	68,42	0.56	0	0.55	100	0,55	100	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
7	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	0.57	0,56	68,42	0.56	-	0.55	-	0,55	7,89	143,5	Tercapai
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100	100	100	-	100	-	100	21,05	21,05	Tidak Tercapai
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	75	80	5.26	85	100	90	100	95	100	105	Tercapai
10	Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
11	Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
<b>C</b>	<b>Pangan</b>												

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
1	Ketersediaan pangan utama	(ton)	3,380	3.38	3,210	3,385	3,082	3,385	3,148	3.385	2.912	86,02	Tidak Tercapai
2	Ketersediaan energi perkapita	(%)	92.5	93,50	92	93.3	93	93.5	91.6	93,50	91,7	98,07	Tidak Tercapai
3	Ketersediaan protein perkapita	(%)	91.25	91,75	90	91.75	92	91.75	100	91,75	100	108,99	Tercapai
4	Penguatan cadangan pangan	(%)	81	85,00	85	85	83	85	84	90	84	93,33	Tidak Tercapai
5	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	(%)	96	98,00	98	99	97	99	98	99	98	98,98	Tidak Tercapai
6	Stabilitas harga dan pasokan pangan	(%)	91	91,00	88	91	90	91	90	91	90	98,90	Tidak Tercapai
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	(%)	86	90,00	90	90	85	90	86.15	90	85,20	94,66	Tidak Tercapai
8	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(%)	88	89,00	85	90	90	90	100	90	100	111,11	Tercapai
9	Penanganan daerah rawan pangan	(%)	100	100	100	100	100	100	90	90	90	100	Tercapai
<b>D</b>	<b>Pertanahan</b>												
1	Jumlah lahan tanah Pemda yang disertifikatkan	bidang	60	15	23	15	5	15	266	15	161	1073	Tercapai
<b>E</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>												
1	Persentase penanganan sampah	%	65	75	81,74	80	82.5	85	87.69	90	91,2	101,33	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)	Per 1000 penduduk	2.1	2,3	2,3	2.4	2.56	2.5	2.59	2,60	2,64	101,54	Tercapai
3	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	(%)	94	96	96	97	97	98	100	100	100	100	Tercapai
6	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7	Panjang Groin yang terbangun	(m)	1077	1.377	-*)	1.577	-*)	1777	-*)	1977	-*)	-*)	
<b>F</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>												
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	(%)	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	(%)	89	100	98,41	100	101.2	100	104.2	100	103,15	100	Tercapai
3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	(%)	50	60	50,30	75	100	80	94.4	85	94,01	100	Tercapai
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	(%)	20	30	100	40	101.2	50	100	60	100	100	Tercapai
5	Ketersediaan database kependudukan		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	100	Tercapai
6	Penerapan KTP berbasis NIK		sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	Sudah	100	Tercapai
7	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	Tidak Tercapai
<b>G</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>												
1	PKK aktif	(%)	82.25	89,35	85,00	92.9	100	96.45	100	100	*)	-	
2	Posyandu aktif	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	*)	-	
3	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi	LPM	6	12	12	15	15	18	6.25	21	*)	-	
4	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	(%)	38	42,00	44,44	44	44	45	25.75	47,00	*)	-	

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	(%)	95.83	97,50	100	98.33	100	99.17	76.24	100,00	*)	-	
<b>H</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>												
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2.3	2,2	1,77	2.2	2.24	2.2	2.2	2,2	2,15	102,32	Tercapai
2	Cakupan peserta KB aktif	%	73.38	73,40	72,52	73.4	73.47	73.41	70.22	73,42	72,07	98,16	Tidak Tercapai
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	15.21	15,05	13,85	14.97	12	14.89	15.08	14,81	13,60	108,90	Tercapai
4	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	73.38	73,40	72,52	73.41	70.99	73.41	67.93	73,42	69,79	95,06	Tidak Tercapai
5	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1.84	1,81	1,941	1.8	1.61	1.79	1.61	1,78	1,59	111,95	Tercapai
6	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	56.87	55,90	54,89	55.9	61.18	56.87	75.91	56,87	74,73	131,40	Tercapai
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	88.85	89.03	88.42	89.09	90.41	89.15	87.6	89,21	90,82	101,80	Tercapai
<b>I.</b>	<b>Perhubungan</b>												

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
1	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll)	%	23.21	35,69	48,37	40.8	54.29	47.36	43.5	61,36	62,2	100,97	Tercapai
2	Terpenuhinya standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kota	%	25	35,00	35,00	40	78.7	45	48.3	50,00	51	102	Tercapai
3	Persentase kendaraan yang lulus uji	%	97.45	97,55	99,00	97.6	94.29	97.65	98	97,70	98,19	100,5	Tercapai
<b>J</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>												
1	Jumlah jaringan komunikasi	unit	60	60	87	60	87	60	60	60	60	100	Tercapai
2	Web site milik pemerintah daerah	SKPD	2	11	23	7	45	5	30	31	30	96,77	Tidak Tercapai
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	25	100	50	0	75	75	100	100	100	Tercapai
4	Fasilitas pembinaan PPID SKPD	%	30	50	0	60	0	70	70	100	100	100	Tercapai
<b>K</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>												
1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina terhadap total UKM	%	61.5	63,10	23,78	63.55	23.89	64.35	8.2	64,58	48,84	75,63	Tidak Tercapai
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	38	42	47	44	59	45	1,879	47	1.895	4.032	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
3	Jumlah BPR/LKM	Unit	3	4	3	5	3	5	48	6	48	800	Tercapai
4	Jumlah UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	135	168	176	170	180	182	183	187	183	97,86	Tidak Tercapai
5	Persentase koperasi aktif	%	71.92	72,87	82,86	73.25	82.86	73.9	83.05	74,12	83,24	112,30	Tercapai
6	Persentase koperasi sehat	%	93.15	93,87	55,86	94.4	91.25	94.85	91.67	95,15	92,86	97,59	Tidak Tercapai
<b>L</b>	<b>Penanaman Modal</b>												
1	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	kali	1	1	1	1	1	1	1 kali	1 kali	1 kali	100	Tercapai
2	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	kali	1 (40 perush)	1 kali (100 perush)	1 kali (100 perush)	1 kali (100 perush)	1 kali (100 perush)	1 (100 perush)	1 kali (64 prsh)	1 kali (100 prsh)	1 kali (86 prsh)	100	Tercapai
3	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota	kali	2	2	2	2	4	2	3	3 kali pameran	3 kali pameran	100	Tercapai
4	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	kali	4	4	4	4	4	4	4	1 kali	1 kali	100	Tercapai
5	Jumlah investor berskala nasional	Investor	327 (s/d bl. Juni)	602	624	633	282	664	622	697	814	116,78	Tercapai
6	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Rupiah	1,39 T	1,68 T	684. 716. 711.	1,85 T	1,37 T	2,04 T	1,567,137,4 00,703	2,24 T	4,20 T	187,5	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
					807								
7	Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/ kota	%	83.33	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100	Tercapai
8	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	75	100	100	100	100	100	100	100%	100	100	Tercapai
9	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Bidang usaha unggulan	1	1	1	1	1	1	1	1 bidang usaha unggulan	1 bidang usaha unggulan	100	Tercapai
<b>M</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>												
1	Jumlah organisasi cabang olahraga	kelompok	28	5	4	2	1	1	4	1	0	0	Tidak Tercapai
2	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	5	2	6	2	4	1	1	1	2	200	Tercapai
3	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	Cabang	3	2	4	3	3	1	1	1	1	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
4	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	unit	6	1	0	1	0	-	-	-	-	100	Tercapai
5	Jumlah gedung olahraga	unit	2	1	0	1	1	-	-	-	-	100	Tercapai
6	Lapangan olahraga	Buah	132	6	0	3	4	-	-	-	-	100	Tercapai
<b>N</b>	<b>Statistik</b>												
1	Buku "Kota Tegal dalam angka"	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai
2	Buku "PDRB Kota"	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai
<b>O</b>	<b>Kebudayaan</b>												
1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	37	0	0	0	4	2	2	0	2	200	Tercapai
2	Cakupan Kajian Seni	Kali	2	2	3	2	3	3	3	2	4	200	Tercapai
3	Cakupan Fasilitas Seni	(%)	85.71	85.71	100	85.71	73.49	85.71	85.71	85,71	85,71	100	Tercapai
4	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	(%)	62.5	62.5	62,50	62.5	44.56	62.5	71.42	62,5	85,00	136	Tercapai
5	Cakupan Organisasi seni	(%)	100	100	70	100	66.7	100	100	100	100	100	Tercapai
6	Cakupan Tempat Umum	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7	Cakupan Gelar Seni	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
<b>P</b>	<b>Perpustakaan</b>												
1	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	23	35	10	16	16	45	59	47	82	174,47	Tercapai
2	Peningkatan kualitas perpustakaan (SDM)	Orang	12	14	10	14	17	14	16	15	25	166,67	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
3	Jumlah kunjungan perpustakaan dalam satu tahun	Orang	23,071	26,091	16,998	27,599	21,212	29,109	26,205	30.618	40.497	132,27	Tercapai
4	Tingkat Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	Eksemplar	28,221	32,221	34,651	34,221	37,822	36,221	41,672	38.221	34.740	90,89	Tidak Tercapai
<b>Q</b>	<b>Kearsipan</b>												
1	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD)	SKPD	3	10	9	10	86	10	30	10	10	100	Tercapai
2	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	Eks	0	200	150	250	220	300	220	350	2.000	571	Tercapai
3	Arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	perwal	0	1	0	0	0	1	2	1	1	100	Tercapai
	<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>												
<b>A</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>												
1	Produksi perikanan Tangkap	Ton	22,469.96	22.717,80	25.444,90	22,990.41	21,874.39	23,335.27	22,225.25	23.685,3	25.399,356	107,24	Tercapai
2	Produksi perikanan budidaya	Ton	1,511	1,655	1,671	1,749	1,783.98	1,836	597.34	1.298	598,17	46,08	Tidak Tercapai
3	Jumlah produksi hasil olahan ikan	ton	4,676	4,729	4,756	4,937	4,939	5,037	6,609.76	5.145	7.553,63	146,81	Tercapai
<b>B.</b>	<b>Pariwisata</b>												

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
1	Kunjungan wisata	Orang	464,599	473,583	506,480	478,568	538,229	483,580	498,884	488.705	502.096	102,7	Tercapai
2	Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Ribu Rp	974,521	1,058,694	1,058,232	1,109,379	1,642,130	1,167,598	1,616,111,175	1.223.478	1.617.512.250	132,2	Tercapai
3	Jumlah obyek wisata unggulan	Buah	1	2	2	2	2	2	2	2	2	100	Tercapai
<b>C</b>	<b>Pertanian</b>												
1	Produksi padi	Ton	4,839	4,839	3,589	4,839	3,082	4,839	3,402	4.839	2.490	51,45	Tidak Tercapai
2	Produktivitas Padi	Kw/ha	65.57	65,57	57,92	65.57	52.95	65.57	70.88	65,57	70	106,75	Tercapai
3	Angka prevalensi penyakit hewan (%)	(%)	8.57	5,26	5,15	3.62	3.4	1.98	2.73	1,19	1,17	101,70	Tercapai
4	Angka prevalensi penyakit zoonosis (%)	(%)	0.18	0,108	0,109	0.072	0.07	0.036	0.03	0,015	0,053	28,30	Tidak Tercapai
5	Produksi hasil telur	Ekor	2,236,513	2,269,734	1,356,902	2,286,529	2,592,675	2,303,484	2,344,373	2.303.448	2.372.406	102,99	Tercapai
6	Tingkat kenaikan produksi daging	(%)	0.21	0,01	2,96	0.1	0.14	0.01	0.89	0,01	0,91	91	Tidak Tercapai
7	Tingkat kenaikan produksi Susu	(%)	0.21	0,01	20,27	0.1	0.12	0.01	0.15	0,01	0,22	2200	Tercapai
8	Tingkat kenaikan produksi telur	(%)	0.21	0,01	1,79	0.1	0.91	0.01	1.58	0,01	0,17	1700	Tercapai
<b>D.</b>	<b>Perdagangan</b>												

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
1	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Jenis	4	4	7	4	7	5	7	5	7	140	Tercapai
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	449,341	495.4	12.344.540,61	520,168.00	7,784,219.25	546,176	9,631,003.32	573,485	14.965.480,06	2.609	Tercapai
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14.94	15,06	28,33	15.12	28.33	15.18	27.99	15,24	27,99	183,66	Tercapai
4	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	23.52	23.52	21,74	23.52	26.92	29.41	30.43	35,29	30,43	86,23	Tidak Tercapai
5	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	78.57	78.57	78,57	85.71	78.57	85.71	78.57	85,71	85,71	100	Tercapai
<b>E.</b>	<b>Perindustrian</b>												
1	Persentase industri yang memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas)	%	22	30	30	35	8.59	40	17.76	45,00	17,76	39,47	Tidak Tercapai
2	Jumlah industri kecil dan menengah (IKM)	unit	3,856	3,933	3,900	4,012	1,665	4,092	1,599	4.194	1.567	37,36	Tidak Tercapai
3	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal	unit	10.76	11.03	11,00	11.25	11.47	11.48	36.04	11,77	12,00	101,95	Tercapai
4	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	6.05	6.48	15,19	6.58	14.88	6.69	15.43	6,82	15,19	222,73	Tercapai
5	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	13.11	13.83	13,84	14.21	14.47	14.63	14.47	15,33	14,47	94,39	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
6	Persentase kluster industri yang berkembang	%	10	20	20	30	31.58	40	21.28	50,00	21,28	42,56	Tidak Tercapai
<b>F</b>	<b>Ketransmigrasian</b>												
1	Persentase penempatan transmigran	%	0	100	50	100	100	100	0	100	*)	*)	
	<b>Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang</b>												
<b>A</b>	<b>Administrasi Pemerintah</b>												
1	Jumlah Raperda masuk Prolegda yang Dibahas dan Ditetapkan	Perda	5	10	12	12	7	11	11	8	8	100	Tercapai
2	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda	buah	22	4	8	5	13	4	1	4	5	125	Tercapai
3	Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda		18	20	39	21	51	22	62	23	89	387	Tercapai
<b>B.</b>	<b>Pengawasan</b>												
1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Dokumen	96	96	96	96	96	96	96	96	256	266,67	Tercapai
2	Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	orang	15	19	19	19	21	19	21	19	23	121.05	Tercapai
<b>C</b>	<b>Perencanaan</b>												

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	Tercapai
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	2	2	3	2	2	2	2	2	2	100	Tercapai
3	Persentase SKPD memiliki Renstra SKPD sesuai standar.	%	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4	Persentase SKPD menyusun Renja SKPD sesuai standar	%	80	100	0	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
<b>D. Keuangan</b>													
1	Jumlah PAD	Juta Rp	172,418	210.453	287,342.20	232,987	306,830.5	258,266	278,032.60	306.557.626.000	285.575.788.984,16*)	93,16	Tidak Tercapai
2	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi)	(%)	23.12	23,29	27,34	23.75	29.94	24.29	28.05	24,81	27,54	111	Tercapai
<b>E. Kepegawaian</b>													
1	Jumlah PNS mengikuti pendidikan kedinasan	%	50	120	53	120	130	110	89	160	327	204,4	Tercapai
2	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan	%	13.2	15,00	11,9	15.6	14.2	16.7	17.09	17,30	30,1	176,1	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Akhir Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
3	Rasio PNS terhadap penduduk	%	1,85	1,85	1,39	1,85	1,34	1,85	1,24	1,85	1,30	70,2	Tidak Tercapai

Hasil evaluasi Indikator Kinerja Daerah Kota Tegal pada Tahun 2019 (akhir periode RPJMD Kota Tegal 2014-2019) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dan memerlukan perhatian didalam penyusunan kebijakan perencanaan ke depan khususnya di Tahun 2021, sebagai berikut :

**Tabel 2.65 Target Indikator Kinerja Daerah Kota Tegal yang Perlu Menjadi Fokus Perhatian  
Dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR
1. Berkembangnya kuantitas dan kualitas koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase koperasi sehat</li> </ul>
2. Berkembangnya UMKM yan mencakup kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilita UMKM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha Mikro dan Kecil</li> </ul>
3. Meningkatnya realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)</li> </ul>
4. Meningkatnya ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan energi perkapita (%)</li> </ul>
5. Meningkatnya distribusi pangan secara merata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)</li> </ul>
6. Meningkatnya diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</li> </ul>
7. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produksi padi</li> <li>Produktivitas hortikultura</li> </ul>
8. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produksi perikanan budidaya</li> </ul>
9. Berkembang dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pasar yang memenuhi persyaratan</li> </ul>
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tata bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase gedung yang dibangun sesuai standar tata bangunan</li> </ul>
11. Meningkatnya pelayanan pemakaman umum bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio TPU/ satuan penduduk</li> </ul>
12. Meningkatnya kualitas pengelolaan Ruang Terbuka hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB</li> </ul>
13. Meningkatnya jumlah petak tanah pemda yang tersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah lahan tanah Pemda yang disertifikatkan</li> </ul>
14. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)</li> </ul>
15. Meningkatnya kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs</li> </ul>
16. Meningkatnya akses masyarakat untuk bersekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A</li> </ul>
17. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka kematian Bayi (AKB)</li> <li>Angka Kematian Balita</li> </ul>
18. Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk</li> </ul>
19. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan peserta KB aktif</li> </ul>
20. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</li> </ul>
21. Meningkatnya kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan</li> <li>Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)</li> </ul>
22. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kunjungan perpustakaan dalam satu tahun</li> <li>Jumlah organisasi olahraga</li> </ul>

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2019, disajikan pada tabel 2.66. Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019 masih menggunakan implementasi UU No.32 Tahun 2004, sedangkan mulai tahun 2017, seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia sudah harus mengimplementasikan UU No.23 Tahun 2014. Terkait hal tersebut, Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2019 kami susun menyesuaikan pembagian urusan konkuren sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Tabel 2.66 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal  
Sampai dengan RKPD Tahun 2019**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>							
<b>Pendidikan</b>							
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	74,12	74,12	88,42	119,29	Tercapai	Disdikbud
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SD sederajat	115	115	103,14	89,69	Tidak Tercapai	Disdikbud
	Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat	111	111	107,81	97,13	Tidak Tercapai	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	100	93,81	94,19	Tidak Tercapai	
	Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	80	80	81,05	103,65	Tercapai	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,23	0,23	0,08	287,50	Tercapai	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,43	0,43	0,14	307,14	Tercapai	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100,00	Tercapai	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,96	99,96	100	100,04	Tercapai	
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	6,83	6,83	6,16	90,19	Tidak Tercapai	
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	7,5	7,5	5,84	77,33	Tidak Tercapai	
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas baik	84	84	98,00	116,67	Tercapai	
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik	83	83	92,83	111,84	Tercapai	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	51,97					
	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata	11					
Program Pendidikan Non Formal	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	99	99	99,98	100,99	Tercapai	Disdikbud
	Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	73					
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	72	72	86,12	119,61	Tercapai	Disdikbud
	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,7	90,70	96,25	106,12	Tercapai	
	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	96,7	96,70	90,71	93,81	Tidak Tercapai	
	Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99					
	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD / MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman didaerah terpencil	100					
	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar	100					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.						
	Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100					
	Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	100					
	Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervise dan pembinaan	100					
Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat	113					
	Angka partisipasi murni SMA sederajat	90					
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,31					
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100					
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMA/MA	7,5					
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) siswa SMK	7,6					
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi Ruang Kelas baik	88					
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	30					
	Rasio guru terhadap murid	10					
Kesehatan							
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Persentase ketersediaan bahan dan alat penunjang obat sesuai dengan kebutuhan	100	100	100	100	Tercapai	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya pelayanan Jamkesta						Dinkes
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	Tercapai	
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	Tercapai	
	Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	100	100	59,26	59,26	Tidak Tercapai	
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/MI	100					
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SLTP/SLTA	100					
	Angka bebas jentik	95					
	Cakupan Posyandu strata Mandiri	100	100	78,82	78,82	Tidak Tercapai	
	Rasio posyandu per satuan balita	12,87					
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	92,5	92,50	91,35	98,75	Tidak Tercapai	Dinkes
	Presentase pengetahuan remaja siswa SLTA tentang kesehatan	80					
	Presentase pengetahuan masyarakat tentang kesehatan	75					
	Terpenuhinya media promosi kesehatan sesuai kebutuhan	100					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase tingkat partisipasi masyarakat ke Posyandu (D/S)	80					Dinkes
	Persentase Balita bawah garis merah yang naik berat badannya	85					
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	Tercapai	
	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/umur)	1,2	1,2	0,49	158,58	Tercapai	
	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/tinggi badan)	0,15	0,15	0,189	74	Tidak Tercapai	
	Universal salt Iodium	100					
	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi à satuan persen	2,59					
	Prevalensi balita gizi kurang àsatuan persen	11,8					
	Persentase cak Vitamin A pada bayi	100					
	Persentase cakupan vitamin A pada Balita	100					
	Persentase cakupan vitamin A pada ibu nifas	100					
	Persentase tablet Fe da folat pada ibu hamil	100					
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	Tercapai	
	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	65	65	57,3	88,15	Tidak Tercapai	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Cakupan keluarga sadar gizi	80	80	67,28	84,1	Tidak Tercapai	
Program pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Rumah Sehat	95	95	85,8	90,31	Tidak Tercapai	Dinkes
	Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	100%					
	Cakupan sarana air bersih PDAM pada kran umum perumahan yang memenuhi syarat kesehatan	85%					
	Cakupan sampel air bersih di perumling yang memenuhi syarat kesehatan	95%					
	Cakupan pengusaha industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat P-IRT	100%					
	Cakupan sarana Depot air Minum yang memenuhi syarat Kesehatan	95%					
	Cakupan pengusaha Industri Rumah Tangga Pangan yang melaksanakan CPPB	100%					
	Cakupan sanitasi makanan minuman pada PKL yang memenuhi syarat kesehatan	85%					
	Cakupan sampel makanan minuman pada JB dan RM/Rest yang memenuhi syarat kesehatan	100%					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Cakupan sampel makanan minuman pada PKL yang memenuhi syarat kesehatan	85%					
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesakitan DBD (per 100rb penduduk)	24	24	31,94	66,91	Tidak Tercapai	Dinkes
	Angka kematian DBD	< 2 %	< 2	3,3	65	Tidak Tercapai	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100	100	100	Tercapai	
	Angka bebas jentik	> 95 %					
	Presentase penderita HIV/IMS yang diobati	100%	100	100	100	Tercapai	
	Presentase anak usia 15 s/d 24 Tahun mengetahui 5 pengetahuan dasar HIV AIDS	85%					
	Angka kesembuhan (curre rate) penderita TB Paru	> 85%	85	81,01	95,30	Tidak Tercapai	
	Penemuan baru TB Paru positif (CDR)	85%	91	97	93,40	Tidak Tercapai	
	Prevalensi TB Paru (per 10.000 penduduk)	91					
	Prevalensi penderita Kusta yang ditemukan	1,5/10rb penduduk	1,5/10rb penduduk	0,84	156	Tercapai	
	Presentase penderita Kusta yang ditangani	100%					
	Angka kesembuhan (RFT) Kusta	85%	85	88,35	103,94	Tercapai	
	Presentase penderita diare Balita ditangani	100%					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Prosentase penderita Ispa Pneumonia pada Balita yang ditemukan tertangani	100%	100	100	100	Tercapai	
	UCI Kelurahan	100%	100	100	100	Tercapai	
	Tertanganinya KLB > 24 jam	100%	100	100	100	Tercapai	
	AFP rate (penemuan penderita lumpuh layuh pd penduduk usia > 15 th)	2/100.000 pddk >15th	2/100.000 pddk >15th	8,42	421	Tercapai	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar B	100%					Dinkes
	Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi ISO	12,50%					
	Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang akreditasi	100%					
	Proporsi pembiayaan kesehatan dari APBD	> 10%					
	Kajian District health account	100%					
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	Cakupan puskesmas yang representatif	100	100	75	75	Tidak Tercapai	Dinkes
	Cakupan pembantu puskesmas yang representatif	77,7					
	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	100					
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan lansia sehat	80%					Dinkes
	Cakupan kunjungan lansia	60%					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Proporsi Lansia kategori A yang mendapat layanan home care	90%					
	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	95	95	95,6	100,63	Tercapai	
Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	100	100	100	Tercapai	Dinkes
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	99%	99	96,2	97,17	Tidak Tercapai	
	Cakupan pelayanan nifas	100					
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	Tercapai	
	Jumlah Kematian Ibu (kasus)	3	3	3	100	Tercapai	
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	Tercapai	
	Cakupan peserta KB aktif	84	73,42	72,07	98,16	Tidak Tercapai	
Program Operasional BLUD	BOR (Bed Occupancy Ratio)	77,7	77,7	59	75,93	Tidak Tercapai	RSUD Kardinah
	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	5,3	5,3	3,94	134,52	Tercapai	
	TOI (Turn Over Interval)	1,5	1,5	3,20	46,88	Tercapai	
	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	48,2	48,2	47,40	98,34	Tidak Tercapai	
	NDR (Net Death Rate)	30,8	30,8	28,01	109,96	Tercapai	
	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	80	80	82,67	103,34	Tercapai	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Zero Komplain (Jumlah Komplain dibagi dengan Jumlah Kunjungan)	0,021	0,021	0,019	110,52	Tercapai	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan terbangun (km)	230,45					DPUPR
Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Jembatan terbangun	63					DPUPR
	Persentase jalan dalam kondisi baik	75,8	75,8	88,69	117	Tercapai	
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	100	100	100	100	Tercapai	
	Persentase LPJU yang terlayani meterisasi	94,1	94,10	99,36	105,59	Tercapai	
	Persentase LPJU yang menggunakan Light Emitting Diode (LED)	17,2	17,20	98,21	570,99	Tercapai	
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium)	56					DPUPR
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya	Persentase terbangunya sarana dan prasarana jaringan irigasi pertanian dan jaringan pengairan lainnya	80					DPUPR
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	61,44	61,44	71,85	116,94	Tercapai	DPUPR
	Cakupan pelayanan Sistem Drainase	56,31					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	71,35	71,35	71,55	100,28	Tercapai	
Program pengendalian banjir	Prosentase wilayah bebas genangan banjir	97,11	97,11	98,17	101,09	Tercapai	DPUPR
	Menurunnya luas Genangan banjir (Km2)	1,15					
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100					DPUPR
	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi	100					
Program pembangunan infrastruktur perkotaan	Persentase kawasan kumuh	3,71					DPUPR
	Panjang trotoar jalan yang direvitalisasi dan dibangun	40	40	14.454,6	36,14	Tidak Tercapai	
Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)	Tersedianya infrastruktur kelurahan	27					DPUPR/ KECAMATAN/ KELURAHAN
Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital:	100	100	100	100	Tercapai	DPUPR
	a. Peta analog (%)						
	b. Peta digital (%)	100	100	100	100	Tercapai	
	c. Persentase kawasan yang memiliki RTBL (%)	71,4	71,4	8,33	11,67	Tidak Tercapai	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	d. Tersediannya Perda RDTRK pada 4SPPK	100	100	0	0	Tidak Tercapai	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	33,47	33,47	11,15	33,31	Tidak Tercapai	DPUPR
	Jumlah bangunan ber-IMB	1087	1087	692	63,66	Tidak Tercapai	
	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0					
	Prosentase pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang yang tertangani (%)	100					
Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Program pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (unit)	294	294	336	114,29%	Tercapai	Disperkim
Program Lingkungan Sehat perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	99,70	99,7	93,98	94%	Tidak Tercapai	Disperkim
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (Unit)	490					
	Cakupan layanan sanitasi (%)	81,13	81,13	85,37	105,23	Tercapai	
Program pengelolaan areal pemakaman	Luasan tempat pemakaman umum (ha)	33,54	33,54	27,2	86,24%	Tidak Tercapai	Disperkim
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan penegakan Perda dan Perwal Kota Tegal (%)	100%	100	100	100	Tercapai	Satpol PP
	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) (%)	100%	100	100	100	Tercapai	
Program Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka Kriminalitas (kasus)	105	105	190	60,8	Tidak Tercapai	Satpol PP
	Angka kriminalitas tertangani (%)	16					
	Persentase (%) patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman	100					
	Cakupan patroli petugas Satpol PP	3	3	3	100	Tercapai	
	Jumlah pelanggar Perda ditertibkan	100%					
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan rasio petugas linmas per 10.000 penduduk	46	46	40,9	90,89	Tidak Tercapai	Kesbang
	Tingkat partisipasi dalam Pemilu	80	80	70,98	88.73	Tidak Tercapai	
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan	Pembinaan kesadaran wawasan wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP	4					Kesbang
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/ kepercayaan Kepada Tuhan YME	4					
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah kasus Pekat ditangani (%)	80%					Satpol PP
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pendidikan politik dan budaya demokrasi	4					Kesbang

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	100	100	100	100	Tercapai	Satpol PP
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK (%)	75	75	75	100	Tercapai	
	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi (%)	50	50	60	120	Tercapai	
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter Pada WMK (unit)	1	1	2	200	Tercapai	
Program pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam	Bintek peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana bagi masyarakat	1	1	-	-		BPBD
Sosial							
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	14	15	94,21	628,07	Tercapai	Dinsos
	Persentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	100	92,14	92,14	Tidak Tercapai	
	Persentase (%) PMKS skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain.	85	85	24,54	28,27	Tidak Tercapai	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	-	*) tidak ada kejadian tanggap darurat	Tercapai	Dinsos
	Persentase (%) korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	80	-	*) tidak ada kejadian tanggap darurat	Tercapai	
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	67	68	128,30	188,68	Tercapai	
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	Tercapai	Dinsos
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	62,5	62,5	40	64	Tidak Tercapai	Dinsos
	Persentase (%) PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	55	55	53	96,36	Tidak Tercapai	
Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dibina (%)	100					Dinsos
Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,	Tersedianya taman makam pahlawan yang representatif	100	100	100	100	Tercapai	Dinsos

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Keuangan dan Kesetiakawanan Sosial							
<b>Non Pelayanan Dasar</b>							
<b>Tenaga Kerja</b>							
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	80	80	25,02	31,28	Tidak Tercapai	Disnakerin
	Proporsi UMK terhadap KHL	100					
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75	75	47,62	63,49	Tidak Tercapai	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	75	75	39,80	53,07	Tidak Tercapai	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Keselamatan dan Perlindungan (%)	50	50	-	*) kewenangan Provinsi	-	Disnakerin
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10	10	9	90		
	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	60	60	107,9	179,83	Tercapai	
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	90	90	-	*) kewenangan Provinsi		
	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	95					
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		-	-	-		Disnakerin

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Focal point aktif (%)	100	100	100	100	Tercapai	DPPKBPPPA
	Forum Anak Aktif (Jumlah Forum Anak di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang aktif/Jumlah Forum Anak di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan) (%)	100	100	100	100	Tercapai	
	Persentase Sekolah Ramah Anak (%)	100	100	100	100	Tercapai	
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender (%)	100					DPPKBPPPA
	Meningkatnya partisipasi perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan (%)	100					
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,55	0,55	0,02	2750		DPPKBPPPA
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	0,55	0,55	100	100	Tercapai	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS(%)	0,55	0,55	100	100	Tercapai	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu(%)	0,55					
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	95	100	21,05	21,05		
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	105	Tercapai	
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100	100	100	100	Tercapai	
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	Tercapai	
	Persentase Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	91	50	-	-	-	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Meningkatnya kebijakan pengarusutamaan gender sebagai upaya peningkatan kualitas perlindungan anak dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan	100	100	-	-	-	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Semakin baiknya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dalam peningkatan SDM	100	100	-	-	-	DPPKBPPPA
Pangan							
Program peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama (ton)	3.385					DKPPP
	Ketersediaan energi perkapita (%)	93,5	93,5	91,7	98,07	Tercapai	
	Ketersediaan protein perkapita (%)	91,75					
	Penguatan cadangan pangan (%)	90					
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	99					
	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	91	91	90	98,90	Tercapai	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	90	90	89,3	99,22	Tercapai	
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	90					
	Penanganan daerah rawan pangan (%)	100					
	Terlaksananya promosi hasil pertanian di tingkat provinsi	80%					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Pertanahan							
Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah lahan tanah Pemda yang disertifikatkan	15	15	161	1.073	Tercapai	Bag. Tapem SETDA
	Jumlah kasus pertanahan	1	1	3	300	Tercapai	
Lingkungan Hidup							
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	90	90	91,2	101,33	Tercapai	DLH
	Ketersediaan Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	92					
	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (/1000 penduduk)	2,6	2,6	2,64	101,54	Tercapai	
	Jumlah TPS (unit)	50					
	Jumlah TPST (unit)	1					
	Tersedianya sarana dan prasarana TPA serta fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. (%)	35					
	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. (%)	98					
Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	100	100	100	100	Tercapai	DLH

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	Tercapai	
	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan (unit)	1					
	Kegiatan Penegakkan hukum lingkungan (%)	100					
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya (%)	95	95	100	100	Tercapai	DLH
Program peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis apencegahan pencemaran udara (%)	100	100	100	100	Tercapai	DLH
Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Panjang Groin yang terbangun (m)	1.977					
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTHK Perkotaan Publik (%)	12,60					DLH
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Program penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	100	100	100	100	Tercapai	Disdukcapil
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	100	100	100	103,15	Tercapai	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran (%)	85	85	85	94,01	Tidak Tercapai	
	Cakupan penerbitan akta kematian (%)	60	60	60	100	Tercapai	
	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	
	Penerapan KTP Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Tercapai	
Pemberdayaan Masyarakat							
Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat	PKK aktif (%)	100	100	100	100	Tercapai	KECAMATAN/ KELURAHAN
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2773					
	Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	Tercapai	
	LPM Berprestasi	21	21	60	285,71	Tercapai	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100					KECAMATAN/ KELURAHAN
Program pengembangan Lembaga Ekonomi	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (%)	47	47,00	*)	-		TIDAK DILAKSANAKAN
Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100					
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100					
Program peningkatan kapasitas pemerintah							
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,2	2,2	2,15	102,32	Tercapai	DPPKBPPPA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Rasio akseptor KB	73,422	73,422	72,07	98,16	Tidak Tercapai	
	Cakupan peserta KB aktif (%)	73,422	73,422	72,07	98,16		
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	14,81	14,81	13,60	108,90	Tercapai	
Program Pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan (%)	100					DPPKBPPPA
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	35					
	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern) (%)	73,42	73,42	69,79	95,06	Tidak Tercapai	
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	1,78	1,78	90,82	101,80	Tercapai	
Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	56,87	56,87	69,79	95,06	Tidak Tercapai	DPPKBPPPA
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	89,21	89,21	1,59	111,95	Tercapai	
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	89,21	89,21	74,73	131,40	Tercapai	DPPKBPPPA
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	1,78	1,78	90,82	101,80	Tercapai	
Perhubungan							

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersusunnya dokumen perencanaan penyelenggaraan perhubungan darat (dokumen)	1					Dishub
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	90	90,00	90,00	100	Tercapai	Dishub
Program peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan (%)	40					Dishub
	Terpenuhinya standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kota (%)	50%	50,00	51	102	Tercapai	
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji (%)	97,7	97,7	98,19	100,5	Tercapai	Dishub
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Pembangunan Halte	2					Dishub
	Tersediannya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam kota trayek	1					
	Standar Pelayanan Bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (%)	50	50	51	102	Tercapai	
Program Peningkatan Dan pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) (%)	61,36	61,36	62,2	100,97	Tercapai	Dishub
Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut	Terbentuknya tim pengembangan pelabuhan	1					Dishub

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Prosentase kepemilikan ijin PAS KECIL Kapal < 7 GT (%)	75%	75,00	-)*	-)*		
Komunikasi dan Informatika							
Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jumlah jaringan komunikasi (unit)	60	60	60	100	Tercapai	Diskominfo
	Web site milik pemerintah daerah	31	31	30	96,77	Tidak Tercapai	
	Jumlah penyiaran radio/TV (unit)	18					
Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi	100					Diskominfo
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	100	100	100	100	Tercapai	
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Jumlah Kajian dan Penelitian Untuk Menetapkan Kebijakan di Bidang Kominfo (dokumen)	0					Diskominfo
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Fasilitasi pembinaan PPID SKPD (%)	100	100	100	100	Tercapai	Diskominfo
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil menengah	Usaha Mikro dan Kecil yang dibina terhadap total UKM (%)	64,58	64,58	48,84	75,63	Tercapai	Dinkop UKM Dag
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	47	47	1.895	4.032	Tercapai	
	Jumlah BPR/LKM	6	6	48	800	Tercapai	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk (%)	187	187	183	97,86	Tidak Tercapai	
Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	74,12	74,12	83,24	112,30	Tercapai	Dinkop UKM Dag
	Persentase koperasi sehat (%)	95,15	95,15	92,86	97,59	Tercapai	
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Perkembangan kewirausahaan	2,2	2,2	4,4	200	Tercapai	Dinkop UKM Dag
Penanaman Modal							
Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	1 kali	1 kali	1 kali	100	Tercapai	DPMPTSP
	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali (100 perush)	1 kali (100 perush)	1 kali (86 prsh)	100	Tercapai	
	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	2 kali pmr	2 kali pmr	3 kali pameran	100	Tercapai	
	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	4 kali	4 kali	1 kali	100	Tercapai	
Program peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	697	697	814	116,78		DPMPTSP
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	2,24 T	2,24 T	4,20 T	187,5		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	100	100%	100	Tercapai	
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	10%					
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 bidang usaha unggulan	1 bidang usaha unggulan	1 bidang usaha unggulan	100	Tercapai	DPMPTSP
Kepemudaan dan Olaharaga							
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	-	-	-	-		Dinporapar
	Jumlah gedung olahraga	-	-	-	-		
	Lapangan olahraga	0	-	-	-		
Program pembinaan Dan pemsarakatan Olah Raga	Jumlah klub olahraga	3					Dinporapar
	Jumlah organisasi cabang olahraga	1	1	-	-		
	Jumlah kegiatan olahraga	1	1	2	200	Tercapai	
	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	1	1	1	100	Tercapai	
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Kegiatan kepemudaan	3	3	-	-		Dinporapar
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi Olahraga dari pemerintah kota	3					Dinporapar
Statistik							
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Buku "Kota Tegal dalam angka"	1	1	1	100	Tercapai	Diskominfo
	Buku "PDRB Kota Tegal"	1	1	1	100	Tercapai	
Kebudayaan							

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	0					Disdikbud
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 keg					Disdikbud
	Misi Kesenian	7 keg					
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	6 bh					
	Jumlah grup kesenian	1					
	Cakupan Kajian Seni	2 keg (diskusi & workshop)	3	3	100	Tercapai	
	Cakupan Fasilitas Seni	6 keg	6 keg (85,71%)	85,71	100	Tercapai	
	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	5 klasifikasi	5 klasifikasi (62,50%)	71,42	114	Tercapai	
	Cakupan Organisasi seni (%)	100	50% (Poin 1)	100	200	Tercapai	
	Cakupan Tempat umum (%)	100	6 Bh	-	-		
	Cakupan Gelar Seni (%)	100	2 keg (50%)	100	100	Tercapai	
Perpustakaan							
Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina (unit)	47	47	82	174,47	Tercapai	Dinas Arpusda
	Peningkatan kualitas perpustakaan (SDM)	15	15	25	166,67	Tercapai	
	Jumlah pengunjung kunjungan perpustakaan dalam satu tahun (orang)	30.618	30.618	40,497	132,27		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Tingkat Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah (eksemplar)	38.221	38.740	34.740	90,89		
<b>Kearsipan</b>							
Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Pusat Informasi Daerah	1					Dinas Arpusda
	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD)	10	10	10	100	Tercapai	
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	100					
Program Penyelamatan Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	350	350	2.000	571	Tercapai	Dinas Arpusda
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya (%)	1	1	1	100	Tercapai	Dinas Arpusda
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase sarana kearsipan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Arpusda
<b>Urusan Pilihan</b>							
<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap (ton)	23.685,30	23.685,3	25.399,356	107,24	Tercapai	DKPPP
Program pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi hasil olahan ikan (ton)	5.145	5.037	6.609,76	131,22	Tercapai	DKPPP
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produksi perikanan budidaya (ton)	1.298	1.298	598,17	46,08	Tidak Tercapai	DKPPP
<b>Pariwisata</b>							
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Kunjungan wisata (orang)	488.705	488.705	502.096	102,7	Tercapai	Dinporapar
	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata (Rp)	1.223.478	1.223.478	1.617.512.250	132,2	Tercapai	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah obyek wisata unggulan	2	2	2	100	Tercapai	Dinporapar
Program pengembangan kemitraan pariwisata	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	42					Dinporapar
	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	25					
Pertanian							
Program peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	101,66		102,48			DKPPP
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produksi padi (ton)	4.839	4.839	2.490	51,45		DKPPP
	Produktivitas padi (kw/ha)	65,57					
	Angka prevalensi penyakit hewan (%)	1,19	1,19	1,17	101,70		
	Angka prevalensi penyakit zoonosis (%)	0,015	0,015	0,053	28,30		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi daging (kg)	2.356.661					DKPPP
	Tingkat kenaikan produksi daging (%)	0,01	0,01	0,91	91		
	Produksi telur (kg)	1.872.115					
	Tingkat kenaikan produksi telur (%)	0,01	0,01	0,17	1700		
	Produksi susu (liter)	60.481					
	Tingkat kenaikan produksi susu (%)	0,01	0,01	0,22	2200		
Transmigrasi							
Program transmigrasi regional							
Perdagangan							

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	Tingkat Terlindunginya konsumen	30%	30%	57,14	190,47	Tercapai	Dinkop UKM Dag
	Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kota (%)	100					
Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	573.485	573.485	14.965.480,06	2.609		Dinkop UKM Dag
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,24	15,24	27,99	183,66	Tercapai	
	Pembangunan promosi pedagangan Internasional	1,3					
	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	5	5	7	140	Tercapai	
Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	87,5	87,5%	57,14	65,30	Tidak Tercapai	Dinkop UKM Dag
	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (%)	85,71	85,71	85,71	100	Tercapai	
Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan	Persentase lokasi PKL yang tertata (%)	35,29	35,29	30,43	86,23	Tercapai	Dinkop UKM Dag
Perindustrian							
Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	59,4					Disnakerin
	Persentase industri yang memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas) (%)	45	45	17,76	39,47	Tidak Tercapai	
	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (%)	15,33	15,33	14,47	94,39	Tercapai	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	6,82	6,82	15,19	222,73	Tercapai	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Prosentase Industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	15,33	15,33	14,47	94,39	Tercapai	Disnakerin
Program pengembangan industri Kecil Dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah	4.194	4.194	1.567	37,36		Disnakerin
	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal (%)	11,77	11,77%	12%	101,95	Tercapai	
	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk (%)	14,72	14,72%	15,06%	102,30	Tercapai	
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial	Persentase kluster industri yang berkembang (%)	50	50	21,28	42,56	Tidak Tercapai	Disnakerin
	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM (%)	19,94	11,77	9,41	80,43		
<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>							
<b>Perencanaan</b>							
Program Pengembangan Data/ Informasi	Tersedianya dokumen data/ informasi perencanaan pembangunan (dokumen)	7					Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	1	1	1	100	Tercapai	Bappeda
	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	2	2	2	100	Tercapai	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	Persentase SKPD memiliki Renstra SKPD sesuai standar (%)	100	100	100	100	Tercapai	
	Persentase SKPD menyusun Renja SKPD sesuai standar (%)	100	100	100	100	Tercapai	
	Tersedianya dokumen LKPJ (dok)	1	100	100	100	Tercapai	
	Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan (dok)	1	100	100	100	Tercapai	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka perencanaan bidang ekonomi (%)	100	100	100	100	Tercapai	Bappeda
Program perencanaan Sosial Budaya	Persentase ketersediaan dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka perencanaan bidang sosial budaya (%)	100	100	100	100	Tercapai	Bappeda
Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah (%)	100	100	100	100	Tercapai	Bappeda
Program Kerjasama Pembangunan	Terwujudnya fasilitasi penelitian dan pengembangan inovasi daerah (keg)	4				Tercapai	Bappeda
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersediannya dokumen kajian perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	2					Bappeda
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Tersediannya dokumen perencanaan infrastruktur perkotaan	1					Bappeda

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase aparat perencana yang meningkat kapasitasnya (%)	100	100	100	100	Tercapai	Bappeda
Administrasi Pemerintahan							
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda	4	4	5	125	Tercapai	SETDA
Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti (%)	100					SETDA
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda	23	23	89	387	Tercapai	SETDA
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah KAD						SETDA
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah perda yang ditetapkan	7					SETDA
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Raperda masuk Prolegda yang Dibahas dan Ditetapkan (Perda)	8	8	8	100	Tercapai	SET DPRD
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda	4	4	5	125	Tercapai	SETDA
Program Pembangunan Kecamatan	Tersedianya program pembangunan kecamatan	4	4	4	100	Tercapai	KECAMATAN/ KELURAHAN
Program Pembangunan Kelurahan	Tersedianya program pembangunan kelurahan	27	27	27	100	Tercapai	KECAMATAN/ KELURAHAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
Pengawasan							
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	96	96	256	266,67	Tercapai	Inspektorat
	Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	96	19	23	121.05	Tercapai	
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	19	19	23	121.05	Tercapai	Inspektorat
Keuangan							
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	24,81	24,81	27,54	111	Tercapai	Bakeuda
Pendidikan dan Pelatihan							
Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah PNS mengikuti pendidikan kedinasan	160	160	327	204,4	Tercapai	BKPPD
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan (%)	17,3	17,30	30,1	176,1	Tercapai	BKPPD
Kepegawaian							
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rasio PNS terhadap penduduk	1,85	1,85	1,30	70,2	Tercapai	BKPPD
Program Rutin Perangkat Daerah							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelaksanaan surat-menyerurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan,	---					Seluruh OPD

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 (n-2)			Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD Tahun 2019	Realisasi RKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		
	makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.	---					Seluruh OPD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.	---					Seluruh OPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Capaian Laporan Kinerja SKPD	---					Seluruh OPD

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain masih terdapat permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Tegal adalah sebagai berikut:

### 2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

#### A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

##### 1. Pendidikan

- a. Pemerataan akses layanan pendidikan belum optimal.
- b. Masih kurangnya peningkatan mutu dan daya saing pendidikan.

##### 2. Kesehatan

- a. Masih terjadinya kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan balita
- b. Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting.
- c. Meningkatnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) disebabkan transisi epidemiologi.
- d. Pengendalian penyakit menular masih belum optimal (DBD, TB, HIV, Diare).
- e. Cakupan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan difasyankes pemerintah masih perlu ditingkatkan.

##### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya cakupan pelayanan SPAM.
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam kota.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kota.
- d. Belum optimalnya penanganan genangan banjir dan rob.
- e. Masih terdapat ruas-ruas jalan kota yang belum mencapai kondisi mantap, termasuk yang belum dilengkapi dengan trotoar dan PJU.
- f. Belum tersedianya landasan hukum yang mengatur secara rinci tata ruang kota.

##### 4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Tingginya *Backlog* kepemilikan rumah di Kota Tegal disebabkan terbatasnya lahan di wilayah Kota Tegal untuk pengembangan perumahan dan permukiman.
- b. Masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni.
- c. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani.

##### 5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- a. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota belum optimal.
- b. Masih rendahnya rasio petugas linmas terlatih.
- c. Belum optimalnya penyediaan logistic bagi masyarakat terdampak bencana

##### 6. Sosial

- a. Belum optimalnya penanganan PMKS
- b. Belum optimalnya pemberdayaan sosial bagi masyarakat miskin.

## **B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

- a. Masih kurangnya pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi penduduk usia kerja.
- b. Masih rendahnya kesempatan kerja di Kota Tegal, sehingga orang yang tidak mau bekerja di luar daerah memilih untuk menganggur.
- c. Masih rendahnya pelatihan berbasis keterampilan untuk menumbuhkan wirausaha baru.
- d. Belum optimalnya penyelesaian persengketaan antara pengusaha dengan pekerja.

### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Masih kurangnya intervensi pada seluruh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk kelembagaan dan Regulasi yang mengatur PUG.
- b. Kasus KDRT mengalami peningkatan sehingga upaya sosialisasi yang dilakukan harus segera diimbangi dengan upaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Predikat KLA masih berada pada kategori pratama sehingga perlu ditingkatkan ke dalam kategori yang lebih tinggi.

### **3. Pangan**

- a. Masih tingginya ketergantungan pasokan pangan utama dari luar daerah akibat produksi lokal masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kualitas pangan masyarakat dilihat dari aspek pemenuhan gizi seimbang.
- c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan belum optimal.

### **4. Pertanahan**

- a. Belum semua bidang tanah pemerintah kota mempunyai alas hak
- b. Pemeliharaan dokumen tanah pemerintah kota belum optimal
- c. Pengawasan yang belum optimal terhadap pemanfaatan bidang tanah pemerintah kota
- d. Pelindungan terhadap tanah pemerintah kota yang belum optimal
- e. Penggunaan bidang tanah pemerintah kota yang belum sesuai dengan peraturan perundangan
- f. Adanya warga masyarakat yang menempati tanah milik pemerintah kota, khususnya yang lebih dari dua puluh tahun yang mengajukan usulan pemindahan kepemilikan aset tanah pemerintah kota
- g. Adanya warga masyarakat yang menempati tanah milik pemerintah kota dan tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota, khususnya yang lebih dari dua puluh tahun yang mengajukan usulan pemindahan kepemilikan aset tanah pemerintah kota, tanah negara bebas serta tanah dalam penguasaan BUMN maupun BUMD
- h. Belum adanya perencanaan pelaksanaan Reforma Agraria

### **5. Lingkungan Hidup**

- a. Timbulan sampah meningkat dan penanganan yang belum optimal serta belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
- b. Belum optimalnya kegiatan pengurangan sampah dengan prinsip 3R sehingga masih banyak sampah yang diangkut ke TPA
- c. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup di Kota Tegal ditandai dengan capaian nilai IKLH pada tahun 2018 dengan indeks 49,99 (Sangat Kurang Cukup);

- d. Masih tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kota Tegal
  - e. Kurangnya data, dokumen perencanaan lingkungan hidup, dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai dan mudah diakses masyarakat.
  - f. Belum optimalnya upaya peningkatan kesadaran pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
  - g. Masih kurangnya tutupan lahan dan konservasi sumber daya alam
- 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- a. Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kota Tegal belum optimal
- 7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
- a. CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) atau Peserta KB Aktif semakin menurun jumlahnya sedangkan unmet need semakin bertambah.
  - b. Masih terdapat Pernikahan Usia Dini dan Drop Out (DO) peserta KB
- 8. Perhubungan**
- a. Masih rendahnya pelayanan transportasi publik (standar pelayanan angkutan umum menurun menjadi 48,30%, tingkat load factor angkutan umum 9-16%, rendahnya pengguna angkutan umum, 1% pada 2019;
  - b. Masih rendahnya pemenuhan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi (ketersediaan perlengkapan menurun menjadi di bawah 50%);
  - c. Masih kurangnya regulasi tingkat daerah di bidang perhubungan.
- 9. Komunikasi dan Informatika**
- a. Tingkat pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal.
  - b. Masih rendahnya tingkat keterbukaan informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Tegal.
  - c. Belum optimalnya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi masyarakat.
- 10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
- a. Masih banyaknya koperasi aktif yang belum berkualitas dan memenuhi predikat sehat
  - b. Menurunnya jumlah usaha mikro dan kecil.
- 11. Penanaman Modal**
- a. Masih perlunya peningkatan investasi PMA dan PMDN.
  - b. Masih perlunya peningkatan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 12. Kepemudaan dan Olahraga**
- a. Belum adanya sinergi pembinaan kewirausahaan yang efektif dan berkesinambungan sehingga partisipasi pemuda di bidang wirausaha masih rendah.
  - b. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan.
  - c. Masih minimnya cabang olahraga berprestasi tingkat nasional.
  - d. Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan atlet.
  - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar
- 13. Statistik**
- a. Belum tersedianya produk statistik sektoral yang terintegrasi secara digital
- 14. Persandian**
- a. Lemahnya sistem manajemen pengamanan informasi

**15. Kebudayaan**

- a. Belum optimalnya pengelolaan, pembinaan dan penyelenggaraan Seni dan Budaya.
- b. Pelestarian benda/bangunan cagar budaya belum optimal.

**16. Perpustakaan**

- a. Belum terpenuhinya Standar Nasional Perpustakaan
- b. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan.

**17. Kearsipan**

- a. Masih lemahnya Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
- b. Masih buruknya Nilai Pedoman Penyusutan dan Pengelolaan Arsip Inaktif.
- c. Masih buruknya Nilai Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
- d. Masih lemahnya Pengelolaan arsip statis.

**C. Urusan Pemerintahan Pilihan**

**1. Kelautan dan Perikanan**

- a. Belum optimalnya pembinaan perikanan budidaya.
- b. Lahan tambak terus berkurang dari waktu ke waktu akibat alih fungsi lahan
- c. Masih rendahnya prosentase konsumsi ikan di masyarakat.
- d. Menurunnya daya dukung ekosistem perairan yang mengakibatkan pada penurunan produksi perikanan

**2. Pariwisata**

- a. Belum optimalnya pengelolaan ODTW.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata Daerah.
- c. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru.

**3. Pertanian**

- a. Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya terus menurun setiap tahun akibat luasan lahan sawah berkurang dan interusi air laut.
- b. Belum optimalnya sosialisasi penggunaan pupuk organik, untuk kelestarian lahan pertanian
- c. Menurunnya beberapa populasi ternak dan hasil produksi peternakan.
- d. Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis Avian Influenza (PHMS AI).

**4. Perdagangan**

- a. Belum optimalnya pembinaan dan penataan pedagang kaki lima (PKL).
- b. Kondisi pasar rakyat belum seluruhnya memenuhi standar kelayakan.

**5. Perindustrian**

- a. Pembinaan terhadap IKM yang menyerap cukup banyak tenaga kerja masih belum optimal.

**D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

**1. Perencanaan**

- a. Belum terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
- b. Belum terwujudnya konsistensi data untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

## **2. Keuangan**

- a. Penerimaan pendapatan daerah yang belum optimal;
- b. Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal;
- c. Pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal.

## **3. Kepegawaian**

- a. Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan.
- b. Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensinya.

## **4. Pendidikan dan Pelatihan**

- a. Belum optimalnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

## **5. Penelitian dan Pengembangan**

- a. Implementasi dan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan belum optimal.
- b. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) belum optimal.

## **E. Urusan Pendukung**

### **1. Sekretariat Daerah**

Belum optimalnya pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

### **2. Sekretariat DPRD**

- a. Belum optimalnya pelayanan karena kurang koordinasi dengan stakeholder dan dinas terkait
- b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Tegal

## **F. Unsur Pengawasan**

### **1. Inspektorat**

- a. Masih kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

## **G. Unsur Kewilayahan**

### **1. Kecamatan**

- a. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- b. Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

## **H. Urusan Pemerintahan Umum**

### **1. Kesatuan Bangsa dan Politik**

- a. masih kurang optimalnya peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat.

### **2.3.2. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

- 1) Kontraksi ekonomi sebagai dampak pandemik global COVID-19
- 2) Masih rendahnya Rata-rata lama sekolah di Kota Tegal

- 3) Belum tercapainya target maksimum Angka Harapan Hidup (AHH)
- 4) Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan rob
- 5) Belum terwujudnya pembangunan Berbasis Penataan Ruang Yang Berkelanjutan
- 6) Masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani
- 7) Tingginya *Backlog* (kepemilikan rumah) di Kota Tegal
- 8) Masih tingginya angka pengangguran
- 9) Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh
- 10) Semakin menurunnya nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan bagi masyarakat
- 11) Belum optimalnya pengelolaan pariwisata
- 12) Belum optimalnya produktivitas pangan
- 13) Belum optimalnya pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan persampahan

# BAB III

## KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

---

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

#### 3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Nasional

Pandemik COVID-19 menciptakan kondisi luar biasa (*extraordinary*), sulit diperkirakan karena belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented*) dan berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian. Berbagai lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020, terdampak COVID-19. Kondisi ketidakpastian ekstrim menyulitkan melakukan proyeksi pertumbuhan. Dampak ke perekonomian sulit diprediksi dan sangat tergantung oleh banyak faktor, meliputi eskalasi penyebaran COVID-19 di berbagai negara, intensitas langkah penanganan COVID-19, disrupsi di sisi *supply*, rambatan ke sektor keuangan, perubahan pola konsumsi dan perubahan perilaku seperti cara berbelanja dan pergerakan transportasi, efek terhadap keyakinan konsumen dan pelaku bisnis, serta volatilitas harga komoditas.

Pandemi COVID-19 merupakan bencana kemanusiaan yang berakibat sangat signifikan tidak hanya pada kesehatan masyarakat dan tingkat kematian, tetapi juga pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Kondisi luar biasa ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada triwulan I 2020 yang hanya mampu tumbuh sebesar **2,97 persen**<sup>1</sup> (YoY) bahkan Kemenkeu RI memprediksi, pada kuartal II-2020 perekonomian nasional akan tumbuh **negatif 3,8 persen**<sup>2</sup>.

Pandemik COVID-19 juga mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah kesehatan dan kematian akibat penularan COVID-19 yang sangat cepat serta langkah pembatasan sosial juga telah mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak pada jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dalam skenario berat, tingkat pengangguran terbuka diperkirakan dapat meningkat menjadi 7,33 persen dari 5,28 persen di tahun 2019. Di skenario yang sama, tingkat kemiskinan dapat meningkat menjadi hampir 9,9 persen dari angka di tahun 2019 sebesar 9,41 persen. Bahkan dalam skenario sangat berat, tingkat

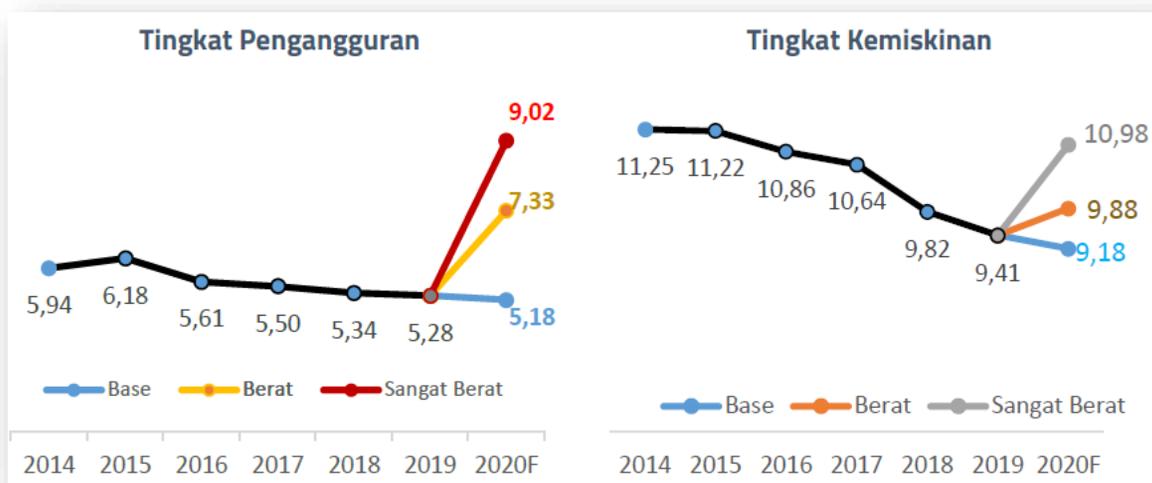
---

<sup>1</sup> Dokumen KEM PPKF 2021, Kemenkeu RI

<sup>2</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/06/27/200000826/kemenkeu-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-2020-negatif-3-8-persen>

pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat menjadi masing-masing 9,02 persen dan 10,98 persen. Dilihat dari tambahan jumlah orang, peningkatan persentase tersebut mengakibatkan tambahan jumlah pengangguran dalam rentang 2,92-5,23 juta orang dan tambahan jumlah orang miskin dalam rentang 1,89-4,86 juta orang. Proyeksi capaian indikator kesejahteraan nasional pada akhir tahun 2020 disajikan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 3.1 Proyeksi Capaian Indikator Kesejahteraan Nasional Tahun 2020**



**Sumber:** Dokumen KEM PPKF 2021, Kemenkeu RI

Setelah mengalami tekanan yang cukup berat di tahun 2020 sebagai akibat dari dampak pandemik global COVID-19, di tahun 2021 perekonomian nasional diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan mampu tumbuh kondusif mulai kuartal II Tahun 2021. Perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2020 dan 2021 dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran dan Lapangan Usaha (persen) Nasional Outlook Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021**

SISI PENGELUARAN	OUTLOOK 2020 (%)	PERKIRAAN 2021 (%)
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	-0,6 – 1,8	4,1 – 4,9
Konsumsi Pemerintah	3,3 – 4,0	2,5 – 3,5
PMTB	-2,8 – 0,3	6,0 – 7,1
Ekspor	-7,7 – -3,0	3,5 – 5,1
Impor	-12,0 – -7,5	4,4 – 5,9
SISI PRODUKSI		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,8 – 2,5	3,3 – 3,9
Pertambangan dan Penggalian	-2,1 – 0,5	0,7 – 1,7
Industri Pengolahan	-1,9 – 1,8	3,4 – 4,3
Pengadaan Listrik dan Gas	1,6 – 3,4	4,8 – 5,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,7 – 4,5	4,6 – 5,6
Konstruksi	-0,9 – 2,2	5,3 – 6,5

SISI PRODUKSI	OUTLOOK 2020 (%)	PERKIRAAN 2021 (%)
Perdagangan	-2,0 – 0,5	4,3 – 5,3
Transportasi dan Pergudangan	-7,5 – -3,1	5,9 – 8,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,9 – -5,2	5,5 – 7,9
Informasi dan Komunikasi	8,3 – 11,2	8,3 – 10,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,5 – 5,4	5,6 – 6,8
Real Estate	-0,2 – 2,5	4,9 – 5,9
Jasa Perusahaan	1,2 – 3,9	8,9 – 9,9
Administrasi Pemerintahan	4,4 – 5,1	4,2 – 5,2
Jasa Pendidikan	3,8 – 6,2	4,5 – 5,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,2 – 13,3	4,7 – 5,5
Jasa lainnya	3,7 – 6,5	6,6 – 7,7
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>-0,4 – 2,3</b>	<b>4,5 – 5,5</b>

**Sumber:** Dokumen KEM PPKF 2021, Kemenkeu RI

Terkait laju inflasi pada Tahun 2021 diperkirakan masih dapat memenuhi target sasaran inflasi **3,0±1,0 persen**. Pencapaian target inflasi tersebut akan diupayakan bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia untuk melaksanakan strategi yang telah tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 dalam koridor Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Strategi-strategi tersebut tertuang dalam konsep 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif. Strategi kebijakan tersebut juga diselaraskan sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional setelah berakhirnya wabah COVID-19.

Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi pada tahun 2020, serta memperhatikan tantangan fundamental jangka menengah, maka arah dan strategi kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2021 **diarahkan** untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi COVID-19 serta menjadi momentum untuk melakukan reformasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk melaksanakan transformasi ekonomi mencapai Visi Indonesia Maju 2045.

### 3.1.2. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Kebijakan ekonomi daerah Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang terjadi pada perekonomian global dan nasional. Penyebaran wabah COVID-19 telah membuat pemerintah di seluruh dunia mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aktivitas di luar rumah warga negaranya. Kebijakan tersebut berdampak kuat pada keseimbangan internal maupun keseimbangan eksternal seluruh negara. Selanjutnya berdampak pada perekonomian nasional dan Jawa Tengah sehingga menyebabkan perekonomian Jawa Tengah tidak tumbuh sesuai kapasitasnya.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 2,60% (yoy)<sup>3</sup>. Capaian tersebut jauh **lebih rendah** dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,34%; yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut **berada di bawah** pertumbuhan ekonomi nasional dan Kawasan Jawa yang tercatat masing-masing sebesar 2,97% (yoy) dan 3,42% (yoy). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan akan terus **mengalami perlambatan** pada triwulan II 2020. Kegiatan investasi akan masih akan terbatas mengingat masih berlangsungnya wabah COVID-19 dengan kurva pandemik yang masih terus meningkat. Kinerja ekspor luar negeri juga diperkirakan **akan menurun** karena COVID-19. Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan terjadi pada lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, serta konstruksi. Kondisi COVID-19 yang belum berakhir membuat sektor-sektor utama belum dapat berproduksi secara optimal.

Kondisi perekonomian sebagai dampak pandemik global COVID-19 juga dihadapi oleh Kota Tegal. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Tegal didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tegal.

Pada tahun 2019, ekonomi Kota Tegal tumbuh sebesar 5,77 persen. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tegal pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 27,81 persen (angka ini meningkat dari 27,73 persen pada tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 17,23 persen (naik dari 17,11 persen pada tahun 2018). Disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan 14,93 persen (turun dari 15,19 persen pada tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,85 persen (naik dari 5,82 persen pada tahun 2018), serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,53 persen (naik dari 5,38 persen pada tahun 2018).

Adanya pandemik global COVID-19 yang memaksa kehidupan masyarakat untuk melakukan pembatasan fisik dan sosial dalam melaksanakan aktivitasnya sangat berdampak besar, khususnya pada perekonomian Kota Tegal. Hal ini disebabkan karena sektor-sektor utama pendukung perekonomian Kota Tegal lebih banyak ditopang oleh aktivitas-aktivitas perekonomian yang membutuhkan banyak interaksi sosial, seperti sektor perdagangan, penyediaan jasa (penyediaan akomodasi dan makan minum), industri pengolahan dan konstruksi.

Pada triwulan II tahun 2020, dampak ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Tegal karena adanya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman penyebaran COVID-19. Kota Tegal menjadi wilayah yang pertama kali menerapkan PSBB di Provinsi Jawa Tengah, yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 April 2020 sebagai bentuk respons Pemerintah Kota Tegal atas laporan kasus pertama COVID-19 di Kota Tegal. Kebijakan ini kemudian membawa dampak positif, dimana pada bulan Mei 2020, Kota Tegal berhasil menjadi wilayah **zona hijau** (kategori wilayah yang aman dari penyebaran COVID-19). Pada akhir Juni 2020, perkembangan kondisi penyebaran COVID-19 berhasil mencapai kondisi **0 kasus** Covid aktif, **0 kasus** Pasien Dalam Pengawasan dan **0 kasus** Orang Dalam Pemantauan. Jika kondisi ini berhasil terus dipertahankan hingga pandemik berakhir, maka Kota Tegal optimis untuk terus melakukan pemulihan ekonomi sebagaimana tema pembangunan tahun 2021 yakni **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Daya Saing Daerah dengan Fokus Pada Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”**.

---

<sup>3</sup> Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Mei 2020, Bank Indonesia

Dengan demikian proyeksi indikator ekonomi Kota Tegal tahun 2021, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Kota Tegal Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Target 2021*
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	4,5 – 5,5
2	Inflasi	%	2,00 – 4,00
3	Tingkat Kemiskinan	%	6,40 – 7,40
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,7 – 8,07
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	75,54
6	Nilai Investasi	Rp. Trilyun	1,74
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	103

Keterangan:

\*Target penyesuaian pasca pandemik COVID-19

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Tegal menerapkan kebijakan keuangan daerah yang secara konsisten diarahkan untuk mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan serta untuk menciptakan akselerasi pembangunan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkesinambungan. Disamping itu arah kebijakan keuangan daerah juga mempertimbangkan realisasi keuangan daerah 5 tahun terakhir serta proyeksi ke depan yang mengacu pada tuntutan dan perkembangan kondisi perekonomian khususnya dampak pandemik COVID-19.

Adapun realisasi keuangan Kota Tegal kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Keuangan Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 - 2019**

No	URAIAN	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>947.468.611.453</b>	<b>1.051.121.466.005</b>	<b>1.024.765.938.277</b>	<b>987.244.236.619,41</b>	<b>1.036.963.763.529,16</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>271.601.397.419</b>	<b>287.343.889.954</b>	<b>306.830.656.135</b>	<b>275.021.448.594,41</b>	<b>285.575.788.984,16</b>
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	48.409.198.815	53.623.297.053	69.042.455.743	83.852.211.209,00	89.361.925.371,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	17.392.901.184	21.137.859.934	19.857.864.056	17.402.002.890,00	19.087.354.255,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.474.818.598	3.992.598.857	14.707.658.210	3.530.831.162,00	8.575.641.316,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	202.324.478.822	208.588.417.110	203.222.678.124	170.236.403.333,41	168.550.868.042,16
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>500.849.967.265</b>	<b>688.199.236.193</b>	<b>644.940.136.542</b>	<b>602.567.259.369,00</b>	<b>641.682.768.016,00</b>
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.641.047.265	30.297.404.187	29.186.187.399	25.571.473.848,00	18.911.295.500,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	405.831.088.000	490.772.001.000	482.150.715.000	482.150.715.000,00	502.969.026.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	74.377.832.000	165.828.134.725	133.603.234.143	94.845.070.521,00	119.802.446.516,00
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>175.017.246.769</b>	<b>75.578.339.858</b>	<b>72.995.145.600</b>	<b>27.015.013.112,00</b>	<b>109.705.206.529,00</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	27.015.013.112,00	28.091.568.988,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.729.703.769	50.059.972.858	53.574.777.000	66.092.844.949,00	59.813.352.605,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	94.438.327.000	-	-	-	-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.849.216.000	25.017.000.000	19.420.368.600	16.547.670.595,00	21.800.284.936,00
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	-	501.367.000	-	-	-
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>959.418.083.451</b>	<b>1.074.082.617.386</b>	<b>1.017.223.991.908</b>	<b>916.079.821.600,05</b>	<b>1.046.575.212.898,18</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>410.581.661.905</b>	<b>424.366.390.921</b>	<b>396.598.307.423</b>	<b>802.365.113.624,05</b>	<b>399.681.169.524,00</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	404.786.760.463	411.630.711.359	382.099.799.923	375.579.236.296,00	383.397.282.307,00
2.1.2.	Belanja Bunga	54.569.082	10.985.462	-	-	-
2.1.3.	Belanja Hibah	4.472.192.500	11.775.132.600	13.563.884.500	15.282.746.721,00	12.031.437.350,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	690.874.460	211.500.000	165.000.000	215.000.000,00	3.581.950.000,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan	577.265.400	656.961.500	686.678.600	650.967.200,00	670.499.867,00
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	-	81.000.000	82.944.400	92.200.000,00	-
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>548.836.421.546</b>	<b>650.373.287.965</b>	<b>620.625.684.485</b>	<b>113.622.507.976,00</b>	<b>646.894.043.374,18</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(11.949.471.998)</b>	<b>(23.618.112.881)</b>	<b>7.541.946.369</b>	<b>70.513.447.819,36</b>	<b>(9.611.449.369,02)</b>

No	URAIAN	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>160.965.665.031</b>	<b>141.703.755.239</b>	<b>112.932.169.729</b>	106.373.126.488,05	165.508.163.967,77
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	160.965.665.031	141.703.755.239	112.932.169.729	106.373.126.488,05	165.508.163.967,77
3.1.2.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-	-	-
<b>3.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>7.309.982.794</b>	<b>5.153.472.638</b>	<b>13.547.687.700</b>	<b>11.320.000.000,00</b>	<b>11.990.000.000,00</b>
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Permanen)	1.307.000.000	1.575.000.000	9.925.000.000	11.320.000.000,00	11.990.000.000,00
3.2.2.	Pembayaran Pokok Utang	-	182.921.638	-	-	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga	6.002.982.794	3.395.551.000	3.622.687.700	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>141.706.210.239</b>	<b>136.550.282.601</b>	<b>99.384.482.029.00</b>	<b>95.053.126.488,05</b>	<b>153.518.163.967,77</b>

Sumber: Bakuda Kota Tegal, diolah

Berdasarkan data Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Realisasi pendapatan daerah setiap tahun meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp.947.468.611.453.- menjadi Rp.1.036.963.763.529,16 pada tahun 2019. Pendapatan daerah Kota Tegal masih didominasi dari kontribusi pendapatan Dana Perimbangan dimana realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp.500.849.967.265.- menjadi Rp 641.682.768.016,- pada tahun 2019. Pendapatan daerah dari PAD setiap tahun berfluktuasi Rp.271.601.397.419.- pada tahun 2015 naik menjadi Rp.285.575.788.984,16 di tahun 2019. Realisasi PAD tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp.306.830.656.135,- Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuatif, pada tahun 2015 sebesar Rp.175.017.246.769,- dan pada tahun 2019 sebesar Rp.109.705.206.529,-.

Realisasi belanja daerah pada kurun tahun 2015 – 2019 juga fluktuatif. Realisasi belanja daerah tahun 2015 sebesar Rp.959.418.083.451.- sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp.1.046.575.212.898,18,-. Realisasi belanja daerah terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar Rp.916.079.821.600,05. Hal ini terjadi akibat cukup banyaknya kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan,

Realisasi pembiayaan netto dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Realisasi pembiayaan netto tahun 2015 sebesar Rp.141.706.210.239.- dan pada tahun 2019 sebesar Rp.153.518.163.967,77,-. Realisasi pembiayaan daerah pada penerimaan pembiayaan daerah berfluktuasi. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA dimana pada tahun 2015 realisasi sebesar Rp.160.965.665.031.- dan pada tahun 2019 sebesar Rp.165.508.163.967,77,-. Realisasi pembiayaan daerah pada pengeluaran pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyertaan Modal. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2015 realisasi sebesar Rp.7.309.982.794.- dan pada tahun 2019 sebesar Rp.11.990.000.000.-.

Sedangkan target pendapatan daerah tahun 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan pada APBD 2020 dapat digambarkan pada Tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3.4**  
**APBD Kota Tegal Tahun 2020**

No	URAIAN	APBD TAHUN
		ANGGARAN 2020
		TARGET
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.132.970.758.000</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>333.012.742.000</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	93.763.370.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.857.084.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.729.217.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201.663.071.000
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>772.709.419.000</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	702.011.544.000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	691.357.253.000
A.	Dana Transfer Umum	
1)	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.246.220.000
2)	Dana Alokasi Umum (DAU)	512.935.790.000
B.	Dana Transfer Khusus	
1)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	153.175.243.000
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	10.654.291.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	70.697.875.000
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.697.875.000
1.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>27.248.597.000</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	27.248.597.000
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.278.393.100.000</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.093.243.855.000</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	540.039.216.000

No	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020
		TARGET
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	527.988.798.000
2.1.3	Belanja Hibah	20.555.841.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4.660.000.000
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>182.439.678.000</b>
2.2.1	Belanja Tanah	10.158.708.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	79.097.382.000
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	48.559.179.000
2.2.4	Belanja Jalan	41.998.804.000
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.625.605.000
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000</b>
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>709.567.000</b>
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	709.567.000
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(145.422.342.000)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>165.060.342.000</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	165.060.342.000
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>19.638.000.000</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.638.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>145.422.342.000</b>

Sumber: Bakeuda Kota Tegal

### 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2021 disusun dengan memperhatikan kinerja penerimaan/ pendapatan daerah selama lima tahun terakhir, melihat kondisi ekonomi terkini dan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi tahun 2021 khususnya transisi ekonomi pasca pandemik global COVID-19.

Rencana pendapatan daerah Tahun 2021 sebesar Rp.964.797.889.000,- **menurun** sebesar Rp.168.172.869.000 atau 14,84% dari target murni Tahun 2020 sebesar Rp.1.132.970.758.000,- yang disebabkan karena **belum dimasukkannya** proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Transfer Khusus yang meliputi Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah; Dana Transfer Antar Daerah yakni Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Hibah karena masih menunggu kebijakan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah terkait dampak pandemik global COVID-19. Namun demikian, secara umum terdapat Rencana **kenaikan** PAD sebesar Rp.4.891.600.000,- atau **1,46%** dari target murni Tahun 2020 sebesar Rp.333.012.742.000,- menjadi **Rp.337.904.342.000,-** yang merupakan kumulatif dari jenis penerimaan:

1. Rencana target Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.98,382,668,000,- ada **kenaikan** sebesar Rp.4.619.298.000,- atau sebesar 4,92% dari target murni Tahun 2020 sebesar Rp. 93.763.370.000, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Rencana Target Pendapatan Pajak Daerah  
Tahun 2021**

NOMOR REKENING	URAIAN	2021
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>98,382,668,000</b>
4.1.1.01	Pajak Hotel	4,391,583,000
4.1.1.02	Pajak Restoran	22,000,000,000
4.1.1.02.01	Restoran	22,000,000,000
4.1.1.03	Pajak Hiburan	7,200,000,000
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	4,672,000,000
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	6,000,000
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	62,000,000
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	2,397,500,000
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	62,500,000
4.1.1.04	Pajak Reklame	5,600,000,000
4.1.1.04.01	Reklame Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron	5,100,000,000
4.1.1.04.02	Reklame Kain	427,000,000
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	15,000,000
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	54,000,000
4.1.1.04.06	Reklame Udara	4,000,000
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	24,500,000,000
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	2,300,000,000
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	341,000,000
4.1.1.11.01	Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2)	15,250,085,000
4.1.1.12.01	BPHTB-Pemberian Hak Baru	16,800,000,000

Sumber: <https://tegal.sipd.kemendagri.go.id>

2. Rencana target Hasil Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.26.960.057.000,- ada **kenaikan** sebesar Rp.102.973.000,- atau sebesar 0,38% dari target murni Tahun 2020 sebesar Rp.26.857.084.000,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Rencana Target Hasil Retribusi Daerah  
Tahun 2021**

NOMOR REKENING	URAIAN	2021
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>26,960,057,000</b>
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	8,362,795,000
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan ditempat pelayanan kes. lainnya	115,000,000
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan RT	1,469,576,000
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	54,000,000
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2,265,000,000
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	2,532,719,000
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	706,000,000
4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Cetak Peta	1,000,000,000
4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	35,000,000
	Retribusi pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100,000,000
4.1.2.01.48	Retribusi Tera/Tera Ulang	80,000,000
	Retribusi Pusat Kesehatan Hewan	5,500,000
	Retribusi Jasa Usaha	16,593,922,000
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,579,108,000

NOMOR REKENING	URAIAN	2021
4.1.2.02.01	Retribusi Penyewaan Bangunan	64,000,000
4.1.4.13.02	Sewa Alat Berat	100,000,000
4.1.2.02.01	Retribusi Pengujian Laboratorium Lingkungan	21,000,000
4.1.4.13.02	Retribusi Penyewaan bangunan/Pemakaian PPIB	80,000,000
4.1.2.02.01.	Retribusi Penyewaan Tanah PKL	350,000,000
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	13,862,000
4.1.2.02.03	Retribusi Penyediaan Fasilitas lainnya ditempat Pelelangan/ depot ikan	
4.1.2.02.03	Retribusi Penyediaan Fasilitas lainnya ditempat Pelelangan/ perbaikan jaring	
4.1.2.02.07	Retribusi Depot ikan, perbaikan jaring dan pemeriksaan air susu	
	Sewa Tanah Pemda	950,246,000
4.1.2.02.01	Retribusi Penyewaan TanahPemda/ Perumahan	
4.1.2.02.01	Retribusi Penyewaan TanahPemda/ Reklame	
4.1.2.02.01	Retribusi Penyewaan TanahPemda/ tanah kios	
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	1,209,248,000
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	10,255,771,000
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Parkir Khusus	1,306,745,000
4.1.02.02.05.001	Parkir Taman Budaya Tegal	5,000,000
4.1.02.02.05.001	Parkir Pasar	1,233,745,000
4.1.02.02.05.001	Parkir Gedung Olah Raga	60,000,000
4.1.02.02.03.002	Parkir Khusus lingkungan TPI	8,000,000
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	22,050,000
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2,221,000,000
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,003,340,000
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2,000,000,000
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	3,340,000

Sumber: <https://tegal.sipd.kemendagri.go.id>

3. Rencana target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 sebesar Rp.10.729.217.000,- diasumsikan masih **sama dengan** target murni Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Rencana Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2021**

NOMOR REKENING	URAIAN	2021
<b>4.1.3</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>10,729,217,000</b>
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	10,729,217,000
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PDAM	2,000,000,000
4.1.3.01.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Kota Tegal	129,217,000
4.1.3.01.04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jateng	8,600,000,000

Sumber: <https://tegal.sipd.kemendagri.go.id>

4. Rencana target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp. 201.832.400.000,- ada **kenaikan** sebesar Rp.169.329.000,- atau sebesar 0,08% dari target murni Tahun 2020 sebesar Rp.201.663.071.000,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Rencana Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  
Tahun 2021**

NOMOR REKENING	URAIAN	2021
4 . 1 . 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>201,832,400,000</b>
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	190,000,000
4 . 1 . 4 . 01 . 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	60,000,000
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	7,000,000
4 . 1 . 4 . 01 . 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	60,000,000
4 . 1 . 4 . 01 . 07	Penjualan Drum Bekas	3,000,000
4 . 1 . 4 . 01 . 09	Penjualan Lampu Hias Bekas	-
4 . 1 . 4 . 01 . 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	60,000,000
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	1,605,500,000
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	1,318,000,000
4 . 1 . 4 . 02 . 02	Jasa Giro Bendahara	287,500,000
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	14,200,000,000
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank Jateng	14,200,000,000
4 . 1 . 04 . 03.01	Hasil Sewa BMD	3,091,470,000
4 . 1 . 04 . 03.01	Fasilitas Umum	2,891,470,000
	Penerimaan Iklan Radio Sebayu	44,000,000
	Sewa Kios Pasar	2,149,713,000
	Sewa Lelang eks tanah bengkok	200,000,000
	Sewa Rusunawa	497,757,000
4 . 1 . 4 . 11 . 04	Pendapatan dari Sharing SPDN Karya Mina+SPBU Dedy Jaya	200,000,000
4 . 1 . 4 . 15	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	182,745,430,000
4 . 1 . 4 . 15 . 01	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kardinah	162,745,430,000
4 . 1 . 4 . 15 . 03	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat	20,000,000,000

Sumber: <https://tegal.sipd.kemendagri.go.id>

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi antara lain melalui:

- Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah;
- Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat;
- Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan *database* pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak;
- Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan dan investasi melalui Perangkat Daerah yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);

- f. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
- g. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.

### 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021

Tahun 2021 diharapkan menjadi momentum transisi menuju normal pasca pandemik COVID-19 serta secara bertahap dapat menyelesaikan tantangan pembangunan yang dihadapi Kota Tegal. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, pengelolaan belanja daerah didorong untuk lebih optimal dengan mulai menggunakan pendekatan *spending better* yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (*result based*), dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*). Arah kebijakan belanja daerah Tahun 2021 adalah:

1. Fokus belanja untuk pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan jaring pengaman sosial;
2. Reformasi anggaran, dengan Fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (*result based*), serta *value for money* (efektif, efisien dan ekonomis);
3. Penajaman belanja barang (belanja operasional, non operasional, perjalanan dinas, dan belanja yang diserahkan ke masyarakat);
4. Belanja modal untuk mendukung proyek yang tertunda 2020 serta menampung kebijakan inisiatif baru dan kegiatan prioritas/ *major project* tahun 2021;
5. Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan sosial:
  - a. Melanjutkan *social safety net* (Program Tegal Eman Lansia, BOS Pendampingan, Alokasi PBI-JK sumber dana APBD II, Program Ayo Sekolah Lagi, serta Bantuan bagi Penunggu Pasien dan Santunan Kematian);
  - b. Akurasi data, perbaikan mekanisme dan integrasi/ sinergi antarprogram.

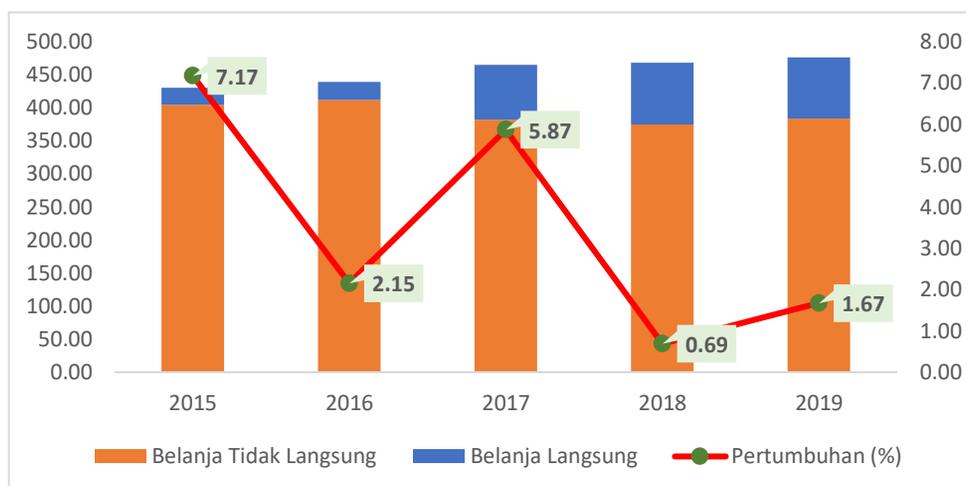
Adapun penjabaran kebijakan belanja daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### A. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam mendorong produktivitas aparatur negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik. Sejalan dengan arah kebijakan belanja daerah yang tetap fokus pada penguatan belanja berkualitas, fungsi belanja pegawai terus diarahkan untuk mendukung efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Birokrasi yang efisien serta layanan publik yang berkualitas merupakan cerminan dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, dan jauh dari praktik korupsi.

Perkembangan belanja pegawai selama periode waktu 2015-2019 cenderung mengalami **peningkatan**, dari sebelumnya sebesar Rp.429.989.441.813.000,- tahun 2015 **meningkat** menjadi Rp.476.053.735.321.000,- pada tahun 2019. Dari sisi pertumbuhan, pada periode tersebut secara rata-rata belanja pegawai tumbuh sebesar **2,58 persen** per tahun. Pertumbuhan tersebut diantaranya dipengaruhi adanya kebijakan kenaikan gaji, penambahan jumlah ASN, dan perbaikan tunjangan kinerja pada Pemerintah Daerah seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

**Gambar 3.2 Perkembangan Belanja Pegawai Tahun 2015-2019**



Sumber: Bakeuda Kota Tegal, diolah.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Tegal akan terus berkomitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap reformasi institusional dalam upaya mendorong efektivitas birokrasi (*to serve, to support, to help*) dalam mencapai target pembangunan. Secara umum, kebijakan belanja pegawai tahun 2021 akan diarahkan untuk:

- 1) Menjaga tingkat kesejahteraan pegawai yang diselaraskan dengan capaian kinerjanya melalui penerapan *reward* dan *punishment* berbasis indikator kinerja;
- 2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui penguatan birokrasi berbasis teknologi;
- 3) Penguatan koordinasi kebijakan secara horizontal dan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah;
- 4) Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

#### B. Belanja Barang dan Jasa

Selama periode tahun 2015-2019, realisasi belanja barang dan jasa fluktuatif dan mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar **5,27 persen**. Penurunan realisasi barang dan jasa terjadi pada tahun 2017 dan 2018 disebabkan karena cukup banyaknya proyek/ kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga menghasilkan SiLPA yang sangat tinggi. Perkembangan realisasi barang dan jasa kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

**Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015-2019**



Sumber: Bakeuda Kota Tegal, diolah.

Secara umum, arah kebijakan belanja barang di tahun 2021 difokuskan pada:

- 1) Melanjutkan efisiensi belanja non prioritas (antara lain perjalanan dinas, rapat, paket *meeting*, rapat dalam kantor, konsinyering, dan honorarium);
- 2) Penajaman belanja pemeliharaan dengan memperhitungkan penambahan aset tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Penajaman dan sinergitas antara Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

### C. Belanja Modal

Belanja modal menjadi salah satu instrumen utama Pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian. Untuk itu, belanja modal yang berkualitas menjadi penting untuk menambah menambah aset sekaligus mendorong investasi pemerintah pendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam periode tahun 2015-2019, secara nominal realisasi belanja modal menunjukkan tren yang menurun dengan rata-rata sebesar **-5,43%**. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 dan 2018.

**Gambar 3.4 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun 2015-2019**



Sumber: Bakeuda Kota Tegal

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan belanja modal adalah meningkatkan efektivitas dan produktivitas belanja modal sehingga berdampak optimal. Penyerapan belanja modal juga dapat mengalami kendala antara lain proses pengadaan lahan dan konstruksi yang tertunda. Untuk itu, kebijakan belanja modal tahun 2021 diarahkan untuk mendukung:

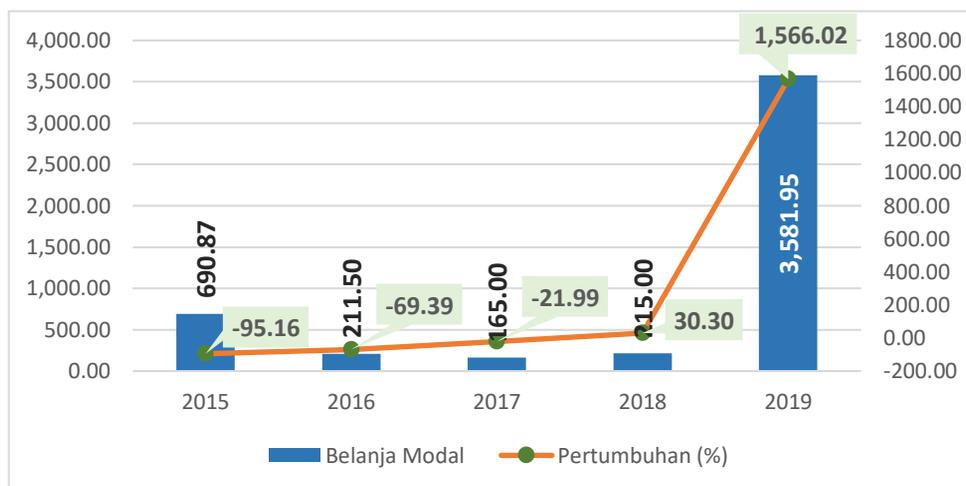
- a. Kelanjutan proyek yang tertunda di tahun 2020 secara selektif;
- b. Inisiatif baru dan kegiatan prioritas tahun 2021;
- c. Fokus infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi;

### D. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bansos menjadi sangat penting sebagai salah satu instrumen fiskal dalam memberikan jaring pengaman sosial (*social safety net*) ditengah pandemi COVID-19. Belanja bansos secara esensi memiliki tujuan untuk memberikan stimulan kepada individu dan keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kurun tahun 2015-2018, alokasi anggaran bansos sangat kecil dengan tren menurun. Mulai tahun 2019, alokasi belanja bansos baru mengalami peningkatan signifikan yang disertai dengan perluasan cakupan peserta dan

besaran manfaat. Berbagai terobosan kebijakan telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program-program dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan.

**Gambar 3.5 Perkembangan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015-2019**



Sumber: Bakeuda Kota Tegal

Dalam merespon pandemi COVID-19, program-program bansos di bidang kesehatan dan pendidikan yang mendukung mengalami perluasan dan peningkatan. Selain untuk memberikan layanan kesehatan dasar, bansos juga diberikan untuk menjaga penduduk miskin dan rentan terhindar dari bencana keuangan ketika sakit. Kebijakan bantuan sosial tahun 2021 secara umum adalah:

- Efektivitas Bansos (akurasi dan integrasi data, integrasi/ sinergi program);
- Melanjutkan Program “Temanlansi – Tegal Eman Lansia”, dengan memberikan bantuan kepada para Lanjut Usia Terlantar (LUT) berupa bantuan permakanan (Rantang Warteg), bantuan uang bulanan, dan *Homecare* Lansia (bidang kesehatan).
- Melanjutkan Program “Asela – Ayo Sekolah Lagi” dengan sasaran anak-anak putus sekolah
- Mendorong sinergi Program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

### 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2021

Pembiayaan Tahun 2021 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, sumber utama penerimaan pembiayaan daerah berasal dari realisasi SiLPA tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, disamping dari realisasi SiLPA tahun sebelumnya, Penerimaan Pembiayaan Daerah juga bersumber dari Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19. Sedangkan terkait dengan pengeluaran pembiayaan daerah adalah pembiayaan-pembiayaan yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah (investasi) pemerintah daerah.

## 3.3. ANALISIS KEUANGAN DAERAH

Analisis keuangan daerah Kota Tegal dilakukan melalui penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis

kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 yang masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana yaitu tahun 2021. Perhitungan kapasitas keuangan daerah Kota Tegal beserta kerangka pendanaannya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 3.3.1. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2021

Evaluasi/ Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9 Catatan Atas Perhitungan Penerimaan Daerah Kota Tegal Tahun 2021**

NO	URAIAN	RKPD 2021	CATATAN
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>964.797.889.000</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (a)</b>	<b>337.904.342.000</b>	
1.1.1	Pajak Daerah	98.382.668.000	Lebih besar dari APBD TA 2020 maupun Proyeksi RPJMD Tahun 2021
1.1.2	Retribusi Daerah	26.960.057.000	Lebih besar dari APBD TA 2020 maupun Proyeksi RPJMD Tahun 2021
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	10.729.217.000	Lebih besar dari Proyeksi RPJMD Tahun 2021 tetapi sama dengan APBD TA 2020
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	201.832.400.000	Lebih rendah dari Proyeksi RPJMD Tahun 2021 tetapi sama dengan APBD TA 2020
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER (b)</b>	<b>626.893.547.000</b>	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	553.367.757.000	
1.2.1.1	Dana Perimbangan	553.367.757.000	
A	<i>Dana Transfer Umum</i>	553.367.757.000	
(1)	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.799.462.000	
(2)	Dana Alokasi Umum (DAU)	525.568.295.000	Sama dengan proyeksi RPJMD Tahun 2021
B	<i>Dana transfer khusus</i>	-	
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	DAK dikeluarkan dalam perhitungan kapasitas fiskal
1.2.1.2	Dana Intensif Daerah (DID)	-	DID dikeluarkan dalam perhitungan kapasitas fiskal
1.2.2	Transfer Antar Daerah	73.525.790.000	
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73.525.790.000	
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	Bantuan Keuangan dikeluarkan dalam perhitungan kapasitas fiskal
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	Pendapatan Hibah dikeluarkan dalam perhitungan kapasitas fiskal
<b>2</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>2.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN (c)</b>	<b>131.354.569.000</b>	
2.1.1	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA)	40.000.000.000	Perkiraan realisasi SiLPA 2020
2.1.2	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	91.354.569.000	Pencairan dana deposito.
<b>JUMLAH PROYEKSI PENERIMAAN RIIL (A+B+C)</b>		<b>1.096.152.458.000</b>	

Pada tabel di atas menggambarkan catatan atas perhitungan penerimaan riil daerah Kota Tegal tahun 2021. Sumber penerimaan daerah tahun 2021 berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tahun 2021. Dalam perhitungan sumber pendapatan daerah, pendapatan transfer dikeluarkan dari perhitungan antara lain pendapatan transfer pusat berupa DAK dan DID serta pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari pendapatan hibah juga dikeluarkan dari sumber pendapatan daerah. Sehingga jumlah proyeksi penerimaan riil tahun 2021 sebesar Rp.1.096.152.458.000,- yang berasal dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.964.797.889.000,- dan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.131.354.569.000,-. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari perkiraan SiLPA Tahun 2020 dan penerimaan pembiayaan lainnya yang merupakan pencairan dana daerah yang ditempatkan pada deposito pada beberapa bank nasional.

### **3.3.2. Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah**

Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah Kota Tegal dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap penghitungan penerimaan daerah dan tahap penghitungan pengeluaran pembiayaan daerah.

#### **Tahap I: Penghitungan Penerimaan Daerah**

Analisis dan perhitungan penerimaan daerah dalam melakukan analisis dan perhitungan penerimaan daerah dilakukan melalui sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca daerah:
  - a. Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sebagaimana pada Tabel 3.10.  
Berdasarkan tabel tersebut rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar 7,52% dimana untuk rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 3,66%. Dana Perimbangan sebesar 9,11% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 53,97%.

Tabel 3.10

## Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	RATA2 PERTUMBUHAN
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>738.480.151.500</b>	<b>853.030.294.453</b>	<b>1.050.620.099.005</b>	<b>1.024.765.938.277</b>	<b>987.244.236.619,41</b>	<b>1.036.963.763.529,16</b>	<b>7,52%</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>241.936.166.929</b>	<b>271.601.407.419</b>	<b>287.343.889.954</b>	<b>306.830.656.135</b>	<b>275.021.448.594,41</b>	<b>285.575.788.984,16</b>	<b>3,66%</b>
1.1.1	Pajak Daerah	46.673.112.577	48.409.198.815	53.623.297.053	69.042.455.743	83.852.211.209,00	89.361.925.371,00	14,25%
1.1.2	Retribusi Daerah	22.863.092.866	17.372.233.365	21.139.576.934	19.857.864.056	17.402.002.890,00	19.087.354.255,00	-2,22%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	3.746.306.371	3.474.818.598	3.992.598.857	14.707.658.210	3.530.831.162,00	8.575.641.316,00	68,58%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	168.653.655.115	202.345.156.641	208.588.417.110	203.222.678.124	170.236.403.333,41	168.550.868.042,16	1%
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>437.444.087.261</b>	<b>500.849.967.265</b>	<b>688.199.236.193</b>	<b>644.940.136.542</b>	<b>602.567.259.369,00</b>	<b>641.682.768.016,00</b>	<b>9,11%</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	23.777.788.261	20.641.047.265	31.599.100.468	29.186.187.399	25.571.473.848,00	18.911.295.500,00	-1,23%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	390.732.536.000	405.831.088.000	490.772.001.000	482.150.715.000	482.150.715.000,00	502.969.026.000,00	5,47%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	22.933.763.000	74.377.832.000	165.828.134.725	133.603.234.143	94.845.070.521,00	119.802.446.516,00	65,03%
1.3	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>59.099.897.310</b>	<b>80.578.919.769</b>	<b>75.076.972.858</b>	<b>72.995.145.600</b>	<b>27.015.013.112,00</b>	<b>109.705.206.529,00</b>	<b>53,97%</b>
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	27.015.013.112,00	28.091.568.988,00	1%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	38.955.789.000	49.729.703.769	50.059.972.858	53.574.777.000	66.092.844.949,00	59.813.352.605,00	9,84%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	80.187.195.000	94.438.327.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.144.108.310	30.849.216.000	25.017.000.000	19.420.368.600	16.547.670.595,00	21.800.284.936,00	6%

Sumber: Laporan Keuangan Bakuda, diolah

- b. Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah Kota Tegal, sebagaimana Tabel 3.6.

Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar 101% dimana untuk belanja pegawai sebesar 101%. belanja hibah 120%. belanja bantuan sosial sebesar 382% dan belanja bantuan keuangan sebesar 82%.

- c. Menghitung rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah Kota Tegal. sebagaimana Tabel 3.7.

Rata-Rata Pertumbuhan aset tahun 2014 – 2018 sebesar minus 15% pertahun dimana untuk rata-rata pertumbuhan pertahun aset lancar 6%. investasi jangka panjang 141%, aset tetap minus 17% dan aset lainnya sebesar 3%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pertahun kewajiban sebesar 452% dimana pertumbuhan rata-rata pertahun untuk kewajiban jangka pendek sebesar 9,76% dan kewajiban jangka panjang sebesar 0%. Kewajiban jangka panjang berupa hutang pada pihak ketiga (loan ADB) sudah lunas pada tahun 2015 sehingga pertumbuhannya 0%. Ekuitas dana terdapat realisasi pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0%.

**Tabel 3.11**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah**  
**Kota Tegal**

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	RATA-RATA PERTUMB
1	Belanja Pegawai	360.139.715.802	404.786.760.463	411.630.711.359	382.099.799.923	375.579.236.296,00	383.397.282.307,00	1,46%
2	Belanja Bunga	98.152.703	54.569.082	10.985.462	-	-	-	
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	
4	Belanja Hibah	15.478.660.000	4.472.192.500	11.775.132.600	13.563.884.500	15.282.746.721,00	12.031.437.350,00	19,76%
5	Belanja Bantuan Sosial	14.276.408.700	690.874.460	211.500.000	165.000.000	215.000.000,00	3.581.950.000,00	281,96%
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-	
7	Belanja Bantuan Keuangan	582.234.000	577.265.400	656.961.500	686.678.600	650.967.200,00	670.499.867,00	3,06%
8	Belanja Tidak Terduga	-	-	81.000.000	82.944.400	92.200.000,00	0,00	
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>390.575.171.205</b>	<b>410.581.661.905</b>	<b>424.366.290.921</b>	<b>396.598.307.423</b>	<b>391.820.150.217,00</b>	<b>399.681.169.524,00</b>	<b>0,55%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda, diolah

**Tabel 3.12**  
**Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Tegal (Jutaan Rupiah)**

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RATA2 PERTUMBUHAN
ASET							
ASET LANCAR							
<b>KAS</b>	126.902.79	60.986.19	141.703.75	105.589.10	107.778.04	-	14.25%
<b>DEPOSITO SETARA KAS</b>	-	100.000	-	-	-	73.600.97	-
<b>INVESTASI JANGKA PENDEK</b>	95.823.15	95.823.15	95.823.15	95.823.15	95.823.15	95.823.15	0%
<b>PIUTANG</b>	35.321.93	30.984.81	41.276.00	49.213.47	50.797.81		10.85%
<b>AKUMULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH</b>	-2.901.24	2.084.50	-11.118.16	-17.218.68	-18.906.81	-16.186.55	-150.99%
<b>BEBAN DIBAYAR DIMUKA</b>	-	-	460.35	336.68	540.09	789.14	26.55%
<b>PERSEDIAAN</b>	10.799.15		16.535.46	15.607.05	25.737.95	21.240.34	13.94%
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>265.945.78</b>	<b>289.878.65</b>	<b>284.680.55</b>	<b>257.932.77</b>	<b>261.770.22</b>	<b>340.767.52</b>	<b>5.90%</b>
INVESTASI JANGKA PANJANG							
INVESTASI NON PERMANEN							
<b>DANA BERGULIR</b>	-	-	872.2	872.2	872.2	854.2	0%
<b>INVESTASI NON PERMANEN</b>	971.94	958.55	-	-	-	-	-
<b>AKUMULASI PENYISIHAN INVESTASI NON PERMANEN</b>	-971.94	-958.55	-872.2	-872.2	-872.2	-854.2	-18.87%
<b>JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
INVESTASI PERMANEN							
<b>PENYERTAAN MODAL</b>	33.252.82	34.391.82	35.840.44	44.973.99	54.898.99	72.871.80	17.59%
<b>INVESTASI PERMANEN LAINNYA</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH INVESTASI PERMANEN</b>	<b>33.252.82</b>	<b>34.391.82</b>	<b>35.840.44</b>	<b>44.973.99</b>	<b>54.898.99</b>	<b>72.871.80</b>	<b>17.59%</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>33.252.82</b>	<b>34.391.82</b>	<b>35.840.44</b>	<b>44.973.99</b>	<b>54.898.99</b>	<b>72.871.80</b>	<b>17.59%</b>
ASET TETAP							
<b>TANAH</b>	618.593.32	703.628.53	713.012.44	707.691.93	700.595.38	857.263.49	7.14%
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	244.032.70	298.124.16	346.773.03	380.126.90	383.514.86	407.547.45	11.05%
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	388.182.17	436.225.01	492.295.57	526.927.76	579.463.32	595.069.46	8.99%
<b>JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI</b>	293.678.87	320.487.34	420.620.48	540.944.92	614.942.13	658.041.66	17.93%
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	22.336.53	22.850.49	23.883.34	22.092.03	12.890.73	15.600.56	-4.26%

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	RATA2 PERTUMBUHAN
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	6.140.25	6.899.08	11.026.83	39.997.46	42.284.20	32.476.52	63.49%
AKUMULASI PENYUSUTAN	-	-	-626.365.02	-573.466.15	-611.269.92	-676.554.35	2.94%
ASET DANA BOS	-	565.15	-	-	-	-	0%
JUMLAH ASET TETAP	<b>1.572.963.84</b>	<b>1.788.779.76</b>	<b>1.381.246.67</b>	<b>1.644.314.85</b>	<b>1.722.420.72</b>	1.889.444.	<b>-16.83%</b>
DANA CADANGAN							
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA							
KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	25.170.19	25.170.19	25.170.19	25.170.19	25.317.46	30.077.58	3.88%
ASET TIDAK BERWUJUD	516.49	587.24	633.24	335.47	470.51	352.14	-2.08%
ASET LAIN-LAIN	104.500.72	103.169.07	103.169.07	104.992.98	199.369.40	69.466.50	5.05%
JUMLAH ASET LAINNYA	<b>130.187.40</b>	<b>128.926.50</b>	<b>128.972.50</b>	<b>130.498.64</b>	<b>225.157.36</b>	<b>99.896.23</b>	<b>3.43%</b>
JUMLAH ASET	<b>2.002.349.84</b>	<b>2.241.976.73</b>	<b>1.830.740.16</b>	<b>2.077.720.25</b>	<b>2.264.247.29</b>	<b>2.402.980.3</b>	<b>-14.66%</b>
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
UTANG	-	0.35	20.902.37	16.632.24	24.124.93	45.005.40	37.06%
BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	464	420.41	193.91	-	-	-	
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	-	-	870.6	1.044.01	1.079.68	1.679.67	386.06%
UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	-	-	4.839.20	3.684.77	290.82	115.87	-58.71%
KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA	18.200.35	23.139.10	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	<b>18.664.35</b>	<b>23.559.86</b>	<b>26.806.08</b>	<b>21.361.02</b>	<b>25.495.43</b>	<b>46.855.41</b>	<b>24.57%</b>
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
UTANG	614.32	193.91	3.509.12	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	<b>614.32</b>	<b>193.91</b>	<b>3.509.12</b>	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	<b>19.278.67</b>	<b>23.753.77</b>	<b>30.315.20</b>	<b>21.361.02</b>	<b>25.495.43</b>	<b>46.855.41</b>	<b>24.89%</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			<b>1.800.424.98</b>	<b>2.056.359.22</b>	<b>2.238.751.86</b>	<b>2.356.124.968</b>	<b>325.17%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda, diolah

### 3.3.3. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2021

Sumber pendapatan daerah mencakup: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Analisis pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

#### 1) Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan, sebagaimana Tabel 3.13 dibawah ini.

**Tabel 3.13 Presentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Tegal**

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	RATA-RATA
1	<b>PENDAPATAN</b>							
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>32.76%</b>	<b>31.84%</b>	<b>27.35%</b>	<b>29.94%</b>	<b>28.11%</b>	<b>27.54%</b>	<b>-3.12%</b>
1.1.1	Pajak Daerah	6.32%	5.67%	5.10%	6.74%	8.57%	8.62%	7.91%
1.1.2	Retribusi Daerah	3.10%	2.04%	2.01%	1.94%	1.78%	1.84%	-8.80%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	0.51%	0.41%	0.38%	1.44%	0.36%	0.83%	61.52%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	22.84%	23.72%	19.85%	19.83%	17.40%	16.25%	-6.29%
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>59.24%</b>	<b>58.71%</b>	<b>65.50%</b>	<b>70.06%</b>	<b>61.60%</b>	<b>61.88%</b>	<b>1.20%</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	3.22%	2.42%	3.01%	2.85%	2.61%	1.82%	-8.89%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	52.91%	47.58%	46.71%	47.05%	49.29%	48.50%	-1.60%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	3.11%	8.72%	15.78%	13.04%	9.70%	11.55%	47.49%
1.3	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>8.00%</b>	<b>9.45%</b>	<b>7.15%</b>	<b>7.12%</b>	<b>11.21%</b>	<b>10.58%</b>	<b>9.04%</b>
1.3.1	Hibah						2.71%	
1.3.2	Dana Darurat							
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.28%	5.83%	4.76%	5.23%	6.76%	5.77%	3.31%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10.86%	11.07%					
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.73%	3.62%	2.38%	1.90%	1.69%	2.10%	-1.72%

Sumber: Laporan Keuangan Bakuda, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, sumber pendapatan daerah tahun 2014 – 2019 masih didominasi dari kontribusi dana perimbangan berkisar dari 58,71% sampai dengan 70,06% dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,20%. Sedangkan pendapatan asli daerah tahun 2014 – 2019 memberikan kontribusi hanya berkisar dari 27,35% sampai dengan 32.76% dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar minus 3,12%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan masih tinggi bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.

## 2) Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana Tabel 3.14 dibawah ini:

**Tabel 3.14 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun 2014 - 2019**

NO	URAIAN	KINERJA					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>OT</b>	<b>OT</b>	<b>UT</b>	<b>UT</b>	<b>UT</b>	<b>UT</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	OT	OT	OT	UT	UT	UT
1.1.1	Pajak Daerah	OT	OT	OT	OT	OT	OT
1.1.2	Retribusi Daerah	OT	OT	UT	UT	UT	UT
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	E	UT	OT	E	OT	OT
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	OT	OT	OT	UT	UT	UT
1.2	Dana Perimbangan	UT	UT	UT	UT	UT	UT
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	UT	UT	UT	UT	UT	UT
1.2.2	Dana Alokasi Umum	E	E	E	E	E	E
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	UT	UT	UT	UT	UT	UT
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	OT	OT	OT	E	UT	UT
1.3.1	Hibah					UT	OT
1.3.2	Dana Darurat						
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	OT	OT	OT	OT	OT	UT
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	E	E	UT			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	UT	UT	E	E	UT	UT

**Sumber:** Laporan Keuangan Bakeuda, diolah.

*Keterangan:*

*OT : Over Target (pelampauan target pendapatan)*

*UT : Under Target (tidak mencapai target yang ditetapkan)*

*E : Equal (mencapai target yang ditetapkan)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian target pendapatan daerah. Pada tahun 2014 dan 2015 realisasi pendapatan daerah melampaui target yang telah ditetapkan sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pendapatan daerah yang setiap tahunnya tidak mencapai target dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yaitu pendapatan dari dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi

Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Dana Alokasi Umum tahun 2014 sampai dengan 2017 sesuai dengan target.

Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2014 sampai dengan 2016 mencapai target sedangkan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak mencapai target. Retribusi Daerah mencapai target pada tahun 2014 dan tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tidak mencapai target. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019 melampaui target sedangkan tahun 2015 tidak mencapai target dan sesuai dengan target pada tahun 2014 dan tahun 2017.

### 3) Analisis proyeksi pendapatan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan kapasitas pendapatan daerah tahun rencana. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi. inflasi dan lain-lain)
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. khususnya untuk masing-masing komponen PAD.
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Proyeksi pendapatan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10 berikut. Proyeksi pendapatan tahun 2021 merupakan angka perkiraan dari pertimbangan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dan pertimbangan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp.964.797.889.000.- dimana Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp.337.904.342.000.-, Pendapatan Transfer sebesar Rp.626.893.547.000.- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.73.525.790.000.-.

**Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan  
Kota Tegal Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019*	APBD 2020	PROYEKSI/ TARGET 2021
<b>4.</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>					
4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>					
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	69.042.455.743	83.852.211.209	89.361.925.371	93.763.370.000	98.382.668.000
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	19.857.864.056	17.402.002.890	19.087.354.255	26.857.084.000	26.960.057.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.707.658.210	3.530.831.162	8.575.641.316	10.729.217.000	10.729.217.000
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203.222.678.124	170.236.413.333	168.550.868.042	201.663.071.000	201.832.400.000
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>306.830.656.135</b>	<b>275.021.458.594</b>	<b>285.575.788.984</b>	<b>333.012.742.000</b>	<b>337.904.342.000</b>
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>					
4.2.1.	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>					
4.2.1.1	<b>Dana Perimbangan</b>					
A.	<b>Dana Transfer Umum</b>					
(1)	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.186.187.399	25.571.473.848	18.911.295.500,00	25.246.220.000,00	27.799.462.000
(2)	Dana Alokasi Umum	482.150.715.000	482.150.715.000	502.969.026.000,00	512.935.790.000,00	525.568.295.000
B.	<b>Dana Transfer Khusus</b>					
(1)	Dana Alokasi Khusus	133.603.234.143	94.845.070.521	119.802.446.516,00	153.175.243.000,00	
(2)	Dana Insentif Daerah				10.654.291.000	
4.2.2.	<b>Transfer Antar Daerah</b>					
4.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	53.574.777.000	66.092.844.949	59.813.352.605,00	70.697.875.000,00	73.525.790.000
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.420.368.600	16.547.670.595	21.800.284.936,00	-	
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>717.935.282.142</b>	<b>685.207.774.913</b>	<b>723.296.405.557</b>	<b>772.709.419.000</b>	<b>626.893.547.000</b>
4.3.	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>					
4.3.1.	Pendapatan Hibah	-	27.015.013.112	28.091.568.988,00	27.248.597.000,00	-
	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>-</b>	<b>27.015.013.112</b>	<b>28.091.568.988,00</b>	<b>27.248.597.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>1.024.765.938.277</b>	<b>987.244.246.619</b>	<b>1.036.963.763.529,16</b>	<b>1.132.970.758.000,00</b>	<b>964.797.889.000</b>

Sumber : Bakeuda Kota Tegal

\* Unaudited diolah

Pertumbuhan realisasi Pajak Daerah tahun 2014-2019 sebesar 14,25% sedangkan Pajak Daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.98.382.668.000.-. Pertumbuhan realisasi Retribusi Daerah Tahun 2014-2019 sebesar minus 2,22%. Proyeksi tahun 2021 Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp.26.960.057.000.-. Realisasi Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sangat fluktuatif. Proyeksi Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp.10.729.217.000.-. Realisasi Lain-Lain PAD yang sah tahun 2014-2017 fluktuatif. Proyeksi Lain-Lain PAD yang sah tahun 2021 sebesar Rp 201.832.400.000.-.

Pada Pendapatan Transfer Daerah, Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tahun 2014-2017 fluktuatif. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2014–2019 rata-rata tumbuh minus 1,23%. sedangkan pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.27.799.462.000.-. Dana Alokasi Umum Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.525.568.295.000.-. Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 dalam perhitungan proyeksi perangkaan tahun 2021 diabaikan.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.73.525.790.000.-. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2021 dalam perhitungan proyeksi perangkaan Tahun 2021 diabaikan.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2021 berupa Pendapatan Hibah dalam perhitungan proyeksi perangkaan Tahun 2021 diabaikan.

#### 4) Analisis penerimaan pembiayaan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Tegal Tahun 2021 sebesar Rp.131.354.315.000.-. yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya atau tahun 2020 dimana diproyeksikan sebesar Rp.40.000.000.000.- dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp.91.354.315.000,-.

### **Tahap II: Penghitungan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Penghitungan dilakukan dengan mengambil data dan informasi proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun 2021 dari RPJMD 2019-2024, kemudian ditelaah dan disinkronkan dengan hasil evaluasi pada Tahap I. Pada komponen yang berkesesuaian lalu ditambah/dikurangi untuk menghasilkan proyeksi belanja dan pengeluaran daerah RKPD tahun 2021. Penambahan/pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan analisis proyeksi belanja dan pengeluaran RKPD tahun rencana yang telah dilakukan. mencakup:

#### 1) Analisis belanja daerah tahun 2021.

Analisis belanja daerah tahun 2021 mencakup analisis terhadap:

##### a) Belanja Operasional, meliputi:

- (1) Belanja Pegawai;
- (2) Belanja Barang dan Jasa;
- (3) Belanja Bunga;
- (4) Belanja Subsidi;
- (5) Belanja Hibah; dan
- (6) Belanja Bantuan Sosial.

##### b. Belanja Modal,

##### c. Belanja Tidak Terduga,

d. Belanja Transfer.

2) Analisis pengeluaran pembiayaan tahun 2021.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020. Komponen pengeluaran pembiayaan daerah mencakup:

- a) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b) penyertaan modal daerah;
- c) pembentukan Dana Cadangan;
- d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 sebagaimana dalam Tabel 3.11 dan 3.12 berikut:

**Tabel 3.16**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah**  
**Kota Tegal Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019*	APBD 2020	RKPD 2021
5.	<b>BELANJA DAERAH</b>					
5.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>					
5.1.1.	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	382.099.799.923	374.307.036.496	383.397.282.307	445.609.082.000	406.324.036.000
	Belanja Pegawai (Honorarium)	1.250.073.100	93.912.239.416	92.656.453.014	94.430.134.000	397.859.700.000
5.1.2.	Belanja Brg dan Jasa	413.825.973.676	318.902.764.143	388.259.566.495	527.988.798.000	
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Subsidi					
5.1.5.	Belanja Hibah	13.563.884.500	15.282.746.721	12.031.437.350	20.555.841.000	10.561.040.000
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	165.000.000	215.000.000	3.581.950.000	4.660.000.000	4.660.000.000
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>					<b>819.404.776.000</b>
5.2.	<b>Belanja Modal</b>	<b>205.549.637.709</b>	<b>113.580.584.276</b>	<b>165.978.023.865</b>	<b>182.439.678.000</b>	<b>274.038.115.000</b>
5.3.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>82.944.400</b>	<b>92.200.000</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
5.4.	<b>Belanja Transfer</b>					
5.4.1	Belanja Bagi Hasil					
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	686.678.600	650.967.200	670.499.867	709.567.000	709.567.000
	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>					<b>709.567.000</b>
	<b>Total Jumlah Belanja</b>	<b>1.017.223.991.908</b>	<b>916.943.538.252</b>	<b>1.046.575.212.898</b>	<b>1.278.393.100.000</b>	<b>1.096.152.458.000</b>

Sumber: Bakeuda Kota Tegal

\* Unaudited diolah

**Tabel 3.17**  
**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah**  
**Kota Tegal Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019*	Proyeksi/ Target 2020	RKPD 2021
6.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>					
6.1.1.	SilPA	112.932.169.729	106.926.300.398	165.508.163.967,77	165.060.342.000	40.000.000.000
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya					91.354.569.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>112.932.169.729</b>	<b>106.926.300.398</b>	<b>165.508.163.967,77</b>	<b>165.060.342.000</b>	<b>131.354.569.000</b>
6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>					
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	3.622.687.700	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	9.925.000.000	11.320.000.000	11.990.000.000,00	19.638.000.000	-
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2.1	Pengeluaran pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-
6.2.1	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>13.547.687.700</b>	<b>11.320.000.000</b>	<b>11.990.000.000,00</b>	<b>19.638.000.000</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>99.384.482.029</b>	<b>165.582.571.765</b>	<b>153.518.163.967,77</b>	<b>145.422.342.000</b>	<b>131.354.569.000</b>

Sumber: Bakeuda Kota Tegal

\* Unaudited diolah

Untuk mendapatkan nilai dana yang akan digunakan dalam penghitungan pagu indikatif atas kapasitas keuangan riil yang telah dihitung di atas, dikurangkan terlebih dahulu dengan kebutuhan dana bagi program/ kegiatan wajib / mengikat yang harus diselenggarakan karena beberapa alasan:

- 1) Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

Pada Tabel 3.16 dan Tabel 3.17 Pengeluaran Belanja Operasi pada proyeksi RKPD Tahun 2021 sebesar Rp.819.404.776.000,- dan pada Pengeluaran Pembiayaan pada proyeksi RKPD Tahun 2021 tidak ada kebijakan. Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas maka Pengeluaran Wajib dan Mengikat pada proyeksi RKPD tahun 2021 sebesar Rp.819.404.776.000,-.

Setelah dilakukan penghitungan Tahap I dan Tahap II di atas maka dapat dilakukan penghitungan analisis kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Tegal Tahun 2021 yaitu sebagaimana pada tabel 3.18. Berdasarkan penghitungan pada tabel tersebut maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Tegal proyeksi tahun 2021 yaitu sebesar Rp.276.747.682.000,-.

**Tabel 3.18 Analisis Penghitungan Kapasitas Riil Kemampuan  
Keuangan Daerah Kota Tegal Tahun 2021**

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2021
1.	Pendapatan Daerah	964.797.889.000
2.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	91.354.315.000
3.	SiLPA	40.000.000.000
	<b>Total penerimaan</b>	<b>1.096.152.204.000</b>
	<i>Dikurangi:</i>	
4.	Belanja Operasi	819.404.776.000
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-
	<b>Total Pengeluaran</b>	<b>819.404.776.000</b>
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>276.747.682.000</b>

#### 3.3.4. Analisis Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (Dana Bagi Hasil, DAK) dan belanja tertentu (belanja pegawai, belanja bagi hasil). Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan tahap 2 penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KFDi = [Penerimaan Umum APED] - [Penerimaan yang Telah Ditentukan Penggunaannya + Belanja]$$

$$KFDi = [PAD + BHP + DBH + DAU + Otsus + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBH DR TDP + DBH CHT TDP + BBH + BH DOB + DD + ADD + Otsus + BP + BB]$$

Keterangan:

KFD	=	Kapasitas Fiskal Daerah
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
BHP	=	Bagi Hasil Provinsi
DBH	=	Dana Bagi Hasil
DAU	=	Dana Alokasi Umum
Otsus	=	Dana Otonomi Khusus
TPG/Tamsil	=	Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan
DTK	=	Dana Transfer Khusus
PR TDP	=	Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya
DBHDR TDP	=	DBH Dana Reboisasi yang Telah Ditentukan Penggunaannya
DBHCHT TDP	=	DBH Cukai Hasil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya
BBH	=	Belanja Bagi Hasil
BH DOB	=	Bagi Hasil untuk Daerah Otonom
DD	=	Dana Desa
ADD	=	Alokasi Dana Desa
Otsus	=	Dana Otonomi Khusus
BP	=	Belanja Pegawai
BB	=	Belanja Bunga

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFDi = \frac{KFDi}{(\sum KFDi) / n}$$

Keterangan:

IKFDi	=	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
KFDi	=	Kapasitas Fiskal Daerah
n	=	Jumlah provinsi sebanyak 34 (tiga puluh empat) atau kabupaten/kota sebanyak 508 (lima ratus delapan)

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai sistem akuntansi pemerintah.

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal Daerah masing-masing daerah kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut :

- a. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah lebih dari atau sama dengan 2.05 (dua koma nol lima) ( $IKFD \geq 2.05$ ) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi;
- b. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara kurang dari atau sama dengan 2.05 (dua koma nol lima) sampai lebih dari 1.14 (satu koma satu empat) ( $2.0 \leq IKFD < 1.14$ ) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah tinggi;
- c. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara kurang dari atau sama dengan 1.14 (satu koma satu empat) sampai lebih dari 0.72 (nol koma tujuh dua) ( $0.72 < IKFD \leq 1.14$ ) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sedang;
- d. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara kurang dari atau sama dengan 0.72 (nol koma tujuh dua) sampai lebih dari 0.53 (nol koma lima tiga) ( $0.53 < IKFD \leq 0.72$ ) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah rendah; dan
- e. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kurang dari atau sama dengan 0.53 (nol koma lima tiga) (indeks  $\leq 0.53$ ) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang menyebutkan bahwa Kota Tegal dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar **0,704** atau **katagori Rendah**. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah didasarkan pada data APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai sistem akuntansi pemerintah. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kota Tegal Tahun 2019 adalah sebagaimana penghitungan pada tabel berikut:

**Tabel 3.19**  
**Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kota Tegal**  
**Tahun Anggaran 2019**

URAIAN	APBD 2019
<b>Pendapatan:</b>	
Pendapatan Asli Daerah	306.557.626.000
Dana Perimbangan	657.351.343.000
Lain-lain Pendapatan yang Sah	117.682.261.000
<i>dikurangi</i>	
1) Pendapatan Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan:	
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	26.008.751.000
Dana Alokasi Khusus	128.373.566.000
2) Belanja Tertentu:	
Belanja Pegawai	435.914.655.000
Belanja Bunga	-
Belanja Hibah	13.438.372.000
Belanja Bagi Hasil	94.002.612.000
<b>KFD kabupaten/ kota-I</b>	<b>383.853.274.000</b>

Berdasarkan penghitungan sebagaimana pada tabel di atas maka KFDi Kota Tegal Tahun 2019 sebesar **Rp.383.853.274.000.-**.

### 3.3.5. Analisis Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/ kota, diatur sebagai berikut:

- di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tegal pada RKPD Kota Tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.20. Pada tabel tersebut Pendapatan Umum Daerah berdasarkan realisasi 2 tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan (Tahun Anggaran 2019).

**Tabel 3.20**  
**Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tegal**  
**Tahun Anggaran 2019**

URAIAN	TAHUN 2019
<b>Pendapatan Umum Daerah</b>	
Pendapatan Asli Daerah	285.575.788.984
Dana Bagi Hasil Pajak / Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	18.911.295.500
Dana Alokasi Umum	502.969.026.000
<b>Jumlah A</b>	<b>807.456.110.484</b>
<i>dikurangi</i>	
<b>Belanja PNSD</b>	
Gaji Pokok	183.200.851.629
Tunjangan Keluarga	16.815.455.985
Tunjangan Jabatan	20.024.021.480
Tunjangan Beras	8.758.111.880
Tunjangan Pph Psl .21	1.003.149.571
Tambahan Penghasilan Pns	71.017.946.605
<b>Jumlah B</b>	<b>229.801.590.545</b>
<b>Kemampuan Keuangan Daerah = A – B</b>	<b>577.654.519.939</b>

**Sumber:** Bakuda Kota Tegal, diolah

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tegal pada Tahun 2019 sebesar **Rp.577.654.519.939.-** sehingga Kota Tegal termasuk dalam kelompok Kabupaten/ Kota dengan **Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi**, karena Kemampuan Keuangan Daerah berada di atas Rp.550.000.000.000,-.

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tegal pada RKPD Kota Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.21. Pada tabel tersebut Pendapatan Umum Daerah mendasari RKPD 2021 sedangkan Belanja PNSD berdasarkan perhitungan kebutuhan Belanja Pegawai tahun 2021 ditambah *access* 2,5%.

**Tabel 3.21 Penghitungan Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah  
Kota Tegal Tahun 2021**

URAIAN	RKPD 2021
<b>Pendapatan Umum Daerah</b>	
Pendapatan Asli Daerah	337.641.979.000
Dana Bagi Hasil Pajak / Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	27.799.462.000
Dana Alokasi Umum	525.568.295.000
<b>Jumlah A</b>	<b>891.009.736.000</b>
<i>dikurangi</i>	
Belanja PNSD	
Gaji Pokok	200.705.200.000
Tunjangan Keluarga	19.325.325.000
Tunjangan Jabatan	5.873.547.000
Tunjangan Beras	12.381.579.000
Tunjangan PPH Psl .21	910.311.000
Tambahan Penghasilan PNS	105.000.000.000
<b>Jumlah B</b>	<b>344.195.962.000</b>
<b>Kemampuan Keuangan Daerah = A – B</b>	<b>546.813.774.000</b>

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.21 diatas maka Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tegal sebesar Rp.546.813.774.000.- sehingga Kota Tegal termasuk dalam kelompok Kabupaten/ Kota dengan **Kemampuan Keuangan Daerah Sedang**, karena Kemampuan Keuangan Daerah berada pada *range* Rp.300.000.000.000,- sampai dengan Rp.550.000.000.000,-.

### 3.3.6. Kerangka Proyeksi APBD 2021

Kerangka APBD Tahun Anggaran 2021 yang menunjukkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana pada Tabel berikut

**Tabel 3.22 Kerangka Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2021**

NO.	URAIAN	PROYEKSI APBD 2021
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>964.797.889.000</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>337.904.342.000</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	98.382.668.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.960.057.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.729.217.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201.832.400.000
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>626.893.547.000</b>
1.2.1	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>553.367.757.000</b>
	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>553.367.757.000</b>
A	DANA TRANSFER UMUM	
(1)	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.799.462.000
(2)	Dana Alokasi Umum	525.568.295.000
B	DANA TRANSFER KHUSUS	
(1)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-

NO.	URAIAN	PROYEKSI APBD 2021
(2)	Dana Insentif Daerah (DID)	-
1.2.2	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>73.525.790.000</b>
(1)	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73.525.790.000
(2)	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>
1.3.0	Pendapatan Hibah	-
2	<b>BELANJA</b>	<b>1.096.152.458.000</b>
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>819.404.776.000</b>
2.1.1	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) Belanja Pegawai (Honorarium)	406.324.036.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	397.859.700.000
2.1.3	Belanja Hibah	10.561.040.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4.660.000.000
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>274.038.115.000</b>
2.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000</b>
2.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>709.567.000</b>
3	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(131.354.569.000)</b>
4	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>131.354.569.000</b>
4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.000.000.000
4.2	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-
4.3	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	91.354.569.000
5	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>-</b>
5.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-
5.2	Pembayaran Pokok Utang	-
5.3	Pembayaran bunga Utang	-
6	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>-</b>
6.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-
7	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>131.354.569.000</b>

a. Komposisi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Kerangka Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2021 maka dapat diperbandingkan komposisi sumber pendapatan daerah sebagaimana tabel berikut

**Tabel 3.23**  
**Komposisi Prosentase Sumber Pendapatan Daerah**  
**pada Kerangka Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2021**

URAIAN	JUMLAH (Rp)	PROSENTASE
Pendapatan Asli Daerah	337.904.342.000	35,02
Pendapatan Transfer	626.893.547.000	64,98
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>964.797.889.000</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa sumber pendapatan dari dana transfer dari pusat menjadi sumber yang utama dalam pendanaan pembangunan daerah yaitu sebesar 64,98% dari total pendapatan daerah sedangkan Pendapatan Asli Daerah memberikan peranan pendanaan hanya sebesar 35,02%.

b. Komposisi Belanja Daerah

Sedangkan pada Belanja Daerah dapat digambarkan perbandingan komposisi antar belanja sebagaimana digambarkan pada tabel 3.24 berikut ini.

**Tabel 3.24**  
**Komposisi Prosentase Belanja Daerah pada Kerangka Proyeksi APBD**  
**Tahun Anggaran 2021**

URAIAN	JUMLAH (Rp)	PROSENTASE
Belanja Operasi	819.404.776.000	74,75
Belanja Modal	274.038.115.000	25,00
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	0,18
Belanja Transfer	709.567.000	0,07
<b>JUMLAH</b>	<b>1.096.152.458.000</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek mendominasi 74,75% dari Belanja Daerah. Sedangkan Belanja Modal sebesar 25,00% untuk belanja pengadaan aset tetap dan aset tetap lainnya, untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya melalui Belanja Tak Terduga sebesar 0,18%, dan 0,07% untuk Belanja Transfer.

# BAB IV

## SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tegal Tahun 2021 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun ke-IV (2020–2024) Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal 2005–2025 dan merupakan Tahun Kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2019–2024. Penekanan tahapan RPJPD Kota Tegal Lima Tahun ke-IV (2020–2024) adalah Mewujudkan Kota Tegal sebagai Kota Perdagangan, Jasa, dan Industri dengan masyarakat sejahtera yang bermartabat melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kota Tegal yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun kaitan indikasi tema pembangunan antara dokumen RPJPD Kota Tegal Tahun 2005–2025, RPJMD Kota Tegal Tahun 2019–2024, dengan dokumen RKPD Kota Tegal Tahun 2021, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2021 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2019–2024



Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Tegal Tahun 2021 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kota Tegal Tahun 2011–2031; (2) Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas

pembangunan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Kota Tegal Tahun 2019 dan RKPD Kota Tegal Tahun 2020 triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021; dan (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2021.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

### 4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi RPJMN Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai dampak terjadinya pandemik global COVID-19, membuat pemerintah memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Tema Pembangunan pada RKP Tahun 2021 disusun agar adaptif dan responsif terhadap wabah COVID-19 dan proses pemulihannya, sehingga dilakukan perubahan tema pembangunan dari “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas” diubah menjadi “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”, dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
- 2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- 3) Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
- 4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Agenda Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

**PN-1 : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**

PN-2 : Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

**PN-3 : SDM berkualitas dan berdaya saing**

PN-4 : Revolusional dan pembangunan kebudayaan

**PN-5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar**

**PN-6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim**

PN-7 : Stabilitas polhukhankam dan ransformasi pelayanan publik

**Tabel 4.1 Penyesuaian Target RKP 2020 dengan Target RKP 2021**

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2020		2021	
	TARGET APBN	OUTLOOK	PROYEKSI	OUTLOOK
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	2,3	4,5 – 5,5	5,3
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,0	7,8	7,4 – 7,7	7,5
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	9,24	8,7 – 9,2	8,9
Rasio GINI	0,375 – 0,385	0,379	0,375 – 0,382	0,376
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	72,30	73,19 – 73,26	73,24

**Sumber:** Musrenbang Nasional Tahun 2020 dalam rangka Penyusunan RKP Tahun 2021

Keterangan Tabel 4.1:

- Untuk 2021, proyeksi adalah perkiraan kemungkinan kondisi yang akan terjadi, sedangkan outlook telah memperhitungkan intervensi kebijakan.
- Pengaruh COVID-19 menambah penduduk miskin sekitar 3,6 juta jiwa dibandingkan dengan September 2019. Melalui perluasan cakupan BPNT, PKH, dan BLT dengan penyaluran yang terintegrasi dengan baik, tingkat kemiskinan diperkirakan mencapai sekitar 9,24 persen pada akhir 2020.
- Jumlah penganggur = jumlah PHK + jumlah AK baru yang tidak mendapat pekerjaan. Tambahan penganggur pada 2020 sebesar 3,52 juta dibandingkan dengan 2019. Perkiraan/ asumsi jumlah PHK didasarkan pada perkembangan data Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan April 2020. Asumsi elastisitas 2020 adalah 350.000 per 1% pertumbuhan ekonomi atau 0,28, sedangkan 2021 elastisitas kembali menjadi 500.000 per 1% pertumbuhan ekonomi atau 0,39.
- Agar tetap sesuai dengan target, kebijakan rasio gini diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah-bawah dan masyarakat pendapatan tinggi.

#### 4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM**” dengan prioritas pembangunan Provinsi (PP) sebagai berikut:

- 1) **PP-1** : Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pengurangan kemiskinan, melalui Penyediaan *basic life access*, Penguatan *sustainable livelihood*, Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/ TKPKD;
  - b. Menurunkan angka pengangguran, melalui Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Perluasan kesempatan kerja, Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

- 2) **PP-2** : Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing, dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
  - a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas agar semua anak usia sekolah dapat bersekolah;
  - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam mengurangi kesakitan dan kematian;
  - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan;
  - d. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan bagi kelompok disabilitas serta lansia produktif dan non produktif.
- 3) **PP-3** : Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana, dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
  - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian
  - b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan;
  - c. Pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan dan memperluas cakupan pemeliharaan dan rehabilitasi lahan/ hutan, mangrove dan keanekaragaman hayati (KEHATI); Pemberdayaan kerusakan lingkungan; Konservasi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan;
  - d. Penguatan penerapan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA), peningkatan efektivitas stimulan lumbung pangan untuk daerah rawan pangan;
  - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
  - f. Peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan;
  - g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
  - h. Memacu konsumsi rumah tangga dan korporasi;
  - i. Peningkatan aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang-jasa, keselamatan orang/penumpang serta konektivitas antar wilayah;
  - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana;
  - k. Pengawasan dan pemantapan pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019.
- 4) **PP-4** : Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah, dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
  - a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*) dan membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) yang terintegrasi dengan peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
  - b. Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif;
  - c. Perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan, obyektif dan akuntabel; penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur dan obyektif, serta perbaikan tunjangan kinerja daerah;
  - d. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan persatuan, kesatuan, berbangsa dan bernegara serta cinta Tanah Air.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2021 yaitu:

- 1) Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78;
- 3) Angka Kemiskinan turun menjadi 10,96 – 11,80 persen;
- 4) Indeks Gini sebesar 0,33 – 0,35;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,80 – 5,80 persen;
- 6) Pertumbuhan Ekonomi antara 4,10 – 5,00 persen;
- 7) Inflasi pada angka  $3,0 \pm 1$  persen;
- 8) PDRB per kapita sebesar 41,15 juta rupiah;
- 9) Indeks Williamson sebesar 0,58;
- 10) Nilai Tukar Petani 106 (per Desember);
- 11) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,77;
- 12) Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,12; dan
- 13) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,02.

Rencana pembangunan daerah tahun 2021 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Jawa Tengah yaitu :

- 1) Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/ SMK;
- 2) Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru pendidikan agama;
- 3) Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
- 4) Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
- 5) Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
- 6) Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
- 7) Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/ irigasi;
- 8) Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
- 9) Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
- 10) Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

#### **4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tegal**

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Tegal Periode 2019-2024. Visi pembangunan jangka menengah Kota Tegal Tahun 2019-2024, adalah:

**"Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi  
Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif"**

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota Tegal tahun 2019-2024 tersebut adalah sebagai berikut:

**Berdedikasi:** Menunjukkan karakter pemerintahan yang aparaturnya memiliki kemampuan, tanggung jawab dan pengabdian diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

**Bersih:** Merupakan kondisi lingkungan perkotaan yang hijau, indah, nyaman dan asri dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

**Demokratis:** merupakan kondisi Kota Tegal yang memberikan ruang toleransi kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan menjunjung tinggi nilai yang berkembang di masyarakat serta memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

**Disiplin:** menggambarkan kondisi aparatur pemerintahan dan masyarakat yang tertib, taat dan patuh terhadap peraturan untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan.

**Inovatif:** merupakan kondisi aparatur pemerintah dan masyarakat yang berkemampuan mendayagunakan pemikiran dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan suatu karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya mewujudkan Kota Tegal sebagai kota cerdas (*Tegal Smart City*).

Perwujudan visi melalui **6 (enam)** misi, yaitu: **Misi Pertama**, Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa dan inovatif, berbasis teknologi informasi; **Misi Kedua** Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender; **Misi Ketiga**, Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu; **Misi Keempat**, Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan; **Misi Kelima**, Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif; **Misi Keenam**, Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.

Kelima misi RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dijabarkan kedalam 14 (empat belas) tujuan dan 30 (tiga puluh) sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tegal Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

**1. Misi-1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.**

Misi ini memiliki dua tujuan, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
  - b. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan
  - c. Terselenggaranya Pemerintahan yang bebas dari korupsi
- 2) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan
  - b. Meningkatnya keterbukaan informasi publik

**2. Misi-2 : Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.**

Misi ini memiliki dua tujuan, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang berwawasan kebangsaan dan partipatif dalam politik, dengan sasaran Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat.
  - 2) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kegiatan pembangunan
    - b. Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
- 3. Misi-3 : Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.**
- Misi ini memiliki tiga tujuan, sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
    - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - 2) Menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan
    - b. Menurunnya angka pengangguran
    - c. Meningkatnya rumah layak huni
    - d. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
- 4. Misi-4 : Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan.**
- Misi ini memiliki empat tujuan, sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu.
    - b. Meningkatnya kualitas udara dan air
  - 2) Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan, dengan sasaran:
    - a. Menurunnya Luas wilayah genangan/ banjir
    - b. Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak
  - 3) Terwujudnya transportasi kota yang nyaman, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan
  - 4) Terwujudnya tertib tata ruang, dengan sasaran:
    - a. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
    - b. Meningkatnya Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
- 5. Misi-5: Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.**
- Misi ini memiliki dua tujuan, sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan
    - b. Meningkatnya sektor perindustrian
    - c. Meningkatnya sektor perdagangan/ jasa
    - d. Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor ekonomi kreatif
    - e. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata

- 2) Meningkatnya nilai investasi, dengan sasaran meningkatnya Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

**6. Misi-6 : Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.**

Misi ini memiliki dua tujuan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya keberdayaan pemuda dan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya keberdayaan pemuda
  - b. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional
- 2) Lestarinya seni budaya, dengan sasaran Berkembangnya seni budaya daerah

Rencana pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024. Indikator kinerja tujuan, sasaran, kondisi capaian tahun lalu dan target Tahun 2021 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tegal Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2021 (RPJMD 2019-2024)	TARGET RKPD 2021 (PENYESUAIAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19)		
<b>Misi-1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.</b>								
1.1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	66,18	64,75	64,75	
			Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	
		1.1.1	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65,98	65,50	65,50
		1.1.2	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Indeks Sistem Merit	Nilai	0,57	0,77	0,77
		1.1.3	Terselenggaranya Pemerintahan yang bebas dari korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3,77	3,44	3,44
1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,94	81,70	81,70	
		1.2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3,52	3,62	3,62
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2,54	2,53	2,53
		1.2.2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	32,17	60	60
<b>Misi-2 : Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.</b>								

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2021 (RPJMD 2019-2024)	TARGET RKPD 2021 (PENYESUAIAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19)
2.1	Terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang berwawasan kebangsaan dan partipatif dalam politik			Potensi konflik sosial teratasi	Persen	100	100	100
		2.1.1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Potensi konflik sosial teratasi	Persen	100	100	100
2.2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,37	94,32	93,37
		2.2.1	Meningkatnya penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kegiatan pembangunan	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat	N/A	Pratama	Pratama
		2.2.2	Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Madya	Pratama	Pratama
<b>Misi-3 : Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.</b>								
3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,93	75,95	75,54
		3.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,31	8,31	8,31
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,04	12,93	12,93
		3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,34	74,35	74,35
3.2.	Menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran			Tingkat Kemiskinan	Persen	7,47	6,20 - 7,20	6,40 – 7,40
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,07	7,04	7,7 – 8,07

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2021 (RPJMD 2019-2024)	TARGET RKPD 2021 (PENYESUAIAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19)
		3.2.1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,47	6,20 - 7,20	6,40 – 7,40
		3.2.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,07	7,04	7,7 – 8,07
		3.2.3	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	Persen		87,81	87,81
		3.2.4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan permukiman layak huni	Persen	44,93	52,85	52,85
<b>Misi-4 : Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan.</b>								
4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor	49,934	50,48	50,48
		4.1.1	Meningkatnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu.	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persen	88,37	98,00	98,00
		4.1.2	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Skor	91,22	89,4	89,4
				Pengukuran Indeks Kualitas Air	Skor	30,00	33,4	33,4
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor	33,92	34,1	34,1
4.2	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan			Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	Persen	N/A	80,34	80,34
		4.2.1	Meningkatnya luas wilayah bebas dari genangan / banjir	Persentase Luas Wilayah Bebas Dari Genangan/ Banjir	Persen		88,66	88,66
		4.2.2	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak	Cakupan Layanan Sanitasi	Persen	85,37	84,5	84,5
				Cakupan Layanan Air Minum	Persen	70,92	67,85	67,85

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2021 (RPJMD 2019-2024)	TARGET RKPD 2021 (PENYESUAIAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19)
4.3	Terwujudnya transportasi kota yang nyaman.			Tingkat pelayanan lalu lintas (level of service)	V/C	0,88	0,90 – 1,00	0,90 – 1,00
		4.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan	Tingkat pelayanan lalu lintas (level of service)	V/C	0,88	0,90 – 1,00	0,90 – 1,00
4.4	Terwujudnya tertib tata ruang			Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen	62,75	63,96	63,96
		4.4.1	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen	62,75	63,96	63,96
		4.4.2	Meningkatnya Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Rasio	11,15	11,61	11,61
<b>Misi-5 : Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.</b>								
5.1	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,77	5,70-6,10	4,5 – 5,5
		5.1.1	Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Persentase kenaikan PAD dari sub sektor perikanan	Persen	(0,79)	1,16	1,16
		5.1.2	Meningkatnya sektor perindustrian	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	14,93	14,92	14,92
		5.1.3	Meningkatnya sektor perdagangan/ jasa	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	27,81	29,05	29,05
		5.1.4	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor ekonomi kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	Persen	N/A	2,2	2,2
		5.1.5	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	502,096	519,038	519,038
5.2	Meningkatnya nilai investasi			Nilai investasi	Trilyun Rupiah	4,20	1,74	1,74

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2021 (RPJMD 2019-2024)	TARGET RKPD 2021 (PENYESUAIAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19)
		5.2.1	Meningkatnya Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Nilai investasi	Trilyun Rupiah	4,20	1,74	1,74
<b>Misi-6 : Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.</b>								
6.1	Meningkatnya keberdayaan pemuda dan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional			Persentase Wirausaha Muda	Persen	N/A	0.18	0.18
		6.1.1	Meningkatnya keberdayaan pemuda	Persentase Wirausaha Muda	Persen	N/A	0.18	0.18
		6.1.2	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional	Persentase cabang olahraga berprestasi	Persen	N/A	39,00	39,00
6.2	<i>Lestarnya seni budaya</i>			<i>Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan</i>	<i>Persen</i>	66,66	55,55	55,55
		6.2.1	Berkembangnya seni budaya daerah	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan	Persen	66,66	55,55	55,55

Tiga puluh sasaran pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional Tahun 2021 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 6 (enam) sasaran.

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Tegal Tahun 2021

### 4.2.1. Penjabaran Tema dan Fokus Pembangunan Kota Tegal Tahun 2021

Pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kota Tegal periode 2019-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Kota Tegal. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Tegal, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional Tahun 2021, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemik COVID-19 di Kota Tegal khususnya.

Pandemik global COVID-19 ini tentunya memberikan dampak yang sangat berat bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Adapun dampak besar yang dialami oleh Kota Tegal, pada khususnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat;
- 2) Terjadinya peningkatan pengangguran;
- 3) Adanya peningkatan kerawanan sosial/ kriminalitas;
- 4) Angka kemiskinan yang semakin meningkat;
- 5) Adanya rawan pangan (terkait daya beli dan ketersediaan pangan);
- 6) Kesenjangan sosial ekonomi meningkat;
- 7) Penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, perdagangan dan jasa pada pertumbuhan ekonomi (yang merupakan sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi di kota tegal);
- 8) Inflasi meningkat; serta
- 9) Terhambatnya pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak COVID-19 serta untuk menjaga keselarasan terhadap Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, maka Pemerintah Kota Tegal melakukan penyesuaian dan perubahan Tema Pembangunan dimana pada Rancangan Awal RKPD, Tema Pembangunan Tahun 2021 adalah “Penguatan Daya Saing Daerah yang Didukung Pengembangan Inovasi dan Teknologi Informasi Menuju Tegal *Smartcity*”, diubah menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Daya Saing Daerah dengan Fokus Pada Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”**.

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan Kota Tegal, yaitu Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah periode 2019-2024.

Penyesuaian tema dan perumusan sasaran serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

**Gambar 4.2 Penyesuaian Tema Pembangunan Pusat – Daerah Pada RKPD Kota Tegal Tahun 2021**



Sumber: Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Tegal Tahun 2021

Adapun sebagai perwujudan sasaran pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 tersebut difokuskan pada **6 (enam) prioritas pembangunan** Kota Tegal (PK) sebagai berikut:

- 1) **PK-1:** Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
- 2) **PK-2:** Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kota Tegal yang berdaya saing.
- 3) **PK-3:** Pemantapan infrastruktur kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
- 4) **PK-4:** Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
- 5) **PK-5:** Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.
- 6) **PK-6:** Pengembangan inovasi dan teknologi informasi pendukung "Tegal Smartcity".

Secara rinci, Tema dan prioritas pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Penjabaran Tema Pembangunan Kota Tegal Tahun 2021**

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
PK-1	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.	1.1 Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	a Peningkatan koordinasi dan kolaborasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu
			b Penguatan pelaksanaan jaminan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin
		1.2 Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	a Pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan;
			b Pemberian stimulan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		c Penyelenggaraan kewirausahaan sosial
	1.3 Menurunkan angka pengangguran	a Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha khususnya bagi lulusan sekolah vokasi
<b>PK-2</b> Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kota Tegal yang berdaya saing.	2.1 Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	a Peningkatan kualitas pendidikan formal dengan melakukan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan b Peningkatan akses layanan pendidikan untuk semua melalui Penjaringan dan assesment siswa putus sekolah dan Pelaksanaan Pendidikan Kejar Paket A, B, dan C c Peningkatan kualitas pendidikan non formal d Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan
	2.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	a Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi b Perbaikan gizi masyarakat c Peningkatan pengendalian penyakit d Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) e Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
	2.3 Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	a Perwujudan Kota Tegal Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif serta memastikan anak memperoleh haknya. b Peningkatan perlindungan perempuan. c Peningkatan kualitas pemuda.
	2.4 Meningkatkan produktivitas dan daya saing	a Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
<b>PK-3</b> Pemantapan infrastruktur kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana.	3.1 Meningkatkan pemenuhan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar	a Peningkatan jumlah Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau b Pembangunan infrastruktur pendukung pemenuhan akses air minum layak c Pembangunan infrastruktur pendukung pemenuhan akses sanitasi layak d Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah skala kota

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
	3.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Peningkatan kualitas infrastruktur terkait penanggulangan banjir</li> <li>b Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung operasional pelabuhan</li> <li>c Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pasar tradisional)</li> <li>d Penataan kota sebagai <i>service hub</i> pariwisata, perdagangan dan jasa</li> </ul>
	3.2 Mengembangkan infrastruktur perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Penataan transportasi Kota Tegal</li> <li>b Pengembangan moda transportasi bagi anak sekolah</li> </ul>
	3.4 Peningkatan Ketahanan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur tahan bencana</li> <li>b Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana</li> </ul>
<b>PK-4</b> Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.	4.1 Meningkatkan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, kecil, dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar melalui pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;</li> <li>b Peningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan;</li> <li>c Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;</li> <li>d Penciptaan peluang usaha dan <i>start-up</i> melalui pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;</li> </ul>
	4.2 Meningkatkan nilai tambah dan investasi di sektor riil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Peningkatan industri pengolahan berbasis perikanan dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;</li> <li>b Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata melalui pengembangan ODTW, amenitas dan atraksi wisata yang akan melibatkan industri dan partisipasi masyarakat;</li> <li>c Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital melalui melalui (1) pendampingan; (2) fasilitasi inovasi dan penguatan <i>brand</i>, (3) pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif, klaster/ kota kreatif;</li> </ul>
<b>PK-5</b> Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.	5.1 Membangun budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Penerapan reformasi birokrasi melalui Penguatan kebijakan, kelembagaan dan tata laksana pemerintahan;</li> <li>b Penerapan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya;</li> </ul>

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
			c Penerapan disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam birokrasi
		5.2 Membangun pemerintahan yang terbuka ( <i>open government</i> )	a Penerapan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan
		5.3 Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	a Peningkatan kemandirian fiskal keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
			b Efisiensi dan efektivitas pada belanja daerah;
			c Akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah berbasis IT
PK-6	Pengembangan Inovasi dan Teknologi Informasi pendukung <i>"Tegal Smartcity"</i> .	6.1 Mengembangkan Transformasi Digital dalam mendukung <i>"Tegal Smartcity"</i>	a Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi yang diarahkan pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
			b Peningkatan infrastruktur IT yang mencakup perluasan jangkauan infrastruktur jaringan <i>fiber optic</i> dan <i>groundbreaking Cable Ducting</i> .

#### 4.2.2. Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Tegal Tahun 2021

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021, selain berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Tegal dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

PRIORITAS RKPD KOTA TEGAL TAHUN 2021		PRIORITAS RKPD PROV. JATENG TAHUN 2021		PRIORITAS RKP TAHUN 2021	
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
<b>PK-1:</b> Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	<b>PP-1:</b> Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Penyediaan <i>basic life access</i> untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya	<b>PN-3:</b> SDM berkualitas dan berdaya saing	Mengentaskan Kemiskinan
	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga		Penguatan <i>sustainable livelihood</i>		Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial
	Menurunkan angka pengangguran		Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/ TKPKD, penguatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), yang didukung dengan penguatan Satgas Kemiskinan serta penyediaan basis data terpadu yang valid  Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja  Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi  Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja		

PRIORITAS RKPD KOTA TEGAL TAHUN 2021		PRIORITAS RKPD PROV. JATENG TAHUN 2021		PRIORITAS RKP TAHUN 2021	
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
<b>PK-2:</b> Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kota Tegal yang berdaya saing.	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	<b>PP-2:</b> Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah berdaya saing	Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas	<b>PN-3:</b> SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta		Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda		Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan perempuan		Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Memperkuat Tata Kelola Kependudukan
	Meningkatkan produktivitas dan daya saing				Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing
				<b>PN-4:</b> Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
					Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
					Memperkuat Moderasi Beragama
					Meningkatkan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas
					Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

PRIORITAS RKPd KOTA TEGAL TAHUN 2021		PRIORITAS RKPd PROV. JATENG TAHUN 2021		PRIORITAS RKP TAHUN 2021		
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	
<b>PK-3:</b> Pemantapan infrastruktur kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana.	Meningkatkan pemenuhan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar	---	---	<b>PN-5:</b> Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	
	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi				Infrastruktur Ekonomi	
	Mengembangkan infrastruktur perkotaan				Infrastruktur untuk Mendukung Perkotaan	
	Peningkatan Ketahanan Bencana			<b>PN-2:</b> Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali	
<b>PK-4:</b> Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.	Meningkatkan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, kecil, dan Koperasi	<b>PP-3:</b> Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian	<b>PN-6:</b> Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	
	Meningkatkan nilai tambah dan investasi di sektor riil				Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
					Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu	Pembangunan Rendah Karbon
				<b>PN-1:</b> Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	
					Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	
					Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	

PRIORITAS RKPd KOTA TEGAL TAHUN 2021		PRIORITAS RKPd PROV. JATENG TAHUN 2021		PRIORITAS RKP TAHUN 2021	
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
			Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan		Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi
			Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah		Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan
			Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat ( <i>local based community</i> ) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah		Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
			Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif		Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
			Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan		
			Peningkatan kualitas lingkungan		
			Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana		
<b>PK-5:</b> Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.	Membangun budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif.	<b>PP-4:</b> Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah	Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat ( <i>direct services</i> ), serta membangun pemerintahan yang terbuka ( <i>open government</i> )	<b>PN-7:</b> Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

PRIORITAS RKPD KOTA TEGAL TAHUN 2021		PRIORITAS RKPD PROV. JATENG TAHUN 2021		PRIORITAS RKP TAHUN 2021	
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN
	Membangun pemerintahan yang terbuka (open government)		Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah		Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA		Konsolidasi Demokrasi
			Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
					Penegakan Hukum Nasional
<b>PK-6:</b> Pengembangan Inovasi dan Teknologi Informasi pendukung "Tegal Smartcity".	Mengembangkan Transformasi Digital dalam mendukung "Tegal Smartcity"	---	---	<b>PN-5:</b> Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Transformasi Digital

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kota Tegal Tahun 2021 merupakan upaya pencapaian target kinerja utama daerah tahun 2021, yaitu:

**Tabel 4.4 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021**

No.	IKU Pemda	Satuan	Target Tahun 2021	
			Target sesuai RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemi COVID-19
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,75	64,75
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	WTP	WTP
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3,44	3,44
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,70	81,70
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	60,00	60,00
6	Potensi konflik sosial teratasi	Persen	100	100
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,32	94,32
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,95	75,54
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,20-7,20	6,40 – 7,40
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,04	7,7 – 8,07
11	Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni	Persen	52,85	52,85
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor	50,48	50,48
13	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	Persen	80,34	80,34
14	Tingkat pelayanan lalu lintas (level of service)	V/C	0,90-1,00	0,90-1,00
15	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen	63,96	63,96
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,70-6,10	4,5 – 5,5
17	Nilai investasi	Trilyun Rupiah	1,74	1,74
18	Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,18	0,18
19	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan	Persen	55,55	55,55

**Sumber:** Dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

#### 4.2.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Prioritas dan Sasaran Pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Tegal tahun 2021 yang telah ditetapkan juga memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Tegal yang disampaikan dalam Musrenbang Kota Tegal Tahun 2020. Adapun permasalahan atau pokok pikiran yang disampaikan adalah:

- 1) Penambahan sarana dan prasana bagi sekolah, terutama sekolah negeri untuk meningkatkan prestasi baik dari akademik maupun non akademik sehingga mengurangi pungutan yang terjadi disekolah- sekolah.
- 2) Pemberian bantuan kepada guru- guru suasta supaya dilakukan tepat waktu, karena selama ini berjalan tidak tepat waktu.
- 3) Fasilitasi lembaga pendidikan non formal / pendidikan luar sekolah dimana didalamnya termasuk PAUD, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Kejar Paket, PKBM anak terlantar, dan lain-lain yang membutuhkan perhatian terlebih setelah dihapusnya Dirjen Dikmas di Kementerian Pendidikan.
- 4) Untuk pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terbagi menjadi 2 yaitu : Anak Cacat diantaranya tunanetra (penglihatan), tunarungu (pendengaran), tunagrahita (mental), tunadaksa (kelainan fisik) yang

biasanya tergabung dalam Sekolah luar Biasa (SLB), dan Anak Istimewa diantaranya tunalaras (pengendalian emosi/sosial), anak rentang fokus pendek, Autis, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan yang biasanya tergabung dalam Home Schooling. Anak-anak ini jarang sekali mendapat perhatian dari pemerintah padahal mereka juga mempunyai hak memperoleh pendidikan yang sama tetapi memang membutuhkan penanganan tersendiri, fasilitas khusus dan guru-guru khusus pula. Contoh PKBM yang menyelenggarakan pendidikan ini adalah Home Schooling ABC'D dibawah PKBM Budi Luhur Jl. Merpati no. 32 yang mempunyai 160 Siswa (TK = 14, SD = 85, SMP = 36, SMA = 25) dengan total pengajar 30 guru. Untuk itu Pemda harus memberikan alokasi anggaran untuk operasional sekolah, pengadaan alat peraga, fasilitas penunjang dan kesejahteraan para gurunya.

- 5) Dinas Pendidikan agar melakukan pendataan/pemetaan terhadap anak usia sekolah yang tergolong dalam Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- 6) Pemda harus mengalokasikan anggaran untuk pemberian beasiswa bagi siswa yang mempunyai nilai akademik bagus atau prestasi dibidang lain tetapi secara ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi terkait.
- 7) Pemda harus mengalokasikan anggaran terkait hak-hak siswa untuk menerima ijazah yang tertahan di sekolah-sekolah yang disebabkan adanya kewajiban biaya yang belum di selesaikan/tunggakan karena ketidakmampuan orang tua siswa.
- 8) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistim zonasi terkait dengan keberhasilan pembelajaran, hasil dari pembelajaran, pemetaan dan pemerataan guru.
- 9) Adanya pendidikan/pelatihan: edukasi guru dan orang tua tentang mendidik anak yang sekarang waktunya banyak terbuang karena mainan hp dan internet. yang berefek : daya konsentrasi menurun, literasi rendah dan minat baca turun.
- 10) Kegiatan-Kegiatan Non Fisik untuk Pemberdayaan Masyarakat agar diperbanyak
- 11) Kegiatan-Kegiatan Non Fisik untuk Pemberdayaan Masyarakat agar diperbanyak
- 12) Wujudkan Tegal sebagai Kota yg Ramah/Layak Anak.
- 13) Warga Korban Gusuran Tanah PT KAI di Panggung Depo harus di pastikan Fasilitas nya untuk bisa dapat Rumah KPR bersubsidi.
- 14) Warga Korban Gusuran Tanah PT KAI di Panggung Depo harus di pastikan Fasilitas nya untuk bisa dapat Rumah KPR bersubsidi.
- 15) Mulai membuat daftar hitam pelaksana yang melakukan wanprestasi pengerjaan proyek, dan secara terbuka melakukan reward dan punishment bagi pelaksana. Hal ini berlaku untuk program Penunjukan langsung maupun tender, baik itu program Dinas maupun program Apik
- 16) Menyusun program2 pelatihan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan berbasis data :
  - potensi ekonomi kota tegal
  - potensi kemampuan masyarakat
  - potensi demografis kota
  - proyeksi ekonomi program untuk peningkatan PAD
  - menyusun juknis program dari mulai pra program sampai pasca program
- 17) Program Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Keterbukaan Lapangan Kerja harus terus ditingkatkan dan di evaluasi secara berjangka.
- 18) Optimalkan terus Aspek Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kota Tegal.

- 19) Inovasi & Perbanyak Model-model Wisata, perlu ada Wisata Religius, Wisata Kesehatan, Wisata Kuliner, Wisata Pendidikan dan Wisata Olahraga serta Wisata Penghijauan.
- 20) Pengelolaan sampah rumah tangga agar diperbanyak bank sampah dan pengolahan sampah menjadi sumber energi atau barang bernilai ekonomis.
- 21) TPA Bosem agar di siapkan dalam konsep produktif bukan refill sebab konsep refill tidak sesuai dengan wilayah perkotaan dengan lahan yg sempit. Konsep Refill menjadikan umur pakai TPA akan terbatas seiring daya tampung mencapai kapasitas maksimal harus mencari lokasi baru.
- 22) Dirumuskan upaya pemilikan rumah tinggal bagi warga miskin dengan sistem angsuran yg terjangkau dan didukung dengan program pemberdayaan yg terukur dengan peningkatan pendapatan secara konsisten bagi warga miskin tersebut.
- 23) Merintis kerjasama G to G utk pengentasan pengangguran terdidik baik di tingkat Jawa Tengah, antar provinsi maupun peluang di luar negeri.
- 24) Membentuk RW berdaya sesuai keunggulan yg dimiliki sebagai destinasi wisata, cluster industri jasa atau produk (kampung marketer contoh kampung industri jasa).
- 25) Bekerjasama dengan para penggiat pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan maupun Kapasitas warga, contoh pendampingan Usaha UMKM oleh komunitas bisnis.
- 26) Untuk peninjauan kembali data masyarakat yang menerima bantuan, karena selama ini banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.
- 27) Penataan obyek wisata baru sehingga bisa meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat sekitar obyek wisata.
- 28) Sosialisasi kepada masyarakat terkait program bantuan baik pendidikan maupun kesehatan.
- 29) Perbaikan fasilitas umum guna memperlancar aktifitas masyarakat.
- 30) Penanganan penyakit HIV/AIDS dan TB yang lebih serius, perlu sosialisasi disetiap PKK.
- 31) Perencanaan penanganan sampah yang terpadu sehingga bisa mengatasi permasalahan sampah, perlu program sosialisasi hidup sehat kepada masyarakat.
- 32) Perbaikan saluran air dan pengadaan program masyarakat untuk sadar lingkungan, menjaga sungai biar bersih dan bisa menjadi wisata air.
- 33) Mengembalikan fungsi pasar sehingga bisa meningkatkan pendapatan pedagang.
- 34) Peningkatan program penerangan jalan untuk meningkatkan rasa nyaman kepada masyarakat.
- 35) Peninjauan kembali pemberian ijin kepada tempat-tempat hiburan yang sudah kadaluarsa.
- 36) Peningkatan penanganan penyakit masyarakat yang semakin bertambah parah seperti perjudian dan miras.
- 37) Pengawasan dan penertiban rumah-rumah kos yang tidak sesuai dengan perijinan. Karena disinyalir banyak rumah-rumah kos yang beralih fungsi menjadi tempat mesum dan tempat transaksi narkoba.
- 38) Penataan wajah kota tidak hanya terfokus di Alun – alun Kota Tegal saja, namun perlu di ekspansi ke tempat-tempat kumuh, seperti di depan kantor DISPORAPAR dan di sebelah stadion Yos Sudarso agar bisa dijadikan sebagai wisata keluarga.
- 39) Wilayah jongor sebagai industri pengolahan ikan untuk dapat dijadikan wisata perikanan.
- 40) Pemerintah Kota dapat membangkitkan kembali slogan “TEGAL KOTA BAHARI”.
- 41) Pemerintah Kota harus tanggap situasi masyarakat yang ada, diantaranya terkait PJK, Pedagang Pasar, Permasalahan izin nelayan, warga yang belum memiliki tempat tinggal yang saat ini menggunakan lahan pemerintah.
- 42) Pemerintah Kota segera melakukan reforma agraria.

- 43) Pemerintah Kota harus bersifat Responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
- 44) Sertifikat massal bagi warga Kota Tegal yang kurang mampu.
- 45) Tidak adanya forum bersama (DPRD dan Tim Penyusun RKPD) sinkronisasi antar usulan hasil reses dan musrenbang yang di akomodir dalam RKPD.
- 46) Kurangnya koordinasi antara Eksekutif dan DPRD dalam penyusunan RKPD.
- 47) Pengejaran proyek – proyek jalan lingkungan dimohon kepada pelaksana/ pengelola proyek agar memperhatikan material yang dikerjakan supaya tidak mengganggu pengguna jalan umum.
- 48) Secara umum untuk kegiatan posyandu di wilayah RW-RW agar dipenuhi sarana dan prasarannya seperti timbangan dacin, timbangan bayi dan sarung ayunan seperti contoh di Kecamatan Margadana juga meja pelaksanaan untuk kader posyandu dimohon ada tambahan stimulan.
- 49) Mohon untuk lebih memperhatikan pedagang kecil dalam permodalan ataupun kebutuhan dalam usaha. Terutama masyarakat usaha mikro/ pinjaman modal usaha untuk pedagang kecil yang pembayarannya bisa diangsur setiap 2 minggu.
- 50) Bagaimana caranya untuk mengatasi pengangguran yang semakin banyak? Adakah lapangan pekerjaan buat masyarakat yang sudah tua dan tidak mempunyai pendidikan yang memadai? Sementara kebutuhan semakin bertambah.
- 51) Kenaikan tarif BPJS yang semakin tinggi, dimohon dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit lebih baik lagi manakala dari masyarakat sudah memenuhi kewajibannya yang tiap bulannya membayar.
- 52) Terkait dengan sekitar 51 ribu warga yang belum terdaftar BPJS, minimal 10% atau sekitar 5 ribu warga tidak mampu agar dianggarkan dalam APBD untuk menerima BPJS Daerah (PBI; Penerima Bantuan Iuran) dan segera dilakukan verifikasi, dengan memberi kesempatan kepada warga tidak mampu untuk mendaftarkan diri kepada OPD terkait.
- 53) Masyarakat yang mempunyai penyakit menahun (mendadak miskin) karena ketidakmampuannya untuk melanjutkan pengobatan juga berhak memperoleh BPJS Daerah/ PBI.
- 54) Terkait “Kawasan Bebas Buang Air Besar” pemda harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program jambanisasi dengan melakukan pendataan warga yang belum punya jamban.
- 55) Pemda harus melakukan langkah-langkah/antisipasi penanganan penyakit pasca banjir.
- 56) Meningkatkan bantuan sosial/ dana hibah bagi warga miskin terutama para janda dan anak yatim piatu.
- 57) Pemda harus melakukan verifikasi ulang yang akurat tentang berapa jumlah pasti masyarakat yang tergolong tidak mampu termasuk penerima PKH.
- 58) Pemda harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan korban bencana alam seperti banjir dan angin puting beliung yang rumahnya rusak melalui program bantuan perbaikan rumah, atau bantuan sosial karena bencana.
- 59) Pemda harus mempunyai/membuat “Peta Drainase” secara menyeluruh guna mempermudah penanganan drainase terkait genangan air/banjir.
- 60) Penanganan / pembangunan saluran drainase hendaknya memperhatikan sudut kemiringan dan kountur tanah sehingga tidak harus dengan penyeragaman penggunaan U-ditch.
- 61) Segera merealisasi tercukupinya air bersih bagi daerah-daerah yang belum ada jaringan PDAM.
- 62) Sehubungan masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah maka pemda perlu menganggarkan pembangunan rumah susun sewa (RUSUNAWA).
- 63) Pemda harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program RTLH termasuk tentang persyaratan rumah tumpang dan rumah beratap genteng dengan rangka bambu agar diperkenankan memperoleh program RTLH.

- 64) Pemda harus mempunyai/membuat "Peta Daerah Rawan Banjir" secara menyeluruh guna mempermudah penanganan/antisipasi banjir.
- 65) Tentang rencana komputerasi ritribusi dan pajak rumah makan hendaknya ada kreteria tertentu sehingga tidak membebani atau mematikan usaha kecil dan UKM.
- 66) Penataan kembali taman-taman kota dan hutan kota hingga tidak terlihat kumuh dan menambah fasilitas-fasilitas penunjang sebagai sarana rekreasi keluarga.
- 67) Masalah penanganan sampah hendaklah dipikirkan tentang program pembagian wilayah, contoh sampah pasar dan rumah makan yang 90% adalah sampah organik dimana lebih mudah ditangani melalui pengolahan/komposing harus dipisahkan dengan penanganan sampah permukiman.
- 68) Program percontohan permasalahan sampah dengan mesin pembakar sampah yang mudah, murah, dan terjangkau anggarannya.
- 69) Mengingat terbatasnya lahan pertanian di Kota Tegal maka perlu adanya inovasi dan disversifikasi baik menyangkut teknologi pertanian maupun jenis tanamannya.
- 70) Mempertahankan sawah lestari sesuai RTRW sebagai wujud perhatian terhadap kecukupan produksi pangan.
- 71) Sektor pariwisata menjadi andalan PAD Kota Tegal, untuk itu perlu inovasi/penambahan dibidang sarana (wahana) sehingga mampu menarik wisatawan dan perlu adanya komputerisasi didalam pengelolaan retribusi/karcis tanda masuk.
- 72) Mengembangkan potensi wisata Tangible dan intangible, Tangible dengan menata dan mengembangkan fisik pariwisata PAI, Pulo Kodok dan Muarareja serta kawasan *heritage*.
- 73) Pengembangan wisata Intangible melalui pengembangan brand produk penunjang wisata seperti kuliner dan kesenian lokal dengan membuka kawasan kuliner yang refresentatif, pusat kerajinan/handycraft misal batik tegalan.
- 74) Kota Tegal termasuk kota pesisir maka diperlukan program-program yang mendukung pengembangan wilayah pesisir terutama menyangkut kesejahteraan para nelayan.
- 75) Segera mengusulkan rencana pemberian tunjangan kinerja ASN agar mendapat persetujuan.
- 76) Menyusun rencana kerja yang transparan sesuai dengan fungsi dewan yaitu legelasi, anggaran, dan aspirasi.
- 77) Meningkatkan pelayanan yang terkait dengan failitas kantor terutama kebersihan yang memadai, prasarana persidangan yang refreentatif.
- 78) Untuk kunjungan kerja AKD, agar difasilitasi/diikut sertakan tenaga ahli fraksi.
- 79) Kawasan Pesisir agar ditata guna mengurangi dampak abrasi, serta mempercantik kawasan sebagai destinasi wisata pantai
- 80) Guna mengurangi genangan air di wilayah kota Tegal agar sungai yang bermuara di Kota Tegal perlu dilakukan normalisasi

# BAB V

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

---

**R**encana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD. Penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 pada tahun berkenaan, dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap permasalahan pembangunan yang terjadi.

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Tegal berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Merujuk pada pasal 224 ayat (2) dan Pasal 225 PP 12 Tahun 2019, Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 **wajib mengikuti** ketentuan sebagaimana diatur dalam PP tersebut.

RKPD Kota Tegal Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun **pada masa transisi** implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan pengganti PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat penyusunan dokumen RKPD Kota Tegal Tahun 2021, berbagai peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 12 Tahun 2019 **belum diterbitkan** seluruhnya. Selanjutnya, penyusunan RKPD Kota Tegal Tahun 2021 dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, RKPD Kota Tegal Tahun 2021 menggunakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil pemetaan (*mapping*) yang berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan **tidak mengubah** Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku. Sehingga,

RKPD Kota Tegal Tahun 2021 **tetap berpedoman** pada Perda Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024.

Pada penyusunan RKPD Tahun 2021, Pemerintah Kota Tegal melakukan penyesuaian Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, namun **tidak merubah** seluruh indikator kinerja. Dengan demikian, seluruh Indikator Kinerja yang tercantum pada dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 **tetap dijadikan pedoman** pada penyusunan RKPD Kota Tegal Tahun 2021. Penyesuaian dilakukan melalui pemetaan (*mapping*) nomenklatur yang tertuang dalam RPJMD terhadap Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Permendagri 90 tahun 2019. Dokumen hasil pemetaan (*mapping*) RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 dengan Permendagri 90 tahun 2019 dicantumkan secara lengkap pada **anak lampiran** RKPD Kota Tegal Tahun 2021. Adapun sinkronisasi program pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Sinkronisasi Program pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024  
dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019**

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
<b>NON URUSAN</b>				
<b>RUTIN KESEKRETARIATAN</b>				
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Capaian Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	
3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA		Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>PENDIDIKAN</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>		
4	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	
5	PROGRAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PAUD		APM PAUD	
7	PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL		Persentase PAUD dengan sarana prasarana sesuai standar	
8	PROGRAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PNF		Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C	
10	PROGRAM WAJIB BELAJAR SD		Persentase Lembaga PNF dengan sarana prasarana sesuai standar	
			APK SD/MI Sederajat; APM SD/MI Sederajat; APtS SD/MI Sederajat;	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
11	PROGRAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA SD		AL SD/MI Sederajat; Persentase SD dengan sarpras sesuai standar	
13	PROGRAM WAJIB BELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		APK SMP/MTs Sederajat; APM SMP/MTs Sederajat; APtS SMP/MTs Sederajat; AL SMP/MTs Sederajat;	
14	PROGRAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA SMP		Persentase SMP dengan sarpras sesuai standar	
16	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN		Persentase sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat	
6	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD		Persentase Guru PAUD yang bersertifikat pendidik; Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	
9	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNF		Persentase Pendidik PNF yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	
12	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD		Guru SD sederajat yang bersertifikat pendidik; Guru SD sederajat yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	
15	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP		Guru SMP/MTs yang bersertifikat pendidik; Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
---	---	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait pengembangan kurikulum menjadi Nomenklatur Program
---	---	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait Distribusi dan Pemetaan PTK menjadi Nomenklatur Program
	<b>KESEHATAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>		
17	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Sekolah dilakukan penjangkaran kesehatan	
18	PROGRAM KESEHATAN IBU, ANAK DAN LANSIA		Persentase Industri Formal yang melaksanakan UKK	
19	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT		Persentase Institusi yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga	
20	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN		Persentase merokok pada penduduk umur < 18 tahun	
23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN		Persentase merokok pada penduduk umur < 18 tahun	
24	PROGRAM PELAYANAN KEGAWAT-DARURATAN		Prevalensi Stunting pada anak Balita	
25	PROGRAM OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN		Prevalensi Stunting pada anak Baduta	
26	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS TEGAL BARAT		Prevalensi Gizi Buruk (BB/TB)	
27	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS DEBONG LOR		Cakupan ASI eksklusif	
28	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS TEGAL TIMUR		Prevalensi Gizi Kurang	
29	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS SLEROK	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar		

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
30	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS TEGAL SELATAN		Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)	
31	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS BANDUNG		Cakupan Kunjungan Neonatal (Kn4)	
32	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS MARGADANA		Cakupan kunjungan Bayi dan Balita terstandar	
33	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS KALIGANGSA		Cakupan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja	
34	PROGRAM OPERASIONAL KLINIK PARU MASYARAKAT		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	
	<b>RSUD KARDINAH</b>		Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	
35	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA ADMINISTRASI BLUD		Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
36	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	
37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	
38	PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
39	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN BLUD KARDINAH		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
40	PROGRAM PEMASARAN BLUD KARDINAH		Universal Child Immunization (UCI)	
41	PROGRAM PELAYANAN MEDIS		Cakupan pelayanan surveilan dan deteksi faktor resiko PTM	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
42	PROGRAM PELAYANAN KEPERAWATAN		Cakupan Pelayanan penanggulangan penyakit sesuai standar Prevalensi TB Angka Detection semua kasus TB yang diobati (CDR per 100.000 penduduk) Persentase obesitas pada penduduk usia 18+ tahun Prevalensi Hipertensi Cakupan ODGJ berat dilayani sesuai standar Cakupan Surveilans dan penanggulangan KLB dan Wabah kurang dari 24 jam Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B Angka Kasus Filariasis yang ditangani Persentase anak usia 12-23 bulan dari penduduk maskin yang menerima imunisasi dasar lengkap Persentase warga Negara usia 15–59 Tahun mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
			Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	
			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	
			Cakupan Universal Health Coverage (UHC)	
			Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	
			Cakupan pelayanan kegawat-daruratan tertangani	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Laboratorium Kesehatan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Tegal Barat	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Debong Lor	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Tegal Timur	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Slerok	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Tegal Selatan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Bandung	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Margadana	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Kaligangsa	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Klinik Paru Masyarakat	
			Persentase Kelancaran pengelolaan administrasi BLUD Kardinah	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
			Persentase Kelancaran pemenuhan sarpras BLUD Kardinah Persentase pegawai yang mendapatkan bintek/ diklat Persentase pemenuhan dan ketepatan kelancaran pembayaran honor, gaji BLUD, Jasa Pelayanan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pengendalian yang Sesuai Standar Cakupan masyarakat sekitar pantura yang mendapatkan informasi pelayanan Cakupan Pelayanan Medis sesuai standar Persentase Pelayanan Keperawatan	
20	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Kepadatan dan distribusi dokter spesialis Kepadatan dan distribusi dokter umum Kepadatan dan distribusi dokter gigi Kepadatan dan distribusi perawatan Kepadatan dan distribusi bidan Kepadatan dan distribusi tenaga gizi Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	
22	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Cakupan pangan yang aman	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
	MAKANAN	MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi Syarat kesehatan Persentase Perumahan dan Lingkungan (Perumling) memenuhi syarat kesehatan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	
	---	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Posyandu Strata Mandiri Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Persentase keluarga sadar gizi Persentase kelompok olahraga masyarakat yang terbina Cakupan Kelurahan ODF (Open Defecation Free) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
43	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarana dan prasarana pengendali banjir yang berfungsi baik	
45	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI		Persentase jaringan irigasi pertanian dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik	
49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
	---	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan terkait Pembangunan dan Rehabilitasi TPA/ TPS/ TPST merupakan bagian dari Urusan Bidang PUPR
48	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	
44	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KOTA	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	
50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN		Persentase sarana dan prasarana drainase lingkungan yang berfungsi baik	
52	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas jalan lingkungan dalam kondisi baik	
51	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Persentase bangunan gedung pemerintah yang dibangun/ dipelihara sesuai standar bangunan gedung	
46	PROGRAM JALAN DAN JEMBATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota Persentase jembatan dalam kondisi baik	
	---	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait Jasa Konstruksi menjadi Nomenklatur Program
53	PROGRAM PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rencana rinci tata ruang yang tersusun	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
			Cakupan layanan pengajuan Keterangan Rencana Kota (KRC)	
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>		
54	PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	
55	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan dan penanganan kawasan kumuh	
56	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA UMUM PERUMAHAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan PSU Perumahan	
	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
58	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan ketertiban Umum yang Tertangani	
59	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Rasio Linmas Terlatih	
60	PROGRAM PENEGAKKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH		Persentase Penanganan Pelanggaran Perundang-undangan Daerah	
62	PROGRAM KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	
63	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	
			Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana	
			Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana	
64	PROGRAM PASCA BENCANA		Cakupan korban bencana yang ditangani	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
61	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran	
	<b>SOSIAL</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>		
67	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PSKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	
68	PROGRAM PEMBERDAYAAN PMKS		Persentase PMKS Skala Kota yang menerima pemberdayaan sosial	
65	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DASAR	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar Persentase Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar Persentase Tuna Sosial (PGOT) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	
66	PROGRAM FASILITASI PENDAMPINGAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan layanan pendampingan jaminan sosial terfasilitasi	
69	PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU PPFM		Cakupan data PPFM terverivali	
			Persentase Anak Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	
	---	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan pelayanan tanggap bencana daerah	
	---	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait pemeliharaan Taman Makam Pahlawan menjadi Nomenklatur Program

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>		
	---	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait penyusunan rencana bidang ketenagakerjaan menjadi Nomenklatur Program
70	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN KUALITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi Usia Muda (15 - 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	
	---	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait penempatan tenaga kerja menjadi Nomenklatur Program
71	PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	•••Persentase Perselisihan Hubungan Industrial terselesaikan Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan Upah Rata-Rata per jam pekerja	
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
72	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan kelembagaan PUG aktif	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
73	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Cakupan lembaga perempuan aktif	
74	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilaporkan dan ditangani	
			Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	
	---	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Keluarga menjadi Nomenklatur Program
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait Sistem dan Database Gender dan Anak menjadi Nomenklatur Program
74	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	
			Persentase Sekolah Ramah Anak	
			Persentase Puskesmas Ramah Anak	
	---	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak	
	<b>PANGAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>		
75	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait informasi dan ketersediaan stok pangan menjadi Nomenklatur Program
		PROGRAM PENANGANAN	Angka Kecukupan Protein per Kapita (AKP)	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
		KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi per Kapita (AKE)	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	
	<b>PERTANAHAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>		
76	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase penyelesaian pengajuan sertifikat tanah penguasaan pemerintah daerah yang dimanfaatkan masyarakat	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase bidang tanah aset bersertifikat	
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>		
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait RPPLH dan KLHS menjadi Nomenklatur Program
79	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelaku usaha yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran Air	
			Persentase pelaku usaha yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran Udara	
81	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan hutan kota yang ditingkatkan tutupan lahannya	
			Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>			
57	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN DAN MAKAM KOTA		Persentase Luasan Taman dan Makam Kota	Pada PMDN 90/2019 Program/ Kegiatan terkait Pengelolaan Taman dan Makam Kota merupakan bagian dari Urusan Bidang Lingkungan Hidup
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
78	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola	
80	PROGRAM PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan	
	---	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait Gerakan Peduli Lingkungan Hidup menjadi Nomenklatur Program
	---	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait Pemberian Penghargaan bidang Lingkungan Hidup menjadi Nomenklatur Program

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
	---	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat bidang Lingkungan Hidup menjadi Nomenklatur Program
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
			Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
			Cakupan TPST/ TPS 3R menerapkan konsep green waste	
	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
82	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Akta-Akta Pencatatan Sipil	
83	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk		
	---	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait pencatatan dan penatausahaan dokumen/ pelaporan peristiwa penting menjadi Nomenklatur Program
84	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPENDUDUKAN		
85	PROGRAM PEMANFAATAN DATA, INOVASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Predikat/ klasifikasi Penilaian Standar Mutu Manajemen	
	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
86	PROGRAM FASILITASI KEBIJAKAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PD yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam Renja	
87	PROGRAM PEMBINAAN KEPENDUDUKAN, KB, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan lembaga masyarakat aktif dalam pengendalian penduduk	
			Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate (ASFR))	
			Persentase Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun	
88	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA		CPR (Contracepsi Prevalance Rate)	
			Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	
			Angka prevalensi CPR pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (kelompok penduduk penduduk pemegang KIS APBN/APBN Propinsi dan APBD Kota)	
			Unmeetneed	
			Persentase tingkat pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
89	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga dengan strata sejahtera	
<b>PERHUBUNGAN</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>		
90	PROGRAM PEMANTAPAN PERLENGKAPAN JALAN DAN FASILITAS PENDUKUNG LLAJ	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang tersedia	
91	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS		Tingkat Kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	
			Cakupan Pengamanan Perlintasan Kereta Api	
92	PROGRAM MANAJEMAN DAN REKAYASA LALU LINTAS		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	
93	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM		Penggunaan kendaraan umum (Load Factor)	
			Persentase prasarana angkutan umum yang tersedia	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
47	PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM		Persentase ruas jalan terlayani penerangan jalan	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan terkait PJU merupakan bagian dari Urusan Bidang Perhubungan
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
94	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Komponen Website	
			Nilai Komponen Konten Informasi Publik	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
			Nilai Komponen Kelembagaan	
95	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Kebijakan	
			Indeks Domain Tata Kelola	
			Indeks Domain Layanan	
96	PROGRAM PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR INFORMATIKA		Ketersediaan Layanan NOC	
			Ketersediaan Layanan Data Center	
	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait pengawasan koperasi menjadi Nomenklatur Program
97	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	KSP/USP/ KSPPS/USPPS berpredikat sehat	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait pelatihan bidang koperasi menjadi Nomenklatur Program
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait pemberdayaan dan perlindungan koperasi menjadi Nomenklatur Program
98	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Usaha Mikro Kecil yang memiliki akses terhadap Lembaga Keuangan	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
			Lokasi PKL yang Tertata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Usaha Mikro Kecil yang memiliki Legalitas Usaha	
	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		
99	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait penyediaan peta potensi dan peluang usaha menjadi Nomenklatur Program
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Kepeminatan Investasi	
101	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	
100	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN INVESTASI	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait koordinasi pembinaan dan pemantauan bidang penanaman modal menjadi Nomenklatur Program
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Potensi Investasi yang Update dan Akurat	
	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>		
102	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Wirausaha Muda yang dibina	
			Persentase partisipasi pemuda dalam OKP	
103	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan atlet yang berprestasi	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
			Cakupan pelatih yang berprestasi	
104	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA		Cakupan pembinaan olahraga	
105	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			Program ini melebur ke Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Daya Saing Keolahragaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	---	Program ini untuk mengakomodir Alokasi Hibah bagi Organisasi Kepramukaan yang sebelumnya merupakan bagian dari BTL
	<b>STATISTIK</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>		
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Validasi dan Updating Data Informasi Statistik Sektoral	
	<b>PERSANDIAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>		
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	
	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BUDAYA</b>		
108	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase OPK dilindungi dan dimanfaatkan	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
109	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN		Persentase OPK dibina dan dikembangkan	
	---	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait pengembangan kesenian tradisional menjadi Nomenklatur Program
	<b>PERPUSTAKAAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>		
110	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA SERTA PENINGKATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	
			Rasio Judul Buku dibanding Jumlah Koleksi	
	<b>KEARSIPAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>		
111	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD/ BUMD yang tertib mengelola arsip	
112	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip statis terpelihara	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
113	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	
114	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan budidaya	
115	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
	PRODUKSI PERIKANAN	PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	
	<b>PARIWISATA</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>		
116	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan PAD PAI	
117	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA		Persentase sarana dan prasarana Pariwisata dalam kondisi baik	
	---	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait promosi pariwisata menjadi Nomenklatur Program
	<b>PERINDUSTRIAN</b>			
126	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri kreatif	
	<b>PERTANIAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>		
121	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Susu Jumlah Produksi Telur Jumlah Produksi Daging	
119	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Padi	
120	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Prevalensi Penyakit Zoonosis	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
		VETERINER		
			Cakupan pelayanan kesehatan hewan	
118	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pendapatan Petani	
	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>		
	---	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait Fasilitas Penerbitan menjadi Nomenklatur Program
124	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGEMBANGAN PASAR RAKYAT	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan pendapatan pasar	
122	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN DALAM DAN LUAR NEGERI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih	
123	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang	
	<b>PERINDUSTRIAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		
125	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN SARANA PRASARANA INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang dibina	
	---	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait penerbitan izin usaha industri menjadi

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
				Nomenklatur Program
	---	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRIAL NASIONAL	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait pengelolaan sistem informasi bidang industri menjadi Nomenklatur Program
	<b>FUNGSI PENDUKUNG</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
166	PROGRAM FASILITASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintah daerah dibidang pemerintahan terfasilitasi	
167	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH		Persentase Kerjasama Antar Daerah yang ditindaklanjuti	
168	PROGRAM FASILITASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase kegiatan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan rakyat terfasilitasi	
169	PROGRAM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Keterisian IKK LPPD	
170	PROGRAM FASILITASI PRODUK HUKUM	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Terselesaikan	
171	PROGRAM DOKUMENTASI, PUBLIKASI, PEMBINAAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM		Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	
172	PROGRAM BANTUAN HUKUM DAN HAM		Persentase Tertanganinya Kasus Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah	
173	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA BUMD		Persentase BUMD Sehat	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
174	PROGRAM FASILITASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN		Persentase kegiatan pemerintah daerah dibidang perekonomian terfasilitasi	
175	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENGADAAN BARANG/ JASA		Persentase penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan	
176	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase perangkat daerah melaksanakan pembangunan sesuai target kinerja fisik	
177	PROGRAM PENGEMBANGAN KETATALAKSANAAN	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	
178	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPADA KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH		Persentase layanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terfasilitasi	
179	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI PEMERINTAH DAERAH		Persentase layanan keprotokolan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	
180	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI		Cakupan Ketersediaan Informasi Pemerintah Daerah	
181	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA		Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP-nya Kategori "B" ke atas (>60)	
182	PROGRAM OPTIMALISASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH		Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
	---	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait layanan administrasi keuangan DPRD

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
				menjadi Nomenklatur Program
183	PROGRAM FASILITASI PENYUSUNAN REGULASI DAERAH	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Raperda	
	PROGRAM FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENGANGGARAN		Persentase fasilitasi pelayanan pengawasan dan penyusunan anggaran daerah	
	PROGRAM FASILITASI PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PUBLIKASI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Persentase fasilitasi penyebaran informasi lembaga legislatif	
	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
	<b>PERENCANAAN</b>	<b>PERENCANAAN</b>		
127	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi program dokumen Renja dengan RKPD	
128	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		Persentase capaian target program RPJMD	
129	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI		Persentase pemenuhan data/ informasi dokumen perencanaan	
132	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase konsistensi rencana antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah lingkup bidang sosial budaya	
131	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase konsistensi rencana antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
130	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase konsistensi rencana antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
	<b>KEUANGAN</b>	<b>KEUANGAN</b>		
136	PROGRAM PENGANGGARAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen penganggaran yang tersusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
137	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase dokumen penatausahaan keuangan daerah yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	
138	PROGRAM PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD		Persentase dokumen pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan	
139	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan perangkat daerah yang melakukan pencatatan barang milik daerah dengan baik	
			Cakupan pengamanan barang milik daerah melalui asuransi	
133	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah tahun berjalan	
			Persentase realisasi penerimaan pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun berjalan	
134	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH		Persentase WP yang dibuatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
			Persentase aplikasi/ sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang termanfaatkan	
			Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah dari perangkat daerah pengampu pendapatan	
135	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Persentase realisasi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal daerah tahun berjalan	
			Persentase realisasi penerimaan bunga deposito tahun berjalan	
	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>		
140	PROGRAM PENINGKATAN SINERGITAS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	
141	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI		Persentase formasi jabatan terisi	
			Persentase perempuan pada jabatan eselon II, III, dan IV	
	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
142	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
143	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGKAJIAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian yang diimplementasi-kan	
144	PROGRAM PENGEMBANGKAN DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH		Persentase inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
	<b>PENGAWASAN</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>		
145	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase terselesaikannya laporan hasil pengawasan	
146	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN		Persentase Cakupan Tenaga Pemeriksa Meningkat Angka Kreditnya	
147	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase terselesaikan pengaduan	
	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
	<b>KEWILAYAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>		
152	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TEGAL BARAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tegal Barat terfasilitasi	
153	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TEGAL TIMUR		Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tegal Timur terfasilitasi	
154	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TEGAL SELATAN		Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tegal Selatan terfasilitasi	
155	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN MARGADANA		Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Margadana terfasilitasi	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DANNOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
156	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI KECAMATAN TEGAL BARAT		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Tegal Timur yang aktif	
157	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI KECAMATAN TEGAL TIMUR		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Tegal Barat yang aktif	
158	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI KECAMATAN TEGAL SELATAN		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Tegal Selatan yang aktif	
159	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI KECAMATAN MARGADANA		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Margadana yang aktif	
160	PROGRAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN TEGAL BARAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan keterlibatan masyarakat kelurahan di Wilayah Kecamatan Tegal Timur dalam pembangunan	
161	PROGRAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN TEGAL TIMUR		Cakupan keterlibatan masyarakat kelurahan di Wilayah Kecamatan Tegal Barat dalam pembangunan	
162	PROGRAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN TEGAL SELATAN		Cakupan keterlibatan masyarakat kelurahan di Wilayah Kecamatan Tegal Selatan dalam pembangunan	
163	PROGRAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN MARGADANA		Cakupan keterlibatan masyarakat kelurahan di Wilayah Kecamatan Margadana dalam pembangunan	
148	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN TEGAL BARAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pembinaan administrasi kelurahan di Kecamatan Tegal Timur	
149	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN TEGAL TIMUR		Cakupan pembinaan administrasi kelurahan di Kecamatan Tegal Barat	
150	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN TEGAL SELATAN		Cakupan pembinaan administrasi kelurahan di Kecamatan Tegal Selatan	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019		KETERANGAN
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
151	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN MARGADANA		Cakupan pembinaan administrasi kelurahan di Kecamatan Margadana	
	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
164	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase komponen masyarakat mendapat wawasan kebangsaan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas menjadi Nomenklatur Program
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait Pembinaan dan Ketahanan Ekososbud menjadi Nomenklatur Program
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	---	Pada PMDN 90/2019 Kegiatan Renstra-PD terkait Kewaspadaan Nasional menjadi Nomenklatur Program
165	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Masyarakat terpapar pendidikan politik	

Berdasarkan hasil sinkronisasi Program pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diperoleh dengan cara melakukan pemetaan sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1 di atas, terlihat bahwa dari **185 nomenklatur Program Belanja Langsung** sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dapat dikonversikan dalam **127 nomenklatur program** yang merujuk pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

## 5.1. Sinergitas Program Pembangunan Daerah

### 5.1.1. Sinergitas Program Pemerintah Kota Tegal terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 selain berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024, juga diarahkan untuk mendukung dan bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional. Sinergitas Program Pemerintah Kota Tegal Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Sinergitas Program Pemerintah Kota Tegal Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1.	PN-1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>• Program Penanganan Kerawanan Pangan</li> <li>• Program Pengawasan Keamanan Pangan</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>• Program Pengembangan Ekspor</li> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>• Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>• Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> <li>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri</li> <li>• Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan</li> <li>• Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</li> </ul>
2.	PN-2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li> <li>• Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li> <li>• Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan</li> <li>• Dinas Pendidikan</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Pekerjaan</li> </ul>

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li> <li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>• Program Pengembangan UMKM</li> <li>• Program Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> <li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> <li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>• Program Pengembangan Permukiman</li> <li>• Program Penataan Bangunan Gedung</li> <li>• Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</li> <li>• Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>• Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>• Program Pengembangan Perumahan</li> <li>• Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh</li> <li>• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li> <li>• Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>• Program Penanggulangan Bencana</li> <li>• Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>• Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>• Program Penanganan Bencana</li> </ul>	<p>Umum dan Penataan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</li> <li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengendalian Pencemaran Dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> <li>• Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)</li> <li>• Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>• Program peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li> <li>• Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengelolaan Persampahan</li> </ul>	
3.	<b>PN-3: SDM berkualitas dan berdayasaing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>• Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>• Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>• Program Penanganan Bencana</li> <li>• Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</li> <li>• Program Pengendalian Penduduk</li> <li>• Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li> <li>• Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>• Program Pencatatan Sipil</li> <li>• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>• Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum</li> <li>• Program Penanggulangan Bencana</li> <li>• Program Penanggulangan Kebakaran</li> <li>• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</li> <li>• Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan</li> <li>• Sekretariat Daerah</li> <li>• Kecamatan/ Kelurahan</li> </ul>

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perlindungan Perempuan</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>• Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</li> <li>• Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li> <li>• Program Perlindungan Khusus Anak</li> <li>• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>• Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</li> <li>• Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</li> <li>• Program Perencanaan Tenaga Kerja</li> <li>• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>• Program Penempatan Tenaga Kerja</li> <li>• Program Hubungan Industrial</li> <li>• Program Pengawasan Ketenagakerjaan</li> <li>• Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li> <li>• Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li> <li>• Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li> <li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>• Program Pengembangan UMKM</li> <li>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>• Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>• Program Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>• Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> <li>• Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</li> <li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>• Program Pengembangan Ekspor</li> <li>• Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</li> <li>• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> <li>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota</li> <li>• Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional</li> <li>• Program Perekonomian dan Pembangunan</li> </ul>	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li> </ul>	
4.	PN-4: Revolusional dan pembangunan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Kepegawaian Daerah</li> <li>• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</li> <li>• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</li> <li>• Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</li> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>• Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>• Program Pencatatan Sipil</li> <li>• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>• Program Pengelolaan Profil Kependudukan</li> <li>• Program Pengembangan Kebudayaan</li> <li>• Program Pengembangan Kesenian Tradisional</li> <li>• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah</li> <li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>• Kesbangpol</li> <li>• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>• Sekretariat Daerah</li> </ul>
5.	<b>PN-5:</b> <b>Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> <li>• Progeam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> <li>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>• Progeam Pengembangan Permukiman</li> <li>• Program Penataan Bangunan Gedung</li> <li>• Progeam Penataan Bangunan dan Lingkungannya</li> <li>• Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>• Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>• Program Pengembangan Perumahan</li> <li>• Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh</li> <li>• Program Peningkatan Prasarana, Sarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• Dinas Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan</li> <li>• Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Dinas Perhubungan</li> <li>• Kecamatan/ Kelurahan</li> </ul>

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		dan Utilitas Umum (PSU) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li> <li>• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li> </ul>	
6.	<b>PN-6:</b> <b>Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>• Program Penanggulangan Bencana</li> <li>• Program Penanggulangan Kebakaran</li> <li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengendalian Pencemaran Dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> <li>• Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)</li> <li>• Program peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li> <li>• Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengelolaan Persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>• Satpol PP</li> </ul>
7.	<b>PN-7:</b> <b>Stabilitas polhukhankam dan ransformasi pelayanan publik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Kepegawaian Daerah</li> <li>• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> <li>• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</li> <li>• Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</li> <li>• Program Layanan dan Administrasi Keuangan</li> <li>• Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</li> <li>• Program Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>• Program Aplikasi Informatika</li> <li>• Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum</li> <li>• Program Penanggulangan Bencana</li> <li>• Program Penanggulangan Kebakaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKPPD</li> <li>• Kesbangpol</li> <li>• Sekretariat DPRD</li> <li>• Sekretariat Daerah</li> <li>• Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>

### 5.1.2. Sinergitas Program Pemerintah Kota Tegal terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan Kota Tegal juga diarahkan untuk mendukung dan bersinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Sinergitas Program Pemerintah Kota Tegal Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.3 Sinergitas Program Pemerintah Kota Tegal Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah**

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1.	<b>PP-1:</b> Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>• Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>• Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh</li> <li>• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>• Program Penempatan Tenaga Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja</li> </ul>
2.	<b>PP-2:</b> Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>• Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li> <li>• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</li> </ul>
3.	<b>PP-3:</b> Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>• Program Pengembangan UMKM</li> <li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>• Program Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>• Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> <li>• Program Penanggulangan Bencana</li> <li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengendalian Pencemaran Dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan</li> <li>• Dinas Penanaman Modal Satu Pintu</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> </ul>

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)</li> <li>• Program peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li> <li>• Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengelolaan Persampahan</li> </ul>	
4.	<b>PP-4:</b> Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>• Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>• Program Penataan Administrasi Umum</li> <li>• Program Penyelenggaraan Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>• Badan Keuangan Daerah</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• Sekretariat Daerah</li> </ul>

### 5.1.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan Kota Tegal, yaitu Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Adapun perwujudan sasaran pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 tersebut difokuskan pada **6 (enam) prioritas pembangunan** Kota Tegal (PK) sebagai berikut:

- 1) **PK-1:** Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
- 2) **PK-2:** Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kota Tegal yang berdaya saing.
- 3) **PK-3:** Pemantapan infrastruktur kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
- 4) **PK-4:** Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
- 5) **PK-5:** Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.
- 6) **PK-6:** Pengembangan inovasi dan teknologi informasi pendukung “*Tegal Smartcity*”.

Adapun sasaran prioritas pembangunan Kota Tegal Tahun 2021, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
<b>PK-1:</b> Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menurunkan angka kemiskinan Kota Tegal menjadi <b>6,40 – 7,40%</b></li> <li>2) Menurunkan angka pengangguran Kota Tegal menjadi <b>7,7 – 8,07%</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>• Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>• Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh</li> <li>• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>• Program Penempatan Tenaga Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja</li> </ul>
<b>PK-2:</b> Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kota Tegal yang berdaya saing.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tegal menjadi <b>8,33 tahun</b></li> <li>2) Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah menjadi <b>94,71%</b></li> <li>3) Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan <b>8 SNP</b></li> <li>4) Meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Tegal menjadi <b>74,40 tahun</b></li> <li>5) Meningkatkan capaian persentase keluarga sehat menjadi <b>33,00%</b></li> <li>6) Meningkatkan cakupan kesehatan semesta menjadi <b>90,00%</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>• Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li> <li>• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</li> </ul>
<b>PK-3:</b> Pemantapan infrastruktur kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata Kota Tegal dengan target penambahan sebanyak <b>17 ribu wisatawan</b></li> <li>2) Meningkatkan Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan menjadi <b>80,34%</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TEGAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	3) Meningkatkan persentase Luas Wilayah Bebas dari Genangan/ Banjir menjadi <b>88,66%</b> 4) Meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal pada kisaran <b>6,20 - 7,20%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> <li>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>• Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan</li> </ul>
<b>PK-4:</b> Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.	1) Meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal pada kisaran <b>4,50 – 5,50%</b> 2) Meningkatkan Nilai Investasi menjadi <b>1,74 Trilyun</b> 3) Meningkatkan pertumbuhan wirausaha muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>• Program Pengembangan UMKM</li> <li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>• Program Pelayanan Penanaman Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan</li> <li>• Dinas Penanaman Modal Satu Pintu</li> </ul>
<b>PK-5:</b> Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.	1) Meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi menjadi <b>64,75</b> 2) Mempertahankan capaian <b>WTP</b> pada Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah 3) Meningkatkan capaian Nilai SAKIP menjadi <b>65,50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>• Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>• Program Penataan Administrasi Umum</li> <li>• Program Penyelenggaraan Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>• Badan Keuangan Daerah</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• Sekretariat Daerah</li> </ul>
<b>PK-6:</b> Pengembangan inovasi dan teknologi informasi pendukung “Tegal Smartcity”.	1) Meningkatkan capaian Indeks SPBE menjadi <b>2,53</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>

## 5.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021

### 5.2.1. Kegiatan/ Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Daerah Tahun 2021

Di dalam melaksanakan program/ kegiatan pembangunan pada RKPD Kota Tegal Tahun 2021 disusun Kegiatan/ Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Daerah. *Major Project* ini disusun untuk membuat RKPD lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dirasakan masyarakat. *Major Project* ini merupakan kegiatan/ proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Kota Tegal. Disamping itu, *Major Project* 2021 juga diarahkan sebagai bentuk dukungan dalam Program Prioritas Nasional sebagaimana tercantum pada Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang serta sebagai upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat dampak terjadinya pandemik global COVID-19. Rincian *Major Project* Kota Tegal pada RKPD Kota Tegal Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rincian Major Project Kota Tegal pada RKPD Kota Tegal Tahun 2021

Prioritas Pembangunan	Major Project	Output/ Lokasi	Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
PK-1: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.	<b><u>Koordinasi dan kolaborasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu:</u></b> (1) Program "TEMANLANSI" (Tegal Eman Lansia)	(1) Bantuan permakanaan bagi 750 Lansia terlantar (Program Rantang Warteg) (2) Bantuan uang/ tabungan bagi 750 Lansia terlantar senilai Rp.200.000 per bulan (3) Layanan <i>Homecare</i> kesehatan bagi Lansia terlantar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunkan angka kemiskinan Kota Tegal menjadi <b>6,20-7,20%</b></li> <li>Menurunkan angka pengangguran Kota Tegal menjadi <b>8,07%</b></li> <li>Meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Tegal menjadi <b>74,40 tahun</b></li> <li>Meningkatkan capaian persentase keluarga sehat menjadi <b>33,00%</b></li> <li>Meningkatkan cakupan kesehatan semesta menjadi <b>90,00%</b></li> </ul>	Dinas Sosial
	<b><u>Penguatan pelaksanaan jaminan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin</u></b> (1) Program PBI-JK bagi Maskin sumber APBD II (2) Bantuan Penunggu Pasien (3) Santunan Kematian	(1) PBI-JK sumber APBD II bagi 32.000 individu (2) Bantuan bagi 600 orang penunggu pasien dari keluarga miskin (3) Pemberian santunan kematian bagi 700 orang dari keluarga miskin		Dinas Kesehatan
	<b><u>Peningkatan kesempatan kerja</u></b> (1) Program pemagangan kerja (2) Pemberian pelatihan ketrampilan bagi calon tenaga kerja (3)	(1) Melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menempatkan tenaga kerja yang potensial dalam program pemagangan kerja (2) Memberikan berbagai jenis pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja dan dunia usaha bagi para calon tenaga kerja (3) Pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Prioritas Pembangunan	Major Project	Output/ Lokasi	Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
<b>PK-2:</b> Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kota Tegal yang berdaya saing.	<b><u>Peningkatan akses layanan pendidikan untuk semua:</u></b> (1) Program "ASELA" (Ayo Sekolah Lagi)	(1) <i>Assesment</i> dan bantuan pendidikan bagi Anak Putus Sekolah di Kota Tegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tegal menjadi <b>8,33 tahun</b></li> <li>Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah menjadi <b>94,71%</b></li> </ul>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	<b><u>Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan:</u></b> (1) Rehabilitasi gedung SD dan SMP (2) Pemberian BOS Pendampingan/ Daerah (3) Pemberian honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan	(1) Rehabilitasi gedung SD dan SMP (2) Pemberian BOS Pendampingan/ Daerah bagi seluruh SD dan SMP negeri (3) Pemberian honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan <b>8 SNP</b></li> </ul>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>PK-3:</b> Pemantapan infrastruktur kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.	<b><u>Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ekonomi:</u></b> (1) Penataan Pasar-pasar Tradisional (2) Pengembangan Kawasan Pariwisata (3) Penataan transportasi sebagai service hub pariwisata, perdagangan dan jasa	(1) Pasar Pagi dan Pasar Beras (2) Pengembangan OW. PAI (3) Penataan Jl. Ahmad Yani dan Jl. Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan <i>multiplier effect</i> perekonomian masyarakat</li> <li>Peningkatan PAD sektor pariwisata</li> <li>Peningkatan jumlah kunjungan wisata</li> <li>Meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal pada kisaran <b>4,5 - 5,5%</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan</li> <li>Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>
	<b><u>Penataan Wajah Kota:</u></b> (1) Penataan PKL (2) Penataan Taman/ Ruang Terbuka Hijau	(1) Pembangunan Pusat Kuliner Eks Pabrik Tegal dan Pembangunan dan pematangan lahan(urugan)Pasar burung dan pasar ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan <i>multiplier effect</i> perekonomian masyarakat</li> <li>Peningkatan PAD sektor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>

Prioritas Pembangunan	Major Project	Output/ Lokasi	Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		(2) Taman Boulevard Jalan Pancasila, Pembangunan Taman Yos Sudarso Jalan Pemuda, Revitalisasi Taman Poci Tahap II, Revitalisasi Alun-alun Tegal Selatan Tahap III, Penataan Kawasan Siwatu	<p>Perdagangan dan Jasa dan pariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah kunjungan wisata</li> <li>• Pengurangan luasan kumuh</li> <li>• Pelestarian kawasan Kota Pusaka.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Permukiman</li> </ul>
	<b>Penanganan Sampah:</b> (1) Pematangan Lahan TPA Bokong Semar	(1) Pematangan Lahan TPA Bokong Semar dan Pengadaan <i>Dump Truck</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan kegiatan terkait Perpres 79 Tahun 2019</li> <li>• Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan dan kebersihan Kota</li> </ul>	Dinas Lingkungan Hidup
<b>PK-4:</b> Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.	<b>Pengembangan Kewirausahaan:</b> (1) Pembinaan Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) (2) Pembinaan Pelaku UMKM	(1) Pembinaan Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Tegal melalui wadah Asosisiasi Pengrajin Industri Kecil Menengah Mengembangkan Kota Tegal (APIK BANGET) (2) Fasilitasi pemasaran produk UMKM melalui transformasi digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal pada kisaran <b>4,5 – 5,5%</b></li> <li>• Meningkatkan <i>multiplier effect</i> perekonomian masyarakat</li> <li>• Meningkatkan jumlah wirausahawan Kota Tegal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</li> </ul>
<b>PK-5:</b> Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.	<b>Penerapan Reformasi Birokrasi:</b> (3) Pembinaan dan penempatan kepegawaian dengan menerapkan sistem merit (4) Penataan organisasi/ perangkat daerah di lingkungan Kota Tegal	(1) Penataan organisasi/ perangkat daerah di lingkungan Kota Tegal (2) Pembinaan dan penempatan kepegawaian dengan menerapkan sistem merit (3) Penerapan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi menjadi <b>64,75</b></li> <li>• Mempertahankan capaian <b>WTP</b> pada Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>• Badan Keuangan Daerah</li> <li>• Badan Kepegawaian,</li> </ul>

Prioritas Pembangunan	Major Project	Output/ Lokasi	Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
	<p><b><u>Integrasi dan Digitalisasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran:</u></b></p> <p>(1) Penerapan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi dan terdigitalisasi</p> <p>(2) Penataan, pencatatan, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah</p> <p><b><u>Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah</u></b></p> <p>(1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah</p> <p>(2) Efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah</p>	<p>pelaporan penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi dan terdigitalisasi</p> <p>(4) Penataan, pencatatan, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah</p> <p>(5) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah</p> <p>(6) Efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan capaian Nilai SAKIP menjadi <b>65,50</b></li> </ul>	<p>Pendidikan dan Pelatihan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspektorat</li> <li>Sekretariat Daerah</li> </ul>
<p><b>PK-6:</b> Pengembangan inovasi dan teknologi informasi pendukung "Tegal Smartcity".</p>	<p><b><u>Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi dalam rangka mendukung Smart City :</u></b></p> <p>(1) Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik terintegrasi;</p> <p>(2) Pengembangan Aplikasi Administrasi Pemerintahan;</p> <p>(3) Penguatan akses internet dan intranet Pemerintah Kota Tegal</p>	<p>(1) Menyusun peraturan pendukung terkait implementasi Perpres SPBE di Kota Tegal</p> <p>(2) Aplikasi Pelayanan Publik terintegrasi (GULAMADU)</p> <p>(3) Aplikasi Administrasi pemerintahan dengan tanda tangan elektronik (aplikasi <i>e-sign</i>)</p> <p>(4) <i>Ducting</i> Kabel Kawasan</p>	<p>Meningkatkan capaian Indeks SPBE menjadi <b>2,53</b></p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>

## 5.2.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kota Tegal 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pemerintahan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) urusan pemerintahan umum. Disamping itu, pada masing-masing perangkat daerah, didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

### A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### 1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan melalui Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan sasaran pembangunan pagar 6 sekolah, rehab sedang/berat ruang kelas 10 sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 2 sekolah, rehab sedang/berat ruang dinas 2 sekolah, pengadaan mebeluer sekolah 7 paket, pengadaan buku perpustakaan sekolah 40 sekolah; Arah pencapaian persentase sekolah SD dengan sarpras sesuai standar sebesar 52,75%. BOS di 28 SD se-Kecamatan Tegal Barat untuk 4.618 siswa, BOS di 23 SD se-Kecamatan Margadana untuk 3.532 siswa, BOS di 45 SD se-Kecamatan Tegal Timur untuk 7.841 siswa, BOS di 21 SD se-Kecamatan Tegal Selatan untuk 3.827 siswa, pengadaan alat peraga pendidikan 40 sekolah, pembinaan siswa untuk 8 jenis lomba tingkat kecamatan, cabang lomba KOSN 6 jenis, cabang lomba FLS2N 5 jenis, cabang lomba SSG 5 jenis, Lomba Pemilihan PTK Berprestasi 6 katagori, Lomba OGN (Olimpiade Guru Nasional) 7 katagori, seleksi calon Kepala Sekolah untuk 75 orang, tim manajemen BOS SD, asesment pendampingan untuk siswa di 150 SD, pembinaan pengawas jenjang SD 12 pengawas. Arah pencapaian kegiatan ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Sederajat sebesar 103,75, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat sebesar 94,43%, Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Sederajat sebesar 0,06%, dan Angka Kelulusan (AL) SD/MI Sederajat sebesar 100%.

Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama: rehabilitasi sedang/berat ruang kelas 2 sekolah, rehabilitasi sedang/berat laboratorium sekolah 1 sekolah, rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah (sarana penunjang sekolah) 2 sekolah, pengadaan mebeluer sekolah 5 paket, pengadaan buku perpusatakaan sekolah 35 sekolah, pengadaaam peralatan pendidikan 8 paket; Program ini diarahkan pada pencapaian persentase Sekolah SMP dengan sarpras sesuai standar sebesar 94,44%. Pembinaan cabang lomba KOSN 5 jenis, cabang lomba FLS2N 5 jenis, pelatihan sepak bola 24 siswa, pelaksanaan produk Pentoleraturan pendidikan 100 satuan pendidikan, fasilitasi tenaga pendidik non ASN pada satuan pendidikan 1.298 orang, peningkatan kapasitas guru 138 orang, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah 38 sekolah, asesment pendampingan 100 siswa, penyediaan biaya personil peserta didik (BOS) SMP 10.808 siswa; Arah pencapaian pada persentase sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah dan

kemasyarakatan sebesar 100%; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sederajat sebesar 107,85%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat sebesar 93,89%, Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Sederajat sebesar 0,1%, dan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Sederajat sebesar 100%.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): pembangunan area bermain beserta APE 1 lembaga, rehabilitasi bangunan sekolah/ruang kelas/ruang guru/toilet jamban guru/toilet jamban siswa 5 lembaga, pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 2 lembaga; arah kegiatan ini pada pencapaian persentase PAUD dengan sarana prasarana sesuai standar sebesar 70,5%. Dana operasional sekolah PAUD Negeri 5 sekolah, Lomba Peringatan Hari Anak Nasional 21 lomba, BOP PAUD dari DAK 187 lembaga, penyediaan Alat Rumah Tangga PAUD, fasilitasi tenaga pendidik non ASN pada lembaga PAUD 350 orang, pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD 200 orang, publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini di 4 wilayah kecamatan se-Kota Tegal 75 peserta, laporan pelaksanaan manajemen BOP PAUD 192 lembaga, fasilitasi manajemen pemberian BOP PAUD 187 lembaga. Arah kegiatan pada pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD sebesar 54,11 dan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 90,18.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan: pembangunan ruang kelas baru SKB 2 ruang kelas, pembangunan sarpras dan utilitas ruang Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 1 ruang, pembangunan pagar depan dan pagar keliling 256 meter, pembangunan rumah dinas SKB 2 unit, pemasangan paving block SKB 65 m<sup>2</sup>, pembangunan tempat paker 36 m<sup>2</sup>, pengadaan peralatan pendidikan TIK SKB 2 paket; arah kegiatan pada persentase Lembaga PNF dengan sarana prasarana sesuai standar sebesar 70%. Penyelenggaraan program Paket C setara SMA 100 siswa, pelatihan keaksaraan usaha mandiri 80 orang, pelaksanaan program pengembangan pendidikan kecakapan hidup desa vokasi di 1 kelurahan 20 orang, pelaksanaan jenis program Kesetaraan Kejar Paket A,B,C dan Life Skill (SKB) 1 paket, pemberian BOP Kesetaraan 245 siswa, pelaksanaan program PKH desa vokasi di 1 kelurahan, pelatihan usulan musrenbang 20 peserta, pelaksanaan budaya edukasi di 27 kelurahan, pelaksanaan program literasi di 4 kecamatan, lomba apresiasi GTK non Formal 10 katagori, bantuan operasional pendidik non Formal 100 orang, pembinaan kursus dan PNF 150 orang, sosialisasi dan publikasi oleh lembaga 125 orang. Arah kegiatan pada pencapaian Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C sebesar 85.

## 2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar: pembinaan kurikulum, pelaksanaan Latun, Kurtilas, Ujian Sekolah 158 sekolah dasar; pembinaan kurikulum, pelaksanaan Latun, Kurtilas, Ujian Sekolah 37 sekolah menengah pertama, pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 37 sekolah menengah pertama, pelaksanaan cabang Lomba KSN SD 2 jenis, cabang Lomba KSN SMP 3 jenis, penyelenggaraan festival literasi 37 sekolah menengah pertama, cabang Lomba OPSI 3 jenis.

Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal: akreditasi lembaga pendidikan non formal 25 lembaga, akreditasi lembaga PAUD 50%, pelaksanaan UNBK 13 lembaga.

## 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan: Bimtek pendataan PTK PAUD 100 orang, Bimtek pendataan PTK Dikdas, tunjangan profesi PTK 1.186 orang. Arah kegiatan untuk pencapaian persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik sebesar 69,15% dan yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 77,65%, Pendidik PNF yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 52,57%, guru SD sederajat yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 96,25% dan yang bersertifikat pendidik 86,75%, Guru SMP/MTs yang bersertifikat pendidik 87,15% dan yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 99,65%.

## 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota: rehabilitasi puskesmas pembantu 2 unit, DED Rehabilitasi Pustu 1 dokumen, IPAL 1 unit, penyediaan sarana penunjang program TB 2 unit, pengadaan obat 3 paket, pengadaan bahan medis habis pakai puskesmas dan klinik paru 2 paket.

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: pelayanan ANC Terpadu bagi ibu hamil 3.805 ibu hamil, pembentukan kelas ibu hamil 80 kelas, pelaksanaan orientasi P4K 8 Puskesmas, cakupan kunjungan bayi 100 persen, pelayanan imunisasi 8.101 bayi dan balita, pelayanan imunisasi anak sekolah dasar 14.676 anak, penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 1 234 sekolah, pelayanan pemeriksaan faktor resiko masyarakat usia produktif 23.500 orang, pemeriksaan faktor resiko kanker serviks dan payudara wanita usia subur 2.000 orang, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putrid 6.050 orang, penyelenggaraan kegiatan kesehatan remaja di 8 puskesmas, pemantauan kesehatan lansia 15.025 orang, pelayanan kesehatan penderita hipertensi di fasyankes 25.000 orang, pelayanan kesehatan penderita diabetes di fasyankes 3.000 orang, penemuan dan pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 553 orang, penemuan dan pelayanan penderita TB 447 orang, penemuan dan pelayanan penderita HIV 25 orang, penyediaan bahan sarana penanggulangan TB dan HIV 16 jenis, laporan kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 dokumen, pendataan bayi usia <6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif 1.340 bayi, data bayi lahir mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 4.205 bayi, pemberian makanan tambahan balita kurus 85 balita, pembinaan GP2SP 1 perusahaan, pembinaan kesehatan olahraga kelompok masyarakat 20 kelompok, pembinaan kesehatan olahraga institusi dan sekolah 40 institusi/sekolah, verifikasi kesehatan lingkungan 25 kelurahan, penyusunan strategi sanitasi kota 1 dokumen, pengawasan dan pembinaan 135 TTU, pengawasan dan pembinaan 3.820 rumah, pengawasan dan pembinaan 109 sarana air minum, pengawasan dan pembinaan pengelolaan limbah medis 13 pasyankes, tenaga fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 9 orang, pembinaan pilar ketiga STBM 8 kelurahan, sosialisasi untuk 1.000 orang, implementasi germas, pelaksanaan inisiasi pelayanan kesehatan tradisional di 15 sarana pelayanan kesehatan, layanan kesehatan dan vaksinasi calon jamaah haji 320 orang, pelaksanaan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) di 27 kelurahan, pelayanan pemeriksaan factor resiko PTM masyarakat usia produktif 33.330 orang, penemuan dan pelayanan kasus tular vektor 10 kasus, fogging focus 140 kali, pemeriksaan hepatitis B pada Ibu Hamil 3.838 orang, penemuan dan pelayanan penderita ISPA 326 orang, penemuan dan pelayanan penderita diare 3.934 orang, penemuan dan pelayanan penderita kusta 23 orang, data masyarakat miskin terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 32.500 orang, pelayanan persalinan masyarakat miskin tidak memiliki JKN 50 orang, dokumen monev dan pelaporan jaminan kesehatan masyarakat 1 dokumen, jasa medis pelayanan kesehatan 8 puskesmas, skrining Napza 300 orang, pokja/forum kelurahan sehat dan pokja/forum kecamatan sehat, forum kota sehat, penanganan kasus gawat darurat 450 kasus, frekuensi P3K 234 kegiatan, distribusi obat di 9 fasyankes, layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan 121 jenis, pendampingan akreditasi 14 fasyankes.

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi: penyusunan data kesehatan 2 dokumen.Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah: pelaksanaan promosi kesehatan 5 kegiatan.

## 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota: pengawasan perizinan tenaga kesehatan 500 orang, kegiatan Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota: pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan 27 orang, uji kompetensi tenaga kesehatan 50 orang.

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: pemilihan tenaga kesehatan teladan 9 orang

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: penyusunan dokumenprofil SDM Kesehatan 1 dokumen, penyusunan dokumen rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan 1 dokumen.

## 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT): pembinaan dan pengawasan 60 sarana pelayanan farmasi.Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga: pembinaan dan pengawasan keamanan dan kesehatan pangan usaha makanan dan minuman 100 IRTP, pembinaan dan pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 150 sarana, standarisasi TPM 50 sarana, Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 100 sarana.

Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga: pembinaan dan pengawasan pengusaha makanan minuman 120 usaha pangan.

## 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota: Dana BOK 8 Puskesmas, pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) institusi pendideikdan dan fasilitas pelayanan kesehatan 163 institusi.

Kegiatan Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: penyediaan media promosi dan informasi kesehatan 10 jenis. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: pembinaan dan evaluasi kelurahan siaga 22 kelurahan, supervise dan fasilitasi posyandu 203 pos.

### 3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### 1) **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini diarahkan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota: normalisasi/pemeliharaan sungai 1 paket, pembersihan rutin kanal banjir 500 meter, operasional dan pemeliharaan stasiun pompa 6 unit, operasional dan pemeliharaan power house polder 6 unit. Program ini untuk meningkatkan capaian sarana dan prasarana pengendali banjir yang berfungsi baik sebesar 44%.

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota: rehab saluran irigasi tambak sepanjang 100 meter, operasional dan pemeliharaan irigasi sepanjang 1.500 meter.

#### 2) **Program Pengelolaan dan Penyediaan Sistem Air Minum**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota: operasional dan pemeliharaan SPAM 2 unit. Program ini untuk meningkatkan capaian jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan hingga 52,53% dan keselerasan Program Pengelolaan dan Penyediaan Sistem Air Minum dengan kabupaten Tegal yang merupakan pemasok sumber mata air

#### 3) **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota: DED pengelolaan air limbah domestic, pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah 3 unit, pemeliharaan saluran air limbah domestik sepanjang 2.390 meter, pemasangan septic tank 204 unit.

#### 4) **Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota: pematangan lahan TPA 8,7 Ha, pembangunan TPS3R 1 unit, rehab TPS 3unit, rehab TPST 4 unit, penyediaan sarana dan prasarana persampahan 8 jenis.

#### 5) **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota: pelatihan operator pompa dan kolam retensi 1 paket, pembangunan Saluran Drainase perkotaan dan lingkungan 8 paket, normalisasi Saluran Drainase perkotaan dan lingkungan 5 paket, penyediaan sarana sistem Drainase perkotaan dan lingkungan 4 paket, operasional dan pemeliharaan jaringan drainase sepanjang 2.000 meter.

#### 6) **Program pengembangan permukiman**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota: pembangunan jalan lingkungan sepanjang 7.977 meter. Program ini untuk meningkatkan capaian persentase ruas jalan lingkungan dalam kondisi baik sebesar 80%.

**7) Program penataan bangunan gedung**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung: penerbitan 600 buah IMB, pembangunan gedung 1 unit, rehab gedung 2 unit, dan penyusunan DED.

**8) Program penyelenggaraan jalan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota: penyusunan dokumen perencanaan jalan dan jembatan 3 dokumen, appraisal dan larap pembebasan lahan masuk pelabuhan 2 dokumen, pembangunan jalan sepanjang 1.172,86 meter, rekonstruksi jalan sepanjang 420 meter, Pemeliharaan Berkala Jalan sepanjang 10.903,47 meter, Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 2.000 meter.

**9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi: sosialisasi jasa konstruksi untuk 75 orang.

**10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota: sosialisasi rencana tata ruang. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota: penyusunan dokumen RDTR 1 dokumen. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota : penyusunan dokumen pemanfaatan ruang 1 dokumen, review RTH 1 dokumen, pelayanan informasi tata ruang 720 surat, database informasi tata ruang 4 dokumen. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota: laporan TKPRD 1 dokumen, laporan monitoring pemanfaatan ruang 1 dokumen. Program ini untuk meningkatkan capaian persentase rencana rinci tata ruang yang tersusun sebesar 40%.

**4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

**1) Program Pengembangan Perumahan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota: penyusunan dokumen kebijakan bidang perumahan 1 dokumen. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus: fasilitasi blok rusunawa 5 blok. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan: penyusunan dokumen pengesahan siteplan 1 dokumen, Dokumen Pendataan Perumahan NonFormal 1 dokumen, fasilitasi dokumen RTLH 91 unit. Program ini untuk meningkatkan capaian persentase rumah layak huni sebesar 87,81%.

**2) Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha: dokumen/SK Lokasi Kawasan Kumuh 1 dokumen, proposoal Lomba Hari Habitat 1 dokumen, pemugaran Taman RTP Siwatu 2 unit. Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha: dokumen DED Perencanaan Skala Kawasan Siwatu 1 dokumen, fasilitasi RTLH 91 unit. Program ini untuk meningkatkan capaian persentase pencegahan dan penanganan kawasan kumuh sebesar 2,26%.

**3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini diarahkan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan: pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 110 unit, dokumen PSU Perumahan yang di serahkan ke Pemkot, pemeliharaan PSU Perumahan 3 unit, dokumen DED PSU Perumahan 1 dokumen, pembangunan pagar makam dan pemeliharaan makam se-Kota Tegal, urugan makam 450 m2. Program ini untuk meningkatkan capaian persentase cakupan PSU perumahan sebesar 27,11%.

**5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

**1) Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: pencegahan gangguan trantibum 5 kegiatan, penindakan gangguan trantibum 88 kegiatan, pelatihan linmas 278 orang, pelatihan/pembinaan satpol PP 39 kegiatan, kerjasama antar lembaga/kemitraan 6 kegiatan.

Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota: pembinaan dan penyuluhan perda dan perwal 14 kegiatan, monitoring dan sosialisasi peredaran pita cukai illegal 44 kegiatan, operasi yustisi penegakan perda dan perwal 40 kegiatan. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota: pembinaan dan penanganan penegakan perda dan perwal oleh PPNS 24 kegiatan. Program ini untuk meningkatkan persentase penanganan pelanggaran perundang-undangan daerah sebesar 95,2%.

**2) Program penanggulangan bencana**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota: penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana 112 buah, sistem informasi kebencanaan 1 paket. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana: dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana, pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 250 orang, apel siaga darurat bencana 300 orang, apel Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) 200 orang, pengadaan Early Warning System (EWS) 2 unit, pembentukan Kelurahan Tangguh bencana 2 kelurahan, pelatihan Damage and Lost Assessment (DaLA), fasilitasi kebutuhan pasca bencana, petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana 24 orang. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana: siaga darurat bencana dan kejadian tanggap darurat, pencarian dan pertolongan korban. Program ini untuk meningkatkan jumlah Kelurahan Tangguh Bencana menjadi 14%.

**3) Program penanggulangan kebakaran**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota: pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 97 kegiatan, sosialisasi kebakaran 48 kegiatan. Program ini untuk mencapai tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran selama 15 menit.

**6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

**1) Program pemberdayaan sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota: peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat 60 orang, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan 4 orang, potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga 410 KK, potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat 45 lembaga, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga 1 lembaga.

**2) Program rehabilitasi sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial: pemberian bantuan kepada penunggu pasien, bantuan uang tabungan bagi lansia serta santunan kematian, pemberian bantuan sosial lansia terlantar dan penyediaan permakanan di rumah singgah 240 orang, penyediaan sandang bagi penghuni rumah singgah 100 orang, penyediaan alat bantu disabilitas 13 orang, fasilitasi Hari Disabilitas Internasional (HDI) 15 orang, petugas patroli 25 orang, penjangkaran PMKS 480 orang, pelayan adopsi 5 orang, pelayanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 5 orang, pemberian bantuan bagi penunggu pasien 1.200 orang, fasilitasi pelaksanaan penelusuran keluarga 10 orang, pelayanan orang terlantar dalam perjalanan 640 orang, pelayanan rujukan sampai tempat tujuan 10 orang.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial: Data pengaduan 20 orang, bimbingan mental kepada waria 15 orang, bimbingan penanganan PMKS 400 orang.

**3) Program perlindungan dan jaminan sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar: pembentukan pusat kesejahteraan anak terintegrasi 1 lembaga, pekerja sosial anak goes to public 30 orang, rujukan anak terlantar 40 orang. Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota: fasilitasi penerima manfaat bantuan sosial pangan 7.216 KK, dokumen laporan monev bansos pangan.

**4) Program penanganan bencana**

Program ini diarahkan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota: penyediaan makanan bagi pengungsi 300 orang. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota: pelatihan Taruna Siaga Bencana 15 orang.

**B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

**1) Program perencanaan tenaga kerja**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK): penyusunan data ketenagakerjaan tahun 2021.

**2) Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi: pelatihan uji kompetensi 120 orang

**3) Program penempatan tenaga kerja**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota: pencari kerja magang 40 orang, pencari kerja pra magang 10 orang, penempatan tenaga kerja luar daerah 10 KK, penempatan pencari kerja 500 orang.

**4) Program Hubungan Industrial**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: pembinaan penyusunan peraturan perusahaan pada 60 perusahaan, pembinaan melalui pendataan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial pada 40 perusahaan.

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota: fasilitasi pelaksanaan pengupahan pada 100 perusahaan, penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 15 kasus, laporan kegiatan LKS Tripartit 7 laporan. Program ini untuk meningkatkan persentase perselisihan hubungan industrial terselesaikan menjadi 72%.

**2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**1) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota: pelaksanaan kelembagaan PUG aktif, penyusunan dokumen ARG perangkat daerah.

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota: sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan 200 orang. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota: fasilitasi lembaga Dharma Wanita Persatuan, fasilitasi kegiatan peringatan hari Kartini dan hari Ibu.

**2) Program Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota: penanganan korban kekerasan terhadap perempuan 50 kasus.

**3) Program peningkatan kualitas keluarga**

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota: pengembangan kegiatan kelompok ketrampilan 20 kelompok dan kelompok ketrampilan perempuan 25 kelompok.

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota: fasilitasi sekretariat dan pokja PKK. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota: fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) 1 lembaga.

**4) Program pengelolaan sistem data gender dan anak**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota: sistem informasi data gender dan anak 1 aplikasi.

**5) Program pemenuhan hak anak (PHA)**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota: pembinaan Forum Anak, pembinaan gugus tugas Kota Layak Anak (KLA), pembentukan dan pembinaan Sekolah Ramah Anak (SRA) 20 sekolah, pembinaan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI).

**6) Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota: laporan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: pembinaan Satgas kekerasan dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

**3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

**1) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan: penyusunan neraca bahan makanan 1 dokumen, pemberian kudapan kepada siswa SD/MI 3.000 siswa, pemantauan harga pangan 7 pasar.

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi: survey sampel data konsumsi pangan rumah tangga tingkat kota dan tersedianya data pola konsumsi pangan harapan, pemanfaatan pekarangan oleh kelompok masyarakat 11 kelompok, pemantauan harga dan evaluasi konsumsi perkapita.

**2) Program penanganan kerawanan pangan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan: penyusunan dokumen SKPG dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2 dokumen. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota: rakor dewan ketahanan pangan.

**3) Program pengawasan keamanan pangan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota: pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT) 80 orang.

**4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

**1) Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota: Dokumen Sertifikat Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan Masyarakat 1 dokumen.

**5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

**1) Program perencanaan lingkungan hidup**

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota: penyusunan dokumen pengendalian RPPLH 2 dokumen.

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota: penyusunan dokumen KLHS RDTR 4 dokumen.

**2) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**

Program ini diarahkan pada bimbingan teknik pengelolaan air, penyusunan dokumen pengujian kualitas udara, dan pelayanan Laboratorium Lingkungan.

**3) Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: bimbingan teknis pengelolaan air 2 kegiatan, penyusunan dokumen pemantauan kualitas udara 2 dokumen, penyusunan dokumen profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 1 dokumen, pendataan luas lahan yang diinformasikan status kerusakan lahan untuk produksi Biomassa 100 Ha.

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: pelayanan informasi informasi peringatan pencemaran/ kerusakan lingkungan pada 24 perusahaan, pengadaan alat laboratorium 1 unit, sarana penunjang laboratorium 1 unit.

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota: pemeliharaan hutan kota 6 lokasi, pembangunan taman kota 7 unit, pemeliharaan taman kota seluas 53.955 m<sup>2</sup>, pemeliharaan wahana reklame 31 unit. Sasaran program ini untuk meningkatkan luasan taman dan makam kota sebesar 0,98%.

**4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3: pembinaan pelaku usaha memenuhi komitmen izin penyimpanan sementara dan verifikasi Izin Pengelolaan Limbah B3 30 pelaku usaha.

**5) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: penerbitan rekomendasi izin lingkungan hidup 20 rekomendasi, pengawasan pelaksanaan izin lingkungan hidup dan izin PPLH 45 usaha.

**6) Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup 10 kegiatan

**7) Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: pembinaan 20 sekolah, sertifikasi SNI ISO 14001, PROPER yang mencapai

minimal ranking BIRU 1 perusahaan, pemberian penghargaan Lomba Bersih Sehat (LBS) 4 kelurahan.

**8) Program penanganan pengaduan lingkungan hidup**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota: penanganan dan penyelesaian kasus terkait sengketa lingkungan 5 kasus.

**9) Program pengelolaan persampahan**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah: monitoring dan evaluasi kebijakan strategis daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah 2 kegiatan, pengelolaan sampah dengan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali 365 hari (pengurangan sampah 14.000 ton), pengelolaan sampah dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPST (penanganan sampah 77.000 ton), rumah tangga menggunakan layanan IPLT 330 rumah tangga, sarana penunjang pelayanan retribusi persampahan 1 unit, kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 4 kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 12 kegiatan.

**6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**

**1) Program pendaftaran penduduk**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk: sosialisasi administrasi kependudukan, penerbitan dan pencatatan KTP dan KK sebanyak 45.000 dokumen, pelaporan pelayanan administrasi kependudukan.

**2) Program pencatatan sipil**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil: kegiatan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting 5 kegiatan, dan pelayanan pencatatan sipil 27 kegiatan, serta penyediaan perlengkapan 4 jenis.

**3) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan: laporan FGD pendaftaran penduduk, laporan FGD pencatatan sipil, pengiriman dokumen sebanyak 3.500 dokumen, evaluasi administrasi kependudukan, laporan hasil koordinasi administrasi kependudukan yang terkait urusan pemerintahan di bidang agama.

**4) Program pengelolaan profil kependudukan**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan: penyusunan buku profil kependudukan.

**7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**1) Program pengendalian penduduk**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk: workshop sekolah siaga kependudukan 250 orang, seminar PUP menuju GenRe Keren 300 orang, workshop dampak kependudukan bagi pendidikan non formal 100 orang,

advokasi tentang penundaan usia perkawinan bagi pendidikan non formal 100 orang, lomba kependudukan 3 jenis, pelatihan konselor sebaya 50 orang, kemah bakti Saka Kencana Tingkat Provinsi Jawa Tengah 10 orang, pertemuan forum GenRe 50 orang, pembinaan PIK Remaja jalur pendidikan dan masyarakat 100 orang, jambore Forum GenRe, pelatihan TOT konseling bagi guru BP SMP, SMA/SMK 47 sekolah.

Kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/ kota: laporan monev data kependudukan, dokumen kebijakan kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, kader PPKBD, kader Sub PPKBD.

## 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan seminar koalisi kependudukan Indonesia, rakor FAPSEDU, pertemuan KKI dan FAPSEDU, media informasi KIE Program Bangga Kencana, advokasi lintas sektor, peringatan Harganas Tingkat Kota, Tingkat Provinsi, operasional balai penyuluh KB.

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB) : pengadaan KIE KIT 27 unit, pengadaan GenRe KIT 10 unit, pengadaan bahan dan alat di Kampung KB 4 unit, mobilisasi PPKBD, pelatihan masyarakat di Kampung KB, Lomba peringatan Hari Keluarga 6 jenis.

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota: pelayanan aseptor 50 orang, penyediaan alkon 3 jenis, penyediaan sarpras faskes 3 jenis, fasilitasi faskes, pelatihan aplikasi pelayanan KB 2 angkatan, aplikasi pelayanan KB, lomba motivator KB Pria dan Lomba Kelompok KB Pria.

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB: pertemuan pokja, pembinaan poktan, pertemuan muskel, pertemuan minlok.

## 3) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga: pelatihan UPPKS di Kampung KB, pelatihan UPPKS di luar Kampung KB, fasilitasi poktan 81 kelompok, sosialisasi poktan 80 orang, pembinaan poktan.

Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga: lomba ketahanan dan kesejahteraan keluarga 5 jenis lomba.

## 8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

### 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: lampu aspek 50 buah, cermin tikung 20 unit, controller ITS 2 unit, pemeliharaan prasarana angkutan umum 28 unit, pemeliharaan sarana pengamanan perlintasan kereta api, pemeliharaan dan operasional gardu perlintasan (BBM, oli mesin, buku daftar hadir dan tanda terima piket, makanan dan minum tim pengawasan perlintasan kereta api, alat komunikasi, bangunan non gedung, alat komunikasi HT 10 unit, RIG 2 unit) untuk mencapai cakupan pengamanan

perlintasan kereta api 100%, Peningkatan dan pemeliharaan trotoar seluas 767 m<sup>2</sup>, ruas jalan terlayani penerangan jalan 86,40 persen, pemeliharaan LPJU sebanyak 7.560 titik. Kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe C: dokumen perencanaan 2 dokumen, Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir : manajemen pengendalian lalu lintas, rencana survey pemasangan perlengkapan jalan, penyelenggaraan parkir tepi jalan umum, pembinaan korlap juru parkir dan juru parkir, operasional forum LLAJ, operasional tim tertib lalu lintas, operasional tim penyusun dan pelaksana pengumpul data penghargaan Wahana Tata Nugraha, operasional tim teknis dan laik jalan, operasional pemanduan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas dan parkir kegiatan Wali Kota, operasional panitia Bregaslang, pemeliharaan alat komunikasi, penertiban parkir tepi jalan umum.

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor: penyediaan sarana pengujian kendaraan bermotor, penyediaan Bukti Lulus Uji 4.500 set, pemeliharaan alat uji 9 alat, layak uji kendaraan 210 kendaraan. Kegiatan ini untuk meningkatkan tingkat kepatuhan kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) menjadi 40%.

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota: pemeliharaan rambu lalu lintas, CCTV, traffic light, warning light, marka jalan, RPPJ, pengadaan CCTV Fixed Camera dan PTZ 1 paket, Annaouncer 4 unit, VMS 2 unit, pengamanan lebaran, natal dan tahun baru. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota: penilaian Andalin, pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalin. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan: uji petik kendaraan bermotor di jalan dan terminal, ramp check kendaraan masa liburan.

Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: sewa bus mudik 4 unit. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan 20 orang. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: penerbitan rekomendasi angkutan 50 berkas, laporan pelaksanaan kegiatan izin penyelenggaraan angkutan orang. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: penyusunan data pelayanan angkutan.

## 9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

### 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: pemantauan opini dan aspirasi publik, penyusunan dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) OPD/SKPD, liputan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pemberdayaan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) dan kelompok jurnalistik masyarakat.

### 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: layanan NOC dan Data. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: penyusunan dokumen teknis pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE), Layanan NOC dan Data, integrasi basis data, pengembangan aplikasi SPBE, pelatihan aplikasi bagi 60 orang ASN, penyusunan dokumen pengelolaan GCIO 1 dokumen.

#### 10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) **Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota: Pengawasan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 60 unit.

2) **Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: workshop penilaian kesehatan KSP/USP koperasi 70 unit.

3) **Program pendidikan dan latihan perkoperasian**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota : Pelatihan Manajemen Perkoperasian Sektor Riil 40 unit, Pelatihan Penguatan Kerja Sama antar Koperasi 40 unit, Pelatihan Manajemen Pengembangan Usaha dan Orientasi Lapangan 30 unit, Pelatihan Akuntansi Perkoperasian 40 unit, Sosialisasi Perkoperasian 160 orang.

4) **Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota: saresehan koperasi 60 orang, pameran hari Koperasi, jambore hari Koperasi, upacara hari Koperasi.

5) **Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan: pendataan UKM di 2 kecamatan, fasilitasi ijin usaha mikro kecil dan produk industri rumah tangga 60 UKM.

6) **Program pengembangan UMKM**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil: pelatihan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi, pameran produk UKM.

#### 11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1) **Program pengembangan iklim penanaman modal**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota: Temu bisnis 2 kegiatan, kepeminatan antara UKM dan UMB 20 Letter of Intent, peta potensi 1 dokumen.

2) **Program promosi penanaman modal**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota: pameran investasi 2 kegiatan, pembuatan sarana promosi penanaman modal 2 paket, advertensi 6 kali.

3) **Program pelayanan penanaman modal**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota: laporan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan 7 dokumen, pelayanan mobil keliling 20 kegiatan, penerbitan perizinan dan non perizinan 3.500 dokumen, penyelenggaraan forum komunikasi publik perizinan 120 orang, *capacity building* SDM Penanaman Modal.

**4) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota: pembinaan dan pengawasan 100 perusahaan, rakor pengendalian dan workshop peningkatan daya saing daerah 30 OPD.

**5) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: analisis dan evaluasi investasi 1 dokumen, diseminasi kebijakan penanaman modal 50 orang,

**12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

**1) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota: pembinaan pemuda pelopor 5 orang, pelatihan kepemudaan 3 kegiatan.

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: lomba kepemudaan 3 lomba.

**2) Program pengembangan daya saing keolahragaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota: pengadaan sarpras olahraga 5 jenis. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: pembinaan olahraga 8 kegiatan, Popda tingkat kecamatan, kota, wilayah dan provinsi 17 cabang olahraga, pengiriman kejuaraan tingkat provinsi dan nasional 130 atlet dan 30 pelatih.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi: pelatihan atlet pelajar (PAP) tingkat kota 350 atlet dan 80 pelatih, penghargaan atlet dan pelatih berprestasi 65 atlet dan 30 pelatih.

**13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

**1) Program penyelenggaraan statistik sektoral**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota: penyusunan data statistik sektoral Kota Tegal 3 dokumen.

**14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

**1) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: penyusunan dokumen penilaian Perangkat Daerah yang menerapkan sistem manajemen keamanan aplikasi.

#### **15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

##### **1) Program pengembangankebudayaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota: penyusunan 4 dokumen perlindungan OPK. Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota: fasilitasi pentas/festival tradisi budaya 5 kegiatan, Pentas Hari Jadi Kota Tegal, HUT RI, Tahun Baru dll 5 kegiatan, pentas kolosal Tegal Berjuang 1 kegiatan. Program ini untuk melindungi OPK dengan capaian 72,73%.

##### **2) Program pengembangan kesenian tradisional**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota: Pentas lomba/Festival Sanggar Seni Budaya 24 kegiatan, workshop seni budaya 3 kegiatan.

#### **16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

##### **1) Program pembinaan perpustakaan**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: pengembangan perpustakaan umum, kelurahan dan kecamatan 17 perpustakaan, SD 40 perpustakaan, SLTP 17 perpustakaan, SLTA 17 perpustakaan, Perguruan Tinggi 3 perpustakaan, koleksi buku lokal terbitan perpusda 5 buku, koleksi lukisan seniman 5 lukisan, koleksi batik lokal 3 motif, pembinaan satuan pendidikan dasar 10 sekolah, pengolahan dan pengelolaan buku 1.000 eksemplar, pengembangan bahan pustaka 10 eksemplar, profil Perpustakaan Mr. Besar Martokoesoemo 1 buku, database tenaga perpustakaan dan pustakawan 1 dokumen. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: sosialisasi/layanan perpustakaan keliling sekolah dasar 480 kunjungan, SLTP 60 kunjungan, penghargaan tokoh perpustakaan 5 orang, pembentukan komunitas pustaka masyarakat kota 2 komunitas.

#### **17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

##### **1) Program pengelolaan arsip**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota: laporan monev arsip dinamis 4 dokumen. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota: pengolahan 10.000 berkas dan preservasi dokumen 100 dokumen. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota: pembinaan kearsipan 5 kegiatan, pencetakan 500 buku.

##### **2) Program perlindungan dan penyelamatan arsip**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: duplikasi 500 dokumen arsip digital, pemeliharaan peralatan penyimpanan arsip 6.000 boks, pemeliharaan sarana kearsipan 4 jenis, naskah sumber arsip 1 film.

**3) Program perizinan penggunaan arsip**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota: penyusunan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup 5 SOP.

**C. Urusan Pemerintahan Pilihan**

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

**1) Program pengelolaan perikanan tangkap**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota: pengadaan mesin kapal 10 unit, pengadaan badong 1 paket, pelatihan permesinan 20 orang, pelatihan manajemen 25 orang, pendampingan sarpras perikanan tangkap, rehab dermaga sandar, operasional TPI, dan pengembangan perikanan budidaya, dan pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan, capaian produksi tangkap 22.190 ton. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI): operasional sarpras penunjang 3 TPI.

**2) Program pengelolaan perikanan budidaya**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil: pelatihan pengembangan pembudidaya ikan 40 orang. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan: monitoring kualitas air, capaian produksi budidaya ikan 599 ton.

**3) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil: Sosialisasi Pendampingan untuk POKLAHSAR Kota Tegal 60 orang, Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Perikanan 80 orang. Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: capaian produksi produk pengolahan perikanan 6.700,93 ton, pengadaan freezer 110 unit, pengadaan *coolbox* 200 unit, pengadaan panci presto 100 unit, pengadaan trays 1.000 unit.

**2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

**1) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota: pengadaan sarpras pariwisata 5 jenis. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota: pengadaan sarpras pariwisata 3 jenis, pembinaan sapta pesona 7 kegiatan.

**2) Program pemasaran pariwisata**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota: promosi pariwisata 12 kegiatan

**3) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar: pembinaan SDM dan usaha pariwisata 7 kegiatan.

### 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

#### 1) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian: Monev pengendalian peredaran penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida 9 kegiatan, penyediaan benih padi 1 paket. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota: pelatihan benih/bibit ternak.

#### 2) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian: pembangunan RPH Ruminansia, pengadaan kawasan peternakan itik.

#### 3) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota: pelatihan pencegahan penyakit menular ternak bagi 200 orang peserta.

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota: penyediaan obat-obatan hewan 1 paket. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner: Sosialisasi 600 anak.

#### 4) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota: pengendalian organism pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura.

#### 5) Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian: penyuluhan, penyusunan rencana kerja penyuluhan dan penyusunan program tingkat kecamatan dan kota serta promosi hasil produk pertanian, penyediaan sarana prasarana penyuluhan 10 jenis.

### 4. Urusan Pemerintahan Perdagangan

#### 1) Program perizinan dan pendaftaran perusahaan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan: monitoring dan penyusunan database perdagangan.

#### 2) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan: operasional pengelolaan pasar rakyat 14 unit, pembuatan parkir Pasar Pagi Blok A. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya: pembinaan pengelolaan pasar rakyat 14 unit, pembangunan sarana penataan PKL (pembangunan floating market), pembinaan PKL, pembangunan pusat kuliner eks pabrik tegel, dan penerapan living lab pada lokasi *pilot project smart city*.

#### 3) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota: monitoring barang kebutuhan pokok dan

barang penting, penyaluran paket sembako 8.000 paket. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: monitoring penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi.

**4) Program pengembangan ekspor**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: pameran 4 kegiatan

**5) Program standarisasi dan perlindungan konsumen**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan: pelayanan tera/tera ulang (dokumen SKHP) 2.600 dokumen, pengawasan metrologi legal, dan sosialisasi kemetrologian 60 orang.

**5. Urusan Pemerintahan Perindustrian**

**1) Program perencanaan dan pembangunan industri**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota: pelatihan WUB dan IKM, gelar TTG Nasional dan Kota, pelatihan posyantek 1 kegiatan, penyempurnaan gedung showroom, dan ruang pertemuan, pengadaan sarpras gedung showroom dan ruang pertemuan, jasa konsultasi aplikasi TEMIO, temu usaha industri, promosi produk 7 pameran, kegiatan Dekranas 2 kegiatan. Program ini untuk lebih meningkatkan persentase IKM yang dibina menjadi 18,5%.

**2) Program pengendalian izin usaha industri**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah: sosialisasi Ijin Usaha Industri.

**3) Program pengelolaan sistem informasi industri nasional**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota: sosialisasi sistem informasi industri nasional (SIINAS), penyusunan data industri.

**D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

**1. Sekretariat Daerah**

**1) Program penataan administrasi umum**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penataan Organisasi: penyusunan dokumen Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 1 dokumen, Dokumen Anjab/ABK/Evjab 1 dokumen, dokumen tata laksana 1 dokumen, pembinaan pelayanan publik 5 OPD, dokumen Pengukuran Kinerja 4 dokumen.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum: telaah Staf Ahli Walikota, Pelayanan kerumahtanggaan dan tamu KDH. Kegiatan Perencanaan dan Keuangan: Laporan Keuangan Perangkat Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah. Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan: layanan keprotokolan, ketersediaan informasi pemerintah daerah, pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah

**2) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan: pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan 3 kegiatan, monitoring dan evaluasi 4 dokumen, Dokumen

Pembakuan Nama Rupabumi/Toponimi 1 dokumen, fasilitasi RT/RW 1.265 RT/RW, pembinaan kecamatan dan kelurahan 12 kegiatan, fasilitasi PAW Pimpinan dan Anggota DPRD 2 dokumen, LPPD 1 dokumen.

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah: Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri 5 dokumen, Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri 1 dokumen, Monitoring dan Evaluasi Kerja sama 2 dokumen.

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah: usulan produk hukum daerah dalam propemperda 10 perda, Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemda, Penataan JDIH,

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: bina mental spiritual 5 kegiatan, kegiatan kesejahteraan sosial 3 kegiatan, kegiatan kesejahteraan masyarakat 3 kegiatan

### 3) Program perekonomian dan pembangunan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian: pembinaan BUMD 1 kegiatan, penyusunan laporan pengendalian inflasi daerah 1 dokumen, laporan hasil monev KUR 1 dokumen, monitoring, pemantauan dan pembinaan program percepatan akses keuangan daerah 1 dokumen. Kegiatan Administrasi Pembangunan: penyusunan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Barang/Jasa Kota Tegal 1 dokumen, rakor pengendalian kegiatan, laporan hasil monev 1 dokumen. Kegiatan Barang dan Jasa: pengadaan barang jasa melalui UKPPB 100 paket, pengadaan barang/jasa melalui LPSE 110 paket, pembinaan dan advokasi 2 paket. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam: laporan penggunaan DBHCHT 1 dokumen, laporan penghematan energi 1 dokumen.

## 2. Sekretariat DPRD

### 1) Program layanan dan administrasi keuangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD: fasilitasi rapat DPRD 85 kegiatan, penyediaan ATK 20 jenis dan barang cetakan untuk 6 Fraksi. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD: pemenuhan hak keuangan DPRD 30 orang, penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD 150 stel, fasilitasi general check up anggota DPRD 30 orang.

### 2) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD: kajian peraturan 3 kegiatan, penyusunan naskah akademik raperda 3 dokumen. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran: fasilitasi pembahasan APBD 84 kegiatan. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan: pengawasan penggunaan anggaran 48 kegiatan. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD: bimbingan teknis DPRD 12 kegiatan, publikasi kegiatan DPRD 90 kegiatan, penguatan kelembagaan DPRD, peningkatan peran dan fungsi Fraksi DPRD 6 fraksi, Hearing/Dialog 34 kegiatan, penyusunan dokumen program kerja DPRD 2 dokumen. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat: pokok pokok pikiran DPRD, fasilitasi Reses DPRD. Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD: Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 84 kegiatan.

## E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

### 1. Perencanaan

#### 1) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Program ini diarahkan pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah: penyusunan dokumen RKPDP 2 dokumen, workshop perencanaan pembangunan daerah 3 kegiatan, penyusunan dokumen perubahan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 1 dokumen, dokumen berita acara musrenbang 32 dokumen, dokumen informasi data pembangunan daerah 1 dokumen, pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan 1 aplikasi. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah: penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 dokumen, Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1 dokumen, Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah 1 dokumen, Laporan Pelaksanaan DAK Secara Berkala Per Triwulan 5 dokumen, Dokumen LKPJ Wali Kota 3 dokumen.

**2) Program perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan: penyusunan kertas kerja asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah 3 dokumen, penyusunan dokumen hasil monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP) bidang Pemerintahan 1 dokumen.

Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia: penyusunan dokumen pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting 1 dokumen, dokumen laporan pembinaan Kota Sehat 1 dokumen, dokumen laporan pelaksanaan capaian TPB 1 dokumen, pelaksanaan Festival TPB 1 kegiatan, penyusunan dokumen hasil asistensi renja murni 1 dokumen, dokumen hasil asistensi renja perubahan 1 dokumen, dokumen hasil dalev dokrenda bidang Pembangunan Manusia 1 dokumen, dokumen Monev RAD Pangan dan Gizi.

Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat: penyusunan dokumen laporan kinerja TKPK 1 dokumen, dokumen LP2KD 1 dokumen, dokumen hasil Asistensi ARG 1 dokumen, dokumen hasil asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP) Bidang Kesejahteraan Masyarakat 2 dokumen, dokumen monev RAD PUG 1 dokumen, dokumen Monev Pelaksanaan KLA 1 dokumen, dokumen monev Bantuan Sosial 1 dokumen, dokumen hasil dalev perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Bidang Kesejahteraan Masyarakat 3 dokumen.

**3) Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian: penyusunan dokumen laporan pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi 1 dokumen, dokumen laporan fasilitasi TJSLP 1 dokumen, dokumen Kertas Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi 2 dokumen, dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 2 dokumen, dokumen monev Bidang Ekonomi 1 dokumen, Kertas Kerja Dalev Bidang Ekonomi 1 dokumen. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam: penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA 2 dokumen, jumlah dokumen kertas kerja perencanaan pembangunan daerah bidang SDA 2 dokumen, dokumen monev bidang SDA 1 dokumen, dokumen kertas kerja dalev rencana pembangunan SDA 1 dokumen.

**4) Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup: monev koordinasi perenc Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2 dokumen, dokumen asistensi bidang sumber daya air dan lingkungan hidup 1 dokumen, dokumen monev bidang Sumber Daya air dan Lingkungan Hidup 2 dokumen, dokumen Dalev Bidang Sumberdaya Air dan Lingkungan 3 dokumen.

Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan: penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungann 1 dokumen, dokumen asistensi bidang kebinamargaan dan perhubungan 1 dokumen, dokumen monev bidang kebinamargaan dan perhubungan 1 dokumen, dokumen dalev bidang kebinamargaan dan perhubungan 1 dokumen, dokumen laporan forum data 1 dokumen.

Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan: penyusunan dokumen perencanaan bidang Keciaptakaryaan dan kewilayahan 1 dokumen, dokumen asistensi perencanaan bidang Keciaptakaryaan dan kewilayahan 1 dokumen, dokumen monev bidang keciaptakaryaan dan kewilayahan 1 dokumen, dokumen Dalev Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan 3 dokumen, dokumen monev AMPL 1 dokumen, dokumen monev sarpras Kelurahan 1 dokumen, dokumen monev Pengembangan Wilayah 1 dokumen.

## 2. Keuangan

### 1) Program pengelolaan keuangan daerah

Program ini diarahkan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah: penyusunan dokumen rancangan KUA/PPAS dan KUA/PPAS 2 dokumen, Rancangan KUPA/PPASP dan KUPA/PPASP 2 dokumen, Perda APBD dan lampirannya 1 dokumen, Perwal Penjabaran APBD dan lampirannya 1 dokumen, pendampingan BPKP 4 kegiatan, DPA SKPD 1 dokumen, Perda Perubahan APBD 1 dokumen, Perwal Perubahan Penjabaran APBD 2 dokumen, Perwal Penjabaran Perubahan APBD 1 dokumen, DPPA SKPD 1 dokumen, Analisa Standar Belanja 1 dokumen, Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium 1 dokumen, Perda Pengelolaan Keuangan Daerah 1 dokumen.

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah: laporan kas daerah 48 dokumen, monev dana transfer 4 dokumen, SP2D non gaji 3.000 dokumen, pembinaan bendahara 2 kegiatan, SP2D gaji 2.508 dokumen, sosialisasi bendahara gaji 2 kegiatan, SKPP 165 dokumen, daftar gaji 672 dokumen, rekonsiliasi pajak 1 kegiatan, rekonsiliasi penerimaan jasa deposito 1 kegiatan, rekap IWP 8%, PPh, JKK-JKM 62 dokumen, penempatan deposito 4 dokumen, dokumen piutang penerimaan jasa deposito 1 dokumen, berita acara rekonsiliasi PFK BPJS Kesehatan 12 dokumen, berita acara rekonsiliasi JKK-JKM 12 dokumen, berita acara rekonsiliasi IWP 8% 12 dokumen, berita acara rekonsiliasi PPh 21 atas Gaji 14 dokumen, dokumen pelaksanaan penatausahaan APBD 1 dokumen, dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) 4 dokumen.

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah: rekonsiliasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah 12 dokumen, Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD – Raperwal 1 dokumen, Evaluasi Gubernur atas LPP APBD 1 dokumen, Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur 1 dokumen, laporan penyusunan rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Raperda dan Raperwal) 2 dokumen,

laporan realisasi semester 1 dokumen, laporan keuangan audited 1 dokumen, rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja 4 dokumen, laporan rekonsiliasi BOS 4 dokumen, SP2B 4 dokumen, laporan rekonsiliasi BLUD 4 dokumen, analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 dokumen, kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah 1 dokumen, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan daerah 1 dokumen, verifikasi dan pengujian bukti memorial 1 dokumen, pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah 1 kegiatan.

**2) Program pengelolaan barang milik daerah**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah: penyusunan dokumen standar harga 1 dokumen, RKBMD Pengadaan 5 dokumen, laporan pengadaan BMD 1 dokumen, penetapan status penggunaan BMD 1 dokumen, dokumen RKBMD pemeliharaan 5 dokumen, dokumen asuransi BMD 1 dokumen, penilaian BMD 5 dokumen, dokumen pemanfaatan BMD 1 dokumen, pemindahtanganan BMD 1 dokumen, dokumen rekonsiliasi BMD 2 dokumen, laporan semesteran/tahunan BMD 2 dokumen, rakor BMD 2 kegiatan.

**3) Program pengelolaan pendapatan daerah**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah: laporan perencanaan 2 dokumen, laporan monev triwulanan 4 dokumen, pemeliharaan wahana reklame 2 jenis, pengelolaan obyek pajak (3.305): 782 reklame, 1 PJU, 19 Parkir, 102 PAT, 2.401 Retribusi PKD, pengelolaan obyek pajak (307): 94 hotel, 196 restoran, 17 hiburan, pengelolaan wajib pajak PBB dan BPHTB sebanyak 68.000 wajib pajak, pencetakan kartu NPWPD 600 keping, sosialisasi pajak dan retribusi daerah 4 kegiatan, pengembangan sistem informasi manajemen pajak dan retribusi daerah 7 paket, dokumen ketetapan wajib pajak 22.857 WP, pemeriksaan pajak daerah 1 dokumen, pengundian PBB 1 kegiatan, penganugerahan WP 1 kegiatan, monev dan pemantauan pemungutan pajak dan retribusi daerah 2 dokumen.

**3. Kepegawaian**

**1) Program kepegawaian daerah**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN: update data kepegawaian 2.925 data. Kegiatan Administrasi kepegawaian: seleksi ASN 7.000 orang, laporan kenaikan pangkat 1 laporan. Kegiatan Pengembangan Karir ASN: laporan pengembangan karir 21 laporan. Kegiatan Pembinaan ASN: laporan pembinaan dan kesejahteraan 12 laporan.

**4. Pendidikan dan Pelatihan**

**1) Program pengembangan sumber daya manusia**

Program ini diarahkan pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional: pendidikan dan pelatihan bagi ASN 1.304 orang.

**5. Penelitian dan Pengembangan**

**1) Program penelitian dan pengembangan daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan: Dokumen Rencana kelitbangan 1 dokumen. Kegiatan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan: Kajian Riset Daerah Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 dokumen. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan:Kajian Riset Daerah Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 dokumen, Kajian Riset Daerah Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 dokumen. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi: Inovasi Daerah 20 inovasi, dokumentasi kajian daerah 20 dokumen.

## F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

### 1. Inspektorat Daerah

#### 1) Program penyelenggaraan pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal: Laporan Hasil Pemeriksaan 56 dokumen, rekap olah dan evaluasi data 12 dokumen, Laporan LHKASN 1 dokumen, obyek pemeriksaan 96 OPD, Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda).Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu: laporan Adhoc 8 dokumen, Laporan Pemeriksaan Tujuan Tertentu 1 dokumen, LHE LKjIP 20 dokumen, LHR LKjIP 1 dokumen, LHR DAK 33 dokumen, LHR LKD 1 dokumen, LHR LK OPD 25 dokumen, LHR Review RKA 20 dokumen, Laporan Riksus Bantuan Keuangan Provinsi 5 dokumen, LHR dokumen perencanaan daerah 4 dokumen, LHR penyerapan anggaran 4 dokumen, LHR Barang Jasa 4 dokumen, laporan review LPPD 6 dokumen, laporan penanganan TL hasil pemeriksaan internal 56 dokumen, laporan penanganan TL hasil pemeriksaan eksternal 2 dokumen, laporan TP TGR 2 dokumen.

#### 2) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan: laporan PK APIP 1 dokumen, laporan PAK 40 dokumen, dokumen RTP 6 dokumen, dokumen kerts kerja monitoring pelaksanaan RTP 24 dokumen, dokumen maturitas SPIP 1 dokumen, dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 1 dokumen, laporan hasil PMPRB 1 dokumen, laporan renaksi PPKT 1 dokumen.Kegiatan Asistensi dan Pendampingan: laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Saber Pungli 1 dokumen, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi 1 dokumen, laporan survey Penilaian Integritas 2019 6 dokumen.

## G. Unsur Kewilayahan

### 1. Kecamatan

#### 1) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan:penyusunan dokumen Musrembangcam Tk. Kecamatan 4 dokumen,penyusunan dokumen kecamatan dalam angka 4 dokumen, pembinaan kelurahan,

pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat: pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

**2) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan MTQ Pelajar dan Umum Tingkat Kecamatan, fasilitasi forkopimcam, tenaga Linmas kecamatan.

**3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan: penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahan, pembinaan dan fasilitasi RT/RW, pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (PKK, Karang Taruna, LPMK dan Posyantek) di 4 kecamatan dan 27 kelurahan, operasional linmas kelurahan, pembangunan jalan/pemeliharaan jalan lingkungan, rehab RTLH, pavingisasi, pembangunan saluran, pemeliharaan saluran drainase lingkungan kelurahan, pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan: monev kegiatan pembangunan 4 dokumen.

**H. Urusan Pemerintahan Umum**

**1. Kesatuan Bangsa dan Politik**

**1) Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: pembinaan ideologi wawasan kebangsaan 150 orang, seleksi dan latihan Paskibra 83 orang, upacara hari besar nasional 13 kegiatan.

**2) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budayapolitik**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik: verifikasi bantuan keuangan partai politik 7 parpol, pendidikan politik 1.800 orang, fasilitasi forkopimda 36 kegiatan, dialog Wali Kota dengan warga masyarakat, monitoring wajah kota dengan bersepeda, laporan tim pemantauan perkembangan politik daerah 12 laporan.

**3) Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan: pembinaan Ormas, OKP dan LSM 100 orang, verifikasi pengajuan ormas 10 ormas, verifikasi pengajuan SKT 10 ormas.

**4) Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial: dokumen laporan hasil pemantauan orang asing 12 dokumen, Dokumen Laporan Hasil Deteksi Dini Masalah Sosial Politik 12 dokumen.

Secara rinci, tabel Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan terlampir pada **Anak Lampiran RKPD Kota Tegal Tahun 2021**.

### 5.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2021

#### 5.3.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pada RKPD Kota Tegal Tahun 2021 menggunakan struktur keuangan sebagaimana tercantum pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada peraturan ini sudah **tidak ada** lagi pembagian kategori Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Jenis Belanja Daerah terbagi atas 4 (empat jenis) yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Total Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2021 diproyeksikan sebesar **Rp 1.096.152.458.000,-**. Proyeksi ini menurun sebesar **14,26%** dari tahun sebelumnya, dimana Total Belanja Daerah pada APBD Kota Tegal Tahun 2020 adalah sebesar **Rp 1.278.393.100.000,-**.

Adapun rincian Belanja Daerah untuk Tahun 2021 yakni Belanja Operasi Rp 819.404.776.000,- Belanja Modal Rp 274.038.115.000,- Belanja Tidak Terduga Rp 2.000.000.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp 709.567.000,-, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 5.6**  
**Rincian Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021**

NO.	URAIAN	PROYEKSI 2021	KETERANGAN
1.	Belanja Operasi	819.404.776.000	Turun 25,05%
2.	Belanja Modal	274.038.115.000	Naik 50,21%
3.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	Tetap
4.	Belanja Transfer	709.567.000	Tetap
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH (Rp.)</b>	<b>1.096.152.458.000</b>	<b>Turun 14,26%</b>

Mengacu pada struktur keuangan berdasarkan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sudah tidak ada lagi Program Belanja Langsung maupun Program Belanja Tidak Langsung. Pada dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024, selain alokasi Belanja Tidak Langsung, seperti Belanja Pegawai, Belanja Hibah/ Bansos, Belanja Tidak Terduga, dan sebagainya, terdapat **185** nomenklatur Program Pembangunan Daerah yang tergolong pada jenis Belanja Langsung. Dengan demikian, pagu indikatif per program pada RKPD Kota Tegal Tahun 2021 disusun dengan menyandingkan antara Program Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sesuai RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dengan hasil pemetaan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Pagu Indikatif per Program Tahun 2021**

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
	<b>NON URUSAN</b>		

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM			
	<b>RUTIN KESEKRETARIATAN</b>				
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	474.627.587.860		
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA				
	<i>BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI</i>				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			
4	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.480.321.000		
5	PROGRAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PAUD				
7	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL				
8	PROGRAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PNF				
10	PROGRAM WAJIB BELAJAR SD				
11	PROGRAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA SD				
13	PROGRAM WAJIB BELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA				
14	PROGRAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA SMP				
16	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN				
6	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD				
9	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNF				
12	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD				
15	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP				
---	---			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.100.480.000
---	---			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	257.800.000
	<b>KESEHATAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			
17	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	211.465.569.000		
18	PROGRAM KESEHATAN IBU, ANAK DAN LANSIA				
19	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT				
20	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN				
23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN				

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
24	PROGRAM PELAYANAN KEGAWAT-DARURATAN		
25	PROGRAM OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN		
26	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS TEGAL BARAT		
27	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS DEBONG LOR		
28	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS TEGAL TIMUR		
29	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS SLEROK		
30	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS TEGAL SELATAN		
31	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS BANDUNG		
32	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS MARGADANA		
33	PROGRAM OPERASIONAL PUSKESMAS KALIGANGSA		
34	PROGRAM OPERASIONAL KLINIK PARU MASYARAKAT		
	<b>RSUD Kardinah</b>		
35	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA ADMINISTRASI BLUD		
36	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT		
37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		
38	PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN		
39	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN BLUD KARDINAH		
40	PROGRAM PEMASARAN BLUD KARDINAH		
41	PROGRAM PELAYANAN MEDIS		
42	PROGRAM PELAYANAN KEPERAWATAN		
20	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	58.247.000
22	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	330.931.000
	---	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.759.969.000
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
43	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.901.105.000
45	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IIRIGASI		

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	408.000.000
	---	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	21.848.000.000
48	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.086.087.000
44	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KOTA	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.991.716.000
50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN		
52	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	16.875.089.000
51	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17.630.610.000
46	PROGRAM JALAN DAN JEMBATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	21.713.001.000
	---	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	35.500.000
53	PROGRAM PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	976.480.000
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	
54	PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	480.538.000
55	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	3.464.055.000
56	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA UMUM PERUMAHAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.521.247.000
	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>	
58	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.112.150.000
59	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
60	PROGRAM PENEGAKKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH		
62	PROGRAM KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	928.813.500
63	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
64	PROGRAM PASCA BENCANA		
61	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN	PROGRAM PENANGGULANGAN	210.512.000

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
	BAHAYA KEBAKARAN	KEBAKARAN	
	<b>SOSIAL</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	
67	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PSKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	792.058.000
68	PROGRAM PEMBERDAYAAN PMKS		
65	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DASAR	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.581.000.000
66	PROGRAM FASILITASI PENDAMPINGAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.055.000.000
69	PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU PPFM		
	---	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	88.484.000
	---	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	155.000.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	
	---	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	44.484.000
70	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN KUALITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.181.794.000
	---	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	560.473.000
71	PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	367.077.000
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
72	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	395.000.000
73	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
74	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	236.580.500
	---	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.235.731.500
	---	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	75.000.000

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
74	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	250.000.000
	---	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	75.000.000
	<b>PANGAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	
75	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	92.170.000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	35.000.000
	<b>PERTANAHAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	
76	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	225.000.000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	---	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	95.269.000
79	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.401.210.000
81	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	8.168.825.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>		
57	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN DAN MAKAM KOTA		
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>		
78	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	170.674.000
80	PROGRAM PENATAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	66.538.000

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
		PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
	---	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	413.926.000
	---	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	345.000.000
	---	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	27.700.000
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.527.817.000
	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
82	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	174.108.000
83	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		
	---	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	349.729.100
84	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	501.843.000
85	PROGRAM PEMANFAATAN DATA, INOVASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.000.000
	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
86	PROGRAM FASILITASI KEBIJAKAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	290.000.000
87	PROGRAM PEMBINAAN KEPENDUDUKAN, KB, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.025.000.000
88	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA		
89	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	475.000.000
	<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
90	PROGRAM PEMANTAPAN PERLENGKAPAN JALAN DAN FASILITAS PENDUKUNG LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.532.755.000
91	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS		
92	PROGRAM MANAJEMAN DAN REKAYASA LALU LINTAS		

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
93	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
47	PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM		
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
94	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.721.247.000
95	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.205.653.000
96	PROGRAM PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR INFORMATIKA		
	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
	---	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	51.500.000
97	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	56.500.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	60.500.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	300.000.000
98	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	12.500.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.547.543.000
	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	
99	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	23.560.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100.850.000
101	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	185.431.000
100	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN INVESTASI	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	64.013.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	39.442.000
	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
102	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	871.400.000
103	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.961.851.000
104	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA		
105	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	---	
	<i>BELANJA HIBAH</i>	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000
	<b>STATISTIK</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	61.910.000
	<b>PERSANDIAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	218.120.000
	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BUDAYA</b>	
108	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.000.000.000
109	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN		
	---	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	1.000.000.000
	<b>PERPUSTAKAAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	
110	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA SERTA PENINGKATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.427.658.000
	<b>KEARSIPAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	
111	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	624.000.000
112	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	130.000.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
113	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.287.465.000

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
114	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	78.834.000
115	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	759.278.000
	<b>PARIWISATA</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	
116	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.014.182.000
117	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA		
	---	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.396.785.000
	<b>PERINDUSTRIAN</b>		
126	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	304.746.000
	<b>PERTANIAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	
121	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	241.980.000
119	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	85.735.000
120	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	210.000.000
118	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	51.850.000
	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	
	---	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	110.075.000
124	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGEMBANGAN PASAR RAKYAT	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	19.154.911.000
122	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN DALAM DAN LUAR NEGERI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	225.495.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	237.180.000
123	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.602.080.000
	<b>PERINDUSTRIAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	
125	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN SARANA PRASARANA INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.505.638.000
	---	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	34.213.000

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
	---	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRIAL NASIONAL	81.234.000
	<b>FUNGSI PENDUKUNG</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
166	PROGRAM FASILITASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.010.445.000
167	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH		
168	PROGRAM FASILITASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		
169	PROGRAM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		
170	PROGRAM FASILITASI PRODUK HUKUM		
171	PROGRAM DOKUMENTASI, PUBLIKASI, PEMBINAAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM		
172	PROGRAM BANTUAN HUKUM DAN HAM		
173	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA BUMD		
174	PROGRAM FASILITASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN		
175	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENGADAAN BARANG/ JASA		
176	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		
177	PROGRAM PENGEMBANGAN KETATALAKSANAAN	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	3.049.905.000
178	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPADA KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH		
179	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI PEMERINTAH DAERAH		
180	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI		
181	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA		
182	PROGRAM OPTIMALISASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH		
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
	---	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	19.230.026.000

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
183	PROGRAM FASILITASI PENYUSUNAN REGULASI DAERAH	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.512.118.000
	PROGRAM FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENGANGGARAN		
	PROGRAM FASILITASI PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PUBLIKASI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
<b>FUNGSI PENUNJANG</b>		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
<b>PERENCANAAN</b>		<b>PERENCANAAN</b>	
127	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.899.035.000
128	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
129	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI		
132	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	689.515.000
131	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	262.163.000
130	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	658.699.000
<b>KEUANGAN</b>		<b>KEUANGAN</b>	
136	PROGRAM PENGANGGARAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.196.003.000
137	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH		
138	PROGRAM PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD		
139	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.200.489.000
133	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.334.928.000
134	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH		
135	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH		
<b>KEPEGAWAIAN</b>		<b>KEPEGAWAIAN</b>	
140	PROGRAM PENINGKATAN SINERGITAS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.831.713.000

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
141	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI		
	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
142	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.130.133.000
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
143	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGAJIAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	545.528.000
144	PROGRAM PENGEMBANGKAN DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH		
	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
	<b>PENGAWASAN</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	
145	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.299.398.000
146	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN		
147	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	967.088.000
	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
	<b>KEWILAYAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	
152	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TEGAL BARAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	582.427.000
153	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TEGAL TIMUR		
154	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TEGAL SELATAN		
155	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN MARGADANA		
156	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI KECAMATAN TEGAL BARAT		
157	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI KECAMATAN TEGAL TIMUR		
158	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI KECAMATAN TEGAL SELATAN		
159	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI KECAMATAN MARGADANA		
160	PROGRAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN TEGAL		

RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024		PMDN 90/2019	PAGU INDIKATIF (Rp.)
No	URUSAN DAN NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	
	BARAT		
161	PROGRAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN TEGAL TIMUR		
162	PROGRAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN TEGAL SELATAN		
163	PROGRAM PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KECAMATAN MARGADANA		
148	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN TEGAL BARAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	428.813.000
149	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN TEGAL TIMUR		
150	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN TEGAL SELATAN		
151	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN MARGADANA		
	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
164	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	629.272.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	371.577.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	136.202.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	286.320.000
165	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	856.190.000
<b>JUMLAH</b>			<b>1.096.152.458.000</b>

Sedangkan rincian Pagu Indikatif Tahun 2021 berdasarkan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2021**

NO.	OPD	PAGU INDIKATIF
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	217.460.563.000
2	Dinas Kesehatan	89.186.881.000

NO.	OPD	PAGU INDIKATIF
3	RSUD Kardinah	194.399.928.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107.536.857.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.995.537.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.167.272.000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.219.343.000
8	Dinas Sosial	12.186.378.000
9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9.968.172.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	47.798.434.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.477.441.000
12	Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	8.228.086.000
13	Dinas Perhubungan	19.247.620.000
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.806.630.000
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	31.138.816.000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.808.176.000
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata	22.272.450.000
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.829.922.000
19	Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan	13.115.434.000
20	Bagian Umum	34.334.548.000
21	Bagian Organisasi	1.235.439.000
22	Bagian Hukum	1.126.290.000
23	Bagian Humas dan Protokol	1.662.685.000
24	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah	1.681.636.000
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8.182.117.000
26	Bagian Perekonomian	636.091.000
27	Bagian Pembangunan	645.083.000
28	Sekretariat DPRD	46.547.869.000
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.001.313.000
30	Badan Keuangan Daerah	55.888.440.000
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	11.338.042.000
32	Inspektorat	9.678.996.000
33	Kecamatan Tegal Timur	7.039.314.000
34	Kelurahan Kejambon	1.169.790.000
35	Kelurahan Slerok	1.326.491.000
36	Kelurahan Panggung	2.198.434.000
37	Kelurahan Mangkukusuman	1.155.183.000
38	Kelurahan Mintaragen	1.685.075.000
39	Kecamatan Tegal Barat	7.995.727.000
40	Kelurahan Pesurungan Kidul	1.192.095.000
41	Kelurahan Debong Lor	1.071.171.000

<b>NO.</b>	<b>OPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
42	Kelurahan Kemandungan	1.025.958.000
43	Kelurahan Pekauman	1.200.432.000
44	Kelurahan Kraton	1.546.062.000
45	Kelurahan Tegalsari	1.925.980.000
46	Kelurahan Muarareja	1.141.271.000
47	Kecamatan Tegal Selatan	8.555.844.000
48	Kelurahan Kalinyamat Wetan	1.102.745.000
49	Kelurahan Bandung	1.055.664.000
50	Kelurahan Debong Kidul	1.065.035.000
51	Kelurahan Tunon	1.152.894.000
52	Kelurahan Keturen	979.865.000
53	Kelurahan Debong Kulon	1.088.931.000
54	Kelurahan Debong Tengah	1.307.269.000
55	Kelurahan Randugunting	1.615.861.000
56	Kecamatan Margadana	7.114.651.000
57	Kelurahan Kaligangsa	1.307.559.000
58	Kelurahan Krandon	1.182.407.000
59	Kelurahan Cabawan	984.638.000
60	Kelurahan Margadana	1.531.045.000
61	Kelurahan Kalinyamat Kulon	1.119.459.000
62	Kelurahan Sumurpanggang	1.152.958.000
63	Kelurahan Pesurungan Lor	1.176.000.000
64	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.184.161.000
<b>JUMLAH (Rp.)</b>		<b>1.096.152.458.000</b>

# BAB VI

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain penetapan IKU dan IKD Pemerintah Daerah Kota Tegal, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Laju Inflasi.

Target Indikator Kinerja Makro Tahun 2021 menyesuaikan dengan kondisi pandemik global COVID-19 dan target Indikator Nasional Tahun 2021. Target indikator kinerja makro tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Target Indikator Makro Pembangunan Kota Tegal Tahun 2021

NO	URAIAN INDIKATOR MAKRO	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	
			Target RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemik Covid-19
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,70-6,10	4,5 – 5,5
2	Laju Inflasi	Persen	2,00-4,00	2,00-4,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,04	7,7 – 8,07
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,20-7,20	6,40 – 7,40
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	75,95	75,54

Penentuan target Indikator Makro Pembangunan Kota Tegal untuk tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian akibat dampak pandemik global COVID-19, khususnya pada target Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan. LPE Kota Tegal yang sebelumnya diproyeksikan pada kisaran 5,70

– 6,10 persen pada tahun 2021, diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan menjadi **4,5 – 5,5 persen**. Demikian halnya dengan TPT Kota Tegal yang pada tahun 2021 mendatang diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah pengangguran terbuka Kota Tegal, sehingga target TPT yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebesar **7,7 – 8,07** persen.

Target IPM Kota Tegal pada tahun 2021 diprediksi mencapai **75,54** atau meningkat 1,10 poin dari capaian tahun 2018 dengan kategori tinggi sebesar 74,44. Sedangkan target Tingkat Kemiskinan Kota Tegal untuk tahun 2021 dilakukan penyesuaian menjadi **6,40 – 7,40 persen** dengan tetap menjaga stabilitas harga barang dan Laju Inflasi pada kisaran **2,00 – 4,00 persen**.

## 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja utama Pemerintah Kota Tegal terus dipantau dalam rangka memenuhi penilaian kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD 2019 – 2024. IKU tersebut dicapai dengan upaya dari seluruh perangkat daerah di Kota Tegal baik yang dapat dihitung secara langsung maupun tidak langsung. Upaya seluruh perangkat daerah memiliki peran yang berbeda-beda terhadap pencapaian indikator kinerja tujuan dan/ atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Tegal.

Target capaian indikator pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 dihitung dengan melakukan proyeksi berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator tahun 2019 serta tetap mempertimbangkan dampak pandemic global COVID-19. IKU Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2021 disajikan pada Tabel 6.2

**Tabel 6.2**  
**Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tegal Tahun 2021**

NO	IKU PEMDA	SATUAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2021	
				Target RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemi Covid-19
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	66,18	64,75	64,75
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3,77	3,44	3,44
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,94	81,70	81,70
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	32,17	60	60
6	Potensi konflik sosial teratasi	Persen	100	100	100
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,37	94,32	93,37
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,93	75,95	75,54
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,47	6,20-7,20	6,40 – 7,40
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,07	7,04	7,7 – 8,07
11	Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni	Persen	44,93	52,85	52,85
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor	49,934	50,48	50,48
13	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	Persen	N/A	80,34	80,34

NO	IKU PEMDA	SATUAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2021	
14	Tingkat pelayanan lalu lintas (level of service)	V/C	0,88	0,90 – 1,00	0,90 – 1,00
15	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen	62,75	63,96	63,96
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,77	5,70-6,10	4,5 – 5,5
17	Nilai investasi	Trilyun Rupiah	4,20	1,74	1,74
18	Persentase Wirausaha Muda	Persen	N/A	0,18	0,18
19	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan	Persen	66,66	55,55	66,66

Tabel 6.3 Target Indikator Kinerja Daerah  
Tahun 2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Kinerja Tahun 2021	
				Target RPJMD 2019- 2024	Penyesuaian Dampak Pandemik Covid-19
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,77	5,70-6,10	4,5 – 5,5
2	Laju Inflasi	%	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00
3	PDRB per kapita	Rp.000/ jiwa	56,64	49,00	49,00
4	Tingkat Kemiskinan	%	7,37	6,20 - 7,20	6,40 – 7,40
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,93	75,95	75,54
6	Angka Melek Huruf	%	99,98	99,98	99,98
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,31	8,33	8,33
8	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,04	12,93	12,93
9	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,34	74,40	74,40
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,07	7,04	7,7 – 8,07
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,37	94,32	93,37
12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	89,30	84,30	84,30
13	Penguatan Cadangan Pangan	Nilai	84,00	85,95	85,95
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>Pendidikan</b>					
1	APM PAUD	%	53,73	54,11	54,11
2	APK PAUD	%	88,42	90,18	90,18
3	APK SD/MI Sederajat;	%	103,41	103,75	103,75
4	APM SD/MI Sederajat;	%	93,81	94,43	94,43
5	APTS SD/MI Sederajat;	%	0,08	0,06	0,06
6	AL SD/MI Sederajat;	%	100,00	100,00	100,00
7	APK SMP/MTs Sederajat;	%	107,81	107,85	107,85
8	APM SMP/MTs Sederajat;	%	81,05	93,89	93,89
9	APTS SMP/MTs Sederajat;	%	0,14	0,10	0,10
10	AL SMP/MTs Sederajat;	%	100,00	100,00	100,00
11	Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C	%	100,00	85,00	85,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Kinerja Tahun 2021	
				Target RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemi Covid-19
<b>Kesehatan</b>					
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	71,20	72,00	72,00
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	6,60	7,20	7,20
3	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1000 KH	5,20	8,30	8,30
4	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,09	0,13	0,13
5	Prevalensi Kusta	per 10.000 pddk	0,84	1,0	1,0
6	Persentase Rumah Tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	91,35	89,35	89,35
7	Cakupan Kelurahan ODF ( <i>Open Defecation Free</i> )/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	62,96	92,59	92,59
8	Prevalensi Stunting pada anak Balita	%	5,84	21,50	21,50
9	Prevalensi Stunting pada anak Baduta	%	7,03	14,75	14,75
10	Prevalensi Gizi Buruk (BB/TB)	%	0,189	0,10	0,10
11	Prevalensi Gizi Kurang	%	10,4	12,00	12,00
12	Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)	%	100	100	100
13	Cakupan Kunjungan Neonatal (Kn4)	%	99,60	100	100
14	<i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	100
15	Prevalensi TB	per 100rbpddk	233,26	261,35	261,35
16	Proporsi Penduduk Miskin Non Kuota Yang Mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan	%	46,90	55,26	55,26
17	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	59,25	62,96	62,96
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
1	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	80,89	80,34	80,34
2	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	88,45	88,55	88,55
3	Persentase Luas Wilayah Bebas Genangan/ Banjir	%	87,17	88,66	88,66
4	Cakupan Layanan Sanitasi	%	84,94	84,5	84,50
5	Cakupan Layanan Air Minum	%	70,56	67,85	67,85
6	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Rasio	11,15	11,61	11,61
7	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	62,75	63,96	63,96
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>					
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	93,98	87,81	87,81
2	Persentase Luasan Permukiman Layak Huni	%	44,93	52,85	52,85
3	Jumlah <i>Backlog</i>	Unit Rumah	21.870	22.060	22.060
<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>					
1	Rasio Linmas yang terlatih	%	21,54	27,00	25,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Kinerja Tahun 2021	
				Target RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemi Covid-19
2	Presentase Gangguan etertiban Umum Yang Tertangani	%	81,00	83,00	83,00
3	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran	Menit	15	15	15
4	Prosentase Penanganan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah	%	95,1	95,20	95,20
5	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,48	0,67	0,54
6	Indeks Risiko Bencana	Nilai	117	116	116
<b>Sosial</b>					
1	Persentase Penurunan PMKS	%	2,00	2,00	2,00
2	Persentase PMKS yang Dibantu dan Ditangani	%	94,21	95,00	95,00
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	24,00	24,00	24,00
4	Persentase Anak Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	46,00	46,00	46,00
5	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	57,00	57,00	57,00
6	Persentase Tuna Sosial (PGOT) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	100,00	100,00	100,00
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>Tenaga Kerja</b>					
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%		2,8	2,8
2	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial terselesaikan	%		72	72
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang		500	500
4	Persentase penempatan pencari kerja yang dilatih	%		50	50
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
1	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat	N/A	Pratama	Pratama
2	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Madya	Pratama	Pratama
3	Persentase Kelurahan Layak Anak	%	11,11	18,51	18,51
4	Persentase Sekolah Ramah Anak	%		19,64	19,64
5	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilaporkan dan tertangani	%	100	100	100
6	Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Angka		0,16	0,16

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Kinerja Tahun 2021	
				Target RPJMD 2019- 2024	Penyesuaian Dampak Pandemik Covid-19
<b>Pangan</b>					
1	Ketersediaan Pangan Utama	%		93,5	93,5
2	Angka Kecukupan Energi perkapita (AKE)	kcal/kapita/hari		2.295	2.295
3	Angka Kecukupan Protein perkapita (AKP)	gram/kapita/hari		70,45	70,45
4	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	%		99,70	99,70
<b>Pertanahan</b>					
1	Persentase Bidang Tanah Aset Bersertifikat	%	78,81	90,95	90,95
<b>Lingkungan Hidup</b>					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	49,93	50,48	50,48
2	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	88,37	98,00	98,00
3	Persentase Pengelolaan Limbah B3	%	82,54	93,00	93,00
4	Indeks Kualitas Udara	Nilai	91,22	89,40	89,40
5	Indeks Kualitas Air	Nilai	30,00	33,40	33,40
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	33,92	34,10	34,10
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
1	Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%		78,00	78,00
2	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	99,90	99,00	99,00
3	Rasio bayi berakte kelahiran	%	97,00	98,20	98,20
4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	103,15	93,00	93,00
5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	94,01	93,00	93,00
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Angka	N/A	0,4-0,8	0,4-0,8
2	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	2,14	2,16	2,16
3	CPR ( <i>Contracepsi Prevalance Rate</i> )	%	72,07	73,40	73,40
4	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i> )	per 1000 Kelahiran pada Perempuan-an Usia 15-19 Tahun	N/A	25,00	25,00
5	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	%	13,60	11,70	11,70

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Kinerja Tahun 2021	
				Target RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemi Covid-19
6	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	%	29,10	28,00	28,00
<b>Perhubungan</b>					
1	Tingkat pelayanan lalu lintas ( <i>Level of Service</i> )	V/C	0,88	0,90 – 1,00	0,90 – 1,00
2	Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum	%	2,2	2,2	2,2
<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	32,17 (Tidak Informatif)	60,00 (Cukup Informatif)	60,00 (Cukup Informatif)
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,54 (Cukup)	2,53 (Cukup)	2,53 (Cukup)
<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>					
1	Persentase Koperasi Aktif	%	83,24	81,25	81,25
2	Peningkatan Usaha Mikro Kecil	%		1,84	1,84
<b>Penanaman Modal</b>					
1	Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	4,2	1,74	1,74
2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	10,6	5,00	5,00
<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>					
1	Persentase Wirausaha Muda	%		0,18	0,18
2	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan	%		0,90	0,90
3	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	%		39,00	39,00
<b>Statistik</b>					
1	Persentase Data Statistik Sektoral yang Termanfaatkan	%		40,00	40,00
<b>Persandian</b>					
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai		273-455	273-455
<b>Kebudayaan</b>					
1	Rasio Objek Pemajuan Kebudayaan yang tercatat dan Pokok Pikiran Kebudayaan yang difasilitasi Pemerintah	%	54,54	72,72	72,72
2	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan	%	66,66	55,55	55,55
<b>Perpustakaan</b>					
1	Rasio Judul Buku Dibanding Jumlah Koleksi	%		80,00	42,09
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang		40.000	14.121
<b>Kearsipan</b>					
1	Persentase OPD/ BUMD yang Tertib Mengelola Arsip	%		65,00	65,00
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
<b>Pariwisata</b>					
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	502,096	519,038	519,038
<b>Pertanian</b>					
1	Produktivitas Padi	Kw/Ha	70	72,88	72,88
<b>Perdagangan</b>					

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Kinerja Tahun 2021	
				Target RPJMD 2019- 2024	Penyesuaian Dampak Pandemik Covid-19
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	27,81	29,05	29,05
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US Dollar (\$ .000)	14.965	10.201	10.201
3	Peningkatan Pendapatan Sektor Perdagangan	%		2,56	2,56
<b>Perindustrian</b>					
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	14,93	14,92	14,92
2	Persentase IKM yang dibina	%		18,5	18,5
3	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%		2,20	2,20
<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%		104,5	104,5
2	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	%		100,20	100,20
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25.399	22.083	22.083
4	Jumlah Perikanan Budidaya	Ton	598,17	610	610
5	Persentase Kenaikan PAD dari Sub Sektor Perikanan	Persen		1,16	1,16
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
<b>Sekretariat Daerah</b>					
1	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65,98	65,50	65,50
<b>Sekretariat DPRD</b>					
1	Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Raperda	%	100	100	100
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
<b>Perencanaan</b>					
1	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	100	100	100
2	Tingkat Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	100	100	100
<b>Keuangan</b>					
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	Persentase barang milik daerah yang masih harus dilakukan inventarisasi	%	N/A	5,16	5,16
<b>Kepegawaian</b>					
1	Indeks Sistem Merit	Nilai	0,57	0,77	0,77
2	Persentase formasi jabatan terisi	%	81,63	83,00	83,00
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>					

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Kinerja Tahun 2021	
				Target RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemi Covid-19
1	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	%	18,17	37,00	23,40
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
<b>Pengawasan</b>					
1	Maturitas SPIP	Kategori	Level 2	Level 3	Level 3
2	Kapabilitas APIP	Kategori	Level 2	Level 3	Level 3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>					
1	Persentase Komponen Masyarakat Mendapat Wawasan Kebangsaan	%	0,28	0,36	0,36
2	Cakupan Masyarakat Terpapar Pendidikan Politik	%	0,9	0,9	0,9
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>					
1	Nilai Tukar Petani	Nilai	102,48	104	102
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%		0,47	0,47
3	Angka Kriminalitas	%		0,0008	0,0008
4	Rasio Ketergantungan	Rasio		0,39	0,44
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai		64,75	64,75
6	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai		3,44	3,44
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		81,7	81,7
8	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai		3,62	3,62
9	Potensi Konflik Sosial Teratasi	%		100	100

Tabel 6.4  
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tegal Tahun 2021

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Target RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemi Covid-19	
1	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,31	8,33	8,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Angka Partisipasi Sekolah	%		94,71	94,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi Minimal B	%		50,00	50,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi minimal B	%		40,00	40,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Persentase SD sederajat yang terakreditasi A	%	38,56	38,00	38,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Persentase SMP sederajat yang terakreditasi A	%	60,53	67,00	67,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Target RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemi Covid-19	
7	Persentase Sekolah yang Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat	%	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Rasio Objek Pemajuan Kebudayaan yang Tercatat dan Pokok Pikiran Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah	%		72,72	72,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,34	74,35	74,35	Dinas Kesehatan
10	Persentase Keluarga Sehat	%	26,80	33,00	33,00	Dinas Kesehatan
11	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	71,20	72,00	72,00	Dinas Kesehatan
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	6,60	7,20	7,20	Dinas Kesehatan
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	5,20	8,30	8,30	Dinas Kesehatan
14	Prevalensi DM (Diabetes Militus)	per 100.000 pddk > 15 th	3,66	9,10	9,10	Dinas Kesehatan
15	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,01	0,13	0,13	Dinas Kesehatan
16	Insiden Rate DBD	per 100.000 pddk	31,94	40,00	40,00	Dinas Kesehatan
17	Prevalensi Kanker Serviks	per 1.000 pddk	0,52	0,70	0,70	Dinas Kesehatan
18	Prevalensi Kanker Payudara	per 1.000 pddk	2,74	2,40	2,40	Dinas Kesehatan
19	Prevalensi Kusta	per 10.000 pddk	0,84	1	1	Dinas Kesehatan
20	Skor IKM Puskesmas dan Klinik Paru	Nilai	81,00	81,00	81,00	Dinas Kesehatan
21	Skor IKM RSUD Kardinah	Nilai	82,67	81,00	81,00	RSUD Kardinah
22	Nilai Akreditasi RSUD Kardinah	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD Kardinah
23	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	80,89	80,34	80,34	DPUPR
24	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	62,75	63,96	63,96	DPUPR
25	Persentase Luas Wilayah Bebas Genangan/ Banjir	%	87,17	88,66	88,66	DPUPR
26	Cakupan layanan sanitasi	%	84,94	84,50	84,50	DPUPR
27	Cakupan layanan air minum	%	70,56	67,85	67,85	DPUPR
28	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Layak Huni	%	44,93	52,85	52,85	Disperkim
29	Jumlah Backlog	Unit Rumah	21.870	22.060	22.060	Disperkim
30	Persentase Berkurangnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	%		17,00	17,00	Satpol PP

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Target RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemi Covid-19	
31	Tingkat Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan Daerah	%		95,00	95,00	Satpol PP
32	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai		0,67	0,67	BPBD
33	Indeks Risiko Bencana	Nilai		116	116	BPBD
34	Persentase Penurunan PMKS	%	2,00	2,00	2,00	Dinas Sosial
35	Persentase PMKS yang Dibantu dan Ditangani	%	94,21	95,00	95,00	Dinas Sosial
36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,28	67,14	69,20	Disnakerin
37	Persentase Penempatan Pencari Kerja yang dilatih	%		50,00	50,00	Disnakerin
38	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	14,93	14,92	14,92	Disnakerin
39	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat	N/A	Pratama	Pratama	DPPKBP2PA
40	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Madya	Pratama	Pratama	DPPKBP2PA
41	Persentase ARG terhadap Total Kegiatan RKPD	%		2,8	2,8	DPPKBP2PA
42	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%		0,027	0,027	DPPKBP2PA
43	Rasio Kekerasan terhadap Anak	%		0,044	0,044	DPPKBP2PA
44	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Angka		0,4-0,8	0,4-0,8	DPPKBP2PA
45	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	2,14	2,16	2,17	DPPKBP2PA
46	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	89,3	84,30	84,30	DKPPP
47	Ketersediaan Pangan Utama	%		93,50	93,50	DKPPP
48	Nilai Tukar Petani	%	102,48	104	102	DKPPP
49	NTN	%		104,5	104,5	DKPPP
50	NTPi	%		100,20	100,20	DKPPP
51	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	49,93	50,48	50,48	Dinas Lingkungan Hidup
52	Indeks Kualitas Udara	Nilai	91,22	89,40	89,40	Dinas Lingkungan Hidup
53	Indeks Kualitas Air	Nilai	30,00	33,40	33,40	Dinas Lingkungan Hidup
54	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	33,92	34,10	34,10	Dinas Lingkungan Hidup
55	Persentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	%	88,37	98,00	98,00	Dinas Lingkungan Hidup
56	Persentase Pengelolaan Limbah B3	%	82,54	93,00	93,00	Dinas Lingkungan Hidup

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Target RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemi Covid-19	
57	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%		78,00	78,00	Disudkcapil
58	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	99,9	99,00	99,00	Disudkcapil
59	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,42	81,00	81,00	Disudkcapil
60	Tingkat Pelayanan Lalu Lintas ( <i>Level of Service</i> )	V/C	0,88	0,90 – 1,00	0,90 – 1,00	Dinas Perhubungan
61	Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum	%	2,20	2,20	2,20	Dinas Perhubungan
62	Indeks SPBE	Nilai	2,54	2,53	2,53	Dinas Komunikasi dan Informatika
63	Persentase Data Statistik Sektor yang Mudah Diakses	%	N/A	40,00	40,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
64	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	N/A	273-455	273-455	Dinas Komunikasi dan Informatika
65	Aktivasi Koperasi Non Aktif/ Koperasi Baru	%		0,62	0,62	Diskop UKM dan Perdagangan
66	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	%		1,84	1,84	Diskop UKM dan Perdagangan
67	Peningkatan Pendapatan Sektor Perdagangan	%		2,56	2,56	Diskop UKM dan Perdagangan
68	Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	4,2	1,74	1,74	DPMP TSP
69	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	%	86,44	86,00	86,00	DPMP TSP
70	Persentase Wirausaha Muda	%		0,18	0,18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
71	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan	%		0,90	0,90	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
72	Persentase Cabang Olah Raga Berprestasi	%		39,00	39,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
73	Kunjungan Wisatawan	orang	502.096	519.038	519.038	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
74	Indeks Kearsipan	Nilai	76,72	75,00	75,00	Dinas Arpusda
75	Standar Nasional Perpustakaan	Nilai	A	C	C	Dinas Arpusda
76	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Penganggaran Daerah	%	100	100	100	Bappeda
77	Tingkat Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100	Bappeda
78	Tingkat Implementasi Dokumen Kelitbangan	%	100	65,00	65,00	Bappeda

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Target RPJMD 2019-2024	Penyesuaian Dampak Pandemi Covid-19	
79	Presentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	%		29,16	29,16	Badan Keuangan Daerah
80	Tingkat Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Badan Keuangan Daerah
81	Tingkat ketepatan Waktu Pelaporan Posisi Kas Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	PD Pengampu Fungsi Keuangan
82	Tingkat ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Badan Keuangan Daerah
83	Persentase Barang Milik Daerah yang Masih Harus Dilakukan Inventarisasi	%	N/A	5,16	5,16	Badan Keuangan Daerah
84	Indeks Sistem Merit	Nilai	0,57	0,77	0,77	BKPPD
85	Maturitas SPIP	Nilai	2,0 – 2,9	3,0 - 3,9	3,0 - 3,9	Inspektorat
86	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan Tegal Timur yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	80	80,00	80,00	Kecamatan Tegal Timur
87	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tegal Timur	Nilai	N/A	77,00	77,00	Kecamatan Tegal Timur
88	Persentase Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tegal Barat yang Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan	%	85,71	85,71	85,71	Kecamatan Tegal Barat
89	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tegal Barat	Nilai	N/A	77,00	77,00	Kecamatan Tegal Barat
90	Persentase Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tegal Selatan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	87,5	87,5	87,5	Kecamatan Tegal Selatan
91	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tegal Selatan	Nilai	N/A	77,00	77,00	Kecamatan Tegal Selatan
92	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan Margadana yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	85,71	85,71	85,71	Kecamatan Margadana
93	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Margadana	Nilai	N/A	77,00	77,00	Kecamatan Margadana
94	Potensi Konflik Sosial Teratasi	%	100	100	100	Badan Kesbangpol
95	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3,52	3,62	3,65	Sekretariat Daerah
96	Nilai SAKIP	Nilai	65,98	65,50	65,50	Sekretariat Daerah

# **BAB VII**

## **PENUTUP**

**R**KPD Kota Tegal Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun pada masa transisi implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan pengganti PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, pada proses penyusunannya, situasi dan kondisi pembangunan dihadapkan pada persoalan pandemik global COVID-19 yang berdampak pada sendi-sendi ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak COVID-19 serta untuk menjaga keselarasan terhadap Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, maka Pemerintah Kota Tegal melakukan penyesuaian dan perubahan Tema Pembangunan dimana pada Rancangan Awal RKPD, Tema Pembangunan Tahun 2021 adalah "Penguatan Daya Saing Daerah yang Didukung Pengembangan Inovasi dan Teknologi Informasi Menuju Tegal *Smartcity*", diubah menjadi:

**"Mempercepat Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Daya Saing Daerah  
dengan Fokus Pada Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata".**

Tema pembangunan Kota Tegal Tahun 2021 tersebut difokuskan pada 6 (enam) prioritas pembangunan Kota Tegal dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPMD Kota Tegal Tahun 2019-2024. Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Tahun 2021 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kota Tegal.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tahun 2021, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar perangkat daerah, Lembaga/ institusi vertikal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor dan pemulihan ekonomi.
- 2) RKPD Kota Tegal Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Kota Tegal Tahun 2021
- 3) Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat Kota Tegal.

- 4) Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan Anggaran Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Tegal Tahun 2021 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Visi dan Misi pembangunan "Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif".



WALI KOTATEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO



# ALUN-ALUN KOTATEGAL

**Tegal**  
Kota Bahari

**VISI KOTA TEGAL**

**2019 - 2024**

*"Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi  
Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis,  
Disiplin dan Inovatif"*

**Diterbitkan Oleh :**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TEGAL**

Jalan Ki Gede Sebagu No.3 Tegal, Kode Pos.52123

email : [program.bappeda.tegalkota@gmail.com](mailto:program.bappeda.tegalkota@gmail.com)

Telp. (0283) 351452 Fax. (0283) 353673